



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY



MENGUATKAN PONDASI KELEMBAGAAN BPDPKS UNTUK MENDUKUNG SAWIT INDONESIA YANG BERKELANJUTAN

STRENGTHENING OPPFMA INSTITUTIONAL FOUNDATION
TO SUPPORT INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL



MENGUATKAN PONDASI KELEMBAGAAN BPDPKS UNTUK MENDUKUNG SAWIT INDONESIA YANG BERKELANJUTAN

STRENGTHENING OPPFMA'S INSTITUTIONAL FOUNDATION TO SUPPORT SUSTAINABLE INDONESIAN PALM OIL

BPDPKS telah memberikan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mendanai berbagai riset kelapa sawit baik sisi hulu maupun hilir, dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem informasi kelapa sawit.

OPPFMA has provided funding for palm oil estate research and development particularly for palm oil-related upstream and downstream researches and information technology development.

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki peran penting dan berpotensi besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Selain penyumbang devisa, komoditas kelapa sawit juga berperan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Indonesia, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, hingga penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah tanah air. Dalam dua dekade terakhir pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup pesat, terlihat dari luas areal dan volume ekspor CPO serta banyaknya stakeholder yang terlibat dalam sistem industri kelapa sawit. Peningkatan produktivitas untuk menghasilkan target produksi CPO Indonesia memerlukan peran sumber daya manusia yang terampil di industri perkebunan kelapa sawit serta tata kelola kelembagaan baik.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut BPDPKS sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bagi kemaslahatan industri sawit Indonesia. Untuk itu, BPDPKS terus berupaya untuk mempersiapkan SDM industri kelapa sawit, terutama untuk sektor hulu dan pabrik kelapa sawit, dengan prioritas perkebunan rakyat.

Palm oil is a flagship commodity with crucial role and huge potential for the development of Indonesian economy. Apart from contributing to the foreign exchange income, palm oil is also crucial for Indonesian Gross Domestic Products (GDP), employment, and poverty alleviation, while driving economic wheels in numerous regions in our country. Within the past two decades, Indonesian palm oil estates grow rapidly, as seen from the total estate area, CPO export volume, and the number of stakeholders involved in the industry. To enhance productivity that is capable of achieving CPO production target, Indonesia calls for skillful human resources for the industry, in addition to good institutional governance.

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency, hereinafter referred to as OPPFMA is an institution established with the purpose of collecting, developing, and utilizing CPO Funds for the benefit of Indonesian palm oil industry. For that purpose, OPPFMA ceaselessly prepares human resources for the palm oil industry in upstream sector and factories, by prioritizing smallholders.

Guna mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit, BPDPKS telah memberikan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mendanai berbagai riset kelapa sawit baik sisi hulu maupun hilir, dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem informasi kelapa sawit. Upaya Promosi perkebunan kelapa sawit juga telah dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Titik berat promosi di dalam negeri adalah kampanye positif sawit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk generasi milenial. Sementara fokus promosi di luar negeri lebih difokuskan untuk meningkatkan citra nilai, dan memperluas pasar kelapa sawit dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha perkebunan dan Kementerian Perdagangan.

BPDPKS juga berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan potensi serta memanfaatkan seluruh kekuatan sumber daya di lingkungan internal BPDPKS, agar secara berkelanjutan dapat selalu menciptakan dan memberikan nilai tambah untuk mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan.

To support palm oil estate development, OPPFMA has provided funding for palm oil estate research and development particularly for palm oil-related upstream and downstream researches and information technology development. Palm oil estate promotion has also been held both domestically and internationally. Domestically, the promotion emphasizes on positive campaign to raise awareness in community and the millennials. Meanwhile, the international promotion focuses on enhancing image and expanding market by involving palm oil business owners' association and the Ministry of Trade.

OPPFMA is also committed to focusing on the development of potentials while utilizing the entire resources within organization in order to sustainably create and provide added value that supports Sustainable Indonesian Palm Oil.



Kesinambungan Tema AR BPDPKS

Theme Continuity of BPDPKS' Annual Report



BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAWIT
DILAKUKAN PADA PERIODIKALAN TAHUNAN



2017

**Menguatkan Pondasi
Kelembagaan BPDPKS untuk
Mendukung Sawit Indonesia
yang Berkelanjutan**

**Strengthening OPPFMA
Institutional Foundation to Support
Indonesian Sustainable Palm Oil**



2016

Melanjutkan Dukungan
bagi Sawit Indonesia yang
Lebih BerkelaJutan

Continuing to Support
Sawit Indonesia More
Sustainable

2015

Memulai Dukungan bagi
Sawit Indonesia yang
Lebih BerkelaJutan

Starting to Support
Sawit Indonesia More
Sustainable

Kesinambungan Tema AR BPDPKS

Theme Continuity of BPDPKS' Annual Report

2015

Memulai Dukungan bagi Sawit Indonesia yang Lebih Berkelaanjutan
Starting to Support Sawit Indonesia More Sustainable

Pertengahan tahun 2015, adalah awal dimulainya perjalanan kami sebagai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kelahiran kami merupakan perwujudan amanah dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Kami telah berkomitmen seoptimal mungkin menjalankan peran yang ditugaskan untuk mendorong pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia. Dalam rangka mewujudkannya, kami telah merumuskan peta strategis yang mencakup 11 (sebelas) sasaran strategi yang wajib kami capai.

Selama tahun 2015, kami telah menyelesaikan pencapaian hasil kinerja yang optimal. Dari sisi internal proses kami sedang menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP) yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kelapa sawit. Pada periode selanjutnya, kami akan menyempurnakan governance yang ada sehingga dapat mencapai kinerja optimal.

Kami akan terus bekerja keras memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan industri dengan harapan dapat memberikan imbal hasil secara ekonomi, sosial dan manfaat lainnya, yang pada gilirannya mampu memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mid 2015 initiated our journey as the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). We were born from the manifestation of the mandate of Law Number 39 of 2014 concerning Plantation and Government Regulation Number 24 of 2015 concerning the Gathering of Plantation Funds.

We have been committed to optimally run our duties assigned to encourage a sustainable development of Palm Oil Plantation as one of strategic commodities in Indonesia. To realize this, we have formulated the strategic map which contains 11 strategic targets to achieve.

Throughout 2015, we have accomplished optimal performances. Internally, our process is currently improving the Standard Operating Procedure needed for the management of palm oil fund. In the subsequent period, we have planned to enhance our existing governance to reach optimal performance.

We will continue our hard work in providing the best service to the communities and industries so as to be able to provide economic and social yields as well as other benefits, which in turn may stimulate the national economic growth.

2016

Melanjutkan Dukungan bagi Sawit Indonesia yang Lebih Berkelaanjutan Continuing to Support Sawit Indonesia More Sustainable

Selama hampir dua tahun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sesuai dengan tugas yang diamanahkan. Mengacu pada visi BPDPKS yakni menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia, BPDPKS telah menghimpun dan mengembangkan sumber Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) secara berkelanjutan yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan dana lembaga pembiayaan. Disamping itu, BPDPKS juga melakukan pengelolaan dana melalui investasi jangka panjang dan/atau jangka pendek dengan menjaga prinsip kehati-hatian.

Sepanjang tahun 2016, BPDPKS juga melakukan penyaluran dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja kelapa sawit, melakukan kegiatan promosi perkebunan, melakukan kegiatan peremajaan perkebunan, menyalurkan hasil pengelolaan dana untuk mendorong intensifitas pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi perkebunan kelapa sawit dan bahan bakar nabati (biofuel), melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pemanfaatan DPKS, dan melakukan kajian untuk pengembangan usaha.

Jejak langkah ini menjadi tolok ukur untuk lebih meningkatkan kinerja kami di masa mendatang yang penuh peluang, tantangan sekaligus harapan. Untuk itu BPDPKS bersama seluruh pihak terkait akan senantiasa bersinergi dalam mewujudkan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

For almost two years, the  Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil (IECFPO) has performed a number of strategic activities according to the mandated duties. Referring to **IECFPO** vision to become the manager of funds in the development of sustainable palm oil as one of Indonesia's strategic commodities, **IECFPO** has sustainably collected and developed the sources of Crop Fund for Palm Oil from palm oil plantation business owners and financing institutions. **IECFPO** also carries out the fund management through long- and/or short-term investments by adhering to the prudential principle.

Throughout 2016, **IECFPO** has distributed and utilized the proceeds from the fund management for the research and development in order to improve the palm oil performance, promoting the plantations, rejuvenating the plantations, distributing the proceeds from the fund management to intensify the construction of plantation facilities and infrastructure, meeting the food requirements with palm oil plantation yield, downstream processing the palm oil plantation and biofuel, socializing about and enhancing the Crop Fund for Palm Oil utilization, and conducting business development studies.

This milestone helps creating a benchmark to improve our future performances that are full of opportunities, challenges, and expectations. To that reason, **IECFPO** and all relevant parties will continue to synergize in realizing sustainable palm oil plantation development.

Kesinambungan Tema AR BPDPKS
Theme Continuity of BPDPKS' Annual Report

2017

**Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDPKS untuk
Mendukung Sawit Indonesia yang BerkelaJutan**
Starting to Support Sawit Indonesia More Sustainable

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki peran penting dan berpotensi besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Selain penyumbang devisa, komoditas kelapa sawit juga berperan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Indonesia, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, hingga penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah tanah air. Dalam dua dekade terakhir pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup pesat, terlihat dari luas areal dan volume ekspor CPO serta banyaknya stakeholder yang terlibat dalam sistem industri kelapa sawit. Peningkatan produktivitas untuk menghasilkan target produksi CPO Indonesia memerlukan peran sumber daya manusia yang terampil di industri perkebunan kelapa sawit serta tata kelola kelembagaan yang baik.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut BPDPKS sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bagi kemaslahatan industri sawit Indonesia. Untuk itu, BPDPKS terus berupaya untuk mempersiapkan SDM industri kelapa sawit, terutama untuk sektor hulu dan pabrik kelapa sawit, dengan prioritas perkebunan rakyat.

Guna mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit, BPDPKS telah memberikan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mendanai berbagai riset kelapa sawit baik sisi hulu maupun hilir, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem informasi kelapa sawit. Upaya Promosi perkebunan kelapa sawit juga telah dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Titik berat promosi di dalam negeri adalah kampanye positif sawit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk generasi milenial. Sementara fokus promosi di luar negeri lebih difokuskan untuk meningkatkan citra nilai, dan memperluas pasar kelapa sawit dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha perkebunan dan Kementerian Perdagangan.

Palm oil is a flagship commodity with crucial role and huge potential for the development of Indonesian economy. Apart from contributing to the foreign exchange income, palm oil is also crucial for Indonesian Gross Domestic Products (GDP), employment, and poverty alleviation, while driving economic wheels in numerous regions in our country. Within the past two decades, Indonesian palm oil estates grow rapidly, as seen from the total estate area, CPO export volume, and the number of stakeholders involved in the industry. To enhance productivity that is capable of achieving CPO production target, Indonesia calls for skillful human resources for the industry, in addition to good institutional governance.

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency, hereinafter referred to as OPPFMA is an institution established with the purpose of collecting, developing, and utilizing CPO Funds for the benefit of Indonesian palm oil industry. For that purpose, OPPFMA ceaselessly prepares human resources for the palm oil industry in upstream sector and factories, by prioritizing smallholders.

To support palm oil estate development, OPPFMA has provided funding for palm oil estate research and development particularly for palm oil-related upstream and downstream researches and information technology development. Palm oil estate promotion has also been held both domestically and internationally. Domestically, the promotion emphasizes on positive campaign to raise awareness in community and the millennials. Meanwhile, the international promotion focuses on enhancing image and expanding market by involving palm oil business owners' association and the Ministry of Trade.

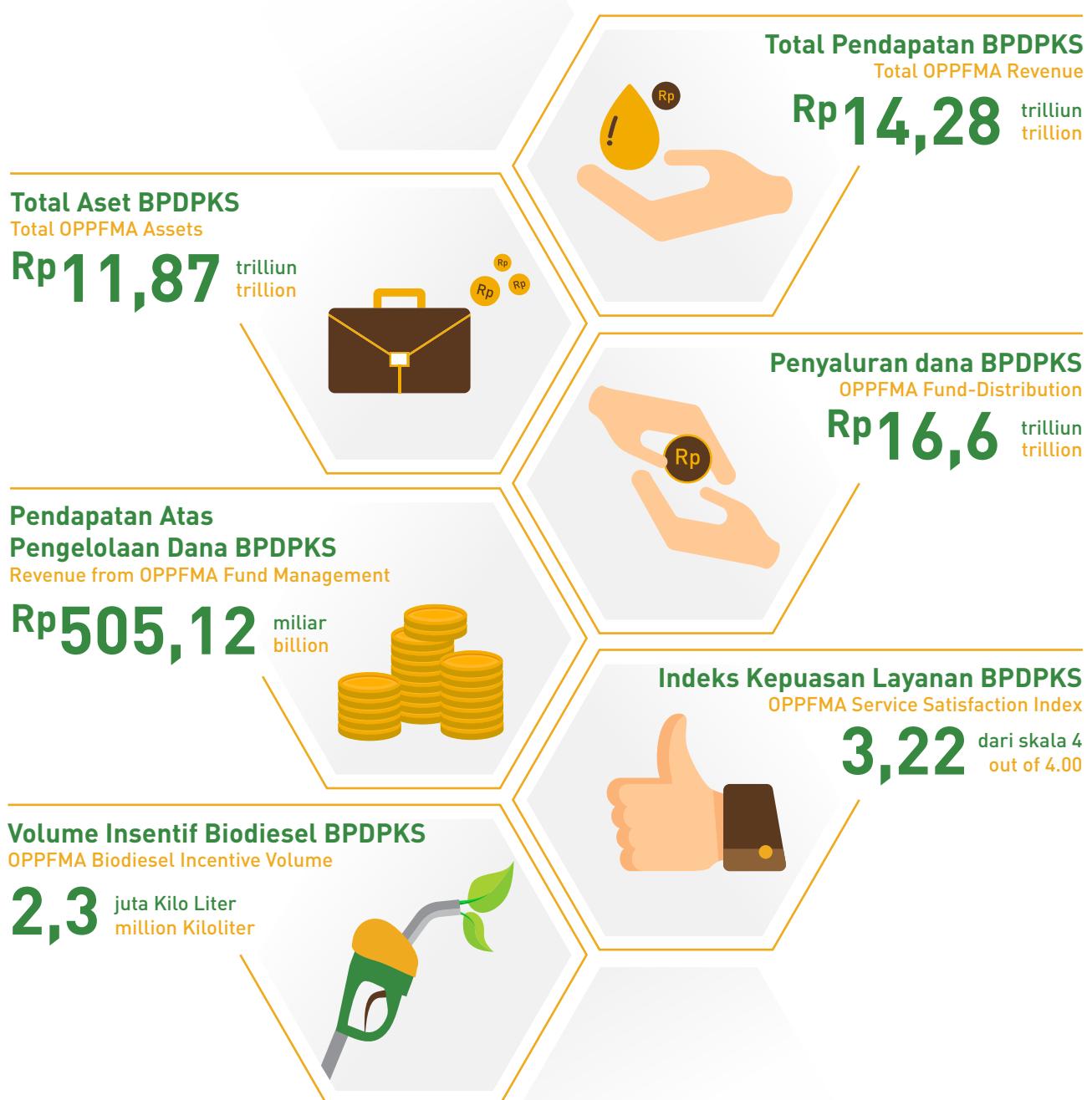
BPDPKS juga berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan potensi serta memanfaatkan seluruh kekuatan sumber daya di lingkungan internal BPDPKS, agar secara berkelanjutan dapat selalu menciptakan dan memberikan nilai tambah untuk mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan.

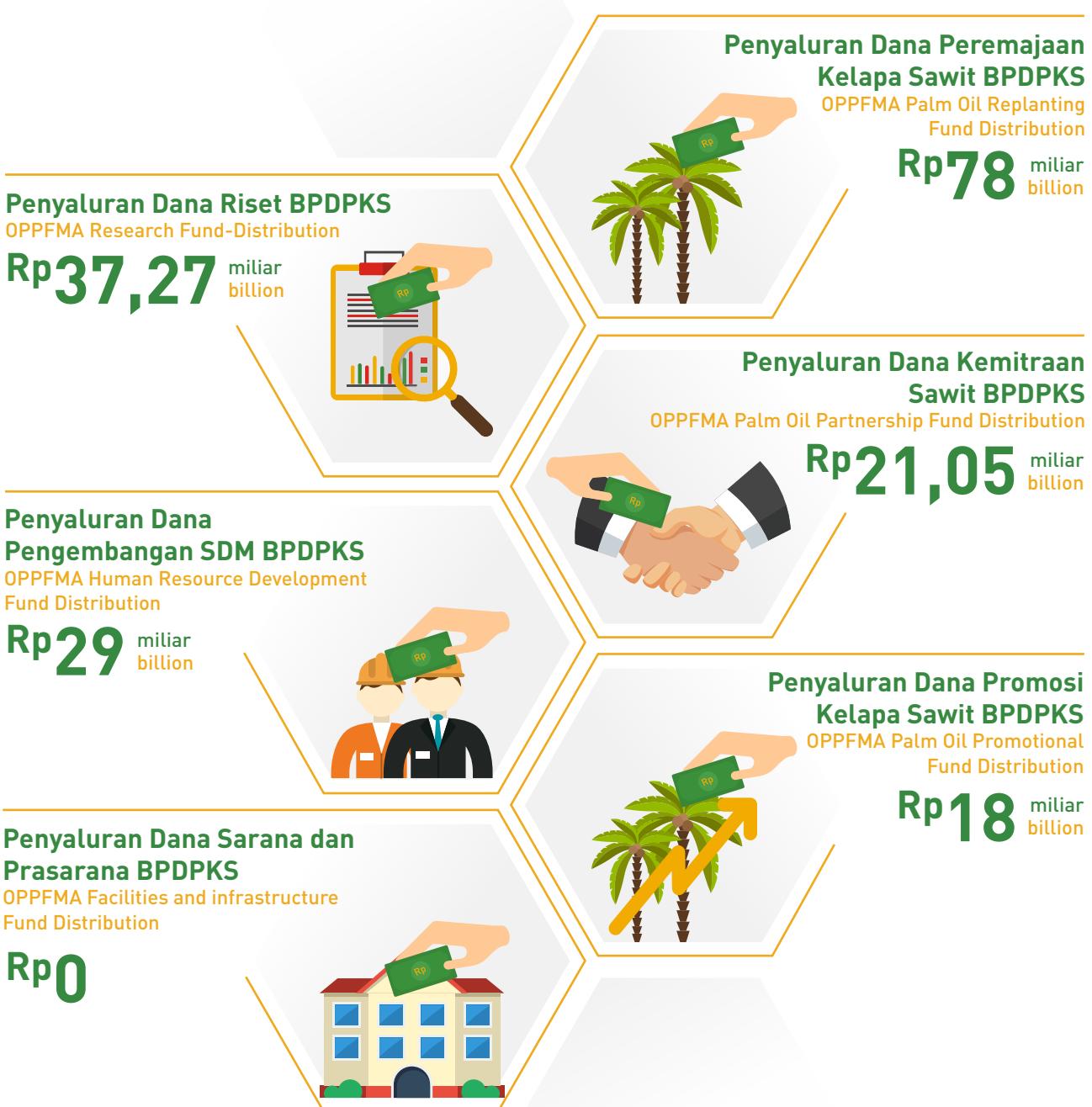
OPPFMA is also committed to focusing on the development of potentials while utilizing the entire resources within organization in order to sustainably create and provide added value that supports Sustainable Indonesian Palm Oil.



Ringkasan Kinerja Tahun 2017 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

2017 Performance Summary of Oil Palm Plantation Fund Management Agency





Testimoni

Testimonials

12



Ir. H. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia
President of the Republic of Indonesia

SAWIT INDONESIA BERDAULAT

Sekian puluh tahun industri sawit Indonesia ditekan oleh bangsa Eropa, saatnya kita tidak lagi ditekan oleh pihak luar dengan melakukan penanaman dan pengolahan yang *sustainable* dan ramah lingkungan serta membangun rangkaian industri yang berorientasi ekspor agar kita mandiri dan kekuatan diplomasi yang agresif agar tidak dipermainkan oleh Asing. Kalau penggunaan Biodiesel dan Energi baru Terbarukan bisa dimplementasikan, maka Indonesia akan hemat kurang lebih 21 Juta Dollar AS per hari.

SOVEREIGNTY FOR INDONESIAN PALM OIL

For decades, Indonesian palm oil has been under pressure from the Europeans. This is the time to break free from such a burden through sustainable and environmentally-friendly planting and management, along with export-oriented industries, to bring independence and aggressive diplomatic power that cannot be underestimated by the outside world. Assuming that biodiesel and new and renewable energy utilization is successfully implemented, Indonesia will reduce our fuel allocation by around USD21 million daily.





Darmin Nasution

Menteri Koordinator Perekonomian Rakyat
Coordinating Minister for Economic Affairs

Peran strategis industri sawit semakin terlihat dalam dua tahun terakhir terlihat setelah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit terbentuk. Program-program yang dijalankan oleh BPDPKS mulai membawa hasil, misalnya terkait *mandatory biodiesel* yang terbukti memberikan rantetan dampak positif bagi perekonomian bangsa. Sebuah industri yang mengedepankan kemandirian serta keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi.

The strategic role of palm oil industry has been apparent for the past two years, following the establishment of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA). OPPFMA has shown admirable development in the implementation of its programs, as proven by the positive impacts brought by mandatory biodiesel use to our economy. This is an industry that puts forward independence and balance in meeting food and energy requirements.

13



Sofyan Djalil

Pemrakarsa BPDPKS
OPPFMA Initiator

Ketergantungan yang tinggi terhadap BBM impor membuat ekonomi negeri ini rapuh. Ketika impor BBM terus meningkat, maka transaksi berjalan tertekan, cadangan devisa tergerus dan nilai tukar rupiah dalam kondisi rawan. Terlintas dalam pikiran saya bagaimana menjadikan minyak sawit sebagai salah satu solusi untuk mengurangi impor BBM. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar sawit juga bermanfaat bagi industri sawit sendiri? Intinya, bagaimana saat itu kita bisa mengimplementasikan ide DARI SAWIT UNTUK SAWIT." BPDPKS hadir untuk membantu pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis Indonesia, dan Pemerintah telah membuat skema pendanaan bagi pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

High dependency on imported fuel makes our country's economy vulnerable. When fuel import continues increasing, transactions are pressured, foreign exchange reserves are depleted, and rupiah exchange rate is vulnerable. A thought came to my mind, what if we use palm oil as a solution to reduce fuel exports? The next question following was, how to make palm oil beneficial for the palm oil industry itself? The point was, how to implement the idea of "FROM PALM OIL FOR PALM OIL". OPPFMA exists to help developing palm oil estates and industry as Indonesia's strategic commodity, while the Government has devised a funding scheme for a sustainable palm oil development.



Daftar Isi

Content

01 PENDAHULUAN INTRODUCTION

- 2 Tema dan Penjelasan Tema
Theme and Explanation of Theme
- 4 Kesinambungan Tema
Continuity of Theme
- 10 Ringkasan Kinerja Tahun 2017 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
2017 Performance Summary of Oil Palm Plantation Fund Management Agency
- 12 Testimoni Testimonials
- 14 Daftar Isi Contents
- 16 Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional Tahun 2017
Financial and Operational Highlights in 2017
- 18 Peristiwa Penting Tahun 2017
Significant Events in 2017

02 LAPORAN KEPADA REGULATOR DAN PEMANGKU KEPENTINGAN REPORT TO REGULATOR AND STAKEHOLDERS

- 22 Sambutan Dewan Pengawas
Message from the Supervisory Board
- 28 Profil Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Supervisory Board Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency
- 40 Laporan Direksi
Board of Directors Report
- 48 Profil Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Board of Director Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency
- 54 Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2017
Accountability for Annual Report 2017

03 PROFIL BPDPKS OPPFMA PROFILE

- 58 Profil BPDPKS OPPFMA Profile
- 59 Riwayat Singkat OPPFMA At A Glance
- 64 Visi Misi dan Tujuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) Vision, Mission, and Objectives
- 67 Tugas, Fungsi, dan Peran
Duties, Function, and Roles
- 68 Budaya Kerja Work Culture
- 69 Makna Logo Meaning of Logo
- 70 Struktur Organisasi Organizational Structure
- 72 Pejabat Satu Level di Bawah Direksi
Profile of Officials One Level under the Board of Directors
- 74 Sumber Daya Manusia Human Resources
- 80 Lembaga Profesi Penunjang
Supporting Professional Institutions
- 82 Area dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia
Indonesian Palm Oil Area and Production

04 ANALISA PEMBAHASAN KINERJA OPERASIONAL DAN KEUANGAN OPERATIONAL AND FINANCIAL PERFORMANCE DISCUSSION ANALYSIS

- 88 Analisis Industri
Industrial Analysis
- 94 Kontribusi BPDPKS kepada Negara
OPPFMA Contribution to the Country
- 96 Analisis Kinerja Operasional
Operational Performance Analysis

106 Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

113 Manajemen Struktur Modal
Capital Structure Management

116 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi
Kinerja Tahun 2017 & Proyeksi Tahun 2017
Comparison between 2017 Performance Target
and Realization and 2017 Outlook

119 Informasi Keuangan Lainnya
Other Financial Information

120 Prospek dan Strategi Usaha
Business Outlook and Strategies

183 Perkara Hukum Legal Cases
Sistem Pelaporan Pelanggaran

184 *Whistleblowing System*

186 Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement

191 Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System

193 Teknologi Informasi Information Technology

196 Akuntan Publik Public Accountants

198 Akses Informasi dan Data BPDPKS
Access to OPPFMA Information and Data

05 TATA KELOLA BPDPKS OPPFMA GOVERNANCE

128 Pendahuluan Introduction

130 Komite Pengarah Dana Perkebunan
Crop Fund Steering Committee

135 Dewan Pengawas Supervisory Board

145 Komite Audit Audit Committee

149 Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary to the Supervisory Board

151 Direksi Board of Directors

157 Kebijakan Remunerasi
Dewan Pengawas dan Direksi
Remuneration Policy for the Supervisory Board
and the Board of Directors

158 Sekretaris BPDPKS Corporate Secretary

159 Audit Internal Internal Audit

166 Manajemen Risiko BPDPKS
Risk Management OPPFMA

178 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

181 Kode Etik BPDPKS
Code of Conducts OPPFMA

06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL BPDPKS OPPFMA SOCIAL RESPONSIBILITY

202 Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
OPPFMA Social Responsibility

07 LAPORAN KEUANGAN AUDITED AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

212 Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements



Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights

(dalam Rp) (in Rp)

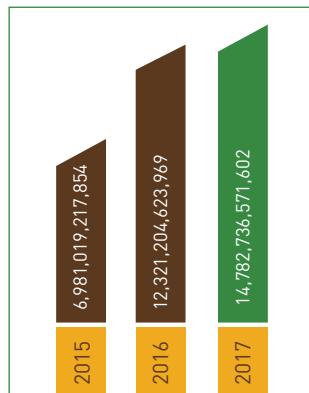
| Laporan Posisi Keuangan | 2015 | 2016 | 2017 | Statement of Financial Position |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| Aset | 6.447.069.468.161 | 5.772.734.755.548 | 11.865.868.411.275 | Assets |
| Aset Lancar | 6.446.836.634.828 | 5.757.640.522.316 | 11.851.159.824.294 | Current assets |
| Aset Tidak Lancar | 232.833.333 | 15.094.233.232 | 14.708.586.981 | Non-current assets |
| Liabilitas | 17.339.031.941 | 602.045.717.305 | 859.191.982.927 | Liabilities |
| Liabilitas Jangka Pendek | 17.339.031.941 | 602.045.717.305 | 859.191.982.927 | Current liabilities |
| Ekuitas | 6.429.730.436.220 | 5.170.689.038.243 | 11.006.676.428.348 | Equity |
| Laporan Aktivitas | | | | Statement of Activity |
| Pendapatan | 6.981.019.217.854 | 12.321.204.623.969 | 14.782.736.571.602 | Income |
| Beban Usaha | 551.287.775.134 | 11.577.229.646.947 | 10.946.738.536.497 | Operating expenses |
| Pengembalian setoran dari kas negara | | - | 2.000.000.000.000 | Deposit refund from state treasury |
| Setoran ke kas negara | | (2.000.000.000.000) | - | Deposit to state treasury |
| Penyesuaian surplus tahun berjalan | | (3.027.019.999) | - | Adjustment to current year surplus |
| Kenaikan/(penurunan) aset neto tidak terikat | | (1.259.052.042.977) | 5.835.998.035.105 | Increase/(decrease) in unrestricted net assets |
| Aset neto tidak terikat awal tahun | | 6.429.730.436.220 | 5.170.678.393.243 | Unrestricted net assets at the beginning of the year |
| Aset neto tidak terikat akhir tahun | 6.429.730.436.220 | 5.170.678.393.243 | 11.006.676.428.348 | Unrestricted net assets at the end of the year |
| Laporan Arus Kas | | | | Statement of Cash Flow |
| Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 6.442.406.435.456 | 1.303.611.901.381 | 4.021.710.047.373 | Net cash flows provided from operating activities |
| Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi | (3.962.033.850.000) | 3.945.123.562.400 | (8.563.899.000.725) | Net cash flows (used for)/ provided from investing activities |
| Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan | (2.000.000.000.000) | (2.000.000.000.000) | 2.000.000.000.000 | Net cash flows provided from/ (used for) financing activities |
| Kenaikan bersih pada kas dan setara kas | 2.480.372.585.456 | 3.248.735.463.781 | (2.542.188.953.352) | Net increase in cash and cash equivalents |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | - | 2.480.372.585.456 | 5.729.108.049.237 | Cash and cash equivalents at the beginning of the year |
| Kas dan Setara Kas pada akhir tahun | 2.480.372.585.456 | 5.729.108.049.237 | 3.186.919.095.885 | Cash and cash equivalents at the end of the year |



Grafik Jumlah Aset (Rp)
Chart of Total Assets (Rp)



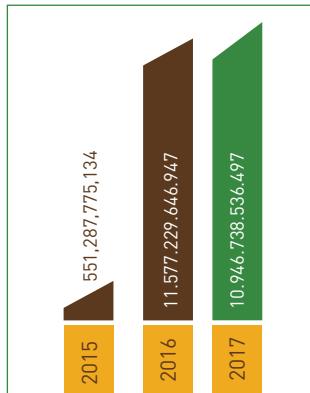
Grafik Jumlah Pendapatan (Rp)
Chart of Total Income (Rp)



Grafik Jumlah Liabilitas (Rp)
Chart of Total Liabilities (Rp)



Grafik Jumlah Beban Usaha (Rp)
Chart of Total Operating Expenses (Rp)



Grafik Jumlah Ekuitas (Rp)
Chart of Total Equity (Rp)



Jumlah Kas dan Setara Kas (Rp)
Chart of Cash and Cash Equivalent (Rp)



**Grafik Jumlah Surplus setelah
Setor ke Kas Negara (Rp)**
Chart of Total Surplus after Deposit to
State Treasury (Rp)



Peristiwa Penting Tahun 2017

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Significant Events in 2017 Oil Palm Plantation Fund Management Agency

1 Februari
February



Dono Boestami ditunjuk sebagai Direktur Utama BPDPKS menggantikan Bayu Krisnamurthi yang resmi mengundurkan diri sejak Februari 2017.

Dono Boestami was appointed as President Director, in replacement of Bayu Krisnamurthi who officially resigned effective since February 2017.

2-4 Februari
February



BPDPKS mengikuti Pertemuan Nasional Sawit Indonesia 2017 yang bertemakan "Membangun Keberlanjutan Daya Saing Sawit Indonesia".

OPPFMA attended the Indonesian Palm Oil Conference 2017 with the topic, "Developing Indonesian Palm Oil Competitiveness' Sustainability".

24 Februari
February



Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin dengan Dewan Pengawas BPDPKS serta Direktur Utama Dono Boestami.

Coordination meeting between the Coordinating Minister for Economic Affairs, Darmin Nasution and OPPFMA Supervisory Board and President Director, Dono Boestami.

25 April
April



Workshop Media Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan Perkembangannya.

Workshop on [Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil](#) Media and Their Development.

2 Mei
May



Peluncuran Buku Program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Book Launching of [Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil \(OPPFMA\)](#) Program.

24 Februari
February



Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel antara BPDPKS dengan 19 Produsen Biodiesel Total dengan volume alokasi penyaluran BBN jenis Biodiesel dari 19 Produsen tersebut adalah masing-masing sekitar 1,350 juta KL untuk PT Pertamina (Persero) dan 24.000 KL untuk PT AKR Corporindo. The signing of Biodiesel Financing Agreement between OPPFMA and 19 biodiesel producers with total allocated distribution volume 1.350 million KL for PT Pertamina (Persero) and 24,000 KL for PT AKR Corporindo.

3 Agustus
August



BPDPKS bekerja sama dengan KBRI Moskow menyelenggarakan *Business Forum "Indonesia-Russia on Palm Oil"*, di Moskow.
OPPFMA collaborated with the Embassy of the Republic of Indonesia in Moscow to hold Business Forum "Indonesia-Russia on Palm Oil" in Moscow.

3 Oktober
October



Penyerahan Dukungan Peremajaan Kelapa Sawit Bagi Koperasi Kelapa Sawit Subur di Pelalawan Riau.

Handover of Palm Oil Replanting Assistance for Palm Oil Cooperative Subur in Pelalawan, Riau.

13 Oktober
October



Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya peremajaan 4.446 hektar kelapa sawit rakyat di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Proyek ini merupakan proyek percontohan nasional dengan pendanaan dibantu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 25 juta per hektare.

President Joko Widodo inaugurated the beginning of 4,446 hectare of smallholders' oil palm plantation replanting in Musi Banyuasin, South Sumatra. This is a national pilot project, where OPPFMA subsidizes an amount of Rp25 million per hectare for the program.

19

2 November
November



BPDPKS berpartisipasi dalam Konferensi Sawit dunia atau *International Palm Oil Conference (IPOC)* 2017 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali.

OPPFMA participated in the International Palm Oil Conference (IPOC) 2017 held at Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali.

27 November
November



Presiden Jokowi meresmikan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Serdang Bedagai seluas 9.109 hektar yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Peresmian ini diawali dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) tentang skema KUR Peremajaan Perkebunan, MoU Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi usaha mikro, petani, dan nelayan, serta temu wicara antara Presiden dengan petani perkebunan. Proyek ini merupakan kesinambungan launching program PSR yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. President Joko Widodo inaugurated Smallholder Oil Palm Replanting in Serdang Bedagai District for an area of 9,109 hectare, spread in 12 districts/municipalities of North Sumatra. The inauguration was preceded by the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) People's Business Loan for Plantation replanting, MoU on Empowerment of People's Right to Land for micro entrepreneurs, farmers, and fishermen, and discussion between the President and plantation farmers. This project is the continuation of the Smallholder Oil Palm Replanting Program launched on October 13, 2017 in Musi Banyuasin District, South Sumatra.

19 Desember
December



Rapat Koordinasi Komite Pengarah BPDPKS dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Coordination Meeting of OPPFMA Steering Committee, which was led by the Coordinating Minister for Economic Affairs, Darmin Nasution.

02



Laporan Kepada Regulator dan Pemegang Kepentingan

Report to Regulator
and Stakeholder





Sambutan Dewan Pengawas

Message from the Supervisory Board

22



Rusman Heriawan

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board



Selama tahun 2017, Dewan Pengawas BPDPKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi.

Throughout 2017, OPPFMA Supervisory Board proactively conducted supervision and provided inputs to the Board of Directors.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sepanjang tahun 2017 Dewan Pengawas mampu melaksanakan perannya dengan baik dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada Direksi. Izinkan saya mewakili Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan terhadap hasil kinerja BPDPKS untuk Tahun Buku 2017. Laporan disampaikan untuk memenuhi pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas BPDPKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi agar terus menjalankan komitmennya untuk selalu meningkatkan kinerja BPDPKS dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (GG) dalam kegiatan sehari-hari.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada manajemen BPDPKS atas pencapaian kinerja di tahun 2017 yang meningkat signifikan melampaui target yang ditetapkan. Dewan Pengawas mencermati bahwa capaian kinerja BPDPKS tahun 2017 merupakan hasil dari sinergi Direksi dan Dewan Pengawas, dukungan kebijakan pemerintah dan dampak perkembangan industri sawit Indonesia. Capaian kinerja BPDPKS tahun 2017 juga merefleksikan peningkatan proses berbasis good governance.

Thanks be to the One Almighty God, for without His blessings throughout 2017, the Supervisory Board would not be able to successfully perform our duties in supervising and directing the Board of Directors. On behalf of the Supervisory Board, I would like to deliver our supervisory report on OPPFMA performance in the fiscal year 2017. The submission of this report is also a part of our supervisory duties as mandated in the Regulation of the Minister of Finance Number 95/PMK.05/2016 on Supervisory Board of Public Service Agencies.

Throughout 2017, OPPFMA Supervisory Board proactively conducted supervision and provided inputs to the Board of Directors. The direct supervision among others covered the monitoring of follow-ups on the Supervisory Board's recommendations to the Directors, to make sure that the Board of Directors maintains their commitment to improving OPPFMA performances while adhering to the Good Corporate Governance principle in their daily operations.

Assessment of the Board of Directors' Performance

The Supervisory Board appreciates OPPFMA Management for the significant performance improvement in 2017 which went beyond the targets set. The Supervisory Board acknowledges that the performance throughout 2017 was the result of a synergy between the Board of Directors and the Supervisory Board, support from government policy, and impact of Indonesian palm oil development. The performance also reflects the improvement of good governance-based process.

Sambutan Dewan Pengawas Message from the Supervisory Board



24 Sampai dengan 31 Desember 2017 BPDPKS mencatat Aset sebesar Rp11.866 triliun, meningkat 105,55% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5.773 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus tahun 2017 yang lebih besar. Adapun Liabilitas sebesar Rp859.19 miliar meningkat 42,71% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp602.045 miliar yang disebabkan oleh pengakuan beban pembayaran selisih harga biodiesel yang telah diverifikasi oleh Kementerian ESDM. Sementara itu, adanya surplus tahun 2017 dan pengembalian setoran dari kas negara sebesar Rp2.000.000.000.000, berdampak pada kenaikan Ekuitas BPDPKS menjadi Rp11.007 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 91,02% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5.170 triliun.

Dari sisi operasional, BPDPKS membukukan pendapatan Rp14.28 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp10.6 triliun yang telah dialokasikan untuk program replanting, pendidikan dan pelatihan petani kelapa sawit, mendanai riset pada sejumlah universitas/lembaga riset, dan telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah dan hak paten serta promosi dan diplomasi sawit. Sementara itu, Pendapatan atas pengelolaan dana sebesar Rp505.12 miliar.

Dewan Pengawas juga senantiasa mendukung Program Mandatori Biodiesel 20% (B-20) pada setiap minyak diesel (solar) yang berhasil meyerap 2,288 juta KL. Dimana program ini telah memberikan manfaat besar dalam bentuk pengurangan gas emisi.

On December 31, 2017, OPPFMA's assets were Rp11,866 trillion, which increased by 105.55% from Rp5,777 trillion in 2016. This was mainly caused by larger surplus in 2017. The liabilities amounting to Rp859,19 billion was an improvement by 42.71% from Rp602.045 billion, due to acknowledgment of the expense for biodiesel price variance payment which has been verified by the Ministry of Energy and Mineral Resources. Meanwhile, the surplus in 2017 and deposit refund from the state treasury amounting to Rp2,000,000,000,000 brought affected to the increase in equity to Rp11,007 trillion, which was a boost by 91.02% from Rp5,170 trillion in 2016.

Operation-wise, OPPFMA recorded a revenue of Rp14,28 trillion and fund distribution amounting to Rp10,6 million which was allocated for replanting, palm oil farmers' training and education, research at a number of universities/research institutions, and scientific publication, patents, and promotion and diplomacy for palm oil. Meanwhile, income from fund management amounted to Rp505,12 billion.

The Supervisory Board also consistently supports the Mandatory Biodiesel 20% (B20) Program for every use of diesel oil, which managed to utilize 2.288 million KL of biodiesel. The program has given large contribution to the reduction of gas emissions.

Pandangan Atas Prospek Usaha

Prospek kelapa sawit di tahun 2018 ini terbilang cukup bagus. Komoditas kelapa sawit bukan hanya merupakan komoditas pertanian yang menghasilkan minyak nabati, *margarin, shortening*, dan RBD oil sebagai bahan baku penting dalam pembuatan sabun mandi, sabun cuci, dan produk kebersihan dan perawatan diri lainnya. Namun kelapa sawit sudah menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia bahkan dunia melalui Program Mandatori Biodiesel 20% (B-20). Dimana turunan sawit merupakan salah satu komponen penting dalam *renewable energy*. Dengan semakin bertambahnya penyerapan biodiesel, industri sawit ke depan memiliki prospek cukup kuat.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola BPDPKS

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Dewan Pengawas menilai BPDPKS telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tata kelola organisasi dapat dilaksanakan secara konsisten. Pengelolaan BPDPKS senantiasa dilandasi dengan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas senantiasa mendorong komitmen BPDPKS untuk menerapkan tata kelola perusahaan di seluruh tingkatan organisasi. BPDPKS secara bertahap melakukan penyempurnaan atas kelengkapan kebijakan dan prosedur di seluruh organisasi BPDPKS dalam rangka mendukung berjalannya sistem operasional mampu sejalan dengan prinsip *good governance*.

Sistem pengendalian internal BPDPKS dilakukan melalui penerapan kebijakan dan prosedur secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha BPDPKS, manajemen risiko, perencanaan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendeklasiasi wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Konsep Sistem Pengendalian Internal sejalan dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO). Dewan Pengawas senantiasa mengawasi kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit.

Opinion on Business Outlook

The business outlook for palm oil industry in 2018 is rather promising. Palm oil is not only used to produce cooking oil, margarine, shortening, and RBD oil as important raw materials in the production of bath soap, laundry soap, and other hygiene and sanitary products. In fact, palm oil has become a part of Indonesian and global sustainable development through the implementation of the Mandatory Biodiesel 20% (B20) Program. Palm oil derivatives are among the crucial components of the renewable energy. Increasing utilization of biodiesel promises a bright future for palm oil industry.

Opinion on OPPFMA Governance Implementation

The Supervisory Board sees that OPPFMA has made the efforts to ensure that the organizational governance was done consistently, all with the purpose to improve the quality of good corporate governance principles adoption. The management at OPPFMA is consistently based on the adoption of good corporate governance principles as set by applicable provisions. The Supervisory Board encourages the management to commit to implementing good corporate governance at every organizational level. Gradually, improvements are made to the policies and procedures across all fields in OPPFMA, with the purpose to realize a system of operation that conforms to the good corporate governance principles.

The internal control system at OPPFMA is performed by consistently exercising policies and procedures on OPPFMA's business activities, and risk management, through accurate strategic planning, clear job division and delegation of authorities, and sufficient accounting policies. OPPFMA's Internal Control System Concepts conforms to the Internal Control System developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The Supervisory Board constantly monitors the adequacy and reasonability in the preparation of the financial statements and risk management by applying the prudential principle, with assistance from the Audit Committee.

Sambutan Dewan Pengawas

Message from the Supervisory Board

Dewan Pengawas menyadari bahwa BPDPKS tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usahanya, karena itu kami mendorong peningkatan kemampuan di bidang manajemen risiko agar mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang akan dihadapi. Kami meyakini bahwa dengan tata kelola yang semakin baik, maka BPDPKS akan mampu mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

Komite di Bawah Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota. Komite Audit berperan membantu Dewan Pengawas menjalankan peran penasehatan dan pengawasan. Dewan Pengawas terus mendorong peningkatan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu pelaksanaan pengawasan aktif dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dengan cara Komite Audit untuk lebih proaktif menemukan, mereview, mendiskusikan dan melaporkan isu-isu terkini, hasil audit internal maupun eksternal, kinerja keuangan dan manajemen risiko sehingga Dewan Pengawas senantiasa terupdate dan dapat memberikan arahan yang tepat kepada Direksi. Selama tahun 2017 fungsi Komite Audit sudah berjalan dengan baik dan tertib dan berkontribusi signifikan dalam menunjang pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas.

Komposisi Dewan Pengawas

Selama tahun 2017, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas sehingga komposisinya masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu:

Realizing that business risks always lurk around our operations, the Supervisory Board encourages competency development in risk management area, as a measure to identify and mitigate such potential risks. We believe that improvements in our governance will help OPPFMA in achieving sustainable growth while providing added value for all stakeholders

Committees under the Supervisory Board

In performing the supervisory duty, the Supervisory Board is assisted by the Audit Committee which consists of 1 Chairperson and 2 Members. The Audit Committee helps the Supervisory Board performing the advisory and supervisory roles. Improvements in the functions and responsibilities of the Audit Committee are encouraged, so that in assisting the Supervisory Board, the Committee can proactively spot, review, discuss, and report current issues, internal and external audit findings, as well as the financial and risk management performance, to allow the Supervisory Board to receive updated information and provide the right directives to the Board of Directors. The Audit Committee has properly performed their duties in 2017, while providing significant contribution to the Supervisory Board's roles.

Composition of the Supervisory Board

There were no changes to the Supervisory Board composition in 2017, and therefore it remains the same with the previous year's composition:

| Nama Name | Jabatan Position | Representative | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment |
|-----------------------|---------------------|---|--|
| Rusman Heriawan | Ketua Chairman | Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture | |
| Lukita Dinarsyah Tuwo | Anggota Member | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Ministry for Economic Affairs | |
| Suahasil Nazara | Anggota Member | Kementerian Keuangan Ministry of Finance | |
| Arlinda | Anggota Member | Kementerian Perdagangan Ministry of Trade | |
| Rida Mulyana | Anggota Member | Kementerian ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources | |
| Panggah Susanto | Anggota Member | Kementerian Perindustrian Ministry of Industry | |
| Gamal Nasir | Anggota Member | Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture | |
| Loso Judijanto | Anggota Member | Kementerian Negara PPN/ Bappenas Ministry of National Development Planning/Bappenas | |
| Joko Supriyono | Anggota Member | GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) IPOA (Indonesian Palm Oil Association) | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/2015 Minister of Finance Decree Number 714/ KMK.05/2015 dated June 26, 2015 |

Kami optimis dengan komposisi yang ada, mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatan secara efektif serta optimal.

With current composition, we are optimistic that our supervisory and advisory functions can be performed effectively and optimally.

Ucapan Terima Kasih

Kami memberikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh pegawai yang telah bahu membahu bekerja keras sehingga BPDPKS masih dapat menjaga kesinambungan operasional BPDPKS di tengah situasi bisnis yang penuh tantangan di tahun 2017 ini. Demikian juga kami atas nama Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih kepada segenap pemangku kepentingan, atas dukungan dan kepercayaan kepada kami.

Acknowledgment

27

Our appreciation goes to the Board of Directors and all employees who have exerted themselves in maintaining a sustainable operation amidst the fully challenging year. On behalf of the Supervisory Board, I would like to express our highest gratitude to the stakeholders for all supports and trusts delivered upon us.

Jakarta, ... 2017 Jakarta, ... 2017

Atas Nama Dewan Pengawas On behalf of the Supervisory Board

**Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Oil Palm Plantation Fund Management Agency**



Rusman Heriawan

Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board

Profil Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Supervisory Board Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency

28



**Joko
Supriyono**

Anggota
Member

**Gamal
Nasir**

Anggota
Member

**Lukita
Dinarsyah
Tuwo**

Anggota
Member

**Loso
Judijanto**

Anggota
Member

Arlinda

Anggota
Member



Profil Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Supervisory Board Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Rusman Heriawan
Ketua Chairman

**Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor,
4 November 1951 (66 tahun), berdomisili di Jakarta.
Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPDPKS
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan**

Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

**Citizen of Indonesia, born in Bogor, November 04, 1951
(67 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Chairman
of OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance
Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.**

Memperoleh gelar Diploma Tiga di Akademi Statistik, (AIS) Jakarta (1974), Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1983), meraih gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD) (2002) dan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (2004).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Kepala Badan Pusat Statistik (2006 - 2011), Deputi Bidang Statistik Sosial (2004 - 2006), Direktur Statistik Perdagangan dan Jasa (2001-2004) dan Peneliti Utama, Balitbang Pertanian-Kementerian Pertanian, (2006 s.d. sekarang) Platform Advisor on Indonesia Sustainable Palm Oil, UNDP.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Diploma 3 from the Academy of Statistics Jakarta (1974), Bachelor of Economics, University of Indonesia (1983), Master's Degree in Regional and Rural Planning (2002), and Doctorate Degree from Bogor Agricultural University (2004).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Head of Central Bureau of Statistics (2006-2011), Deputy of Social Statistics Department (2004-2006), Director of Trade and Service Statistics (2001-2004), and Main Researcher, Research and Development Agency - Ministry of Agriculture (2006-currently), Platform Advisor on Indonesia Sustainable Palm Oil, UNDP.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.





Lukita Dinarsyah Tuwo Anggota Member

**Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung,
25 September 1961 (56 tahun), berdomisili di Jakarta.
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.**

**Citizen of Indonesia, born in Bandung, September 25, 1961
(56 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of
OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance
Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.**

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1980 - 1985), serta meraih gelar MA di bidang Ekonomi dari Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, USA (1991 - 1992), gelar Ph.D di bidang Ekonomi dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA (1994 - 1998).

Perjalanan karir profesional beliau diawali tahun 1986 hingga 1987 di PT Unilever Indonesia sebagai Management Trainee, Production Planner, Elida Gibbs Division. Selanjutnya bergabung di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 1987 - 1998 sebagai Staf Biro Perencanaan Makro & Studi Kuantitatif, dan diangkat sebagai Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional (1998 - 2005). Sebagai Deputi Menteri PPN Bidang Pendanaan Pembangunan (2005 - Agustus 2010), dan Ketua Komite untuk Efektivitas Bantuan Luar Negeri (2008 - 2012). Selanjutnya pada 6 Januari 2010 - 5 Oktober 2014 diangkat sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, serta sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Oktober - Desember 2014). Sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) tahun 2005 hingga Oktober 2012. Serta bergabung sebagai anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dari tahun 2000 - 2002 dan menjabat sebagai Sekretaris dari tahun 2002 - 2006. Saat ini beliau juga menjabat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Desember 2014 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1980-1985), Master's Degree (MA) in Economy from Vanderbilt University of Nashville, Tennessee, USA (1991-1992), and Doctorate Degree (Ph.D) in Economy, University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA (1994-1998).

His professional career was initiated at PT Unilever Indonesia as a Management Trainee, Production Planner, Elida Gibbs Division (1986-1987). He further joined the National Development Planning Agency (Bappenas) as a Staff of Macro Planning and Quantitative Study Bureau (1987-1998) and was appointed as Director of Balance of Payment and International Economic Cooperation (1998-2005). He also served as Deputy Minister for National Development Planning, Department of Development Funding (2005-August 2010) and Head of Committee for Foreign Aid Effectiveness (2008-2012). Further, he was appointed as Vice Minister for National Development Planning (January 6, 2010-October 5, 2014) and as Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (October-December 2014). As Vice President Commissioner of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) 2005-October 2012). He joined as the member of Financial Sector Policy Committee (2000-2002) and served as the institution's secretary (2002-2006). He is currently serving as the Secretary for the Coordinating Ministry for Economic Affairs (December 2014 - current).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.



Profil Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Supervisory Board Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Suahasil Nazara
Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 23 November 1970 (47 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Citizen of Indonesia, born in Jakarta, November 23, 1970 [47 years old], domiciled at Jakarta. Serving as the Member of OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Ekonomi Perencanaan & Ekonomi Regional, Universitas Indonesia, Indonesia (1994), serta gelar Master of Science di Cornell University USA (1997) dan meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Illinois at Urbana Champaign USA (2003).

32 Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sejak Februari 2015 dan telah menjadi pejabat definitive pada 31 Oktober 2016. Pernah menjadi Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (PPIE), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004 - 2005), Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005 - 2008), Sekretaris Tim Review UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (2006), Tim Ahli Desentralisasi Fiskal untuk Menteri Keuangan (2008 - 2011), Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UI (2009 - 2013) sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Ottonomi Daerah tahun 2009 sampai dengan sekarang. Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kantor Wakil Presiden, Republik Indonesia (2011 - 2015) serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013 - 2014. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014 - 2015).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He obtained Bachelor of Economy from the University of Indonesia (1994), Master of Science from the Cornell University, USA (1997), and Doctor of Philosophy (PhD) from the University of Illinois at Urbana Champaign USA (2003).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: He has been serving as the Acting Head of Fiscal Policy Department, Ministry of Finance (February 2015-current) and has become a definitive official on October 31, 2016. He also served as the Head of Postgraduate Department of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia (2004-2005), Head of Institute of Demography, Faculty of Economics, University of Indonesia (2005-2008), Secretary to The Review Team of Law No. 13 of 2003 concerning Employment (2006), Fiscal Decentralization Expert Team for the Minister of Finance (2008-2011), Head of Department of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia (2009-2013), as well as serving as Head of Supervisory Committee of the Regional Autonomy Implementation (2009-current). Coordinator of the Policy Work Group of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction Secretariat, Office of the Vice President of the Republic of Indonesia (2011-2015) and Member of the National Economic Committee Board (2013-2014). Other position he served include Special Staff for the Coordinating Ministry of Economic Affairs (2014-2015).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.





Arlinda
Anggota Member

**Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang,
24 Maret 1963 9 (54 tahun, berdomisili di Jakarta.
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.**

**Citizen of Indonesia, born in Palembang, March 24, 1963
(54 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of
OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance
Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.**

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1985), gelar Master Degree in Economics di bidang Ekonomi dari University Of Colorado At Boulder, United State of America (USA) (1993).

Selama kurun waktu 1994 sampai dengan saat ini, beliau aktif mengikuti dan mewakili Indonesia di forum internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral dan juga aktif mempromosikan produk-produk dan jasa Indonesia di mancanegara untuk meningkatkan ekspor non migas dan nation branding Indonesia. Beberapa jabatan strategis Kementerian Perdagangan yang pernah diemban antara lain: Atase Perdagangan - KBRI di Washington DC USA (2006 - 2009), Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan (2009 - 2011), Direktur Impor, Dit. Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (2012), Kepala Pusat Hubungan Masyarakat (2012 - 2013), Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (2013 - 2015), Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa (2015 – 2016 – sekarang).

Beliau juga dipercaya untuk terlibat aktif di beberapa Tim Teknis dalam rangka peningkatan ekspor non migas Indonesia, yaitu:

- Anggota Tim Teknis Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Juli 2015 - September 2016);
- Ketua Tim Deregulasi Kebijakan Perdagangan (Agustus 2015 – Agustus 2017);
- Ketua Tim Percepatan Turunan Peraturan UU Perdagangan No. 7 Tahun 20014 (Januari 2016 - Agustus 2017).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

She earned Bachelor of Agriculture from Bogor Institute of Agriculture (1985), Master's Degree in Economics from the University of Colorado at Boulder, United State of America (1993).

Since 1994 until currently, she has been participating and representing Indonesia in international forums, either bilateral, regional, or multilateral, while actively promoting Indonesian products and services to foreign countries to increase Indonesia's non-oil and gas exports and nation branding. She has been serving several strategic positions at the Ministry of Trade, among others: Trade Attache - Indonesian Embassy at the Washington D.C., USA (2006-2009), Head of Center for Trade Policy Harmonization (2009-2011), Director of Import, Directorate of Import, Directorate General of Foreign Trade (2012), Head of Center for Public Relations (2012-2013), Expert Staff of Foreign Trade Policy and Development of Special Economic Zone (2013-2015), Expert Staff of Service Trade (2015 - 2016).

She is also entrusted with active participation in several Technical Teams to increase Indonesian non-oil and gas exports, including:

- Member of Technical Team of Batam Free Trade Region and Free Port (July 2015-September 2016);
- Chair of Trade Policy Deregulation Team (August 2015-August 2017);
- Chair of Trade Law No. 7 of 2014 Derivative Acceleration Team (January 2016-August 2017).

She has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.



Profil Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Supervisory Board Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Rida Mulyana
Anggota Member

**Warga Negara Indonesia, lahir di Sumedang,
2 Mei 1963 (54 tahun), berdomisili di Jakarta.
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.**
**Citizen of Indonesia, born in Sumedang, May 02, 1963
(54 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of
OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance
Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.**

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (1988), serta gelar Master of Science di dari London University, Inggris (1992).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, diantaranya: Sekretaris Direktorat Jenderal Migas (2009), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas", Badan Litbang ESDM (2009 - 2010), Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian ESDM (2010 - 2013), Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM (Februari 2013 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned the Bachelor's Degree in Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology (1998) and Master of Science from London University, United Kingdom (1992).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Secretary to the Directorate General of Oil and Gas (2009), Head of the Center for Oil and Gas Technology Research and Development "Lemigas", Energy and Mineral Resources Research and Development Department (2009-2010), Head of Planning and Cooperation Bureau, Ministry of Energy and Mineral Resources (2010-2013), Director General of New Energy, Renewable and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources (February 2013-current).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.





Panggah Susanto Anggota Member

**Warga Negara Indonesia, lahir di Temanggung,
19 Oktober 1958 (59 tahun), berdomisili di Jakarta.
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.**

**Citizen of Indonesia, born in Temanggung, October 19, 1958
(59 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of
OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance
Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.**

Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1984), dan Magister Manajemen STEI IPWI (1997).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Direktur Industri Maritim dan Jasa Keteknikan (2005 - 2008), Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan (2008 - 2010), Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (2010 - 2013), Plt Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (2014 - 2015), Direktur Jenderal Industri Agro (Juli 2013 - sekarang). Selain itu beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik (2016), Komisaris Utama PT Rekayasa Industri (2014 - 2016), Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (2011 - 2014), Komisaris PT Dok & Perkapalan (1997 - 2011), Sekretaris Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik (1996 - 2003) dan Staf Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (1994 - 1996). Selama kurun waktu 1994 sampai saat ini, beliau juga mendapat penugasan ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam berbagai forum terkait perdagangan internasional serta melakukan berbagai kajian terkait teknologi proses pupuk.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree in Chemical Engineering, Bandung Institute of Technology (1984) and Master's Degree in Management, STIE IPWI (1997).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Director of Maritime Industry and Engineering Services (2005-2008), Director of Land Transportation Modes Industry and Aviation (2008-2010), Director General of Manufacture Based Industries (2010-2013), Acting Director General of High-Technology Based Leading Industry (2014-2015), Director General of Agroindustry (July 2013-current). He also received special assignments as the Commissioner of PT Petrokimia Gresik (2016), President Commissioner of PT Rekayasa Industri (2014-2016), Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur (2011-2014), Commissioner of PT Dok & Perkapalan (1997-2011), Secretary to the Board of Commissioners of PT Petrokimia Gresik (1996-2003), and Staff of the Board of Commissioners of PT Pupuk Kalimantan Timur (1994-1996). Since 1994 until currently, he has been receiving overseas assignments to participate in various international trade forums as well as reviews on fertilizer processing technology.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.



Profil Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Supervisory Board Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Gamal Nasir
Anggota Member

**Warga Negara Indonesia, lahir di Medan,
28 Juli 1956 (61 tahun), berdomisili di Bogor.
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas
BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.**

**Citizen of Indonesia, born in Medan, July 28, 1956
(61 years old), domiciled at Bogor. Serving as the Member of
OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance
Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.**

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Pajajaran Bandung (1982), dan Magister Sains dari Universitas Pajajaran Bandung (1990).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Direktur Perbenihan, Ditjen. Tanaman Pangan (2004 - 2005), Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Ditjen. Perkebunan (2005 - 2010), Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan (PPNS), Ditjen. Perkebunan (2007 - 2010), Sekretaris I Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) (2008 - sekarang), Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo), Ditjen. Perkebunan (2008 - sekarang), Komisaris pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) (2008 - 2012). Selain menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkebunan sejak 2010 - sekarang, beliau juga mendapat penugasan khusus dari Kementerian BUMN menjadi Komisaris Utama pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) sejak tahun 2012 - 2016.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree in Agriculture from Padjadjaran University, Bandung (1982) and Master of Science from Padjadjaran University, Bandung (1990).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Director of Seeds, Directorate General of Food Crop (2004-2005), Secretary to the Directorate General of Plantation, Directorate General of Plantation (2005-2010), Coordinator of Plantation Civil Servant Investigators (PPNS), Directorate General of Plantation (2007-2010), Secretary I to the Indonesian Agronomy Association (PERAGI) (2008-current), Secretary General to the Indonesian Plantation Farmers Association (Gapperindo), Directorate General of Plantation (2008-current), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) (2008-2012). Apart from serving as Director General of Plantation since 2010-current, he also received special assignment from the Ministry of State-Owned Enterprises as the President Director of PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) since 2012 until currently.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.





Loso Judijanto Anggota Member

**Warga Negara Indonesia, Lahir di Magetan,
19 Januari 1971 (46 tahun), berdomisili di Bekasi.
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.**

**Citizen of Indonesia, born in Magetan, January 19, 1971
(46 years old), domiciled at Bekasi. Serving as the Member of
OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance
Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.**

Meraih gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (1994), dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (1995) dan memperoleh gelar Master of Statistics The University of New South Wales, Sydney, Australia (1998).

Berbagai pengalaman profesional beliau sejak tahun 1995 – 2015 yaitu: Peneliti Kebijakan Publik di Center for Policy and Implementation Studies (Oktober 1995 - Juni 1996), Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (Januari 1999 - Desember 2003), Partner and Managing Partner – SDP Corporate Governance Specialists (Januari 2001 - November 2004), Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (November 2004 - Maret 2007), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Desember 2007 - Mei 2009), Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Mei 2009 - Februari 2011), Komisaris Independen PT Bank Bukopin Tbk (Maret 2009 - Maret 2010) dan Ketua Komite Risk Management Oversight PT Bank Bukopin Tbk, Komisaris PT Telkomsel (Juli 2007 - Mei 2012), Komite Audit PT Indonesia Infrastructure Finance (2012 - 2014), PT Berau Coal Energy Tbk (2010 - 2014), PT Trimegah Securities Tbk (2010 - 2014), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007 - 2009) dan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2014 - Agustus 2015). Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Agustus 2015 – Agustus 2016), dan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Agustus 2016 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor of Science from Bogor Agricultural University (1994), Master of Management from the University of Indonesia (1995), as well as Master of Statistics from the University of New South Wales, Sydney, Australia (1998).

The followings are his professional resume throughout 1995-2015: Public Policy Researcher at the Center for Policy and Implementation Studies (October 1995-June 1996), Secretary to the Board of Commissioners of PT Pupuk Iskandar Muda (January 1999-December 2003), Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialist (January 2001-November 2004), Special Staff of the Minister of Communication and Informatics (November 2004-March 2007), Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (December 2007-May 2009), Expert Staff of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (May 2009-February 2011), Independent Commissioner of PT Bank Bukopin Tbk (March 2009-March 2010), Chairman of Risk Management Oversight Committee of PT Bank Bukopin Tbk, Commissioner of PT Telkomsel (July 2007-May 2012), Member of Audit Committee of PT Indonesia Infrastructure Finance (2012-2014), PT Berau Coal Energy Tbk (2010-2014), PT Trimegah Securities Tbk (2010-2014), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007-2009), and Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs (October 2014-August 2015), Special Staff for the State Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency (August 2015-August 2016), and special Staff for the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (August 2016-current).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.



Profil Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Supervisory Board Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Joko Supriyono
Anggota Member

**Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk,
20 Mei 1962 (54 tahun), berdomisili di Bekasi.
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.**
Citizen of Indonesia, born in Nganjuk, May 20, 1962 (55 years old), domiciled at Bekasi. Serving as the Member of OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Asisten Afdeling di PT Perkebunan II, Medan (1986 - 1994), Tenaga Instruktur di PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986 -1994). Selama kurun waktu tahun 1995 sampai sekarang menduduki beberapa jabatan di PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai Departemen Head-Human Resources (1995 - 1999), Division Head – Human Resources (2000 - 2002), Area Director – Riau Region (2002 - 2005), Deputy Director – Operation (2005 - 2007), Director – Human Resources (2007 - 2009), Director – Env & Social Responsibilty (2009 - 2011), Director in charge of Sustainability and Public Relation, President Director of Sumatera Operation (2011 - 2015), Director in charge of Sustainability and Public Relation, President Commisioner of Sumatera Operation (2015 - sekarang).

Selain itu beliau juga menduduki berbagai jabatan di organisasi profesi antara lain: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau sebagai Ketua (2003 -2006), Anggota Komite GAPKI Pusat (2008 -2009), Sekretaris Jenderal GAPKI Pusat (2009 -2015), Ketua Umum GAPKI Pusat (2015 - sekarang), Ketua Bidang Infrastruktur dan Lahan di Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) (2012 - 2015).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Earned Bachelor's Degree from the Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1986) and Master of Management from STIE IPWI (1996).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Division Assistant at PT Perkebunan II, Medan (1986-1994), Instructor at PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994). Since 1995 until currently he has been serving various positions at PT Astra Agro Lestari Tbk as Department head - Human Resources (1995-1999), Division Head - Human resources (2000-2002), Area Director - Riau Region (2002-2005), Deputy Director - Operation (2005-2007), Director - Human Resources (2007-2009), Director - Env. and Social Responsibility (2009-2011), Director in Charge of Sustainability and Public Relation, President Director of Sumatra Operation (2011-2015), Director in Charge of Sustainability and Public Relation, President Commissioner of Sumatra Operation (2015-current).

He also serves the positions in professional organizations as follows: Chairman of the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Riau Branch (2003-2006), Member of the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Central Committee (2008-2009), Secretary General to the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Central (2009-2015), General Chairman of the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Central (2015-current), Chairman of Infrastructure and Land, Indonesian Palm Oil Board (IPOB) (2012-2015).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.





Laporan Direksi

Message from the Board of Directors

40





Selama 2017, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp14.28 triliun atau sebesar 133,96% dari target tahun 2017.

Throughout 2017, the funds collected by OPPFMA were amounting to Rp14,28 trillion or by 133.96% of the 2017 target.

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan berbangga hati kami mengumumkan bahwa di tahun 2017, kami berhasil untuk terus melanjutkan misi menjaga keberlanjutan pembangunan industri kelapa sawit nasional. Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2017, BPDPKS berhasil menutup tahun 2017 dengan pencapaian-pencapaian yang membanggakan. Suatu kehormatan bagi saya atas nama Direksi untuk menyajikan Laporan Tahunan BLU BPDPKS tahun anggaran 2017.

Perbaikan Kondisi Ekonomi Global Berdampak Pada Peningkatan Nilai Industri Kelapa Sawit

Kondisi ekonomi global sepanjang tahun 2017 menunjukkan tren pemulihan yang cukup baik ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, terutama di negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun 2017 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 2,6% dari 1,5% pada tahun 2016. Sementara itu ekonomi Zona Euro di tahun 2017 berhasil tumbuh 2,5%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2007. Perekonomian Tiongkok juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya.

Our Esteemed Stakeholders,

We proudly announce our success throughout 2017 in extending the mission to maintain the sustainability of the national palm oil industry. Albeit facing innumerable dynamics and challenges, OPPFMA strongly concluded 2017 with exceptional achievements. It is an honor for me to represent the Board of Directors in presenting OPPFMA Public Service Agency Annual Report for the fiscal year 2017.

Global Economic Growth Resulted in Value Improvement for Palm Oil Industry

The global economy throughout 2017 showed favorable trend of recovery, as shown by higher economic growth as compared to in 2016, particularly in developed countries. In 2017, US economy grew significantly from 1.5% in 2016 to 2.6%. Meanwhile, Eurozone economy grew by 2.5% in 2017, the highest since 2007. China also showed better performance than initially forecasted.

Laporan Direksi

Message from the Board of Directors

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2017 juga turut membaik. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari 5,03% pada tahun 2016 menjadi 5,07% pada tahun 2017, didukung oleh stabilitas konsumsi rumah tangga, meningkatnya pertumbuhan investasi, kontribusi belanja Pemerintah, dan surplus neraca perdagangan internasional yang terus meningkat. Stabilitas tingkat konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari laju inflasi yang terkendali. Laju inflasi sepanjang tahun 2017 tercatat 3,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2016 yang sebesar 3,0% namun masih tergolong cukup rendah secara historis dan masih dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 4±1%.

Perbaikan perekonomian global dan Indonesia juga berdampak pada perkembangan industri kelapa sawit nasional. Produksi CPO di sepanjang tahun 2017 tercatat mencapai 38,17 juta ton dan PKO sebesar 3,05 juta ton sehingga secara keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia mencapai 41,98 juta ton. Total capaian tersebut meningkat sebesar 18% dibandingkan dengan capaian produksi di tahun 2016. Di sisi tren rata-rata harga jual CPO, harga CPO CIF Rotterdam di sepanjang tahun 2017 tercatat USD714,3/MT atau meningkat 2% dibandingkan dengan rata-rata harga di tahun 2016 sebesar USD700,4/MT. Peningkatan harga yang pesat di 2017 setelah sebelumnya terpuruk di tahun 2015 salah satunya disumbang oleh peningkatan nilai ekspor minyak sawit yang di tahun 2017 mencapai level USD18,22 Miliar. Angka tersebut merupakan nilai tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia.

Kinerja Perusahaan

Aspek Layanan

Kami selalu berupaya untuk menjalankan amanah sebagai pengelola dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Kami berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan transparan tanpa menghilangkan nilai-nilai organisasi Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS yang berada di bawah koordinasi 8 (delapan) Kementerian/Lembaga teknis di Republik Indonesia.

The global economic recovery was accompanied by improved economic condition in Indonesia. The national Gross Domestic Products (GDP) increased from 5.03% in 2016 to 5.07% in 2017, thanks to steady household consumptions, boosted investments, Government expenditure contribution, and increasing international trade balance surplus. The stability in household consumption was among others supported by controlled inflation. The inflation in 2017 was recorded at 3.6%, which was higher than in 2016 at 3.0%, albeit historically considered low and still within the inflation range set by Bank Indonesia (BI) at 4±1%.

The global and national economic improvements also contributed to the growth of national palm oil industry. CPO production in 2017 reached 38.17 million ton, while PKO was 3.05 million ton, making the overall total Indonesian palm oil production at 41.98 million ton. The total achievement was 18%, compared to production achievement in 2016. Regarding average CPO sale price trend, the CIF Rotterdam price in 2017 was USD 714.3/MT which was an increase by 2% from the average price in 2016 at USD 700.4/MT. Rapid increase in price throughout 2017, following a price fall in 2015, was among others triggered by improved palm oil export at USD 18.22 billion in 2017. This was the highest figure attained throughout the history of Indonesian palm oil exports.

Company Performance

Service Aspect

We consistently aims at realizing the mandate as CPO fund manager as stipulated in Government Regulation Number 24 of 2015 concerning Collection of Crude Palm Oil Funds. We are committed to work professionally and transparently by adhering to the organizational values of Public Service Agency OPPFMA which is under the coordination of eight (8) Technical Ministries/Agencies in Indonesia.

Di sepanjang tahun 2017, terjadi peningkatan aktivitas ekspor kelapa sawit sebesar 21,05% atau 6,51 juta MT dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan tersebut tentunya berdampak pada aktivitas pungutan ekspor kelapa sawit yang menjadi sumber utama penerimaan BLU BPDPKS. Di dalam menerapkan pungutan terhadap 37,44 juta MT komoditas ekspor di tahun 2017, kecepatan dan ketepatan layanan verifikasi merupakan kunci utama bagi keberhasilan penghimpunan dana kelapa sawit. Kami terus berupaya memberikan pelayanan pungutan ekspor yang cepat, mudah, dan transparan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk menjadikan industri kelapa sawit yang berkelanjutan tidak terlepas dari kinerja penyaluran dana yang efektif dan tepat sasaran. Penciptaan pasar baru dalam negeri adalah sebuah inisiatif yang berkelanjutan guna meningkatkan level kompetisi minyak sawit nasional di dunia. Sektor energi merupakan alternatif pasar baru yang paling siap dan menjanjikan serta memberikan efek berganda bagi ketahanan ekonomi bangsa. Di sepanjang tahun 2017, kami berhasil menjaga stabilitas penyaluran volume biodiesel di level 2,36 juta KL. Angka penyerapan tersebut sebesar 82% dari target yang ditetapkan pemerintah di tahun 2017 sebesar 2,53 juta KL.

Keberpihakan pemerintah melalui BPDPKS kepada pekebun rakyat ditunjukkan melalui komitmen perbaikan yang fundamental di sisi hulu. Serangkaian program antara lain peremajaan kebun sawit rakyat, pengembangan kompetensi sumber daya manusia perkebunan sawit rakyat, dan penelitian serta pengembangan perkebunan kelapa sawit diintegrasikan agar output yang diperoleh mampu memberikan insentif bagi peningkatan nilai tambah hasil usaha pekebun rakyat.

Usaha peningkatan nilai tambah bagi pekebun rakyat dimulai dengan perbaikan kondisi kebun yang saat ini jauh dari rata-rata standar produktif. Melalui program peremajaan sawit rakyat, di tahun 2017 kami telah berhasil menyalurkan dana peremajaan untuk kebun seluas 2.941,85 Ha. Angka tersebut jauh melesat dibandingkan dengan capaian di tahun 2016 yang sebesar 254 Ha. Sejalan dengan program peremajaan yang terus didorong, kami terus berupaya mempersiapkan kapasitas SDM perkebunan agar mampu mengelola kebun sawit secara mandiri.

There was a surge in the palm oil export activity in 2017, rendering and improvement by 21.05% or 6.51 million MT from 2016. This certainly affected the palm oil export levies as the main source for OPPFMA revenue. In collecting levies from 37.44 million MT export commodities in 2017, speed and accuracy of verification service are the key to the success of palm oil fund collection. We attempt at always providing quick, easy, and transparent export levy services to all stakeholders.

Realizing a sustainable palm oil industry means paying attention to effective and well-targeted fund distribution. The emergence of new domestic markets is a sustainable initiative that aims to enhance the national palm oil competitiveness in the world. Energy sector brings a new alternative market which is the most ready and most promising to provide multiple effects for our economy. In 2017 we successfully maintained the stability of biodiesel volume distribution at 2.36 million KL. It occupied 82% of the target set by the Government for 2017, i.e. 2.53 million KL.

Through OPPFMA, the Government's partiality to smallholders is shown through the commitment to make fundamental improvements in upstream sector. A set of programs, among others smallholder oil palm replanting, smallholder human resource competency development, and integrated palm oil estate research and development to gain outputs that are capable of giving incentives for increasing added value of the smallholders.

The improvement of added value for smallholders starts from the improvement of estates which, currently, are far from the average productive standard. Through smallholder replanting program, we successfully distributed replanting funds for 2,941.85 hectare of estates. The number exceeded 2016 achievements at 254 hectare. In line with the currently encouraged replanting program, we continuously developing the capacity of palm oil estate human resources to allow them independently manage their estates. Together with Universities and the Palm Oil Association,

Laporan Direksi

Message from the Board of Directors

Kami bersama dengan pihak Universitas dan Asosiasi Kelapa Sawit di tahun 2017 berhasil menyelenggarakan 43 kegiatan pelatihan bagi pekebun sawit rakyat dan guru SMK perkebunan dan pemberian beasiswa pendidikan setingkat D1 dan D3 untuk 6 angkatan bagi anak pekebun sawit rakyat. Dalam hal penyiapan industrialisasi usaha kebun sawit rakyat, kami terus berupaya mendorong inovasi melalui program penelitian dan pengembangan. Di tahun 2017, kami telah berhasil melaksanakan 8 kegiatan riset inisiatif dan 32 riset yang melalui jalur *call for proposal*.

Di tengah isu keberterimaan sawit nasional di tingkat global yang rendah serta kebutuhan perluasan pasar baru, kami terus giat melakukan serangkaian kegiatan yang bertajuk promosi sawit nasional bersama dengan kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri serta Asosiasi Kelapa Sawit. Di tahun 2017 kami telah melakukan berbagai kegiatan promosi dalam bentuk misi dagang, diseminasi informasi melalui pameran dan seminar, advokasi atas tuntutan hukum di sidang perdagangan dunia, serta *fellowship* program dengan kaum milenial.

Aspek Keuangan

Di tahun 2017, total aset kelolaan ditutup pada level Rp11,87 Triliun. Angka tersebut meningkat 105,72% dibandingkan dengan tahun 2016 yang ditutup di level Rp5,77 Triliun. Peningkatan aset kelolaan sejalan dengan peningkatan jumlah pungutan ekspor yang mencapai Rp14,28 Triliun. Angka tersebut meningkat 22,16% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp11,69 Triliun.

Realisasi beban penyaluran dana untuk program di tahun 2017 sebesar Rp10,62 Triliun. Angka tersebut terpantau cukup stabil dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,94 Triliun. Sama dengan tahun sebelumnya, penyaluran dana masih difokuskan untuk mendukung program pemerintah menjaga stabilitas keberlangsungan pasar minyak sawit di sektor energi.

we have held 43 trainings for smallholders and teachers of plantation vocational high schools, in addition to granting education scholarship for six (6) batches of Diploma 1 and Diploma 3 levels for children of smallholders. In preparing the smallholder business industrialization, we continue encouraging new innovations through research and development. We have performed eight (8) initiative researches and 32 researches through call for proposal.

Amidst the issue of low Indonesian palm oil acceptance in the global industry and the need to expand new market, we ceaselessly promote our palm oil in collaboration with technical ministries such as the Ministry of Trade, Ministry of Foreign Affairs, and the Palm Oil Association. The promotions were performed among others through trade missions, dissemination of information at exhibitions and seminars, advocacy against lawsuits at the world trade court, and holding fellowship program with the millennials.

Financial Aspect

In 2017, the total managed assets was concluded at Rp11.87 trillion. This was an increase by 105.72% as compared to in 2016 which was concluded at Rp5.77 trillion. The increase in managed assets was in line with the increase in the export levies at Rp14.28 trillion. It was an improvement by 22.16% from the previously Rp11.69 trillion in 2016.

The actual fund distribution expense for programs in 2017 was Rp10.62 trillion. The number was relatively stable when compared to the actual figure in the previous year at Rp10.94 trillion. Similar to the previous year, fund distribution was focused on supporting government's program to maintain the stability and continuity of palm oil market in energy sector.

Sebagai badan pengelola dana, mekanisme pengelolaan dana di tahun 2017 dilakukan melalui penempatan pada instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko rendah. Hal tersebut memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan yang tetap ingin memastikan ketersediaan dana pada waktu yang telah ditentukan. Di tahun 2017, total pendapatan dari hasil pengelolaan dana mencapai Rp512,95 Miliar atau dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 6,53% p.a.

Strategi Untuk Menjawab Tantangan Organisasi yang Profesional dan Transparan

Tahun 2017 merupakan pembuktian bagi kami untuk menjawab tantangan akan sebuah organisasi BLU yang lebih profesional dan transparan. Kami berkomitmen untuk mengubah organisasi menjadi lebih modern dengan penerapan teknologi informasi di semua unit layanan. Implementasi yang telah dikembangkan di sepanjang tahun 2017 meliputi penerapan *enterprise resource planning* (ERP), *e-billing* untuk layanan pungutan ekspor, dan e-office untuk *paper less-based information dispersion*. Ke depannya, kami akan terus meningkatkan layanan kami sehingga dapat menjangkau target pengguna layanan utama kami dengan mudah, cepat, dan tepat sasaran.

Sementara itu, guna menjadikan organisasi ini menjadi lebih transparan dalam kaitannya pengelolaan dana kelapa sawit, kami ikut serta mensukseskan program-program anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa kegiatan antara lain penyampaian Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penerapan pengendalian internal dan mutu yang baik menjadi unggulan kami di tahun 2017.

As the manager of fund, in 2017 OPPFMA applied the strategy of investing in low-risk instruments. This gesture was performed by considering the expectation of stakeholders who would like to ensure the availability of fund at a specified time. The total revenue from fund management was Rp512.95 billion in 2017, or 6.53% of investment return p.a.

Strategy to Answer Challenges for Professional and Transparent Organization

2017 was a year that entailed us to answer the challenges in presenting a more professional and transparent Public Service Agency. We are committed to reform into a more modern organization which implements information technology in all service units. Throughout 2017, we have implemented the enterprise resource planning (ERP), e-billing for export levy services, and e-office for paperless-based information dispersion. In the future, we will continue improving our services to reach out to our main service users in easier, faster, and more effective manners.

To improve transparency in CPO fund management, we are also participating in campaigns against corruption, collusion, and nepotism. Our outstanding activities in 2017 include the submission of State Officials Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK) and implementation of good internal and quality control.

Laporan Direksi

Message from the Board of Directors

Perkembangan Penerapan GCG

Dalam rangka memperkuat implementasi Tata Kelola Organisasi yang Baik (GCG), kami senantiasa melaksanakan perencanaan yang terukur dan tertuang dalam dokumen Pola Tata Kelola serta melakukan kegiatan evaluasi untuk menilai sejauh mana efektivitas penyelenggaraan GCG di lingkungan BLU BPDPKS serta hal-hal yang menjadi perhatian utama. Di sepanjang tahun 2017, BLU BPDPKS telah menunjukkan perkembangan implementasi GCG ke arah yang membanggakan dibandingkan dengan tahun 2016. Kami telah melakukan perbaikan di beberapa critical area berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perbaikan atas beberapa area penting dilakukan dengan meningkatkan kualitas kebijakan dan prosedur kerja, tingkat kepatuhan SDM terhadap prosedur kerja, serta pengawasan yang dilakukan secara berjenjang.

Development of GCG Implementation

In strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG), we constantly implement measured planning as contained in the Governance Pattern and perform evaluation to assess to which extent GCG is effectively implemented in OPPFMA, while paying attention to our main concerns. Compared to 2016, the implementation of GCG in 2017 has shown satisfactory improvements. We have improved several critical areas according to the result of performance evaluation 2016 set by the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance. These improvements were performed by among others enhancing the quality of policy and working procedure, boosting HR compliance with working procedure, and conducting tiered monitoring.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2017, telah terjadi perubahan dalam komposisi anggota Direksi BPDPKS seiring dengan bergabungnya Dono Boestami, Edi Wibowo, dan Tulus Budhianto ke dalam jajaran Direksi. Kehadiran sosok-sosok yang merupakan gabungan pemerintah dan swasta diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh jajaran Direksi dari berbagai bidang keilmuan.

Di sisi lain, kami juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bayu Krisnamurthi atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama.

Atas perubahan komposisi tersebut, maka susunan anggota Direksi BPDPKS hingga akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Change in Board of Directors Composition

The Board of Directors saw several compositional changes throughout 2017, with the arrival of Dono Boestami, Edi Wibowo, and Tulus Budhianto. A perfect combination from governmental and private sectors, these officials are expected to provide more diverse values to existing skills and experiences of the Board of Directors.

We also express our deepest gratitude to Bayu Krisnamurthi for the contributions during his tenure as the President Director.

With such a turnaround, the composition of the Board of Directors of OPPFMA as of the end of 2017 were as follows:

| Nama Name | Jabatan Position |
|-----------------------|--|
| Dono Boestami | Direktur Utama President Director |
| Catur Ariyanto Widodo | Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko Director of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management |
| Agustinus Antonius | Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Fund Planning and Management |
| Edi Wibowo | Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Distribution |
| Tulus Budhianto | Direktur Kemitraan Director of Partnership |
| Herdrajat Natawidjaja | Direktur Penghimpunan Dana Director of Fundraising |

Apresiasi

Dengan berakhirnya Laporan Tahunan ini, kami selaku jajaran Direksi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komite Pengarah selaku pemberi kebijakan atas operasional pelaksanaan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, atas kepercayaan, arahan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas kinerja kami baik di tahun anggaran 2017 maupun untuk tahun-tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dewan Pengawas yang secara efektif melakukan check and balances melalui pengawasan secara berkala serta memberikan saran guna terwujudnya organisasi BLU BPDPKS yang profesional dan transparan.

Acknowledgment

To conclude this Annual Report, we, the Board of Directors, send our warmest regard to the Steering Committee for the policies made throughout our duties in managing the CPO funds, and particularly for the trust, directives, and inputs that improve our performances, both in the fiscal year 2017 and in more years to come. We would like also to thank to the Supervisory Board for the effective check and balance through periodical supervision and the provision of inputs to realize a professional and transparent organization at OPPFMA.

Jakarta, ... 2017 Jakarta, ... 2017

Atas Nama Direksi On behalf of the Board of Directors

**Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Oil Palm Plantation Fund Management Agency**



Dono Boestami

Direktur Utama President Director

Profil Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Board of Director Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Dono Boestami

Direktur Utama President Director

**Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya,
Jawa Timur, 13 Januari 1963 (54 tahun),
berdomisili di Jakarta Menjabat sebagai
Direktur Utama BPDPKS sejak Februari 2017.**
An Indonesian citizen, born in Surabaya, East Java on
January 13, 1963 (54 years old), domiciled at Jakarta.
He has been serving as OPPFMA President Director since
February 2017.

Meraih gelar Bachelor of Science Civil Engineering (1985) dan Master of Science Project & Construction Management dari Golden Gate University, Amerika Serikat (1989).

Beliau memiliki banyak pengalaman di dunia finansial dan pasar modal. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat antara lain Direktur Investment Banking pada PT Danareksa (Persero) (2001); Direktur Utama PT Citigroup Securities Indonesia (2004); Direktur PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006); Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011), dan Direktur Keuangan PT Atlas Resources Tbk (2012). Selain itu, Beliau juga sempat mengenyam pengalaman sebagai anggota Komite Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) (2008-2011). Jabatan terakhir adalah Direktur PT MRT (2013 - 2017), sebelum diangkat sebagai Direktur Utama BPDPKS.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor of Science in Civil Engineering (1985) in Master of Science Project & Construction Management from the Golden Gate University, USA (1989).

He is experienced in finance and capital market industries. He has served a number of key positions, such as Director of Investment Banking at PT Danareksa (Persero) (2001); President Director of PT Citigroup Securities Indonesia (2004); Director at PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006); Director of Finance at PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011), and Director of Finance at PT Atlas Resources Tbk (2012). He was also a member of Listing Committee of the Indonesia Stock Exchange (BEI) (2008-2011). Prior to being appointed as OPPFMA President Director, he served as a Director at PT MRT (2013-2017).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.





Agustinus Antonius

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana
Director of Fund Planning and Management

**Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang,
29 Agustus 1967 (50 tahun), berdomisili di Jakarta.
Menjabat sebagai Direktur Kemitraan BPDPKS
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
754/KMK.05/ 2015 Tanggal 13 Juli 2015.**

**Citizen of Indonesia, born in Palembang, August 29, 1967
(50 years old), domiciled at Jakarta. Serving as OPPFMA
Director of Partnership pursuant to Minister of Finance
Decree Number 754/KMK.05/2015 dated July 13, 2015.**

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian (Bidang Konsentrasi Ilmu Tanah), Universitas Jambi, (1990) dan meraih gelar Magister Manajemen (Bidang konsentrasi Keuangan dan Agribisnis), Universitas Gadjah Mada (1992).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Credit Department Head - Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (dahulu Bank Sumitomo Niaga), Risk Management - Kepala Divisi - Senior Manager - Bank Commonwealth (1997 - 1999), Unit Risk Management - Credit Officer - Senior Manager - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999 - 2000), Unit Risk Management - Senior Credit Officer - Assistant Vice President - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000 - 2002), Staff Senior - Vice President - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Mei 2002 - Oktober 2003), Kepala Divisi - Vice President - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Oktober 2003 - Februari 2004). Berpengalaman dalam bidang perkecambahan sawit sebagai direksi di berbagai perusahaan, dan terakhir sebagai Direktur Utama PT Teguhkarsa Wanaestari (Perkebunan Kelapa Sawit), (2013 - Juli 2014).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree from the Faculty of Agriculture (Majoring in Soil Science), Jambi University,(1990), and Master of Management (Majoring in Finance and Agribusiness) Gadjah Mada University, (1992).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Credit Department Head - Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (previously Bank Sumitomo Niaga), Risk Management - Division Head - Senior Manager - Commonwealth Bank, (1997-1999), Risk Management Unit - Credit Officer - Senior Manager -Indonesian Bank Restructuring Agency, (1999-2000), Risk Management Unit - Senior Credit Officer - Assistant Vice President - Indonesian Bank Restructuring Agency,(2000-2002), Senior Staff - Vice President - Indonesian Bank Restructuring Agency, (May 2002-October 2003), Division Head - Vice President - Indonesian Bank Restructuring Agency, (October 2003-February 2004). He has experiences in palm oil industry as a member of the Board of Directors in several companies, lastly as President Director of PT Teguhkarsa Wanaestari (Palm Oil Plantation), (2013-July 2014).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.



Profil Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Board of Director Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Catur Ariyanto Widodo

Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Director of Finance, General, Compliance and Risk Management

**Warga Negara Indonesia, lahir di Ungaran, Jawa Tengah, 22 Februari 1971 (46 tahun), berdomisili di Jakarta
Menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK.01/UP.11/2016
Tanggal 20 Mei 2016.**

An Indonesian citizen, born in Ungaran, Central Java on February 22, 1971 (46 years old), domiciled at Jakarta. Serving as Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate of OPPFMA based on Decree of the Minister of Finance Number 372/KMK.01/UP.11/2016 dated May 20, 2016.

50
Meraih gelar Diploma Tiga di Sekolah Tinggi Akuntansi (STAN) (1993), Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1999). Pada tahun 2005 menyelesaikan Program Master of International and Development Economies pada The Australian National University (ANU), Australia.

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting di Ditjen Perbendaharaan, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Instansi III, Kepala Seksi Analisis Laporan Keuangan, Kabid Pembinaan Perbendaharaan, Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU, Kasubdit PPK BLU II, Kabag Umum Kanwil DJPB Prov. Sulbar dan jabatan terakhir sebagai Kakanwil DJPB Prov. Sulbar sebelum diangkat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Diploma 3 Degree from the State College of Accountancy [STAN] (1993), Bachelor of Economy from the University of Indonesia (1999). In 2015 he graduated from the Master of International and Development Economies Program at The Australian National University (ANU), Australia.

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions at the Directorate General of Treasury, i.e. Head of Institutional Accounting Development Section III, Head of Financial Reporting Analysis Section, Head of Treasury Development Department, Head of Public Service Agency Performance Development Sub-Directorate, Head of Commitment-Making Official Public Service Agency II Sub-Directorate, Head of General Affairs Development of Directorate General of Treasury Regional Office West Sulawesi, and lastly serving as Head of Directorate General of Treasury Regional Office West Sulawesi prior to his appointment as the Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate of OPPFMA.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.





Herdrajat Natawidjaja

Direktur Penghimpunan Dana
Director of Fund Raising

**Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung,
28 Februari 1957 (60 tahun), berdomisili di Tangerang.
Menjabat sebagai Direktur Penghimpunan Dana
BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 725/KMK.05/2016 Tanggal 30 September 2016.
Citizen of Indonesia, born in Bandung, February 28, 1957
(60 years old), domiciled at Tangerang. Serving as the OPPFMA
Director of Fund Raising pursuant to Minister of Finance Decree
Number 725/KMK.05/2016 dated September 30, 2016.**

Meraih gelar Sarjana Proteksi Tanaman Universitas Mulawarman Samarinda (1982), gelar S2 Jurusan Nematology pada fakultas Science, University of Gent Belgium, Belgia (1994) dan Philosophy of Doctor in Plant Pathology (Major), Entomology and Development of Communication (Minor) University Philippines Los Banos Philippina (2003), serta mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (APRA) 45 Lemhannas Republik Indonesia (2010).

Selama kurun waktu 2004 sampai dengan tahun 2015 menjadi Direktur Perlindungan Tanaman Perkebunan, Direktur Pembinaan Usaha dan Pascapanen serta Direktur Tanaman Tahunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Kepala Sekretariat Komisi ISPO

He earned Bachelor's Degree in Plant Protection from the University of Mulawarman Samarinda (1982), Master's Degree in Nematology from the University of Gent Belgium (1994), and Doctorate Degree from Plant Pathology (Major) Entomology, Dev. Communication (Minor) from the University of the Philippines Los Banos (2003).

From 2007 until currently, he has also been receiving assignments abroad, either as a member, chairman, or speaker in bilateral cooperation forum in various countries. Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as External Examiner for Doctorate Candidate Commission at the Postgraduate School of Bogor Institute of Agriculture, since 2007, Chairman of ISPO Assessment Team and Secretary to ISPO Committee.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.



Profil Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Board of Director Profile Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Edi Wibowo

Direktur Penyaluran Dana
Director of Fund Disbursement

**Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya,
Jawa Timur, 13 Januari 1963 (54 tahun),
berdomisili di Jakarta Menjabat sebagai Direktur
Penyaluran Dana BPDPKS sejak Februari 2017.
An Indonesian citizen, domiciled at Jakarta, serving
as the Director of Disbursement of OPPFMA since
February 2017.**

Meraih gelar Sarjana Mekanisasi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1991), mengikuti Profesional Development on Energy – di Chicago- USA 1994 dan 1996, meraih gelar Master Teknik pada Jurusan Teknik Mesin - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (2002).

Sebelum menjadi Direktur Penyaluran Dana di BPDPKS mulai Februari 2017, Edi Wibowo adalah seorang peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas "Lemigas" sejak tahun 1992, dan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi di Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional sejak 2009. Sejak 2011 ia menjadi Kepala SubDirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi-DJ EBTKE KESDM, Kepala SubDirektorat Pengusahaan dan Pengawasan Bioenergi DJ EBTKE KESDM sejak Juni 2015 dan Kepala SubDirektorat Program Bioenergi DJ EBTKE KESDM sejak Juli 2016.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor of Agricultural Mechanization from Bogor Institute of Agriculture (1991), attended the Professional Development on Energy in Chicago, USA (1994 and 1996), and earned Master of Engineering in Mechanical Engineering from the Faculty of Engineering, University of Indonesia (2002).

Prior to serving as the Director of Fund Disbursement since February 2017, he was a researcher at the Center for Oil and Gas Technology Research and Development "Lemigas", and Head of Energy Utilization Policy Facilitation Sub-Department at the Secretariat General of the National Energy Board since 2009. In 2011 he became the Head of Subdirectorate of Bioenergy Engineering and Environment of the Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources, Head of Subdirectorate of Bioenergy Exploitation and Monitoring of the Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources, and the Head of Subdirectorate of Bioenergy Program of the Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.





Tulus Budhianto

Direktur Kemitraan
Director of Partnership

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 13 Januari 1963 (54 tahun), berdomisili di Jakarta Menjabat sebagai Direktur Kemitraan BPPDKS sejak Februari 2017.
An Indonesian citizen, domiciled at Jakarta, serving as the Director of Partnership of OPPFMA since February 2017.

Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985, gelar Masters of Arts di bidang International Development Studies, dari St. Mary's University, Halifax, Canada tahun 1998.

Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Perindustrian tahun 1987 sampai dengan tahun 2000, yang kemudian digabung sebagai Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Sekembali dari penugasan sebagai Atase Perdagangan pada periode tahun 2007-2010; selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut menjabat sebagai Sekretaris Ditjen. Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan, dan Kepala Biro Perencanaan-Kementerian Perdagangan.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's degree in Agricultural Technology from Gadjah Mada University Yogyakarta in 1985, Master of Arts in International Development Studies, from St. Mary's University, Halifax, Canada in 1998.

He began his career as a Civil Servant at the Department of Industry from 1987 to 2000, which then merged into the Ministry of Industry and Trade. Upon his return from the assignment as a Trade Attache for 2007-2010 period, throughout 2010-2016 he consecutively served as a Secretary to Directorate General of International Trade Cooperation, Head of the Center for Trade Education and Training, Head of the Center for Trade Policy Harmonization, and Head of Planning Bureau of the Ministry of Trade.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.



Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017

Accountability for Annual Report 2017

Dewan Pengawas Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertanggung jawab atas Laporan Tahunan ini, berikut informasi keuangan dan informasi lain yang terkait, yang telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing dibawah ini.

The Supervisory Board of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency hold the accountability for this Annual Report, including the financial statements and other relevant information, which have been approved by all members of the Supervisory Board by affixing their signatures below.

Jakarta, Mei 2017 Jakarta, May , 2017

Dewan Pengawas Supervisory Board



Rusman Heriawan
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board



Lukita Dinarsyah Tuwo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board



Panggah Susanto
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Suahasil Nazara
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



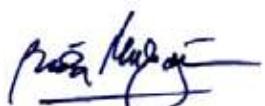
Gamal Nasir
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Arlinda
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Loso Judijanto
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Rida Mulyana
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Joko Supriyono
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertanggung jawab atas Laporan Tahunan ini, berikut informasi keuangan dan informasi lain yang terkait, yang telah disetujui oleh seluruh Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing dibawah ini.

The Board of Directors of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency hold the accountability for this Annual Report, including the financial statements and other relevant information, which have been approved by all members of the Board of Directors by affixing their signatures below.

Jakarta, Mei 2017 Jakarta, May , 2017

Direksi Board of Directors



Dono Boestami
Direktur Utama
President Director



Catur Ariyanto Widodo
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan
dan Manajemen Risiko
Director of Finance, General, Compliance
and Risk Management



Edi Wibowo
Direktur Penyaluran Dana
Director of Fund Disbursement



Agustinus Antonius
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana
Director of Planning and Fund Management



Tulus Budhianto
Direktur Kemitraan
Director of Partnership



Herdajat Natawidjaja
Direktur Penghimpunan Dana
Director of Fund Raising

03



Profil BPDPKS OPPFMA Profile





Profil BPDPKS

OPPFMA Profile

| | |
|--|--|
| Nama Perusahaan Company Name | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation Fund Management Agency |
| Nama Panggilan Nickname | BPDPKS OPPFMA |
| Kegiatan Usaha Business Activities | Menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran. Collecting, administering, managing, storing, and distributing funds with the aim to promote sustainable oil palm plantation development. The fund raised is sourced from Palm Oil Business Owners, Financing Institution Funds, Community Funds, and other legal Funds. The collected funds cover restitution of the export of oil palm plantation commodity and/or its derivatives and contributions. |
| Tanggal Pendirian Date of Establishment | 10 Juni 2015 June 10, 2015 |
| Kepemilikan Ownership | Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia |
| Jumlah Pegawai Number of Employees | 92 orang 92 staff |
| Alamat Kantor Office Address | Graha Mandiri Lt.5 Jl. Imam Bonjol No.61, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 |
| Info Kontak Contact Info | Telp: (021) 123-4567890, (021) 123-0987654 Email: info@bpdp.or.id Jam Operasional Operating Hour: Senin – Jumat 07.30 – 17.00 WIB Monday - Friday at 09:00-18:00 Western Indonesia Time |
| Website | www.bpdp.or.id |
| Media Sosial Social Media | www.twitter.com/bpdp_sawit www.instagram.com/bpdpkelapasawit www.facebook.com/bpdpsawit BLU BPDPsawit |

Riwayat Singkat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) At A Glance



59

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit [BPDPKS] merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.

Pada tanggal 10 Juni 2015, BPDPKS ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

Landasan hukum pendirian BPDPKS adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perkebunan;

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) is a work unit under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia formed as a Public Service Agency which collects, administers, manages, reserves, and distributes CPO fund.

On June 10, 2015, OPPFMA was established as a governmental institution which fully applies the Public Service Agency financial pattern pursuant to Decree of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015 concerning the Determination of OPPFMA at the Ministry of Finance as a Governmental Institution which Fully Applies the Public Service Agency Financial Management.

The legal bases for OPPFMA establishment are as follows:

1. Law Number 17 of 2003 dated April 05, 2003 concerning State Finance;
2. Law Number 1 of 2004 dated January 14, 2004 concerning State Treasury;
3. Law Number 39 of 2014 dated October 17, 2014 concerning Plantations;

Riwayat Singkat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) At A Glance

- 60
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan ini telah dirubah dengan PP 74 tahun 2012;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak tertagih;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
 11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pendapatan BPDPKS akan dicatat dalam APBN melalui prosedur pengesahan pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian pendapatan BPDPKS diakui sebagai pendapatan negara pada saat pengesahan pendapatan tersebut. Sementara untuk pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional BPDPKS akan masuk ke realisasi APBN pada saat yang sama dengan pengesahan pendapatan. BPDPKS hanya melaporkan pendapatan tersebut ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan.

4. Government Regulation Number 23 of 2005 dated June 13, 2005 concerning Financial Management of Public Service Agencies. This Regulation has been amended by the Government Regulation Number 74 of 2012;
5. Government Regulation Number 38 of 2008 dated May 19, 2008 concerning Amendment to Government Regulation Number 6 of 2006 dated March 14, 2006 concerning the Management of State/Regional Properties;
6. Government Regulation Number 24 of 2015 dated May 25, 2015 concerning Collection of Plantation Funds;
7. Presidential Regulation Number 61 of 2015 dated May 25, 2015 concerning Collection and Utilization of Crude Palm Oil Funds;
8. Minister of Finance Regulation Number 76/PMK.05/2008 dated May 23, 2008 concerning Accounting and Financial Reporting Guidelines for Public Service Agencies;
9. Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.06/2014 dated April 24, 2014 concerning Accounts Receivable Quality and Formation of Allowance for Doubtful Accounts for the State Ministries/Agencies;
10. Minister of Finance Regulation Number 113/PMK.01/2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil,
11. Minister of Energy and Mineral Resource Regulation Number 29 of 2015 dated September 11, 2015 concerning the Biofuel Provision and Utilization of Biodiesel for Financing by the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil;
12. Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation Number 61 of 2015 concerning Collection and Utilization of Crude Palm Oil Funds.

IEFCPO income shall be recorded in the State Budget (APBN) through approval procedure at the end of the reporting period. Therefore, IEFCPO income is recognized as state income during the approval of such income. Meanwhile, income used for IEFCPO operating expense shall be posted into State Budget realization at the same time with the income approval. IEFCPO shall only report the income to the Directorate General of Treasury and the Financial Planning Bureau of the Ministry of Finance.



Jejak Langkah BPDPKS

Milestone OPPFMA

2014

Ketergantungan terhadap
BBM impor membuat neraca
perdagangan migas defisit
Dependency on imported fuel
creates a deficit in the balance
of trade of the oil and gas.

JANUARI
JANUARY
2015

- Harga CPO menurun secara signifikan akibat kemerosotan harga minyak mentah dan kelebihan pasokan CPO di pasar domestik.
- Petani sawit terkena dampak penurunan harga CPO.
- Program biodiesel tidak berjalan.
- CPO price declines significantly due to a steep decline in crude oil price and CPO oversupplies in domestic market.
- Palm oil farmers are affected by the CPO price decline.
- The biodiesel program fails to execute.

FEBRUARI
FEBRUARY
2015

62

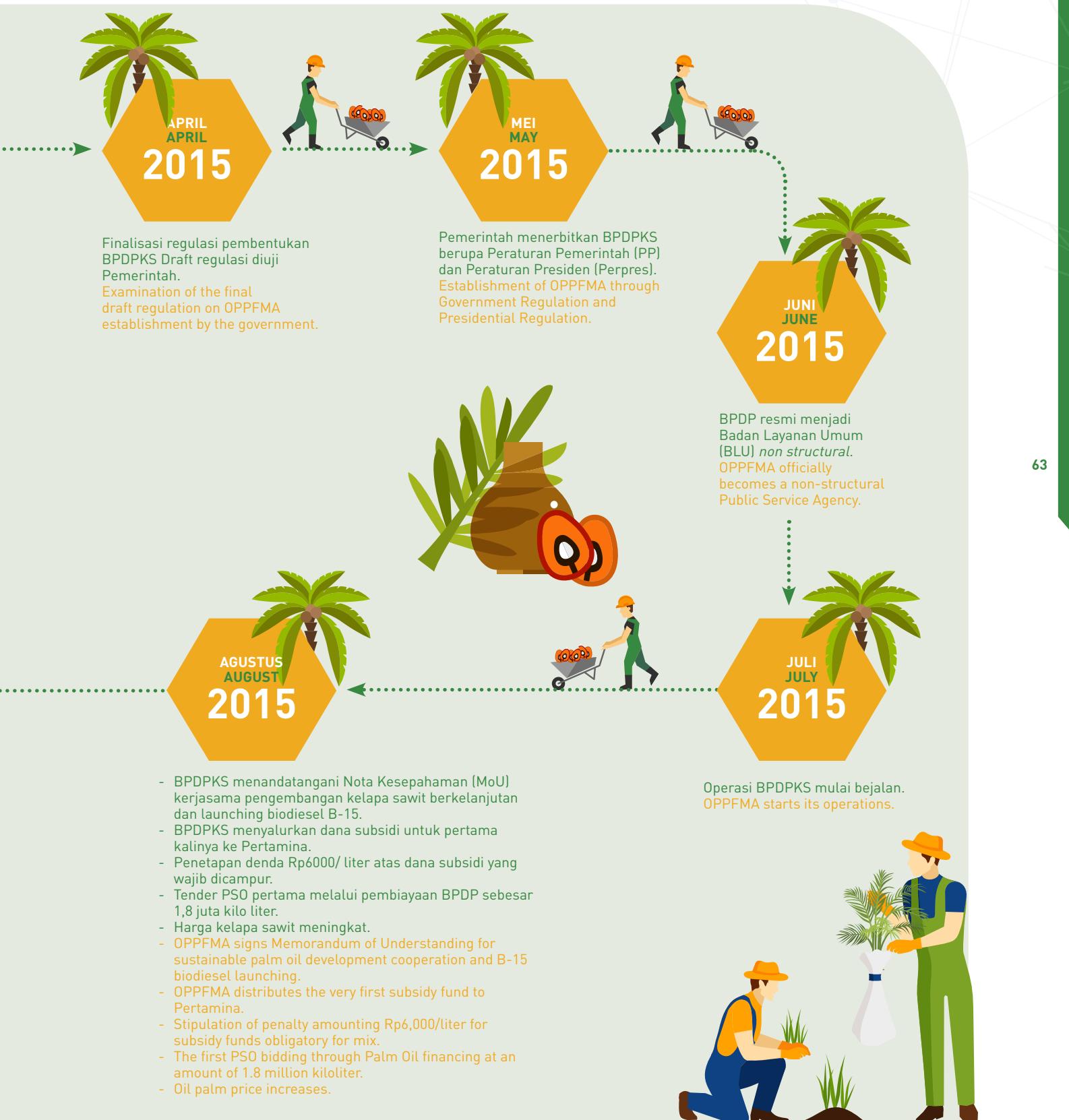
Semua pemangku kepentingan berupaya menjaga stabilitas harga CPO. Kemenko Perekonomian memanggil seluruh pemangku kepentingan di industri Sawit (Kementerian Keuangan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian) dan pelaku industri (pengusaha, perkebunan, biodiesel, otomotif dan petani)
All stakeholders strive to maintain the stability of CPO price.
The Coordinating Ministry for Economic Affairs gathers all palm oil stakeholders (the Ministries of Finance, Energy and Mineral Resources, Trade, Industry, and Agriculture) and business owners (entrepreneurs, estates, biodiesel, automotive, and farmers).

2015-2018

Pemerintah berupaya mengurangi impor bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM) melalui penetapan mandatory biodiesel pertama (B-1 hingga B-15)

The Government strives to reduce the import of fossil fuels by stipulating the first mandatory biodiesel (B-1 through B-15).





Visi Misi dan Tujuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)
Vision, Mission, and Objectives

Visi Vision

Menjadi pengelola dana yang berperan
dalam pengembangan kelapa sawit
berkelanjutan sebagai salah satu
komoditas strategis Indonesia

To become the manager of funds in the sustainable
development of palm oil as one of Indonesia's
strategic commodities.



Misi Mission

Mengelola dan menumbuhkembangkan
dana pengembangan dana kelapa sawit
secara profesional, transparan, akuntabel,
dan berkelanjutan untuk menjamin
keberlangsungan program kelapa sawit
berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan
dan stabilitas komoditas strategis.

To manage and foster the palm oil development
funds in professional, transparent, accountable,
and sustainable manners to ensure the course
of palm oil sustainability program as an effort to
improve and stabilize strategic commodities.

Tujuan BPDPKS

OPPFMA Objectives

Melakukan pengelolaan DPKS untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional dunia
To manage CPO Fund and ensure the continuity of the sustainable palm oil program as a global strategic commodity.

Meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dunia

To improve and maintain the stability of palm oil business income by optimizing price amid the fluctuating global palm oil commodity price.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit
To enhance the palm oil human resource capacity.

Meningkatkan optimalisasi penggunaan hasil perkebunan kelapa sawit untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor

To optimize the utilization of palm oil yields for industrial raw materials, renewable energy, and export.

Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit
To encourage developments in palm oil downstream industry.



Tujuan BPDPKS OPPFMA Objectives

Maksud pembentukan BPDPKS menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran. Selanjutnya dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

- a. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme kemandirian dan berdaya saing serta untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.
- b. Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dimaksudkan untuk (1) pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit; (2) kebutuhan pangan; (3) hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit; (5) penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.
- c. Promosi Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk meningkatkan (1) citra nilai produk Kelapa Sawit (2) informasi pasar kelapa sawit, (3) memperluas pasar kelapa sawit, (4) meningkatkan investasi perkebunan kelapa sawit dan atau (5) menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan kelapa sawit, ;
- d. Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit serta menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal ; dan
- e. Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Sarana dan prasarana terdiri atas benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar dan verifikasi atau penelusuran teknis.

OPPFMA was established to collect, administer, manage, reserve, and distribute funds with the aim to promote sustainable oil palm estate development. The funds raised are sourced from Palm Oil Business Owners, Financing Institution Funds, Community Funds, and other legal Funds. The collected funds cover restitution of the export of oil palm estate commodity and/or its derivatives and contributions. Further, the collected funds are used for the purposes of:

- a. Palm Oil Human Resource Development is performed to increase their knowledge, skills, professionalism, independence, and competitiveness while enhancing their technical, managerial, and entrepreneurial expertise;
- b. Oil Palm Estate Research and Development is conducted in order to (1) meet oil palm estate produce; (2) food requirements; (3) oil palm estate industrial downstreaming; and (4) biofuel-biodiesel provision and utilization;
- c. Oil Palm Estate promotion is intended to increase (1) Palm Oil products image, (2) information on palm oil market, (3) palm oil market expansion, (4) investment in palm oil estates, and/or (5) development of palm oil estate commodity marketing center;
- d. Oil Palm Estate Replanting is aimed to improve the oil palm estate productivity and maintain the optimal utilization of oil palm estate; and
- e. Oil Palm Estate Facilities and Infrastructures are aimed at improving oil palm estate's production, productivity, and quality. The facilities and infrastructure comprise seedlings; fertilizers; pesticides; post-harvesting and yield processing equipment; plantation road and access road to public road and/or port; means of transportation; agricultural machineries; market infrastructure construction; and technical verification or tracing.

Tugas, Fungsi, dan Peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)

Duties, Function and Roles



67

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas BPDPKS adalah mengumpulkan pungutan dan iuran dari Kelapa sawit atau turunannya dan menyalurkannya sesuai fungsi - fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan DPKS untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit;
- c. Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit;
- d. Meningkatkan optimasi penggunaan hasil perkebunan kelapa sawit untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
- e. Meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dunia.

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil, OPPFMA assumes the duties to collect duties and contributions from palm oil or its derivatives and distribute the fund according to the following functions:

- a. To manage CPO Fund and ensure the continuity of the sustainable palm oil program as a national strategic commodity;
- b. To enhance the palm oil human resource capacity;
- c. To encourage developments in palm oil downstream industry;
- d. To optimize the utilization of palm oil yields for industrial raw materials, renewable energy, and export; and
- e. To improve and maintain the stability of palm oil business income by optimizing the price amid the fluctuating global palm oil commodity price.

Budaya Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) Work Culture

BPDPKS memiliki nilai-nilai inti yang menjadi budaya kerjanya yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu:

OPPFMA adheres to the core work values that are aligned with the values of the Ministry of Finance, in particular:



Integritas Integrity

BPDPKS memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dengan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. OPPFMA commits to uphold the integrity in assuming its duties by thinking, speaking, behaving, and acting properly and correctly while adhering to the code of conduct and moral principles.



Profesionalisme Professionalism

BPDPKS memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dengan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. OPPFMA constantly strives to thoroughly and accurately work with the best competence with full responsibility and high commitment.



Sinergi Synergy

BPDPKS memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dengan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. OPPFMA continues to develop and ensure productive internal work relations and harmonious partnership with the stakeholders.



Pelayanan Service

BPDPKS akan senantiasa berupaya memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan, yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. OPPFMA constantly strives to provide satisfactory services to stakeholders, wholeheartedly, in transparent, fast, accurate, and secure manners.



Kesempurnaan Perfection

BPDPKS senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk memberikan dan menjadi yang terbaik. OPPFMA strives to constantly improve in all aspects to provide and be the best.

Makna Logo Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Meaning of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) Logo

Logo itu merupakan paduan dari huruf B (**HIJAU** dan **MERAH**), P (**ORANYE**), D (**COKLAT**) dan P (**ORANYE**) = **BPDP**.
The logo is a combination of letters B (**GREEN** and **RED**), P (**ORANGE**), D (**BROWN**) and P (**ORANGE**) = **BPDP**.



69

Masing-masing warna mempunyai makna yaitu:

Each color has different meaning:



Warna **HIJAU** : Kelestarian, *Sustainability*, Ramah Lingkungan
GREEN: Preservation, Sustainability, Environmentally-friendly



Warna **MERAH** : Energi, Pemberdaya / *Enabler*
RED: Energy, Enabler



Warna **ORANYE** : Bisnis, Profesionalisme
ORANGE: Business, Professionalism



Warna **COKLAT**: Lahan, Rakyat, Petani
BROWN: Land, Community, Farmers

Semua berada didasar / latar belakang warna putih = transparansi, akuntabilitas

Tulisan sawit = dana dan pemberdayaan dari dan untuk sawit

All colors are presented on top of a white background which signifies transparency and accountability.

The word "sawit" signifies the fund and empowerment from and for palm oil (sawit).

Struktur Organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) Organization Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015, BPDPKS berada di bawah koordinasi Menteri Perekonomian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, struktur organisasi BPDPKS terdiri dari:

1. Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
3. Direktorat Penghimpunan Dana;
4. Direktorat Penyaluran Dana;
5. Direktorat Kemitraan;
6. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPDPKS serta untuk mencapai visi dan misinya, BPDPKS telah melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan dan uraian tugas Kepala Divisi pada BPDPKS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direkstur Utama BPDPKS Nomor KEP-66/DPKS/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penyesuaian Struktur Jabatan dan Uraian Tugas Kepala Divisi BPDPKS.

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015, OPPFMA is under and answerable to the Minister of Finance through the Directorate General of Treasury. According to the Regulation of the Minister of Finance, OPPFMA organizational structure consists of:

1. Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management;
2. Directorate of Fund Planning and Management;
3. Directorate of Fund Collection;
4. Directorate of Fund Distribution;
5. Directorate of Partnership;
6. Internal Audit Unit; and
7. Functional Position Groups.

To improve the effectiveness in the implementation of its core duties and functions while achieving the vision and mission, OPPFMA has made adjustments to the nomenclature and description of positions and duties of Division Heads as stipulated by the Decree of OPPFMA President Director Number KEP-66/DPKS/2016 dated December 26, 2016 concerning the Adjustment to the Positional Structure and Job Description of OPPFMA Division Heads.

Komite Pengarah Steering Committee

| | |
|------------------------|--|
| Ketua Chairman | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Minister for Economic Affairs |
| Anggota Members | Menteri Pertanian Minister of Agriculture |
| | Menteri Keuangan Minister of Finance |
| | Menteri Perindustrian Minister of Industry |
| | Menteri Perdagangan Minister of Trade |
| | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Minister of Energy and Mineral Resources |

Dewan Pengawas Supervisory Board

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Ketua Chair | Rusman Heriawan |
| Anggota Members | - Lukita Dinarsyah Tuwo |
| | - Suahasil Nazara |
| | - Arlinda |
| | - Rida Mulyana |
| | - Panggah Susanto |
| | - Gamal Nasir |
| | - Loso Judjianto |
| | - Joko Supriyono |

Adapun bagan organisasi BPDPKS adalah sebagai berikut:

The following is the chart of OPPFMA organizational structure:



Pejabat Satu Level di Bawah Direksi

Profile of Officials One Level under the Board of Directors



Harry Kuncoro

Kepala Divisi Anggaran
dan Akuntansi
Head of Budget and
Accounting Division



Benny Septialdi

Kepala Divisi Umum dan
Sumber Daya Manusia
Head of General Affairs and
Human Resources Division



Sylvia Daniarti

Kepala Divisi Kepatuhan
dan Manajemen Risiko
Head of Compliance and
Risk Management Division



Muhammad Ferian

Kepala Divisi
Pengembangan Biodesel
Head of Biodiesel Development
Division



**Kurniadi
Perdana Putra**

Kepala Divisi Replanting, Reforestation
dan Promosi Perkebunan
Head of Replanting, Reforestation, and
Plantation Promotion Division



Arfie Thahar

Kepala Divisi Pendidikan SDM,
Litbang, dan Pengembangan Sarana
dan Prasarana
Head of HR Education, Research
and Development, and Facility and
Infrastructure Development Division



Wawan Hardiwinata

Kepala Divisi Pemungutan Biaya
dan Iuran CPO
Head of CPO Duties and
Contributions Division



Deri Ridhanif

Kepala Divisi Biaya dan
Iuran Produk Turunan
Head of Derivative Product Duties
and Contributions Division



Prayudha Moeljo

Kepala Divisi Kepatuhan dan
Manajemen Risiko
Head of Compliance and Risk
Management Division



Fajar Wahyudi

Kepala Divisi Unit Penyaluran
Head of Distribution Unit Division



Vacant

Kepala Divisi Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi
Head of Small and Medium
Entrepreneurs and Cooperatives
Division



Kus Emy Puspita Dewi

Plt. Kepala Divisi Perusahaan
Acting Head of Corporate Division



Kus Emy Puspita Dewi

Kepala Divisi Lembaga
Kemasyarakatan & Civil Society
Head of Community Institutions and
Civil Society Division



Vacant

Kepala Satuan Pengawasan Internal
Head of Internal Control Unit

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Dalam menjalankan usaha yang terus berkembang, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aset utama yang perlu dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan metode yang efektif. BPDPKS menerapkan metode pendekatan Human Capital Management dalam melakukan pengelolaan SDM, metode ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang dimiliki BPDPKS sehingga mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi tuntutan pertumbuhan perusahaan.

Struktur Pengelola SDM

HR Management Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015, pengelolaan fungsi SDM BPDPKS dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia & Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

In running the continuously developing business, Human Resources are the key assets which require sustainable management and development through effective methods. OPPFMA applies the Human Capital Management approach in managing Human Resources. The method puts emphasis on the improvement of existing human resources to develop their capacities in facing the Company's growing demands.

Pursuant to the Minister of Finance Regulation Number 113/PMK.05/2015, the management of OPPFMA HR function is conducted by HR & General Affairs Division which is directly responsible to the Directorate of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management.

74

Struktur Pengelola SDM BPDPKS tahun 2017

OPPFMA HR Management Structure in 2017



Komposisi Pegawai

Employee Composition

Jumlah pegawai BPDPKS pada tahun 2017 adalah 93 pegawai, meningkat 9,41% dari tahun 2016 yang berjumlah 85 pegawai. Peningkatan jumlah pegawai ini sejalan dengan rencana pengembangan BPDPKS yang menekankan pada peningkatan produktivitas. BPDPKS akan meningkatkan jumlah pegawai seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan. Distribusi pegawai berdasarkan status, level jabatan,jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia adalah sebagai berikut:

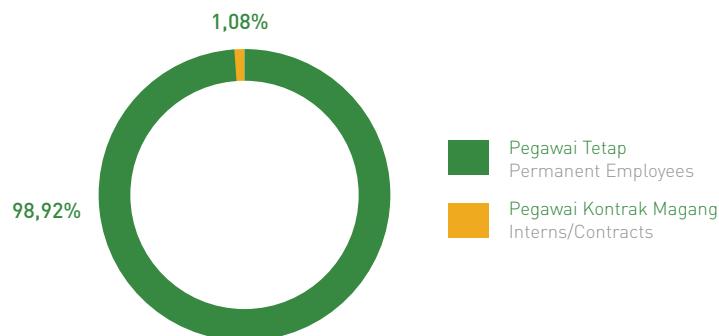
a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

| Status | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Pegawai Tetap Permanent Employees | 92 | 85 | 47 |
| Pegawai Kontrak Magang Interns/Contracts | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 93 | 85 | 47 |

75

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017
Employee Composition by Employment Status Years 2017



b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

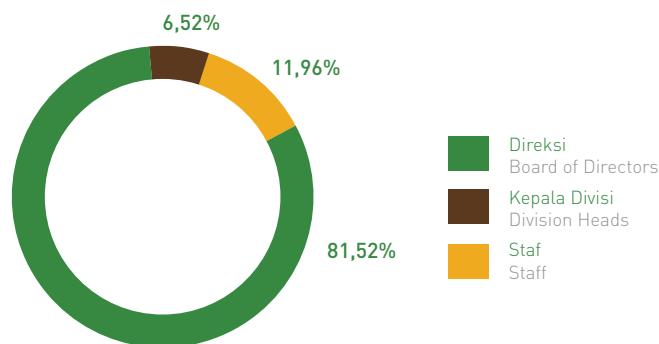
Employee Composition by Position

| Status | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Direksi Board of Directors | 6 | 4 | 47 |
| Kepala Divisi Division Heads | 11 | 13 | - |
| Staf Staff | 75 | 68 | - |
| Jumlah Total | 92 | 85 | 47 |

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2017
Chart of Employee by Position Years 2017

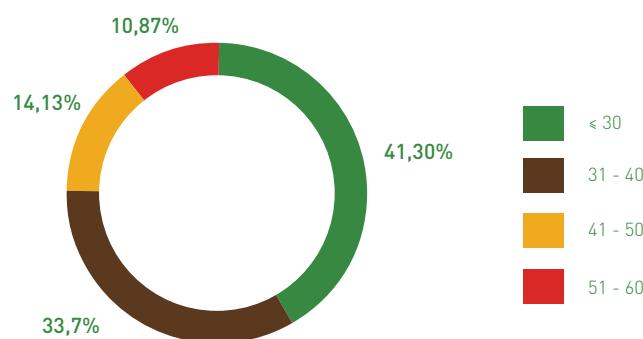


c. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

| Usia | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------|------|------|------|
| ≤ 30 | 38 | 29 | 16 |
| 31 - 40 | 31 | 31 | 12 |
| 41 - 50 | 13 | 14 | 13 |
| 51 - 60 | 10 | 11 | 6 |
| Jumlah Total | 92 | 85 | 47 |

Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2017
Chart of Employee by Age Years 2017

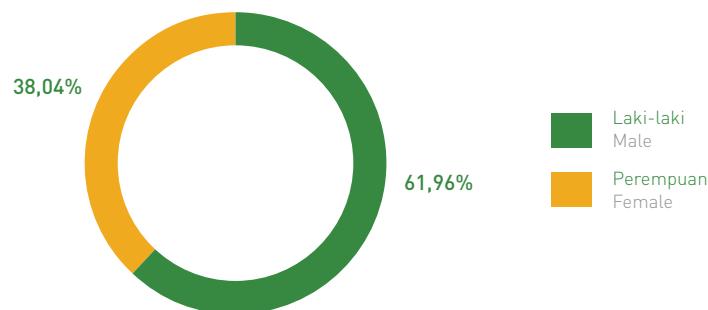


d. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

| Jenis Kelamin | Gender | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------|--------|------|------|------|
| Laki-laki | Male | 57 | 54 | 47 |
| Perempuan | Female | 35 | 31 | 0 |
| Jumlah | Total | 92 | 85 | 47 |

Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017
Chart of Employee by Gender Years 2017

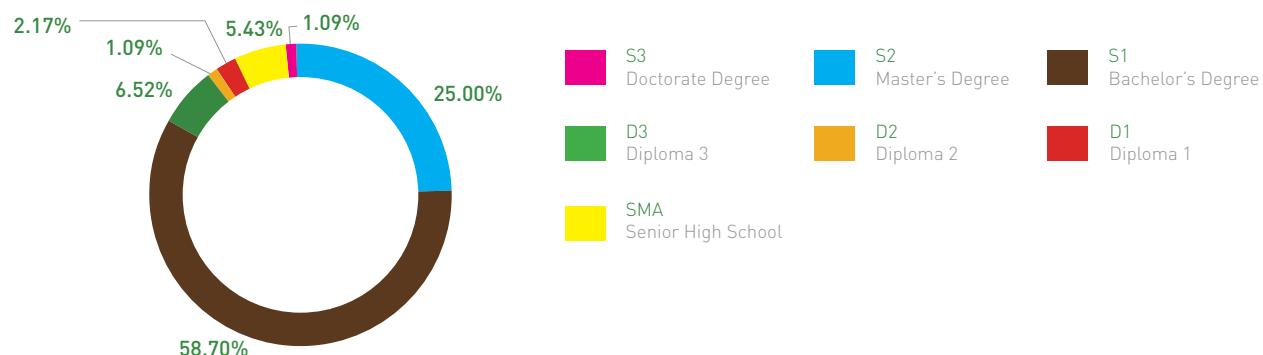


e. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education

| Tingkat Pendidikan / Education | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| S3 Doctorate Degree | 1 | 2 | 1 |
| S2 Master's Degree | 23 | 20 | 14 |
| S1 Bachelor's Degree | 54 | 47 | 27 |
| D3 Diploma 3 | 6 | 9 | 5 |
| D2 Diploma 2 | 1 | 0 | - |
| D1 Diploma 1 | 2 | 2 | - |
| SMA Senior High School | 5 | 5 | - |
| Jumlah Total | 92 | 85 | 47 |

Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
Chart of Employee Composition by Education Years 2017



Sumber Daya Manusia Human Resources

Kesempatan Yang Sama kepada Pegawai Equal Opportunity for Employees

BPDPKS senantiasa berkomitmen untuk menjunjung kesetaraan dalam menyeleksi sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar untuk menjadi calon pegawai yang profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender atau kondisi fisik mulai dari penerimaan pegawai, melaksanakan tugasnya secara profesional, dan memperoleh kompensasi. BPDPKS menjamin tidak terjadinya diskriminasi sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja *excellence*. Dengan demikian BPDPKS berupaya melakukan proses pengelolaan SDM berdasarkan faktor kemampuan (*competency*) dan kinerja (*performance*) yang sejalan dengan aspek *fairness*.

OPPFMA is always committed to supporting equality in selecting human resources by providing equal opportunities to applicants to become professional employee candidates regardless of their ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition since their admission, to conduct their duties professionally, and to earn compensations. OPPFMA ensures zero discrimination to give fair and honest treatment in encouraging employees in accordance with their respective potential, ability, experience, and skills to achieve excellent performance. Therefore, OPPFMA strives to conduct HR management based on competency and performance, as led by the principle of fairness.

Proses Rekrutmen Yang Berkualitas Quality Recruitment Process

Rekrutmen merupakan proses mendapatkan SDM terbaik sesuai dengan Rencana Jangka Pendek maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Perekutan yang dilakukan bersifat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme yang dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. BPDPKS membuka kesempatan yang sama bagi semua kandidat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun gender selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Adapun proses rekrutmen sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja
- b. Membentuk panitia seleksi
- c. Melakukan penunjukan / bekerja sama dengan pihak ketiga penyelenggara rekrutmen
- d. Tes tertulis *assessment*
- e. Tes wawancara oleh Direksi

Selama tahun 2017, BPDPKS telah merekrut sebanyak 10 orang pegawai yang terdiri dari 4 pegawai laki-laki dan 6 pegawai perempuan.

Recruitment is a process to obtain the best human resources according to the Company Short-Term and Long-Term Plans. The recruitment is carried out transparently by upholding professionalism according to the employee requirements analysis. OPPFMA provides equal opportunities for all candidates regardless of ethnicity, religion, race, or gender as long as they meet the determined requirements.

The recruitment process flows as follows:

- a. Preparing employee requirements based on workload analysis
- b. Establishing selection committee
- c. Appointing/Collaborating with third party recruiter
- d. Written test
- e. Interview with the Board of Directors

Throughout 2017, OPPFMA has recruited 10 employees, consisting of 4 male employees and 6 female employees.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Trainings and Competency Building

BPDPKS telah memiliki program pengembangan kompetensi yang terencana, sistematis dan terfokus sesuai perkembangan bisnis perusahaan. Salah satu program pengembangan kompetensi utama yang telah dilaksanakan secara konsisten adalah Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mendukung proses pemeliharaan dan peningkatan kualitas SDM. Setiap pegawai BPDPKS dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan kebutuhan posisi jabatannya.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja, BPDPKS memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh baik di dalam maupun luar negeri.

Selama tahun 2017, BPDPKS telah melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai, sebagai berikut:

| Pelatihan Training | Waktu Pelaksanaan Schedule | Pelaksana Organizer | Jumlah Peserta Number of Participants | Lokasi Location |
|---|---|--------------------------------|---|--------------------|
| Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement | 7-10 November 2017 November 7-10, 2017 | LPP Andalas Institute | 16 | Bogor |
| Pengelolaan Investasi Investment Management | 4-5 Oktober 2017 October 4 - 5, 2017 | PT. Finansial Bisnis Informasi | 16 | Jakarta |
| Manajemen Risiko Risk Management | 8 September – 10 November 2017 September 8-November 10, 2017 | PT. Cipta Raya Mekar Sahitya | 20 | Jakarta |

Adapun biaya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai BPDPKS selama tahun 2017 sebesar Rp292.320.000.

Sebagai bentuk antisipasi BPDPKS dalam menghadapi perkembangan dunia global maupun untuk mendukung tercapainya visi misi, BPDPKS juga menjalankan program pendidikan sekolah lanjutan baik di dalam maupun luar negeri. Peserta yang mengikuti program tersebut adalah pegawai pilihan yang memang akan direncanakan mengisi jabatan tertentu serta memenuhi kompetensi perusahaan di masa mendatang. Selain itu, secara tidak langsung program ini dapat memberikan benefit bagi pegawai sekaligus memacu mereka dalam meningkatkan kinerja.

OPPFMA has planned, systematic, and focused competency building program according to the Company's business development. One of the main competency development programs which has been consistently performed is the Education and Training Program which supports the maintenance and development of HR quality. Each and every OPPFMA employee must be competent in the relevant field as indicated by the positional requirements.

To improve work skills and expertises, OPPFMA provides vast opportunities for eligible employees to participate in local or international education/training programs.

Throughout 2017, OPPFMA had held the following employee training and competency development programs:

The employee training and competency development expenses throughout 2017 was amounted to Rp292,320,000.

To anticipate the global development and to achieve its vision and mission, OPPFMA also gives post-education programs that are held both locally and internationally. The program-attending participants were the selected employees planned to fill certain positions and meeting the competence required by the Company. In addition, indirectly this program would be beneficial for the employees yet encouraging them to improve their performance.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Program Kesejahteraan Pegawai Employee Welfare Program

BPDPKS berupaya untuk memenuhi kesejahteraan pegawai melalui beberapa aspek antara lain :

1. Gaji
2. Tunjangan
3. Bonus
4. Jaminan kesehatan

OPPFMA strives to meet employee welfare through several aspects, which include:

1. Salary
2. Benefits
3. Bonus
4. Health Insurance

Sistem Manajemen Kinerja BPDPKS OPPFMA Performance Management System

Pengukuran kinerja di BPDPKS dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan. Sistem penilaian yang dibangun mampu menjadi pembeda antara pegawai berkinerja tinggi dengan pegawai berkinerja rendah. Penilaian kinerja mengukur pencapaian pekerja terhadap target individu yang merupakan turunan dari sasaran/target BPDPKS. Target individu pekerja ditetapkan dan disepakati bersama atasan di awal tahun, sebagai turunan dari target/sasaran atasannya dan sejalan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) Direktorat.

In OPPFMA, performance is measured based on objectivity and fairness principles. The assessment system developed manages to separate between high-performing and low-performing employees. Performance assessment measures employee achievement of individual targets as the derivatives of OPPFMA objectives/targets. Employee individual targets are determined and jointly agreed with the superior at the beginning of the year, as a derivative of the superior's objective/target and in line with Directorate's Key Performance Indicators.

Lembaga Profesi Penunjang The professional institutions that support OPPFMA

| Keterangan Description | Profesi Penunjang Supporting Profession |
|--|---|
| Akuntan Publik Public Accountant | <p>dbsd&a Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang & Ali Registered Public Accountants Branch License Number 862/KM.1/2015 HEAD OFFICE Menara Kuningan 11th Floor JL. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta 12940 Indonesia</p> |
| Auditor Pemerintah Government's Auditor | <p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) The Audit Board of the Republic of Indonesia Jl. Jendral Gatot Subroto No.Kav 31 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210</p> |



Area dan Produksi Kelapa Sawit di Setiap Propinsi di Indonesia

Indonesian Palm Oil Area and Production per Province

82



ACEH

Luas Lahan: 408.638 Ha
Jumlah Produksi: 673.092 Ton

SUMATERA UTARA

Luas Lahan: 1.100.874 Ha
Jumlah Produksi: 4.066.250 Ton

RIAU

Luas Lahan: 2.347.591 Ha
Jumlah Produksi: 8.215.973 Ton

KEPULAUAN RIAU

Luas Lahan: 20.193 Ha
Jumlah Produksi: 52.332 Ton

SUMATERA BARAT

Luas Lahan: 399.728 Ha
Jumlah Produksi: 715.188 Ton

JAMBI

Luas Lahan: 736.095 Ha
Jumlah Produksi: 1.910.029 Ton

BENGKULU

Luas Lahan: 298.187 Ha
Jumlah Produksi: 751.233 Ton

KEP. BANGKA BELITUNG

Luas Lahan: 78.912 Ha
Jumlah Produksi: 549.067 Ton

SUMATERA SELATAN

Luas Lahan: 988.384 Ha
Jumlah Produksi: 3.063.197 Ton

LAMPUNG

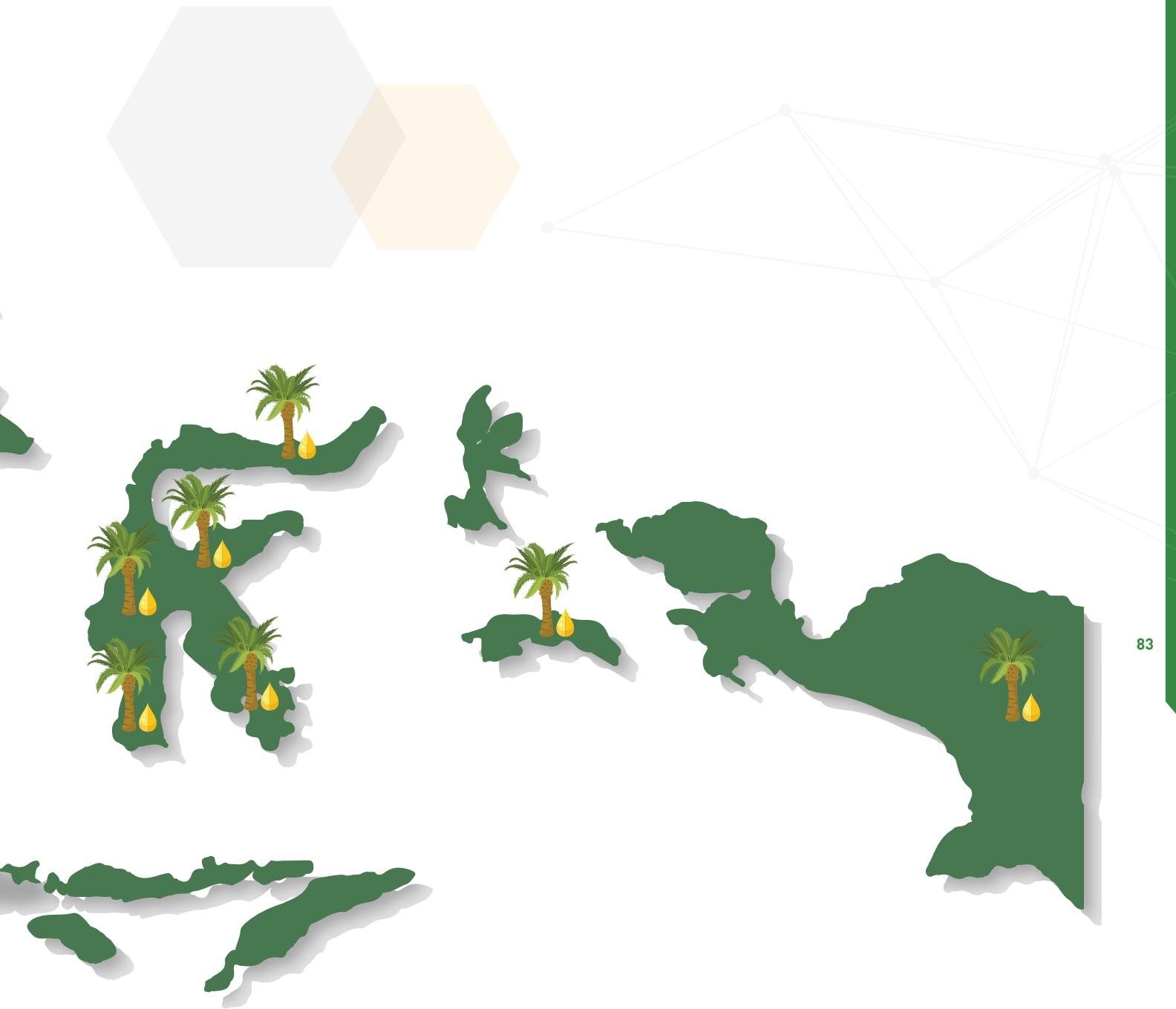
Luas Lahan: 137.884 Ha
Jumlah Produksi: 455.878 Ton

BANTEN

Luas Lahan: 11.733 Ha
Jumlah Produksi: 21.877 Ton

JAWA BARAT

Luas Lahan: 14.305 Ha
Jumlah Produksi: 35.226 Ton



KALIMANTAN BARAT

Luas Lahan : 1.455.183 Ha
Jumlah Produksi : 2.346.242 Ton

KALIMANTAN TENGAH

Luas Lahan : 1.183.724 Ha
Jumlah Produksi : 3.830.087 Ton

KALIMANTAN SELATAN

Luas Lahan : 422.226 Ha
Jumlah Produksi : 1.198.190 Ton

KALIMANTAN UTARA

Luas Lahan : 168.670 Ha
Jumlah Produksi : 301.547 Ton

KALIMANTAN TIMUR

Luas Lahan : 933.852 Ha
Jumlah Produksi : 301.547 Ton

SULAWESI BARAT

Luas Lahan : 111.836 Ha
Jumlah Produksi : 319.455 Ton

SULAWESI TENGAH

Luas Lahan : 86.990 Ha
Jumlah Produksi : 303.200 Ton

GORONTALO

Luas Lahan : 8.024 Ha
Jumlah Produksi : 121 Ton

SULAWESI TENGGARA

Luas Lahan : 49.391 Ha
Jumlah Produksi : 85.097 Ton

SULAWESI SELATAN

Luas Lahan : 38.939 Ha
Jumlah Produksi : 117.250 Ton

MALUKU

Luas Lahan : 10.616 Ha
Jumlah Produksi : 50 Ton

PAPUA BARAT

Luas Lahan : 52.920 Ha
Jumlah Produksi : 86.934 Ton

PAPUA

Luas Lahan : 54.194 Ha
Jumlah Produksi : 161.132 Ton

Area dan Produksi Kelapa Sawit di Setiap Propinsi di Indonesia

Indonesian Palm Oil Area and Production per Province

| No. | Provinsi | Perkebunan Rakyat Smallholder | | Perkebunan Negara Government | | Perkebunan Swasta Private | | Jumlah Total | |
|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Luas (Ha) | Produksi Production (Ton) | Luas (Ha) | Produksi Production (Ton) | Luas (Ha) | Produksi Production (Ton) | Luas (Ha) | Produksi Production (Ton) |
| 1 | Aceh | 226.984 | 226.984 | 41.937 | 68.844 | 139.717 | 377.264 | 408.638 | 673.092 |
| 2 | Sumatera Utara | 226.984 | 422.597 | 324.419 | 1.246.900 | 549.471 | 2.396.753 | 1.100.874 | 4.066.250 |
| 3 | Sumatera Barat | 198.484 | 198.484 | 9.668 | 28.196 | 191.576 | 488.508 | 399.728 | 715.188 |
| 4 | Riau | 1.360.855 | 3.651.687 | 92.130 | 322.970 | 977.523 | 4.531.989 | 2.347.591 | 8.215.973 |
| 5 | Kepulauan Riau | 1.302 | 1.531 | - | - | 18.891 | 50.801 | 20.193 | 52.332 |
| 6 | Jambi | 457.321 | 1.013.114 | 23.991 | 90.699 | 254.783 | 806.216 | 736.095 | 1.910.029 |
| 7 | Sumatera Selatan | 439.958 | 1.230.201 | 49.551 | 138.718 | 498.875 | 1.694.278 | 988.384 | 3.063.197 |
| 8 | Kep. Bangka Belitung | 63.458 | 109.355 | - | - | 154.540 | 439.712 | 78.912 | 549.067 |
| 9 | Bengkulu | 193.296 | 455.074 | 4.903 | 17.540 | 99.988 | 294.405 | 298.187 | 751.233 |
| 10 | Lampung | 113.837 | 167.896 | 15.629 | 47.921 | 84.180 | 240.061 | 137.884 | 455.878 |
| Wilayah Sumatera Sumatra Region | | 3.478.093 | 8.715.780 | 562.228 | 1.961.787 | 2.969.545 | 11.319.986 | 7.009.866 | 21.997.553 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 261 | 224 | 9.818 | 25.601 | 4.226 | 9.401 | 14.305 | 35.226 |
| 13 | Banten | 9.432 | 1.977 | 9.800 | 17.975 | 2.203 | 1.925 | 11.733 | 21.877 |
| 14 | Jawa Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | D.I. Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jawa Timur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wilayah Jawa Java Region | | 9.693 | 9.488 | 19.617 | 43.576 | 6.429 | 11.326 | 35.739 | 64.390 |
| 17 | Bali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wilayah Nusa Tenggara Nusa Tenggara Region | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kalimantan Barat | 386.801 | 741.812 | 51.696 | 124.638 | 1.016.686 | 1.479.792 | 1.455.183 | 2.346.242 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 150.059 | 243.627 | - | - | 1.033.665 | 3.586.460 | 1.183.724 | 3.830.087 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 83.865 | 190.936 | 17.040 | 59.132 | 336.657 | 948.122 | 422.226 | 1.198.190 |
| 23 | Kalimantan Timur | 307.209 | 492.922 | 57.671 | 160.960 | 568.972 | 1.126.627 | 933.852 | 1.635.645 |
| 24 | Kalimantan Utara | 27.548 | 48.523 | - | - | 141.122 | 253.024 | 168.670 | 301.547 |
| Wilayah Kalimantan Kalimantan Region | | 955.482 | 1.708.821 | 126.407 | 344.730 | 3.097.103 | 7.394.024 | 4.178.992 | 9.137.318 |
| 25 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Gorontalo | 4.810 | 16 | - | - | 7.543 | 105 | 8.024 | 121 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 77.936 | 144.421 | 1.183 | 1.786 | 78.710 | 156.993 | 86.990 | 303.200 |
| 28 | Sulawesi Selatan | 34.377 | 69.683 | 19.350 | 40.828 | 2.627 | 6.739 | 38.939 | 117.250 |
| 29 | Sulawesi Barat | 62.163 | 168.496 | - | - | 49.673 | 150.959 | 111.836 | 319.455 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 6.513 | 214 | 3.961 | 5.868 | 38.917 | 79.015 | 49.391 | 85.097 |
| Wilayah Sulawesi Sulawesi Region | | 185.798 | 382.831 | 24.494 | 48.482 | 177.379 | 393.811 | 387.671 | 825.124 |
| 31 | Maluku | 859 | 50 | - | - | 9.757 | - | 10.616 | 50 |
| 32 | Maluku Utara | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Papua | 14.808 | 10.122 | 12.281 | 72629 | 27.105 | 78.381 | 54.194 | 161.132 |
| 34 | Papua Barat | 11.915 | 38.593 | 2.920 | 8.169 | 40.713 | 40.172 | 52.920 | 86.934 |
| Wilayah Maluku & Papua Maluku & Papua Region | | 27.582 | 48.765 | 15.201 | 37.895 | 77.576 | 118.553 | 120.359 | 205.213 |
| INDONESIA | | 4.656.648 | 10.856.685 | 747.948 | 2.436.471 | 6.328.031 | 19.237.700 | 11.732.627 | 32.530.856 |

Sumber Source:
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Directorate General of Estate Crops
Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2015 - 2017



04



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

**Operational and Financial
Performance Discussion and
Analysis**





Analisis Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Operational and Financial Performance Discussion and Analysis

Analisis Industri Industrial Analysis

Perekonomian Nasional National Economy

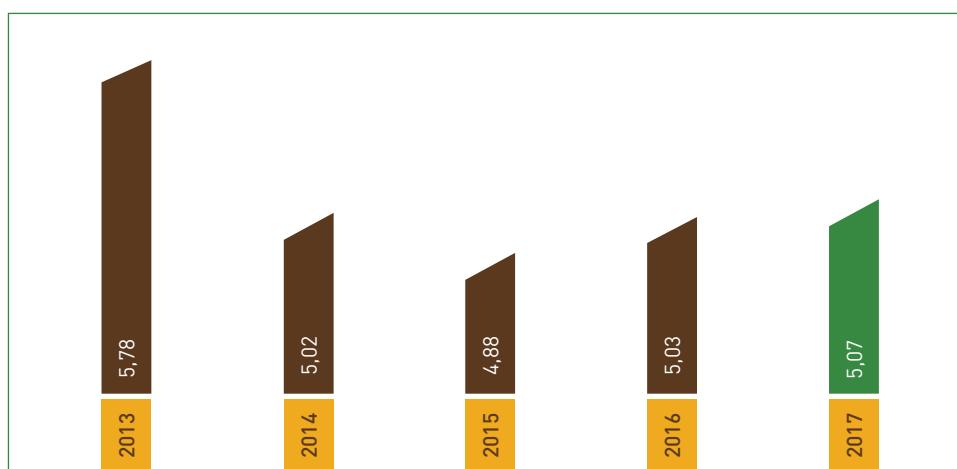
Perekonomian Indonesia tahun 2017 berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau USD3,876,8.

Perekonomian Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09%.

Indonesian economy in 2017 as measured by Gross Domestic Products (GDP) at current prices reached Rp13,588.8 trillion, while GDP per capita reached Rp51.89 million or USD3,876.8.

Indonesian economy in 2017 grew by 5.07%, which was higher compared to in 2016 with 5.03%. From production, the highest growth was attained by Information and Communication Business Sector with 9.81%. From expenditure, the highest growth was attained by Goods and Services Export Component with 9.09%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2017 (%)
Indonesian Economic Growth Rate in 2013-2017 (%)



Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Indonesian Economic Growth, Central Bureau of Statistics

Perekonomian Indonesia triwulan IV-2017 bila dibandingkan triwulan IV-2016 (y-on-y) tumbuh 5,19%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,25%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,50%.

Indonesian economy in Q4 2017 as compared to in Q4 2016 (yoy) grew by 5.19%. From production, the highest growth was attained by Company Services Business Sector with 9.25%. From expenditure, the highest growth was attained by Goods and Services Export Component with 8.50%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2017 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,70%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,60%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66%, dan Pulau Kalimantan 8,20%.

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017 No. 16/02/Th.XXI, 5 Februari 2018
Source: Indonesian Economic Growth in fourth Quarter of 2017 No.16/02/Th.XXI, February 5, 2018

Inflasi Inflation

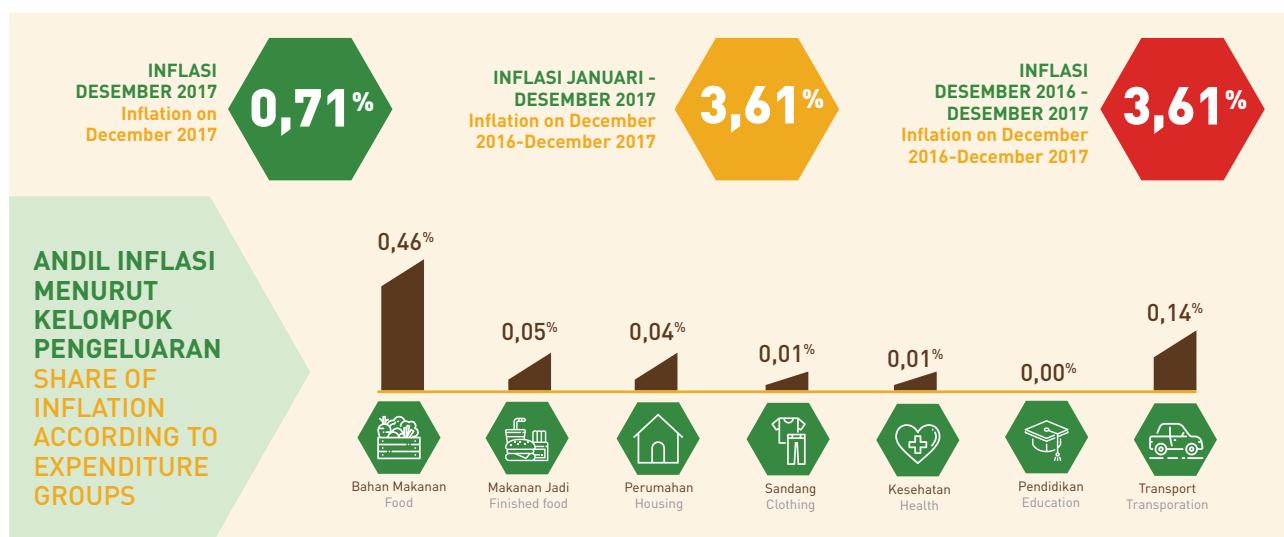
Inflasi Indonesia sebesar 0,71% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 131,28. Dari 82 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 2,26%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,30%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%; kelompok sandang sebesar 0,13%; kelompok kesehatan sebesar 0,18%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,07%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,75%.

Indonesian economy in Q4 2017 as compared to the previous quarter (q-to-q) contracted by 1.70%. From production, this was triggered by seasonal effect on Agriculture, Forestry, and Fishery Business Sector which contracted 21.60%. From expenditure, this was caused by decline in net Export.

Spatially, Indonesian economic structure in 2017 was dominated by provincial groups in Java and Sumatra Islands. Provincial group in Java Island has contributed to the Gross Domestic Product by 58.49%, followed by Sumatra Island by 21.66% and Kalimantan Island by 8.20%.

89

In Indonesia, the inflation reached 0.71% with Consumer Price Index (CPI) of 131.28. All 82 CPI cities faced inflation. Inflation occurs due to an increase in price as demonstrated by the increase in all expenditure group indexes, i.e. foodstuff by 2.26%; prepared food, beverages, cigarette & tobacco by 0.30%; housing and utilities by 0.17%; clothing by 0.13%; health by 0.18%; education, recreation, and sport by 0.07%; and transportation, communication, and financial services by 0.75%.



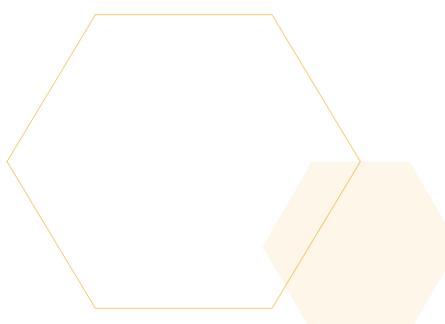
Analisis Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Operational and Financial Performance Discussion and Analysis

Perekonomian Nasional Exchange Rate

Rupiah terdepresiasi 0,37% terhadap Dolar Amerika pada Desember 2017 dengan nilai tukar sebesar Rp13.540,79 per dolar Amerika. Menurut provinsi, level terendah kurs tengah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai Rp13.667,50 per dolar Amerika pada minggu keempat Desember 2017.

Rupiah depreciated by 0.37% Against US dollar in December 2017 at the exchange rate of Rp13,540.79 per US dollar. By province, the lowest middle exchange rate was spotted in South Sulawesi, at Rp13,667.50 per US dollar in the fourth week of December 2017.



Sekilas Industri Crude Palm Oil (CPO)

Crude Palm Oil (CPO) Industry Overview

Industri sawit Indonesia mencatatkan kinerja yang baik pada tahun 2017. Berdasarkan data yang diolah oleh GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), produksi minyak sawit Indonesia tahun 2017 sebesar 41,98 juta ton yang terdiri CPO 38,17 juta ton dan PKO sebesar 3,05 juta ton. Total produksi tersebut meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun 2016 sebesar 35,57 juta ton yang terdiri dari CPO 32,52 juta ton dan PKO 3,05 juta ton. Sementara itu stock minyak sawit Indonesia pada akhir tahun 2017 adalah 4,02 juta ton.

Harga rata-rata CPO tahun 2017 sebesar USD714,3/metric ton, meningkat 2% dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2016 sebesar USD700,4/metric ton.

Berdasarkan data yang diolah GAPKI dari berbagai sumber (Kementerian ESDM, Kementan, KEMENPERIN, BPS, GAPKI, APROBI, GIMNI, APOLIN, AIMMI dan BPPDKS), ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) tidak termasuk biodiesel dan oleochemical tahun 2017 sebesar 31,05 juta ton meningkat 23% dibandingkan tahun 2016 sebesar 25,11 juta ton pada tahun 2016.

Nilai sumbangan devisa yang dihasilkan oleh minyak sawit meningkat seiring kenaikan volume ekspor dan harga yang cukup baik. Tahun 2017 nilai ekspor minyak sawit Indonesia sebesar USD22,97 meningkat 26% dibandingkan tahun 2016 sebesar USD18,22 miliar. Nilai ekspor minyak sawit tahun 2017 ini merupakan nilai tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia.

Pada tahun 2017, hampir semua negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia mencatatkan kenaikan permintaan minyak sawit. India mencatatkan kenaikan permintaan yang signifikan baik secara volume maupun persentase. Sepanjang tahun 2017, permintaan ekspor minyak sawit India sebesar 7,63 juta ton meningkat 32% atau 1,84 juta ton dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5,78 juta ton. Negara-negara Afrika pada tahun 2017 sebesar 2,29 juta ton meningkat 50% dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,52 juta ton. Cina pada tahun 2017 sebesar

Indonesia's palm oil industry recorded satisfactory performance in 2017. The data collected by the Indonesian Palm Oil Association (IPOA), Indonesian palm oil production in 2017 reached 41.98 million tons, consisting of 38.17 million tons of CPO and 3.05 million tons of PKO. The figure was an improvement by 18% from 2016 at 35.57 million tons, comprising 32.52 million tons of CPO and 3.05 million tons of PKO. Indonesian palm oil stock as of 2017 was 4.02 million tons.

The average price for CPO in 2017 was USD717.3/metric ton, which was 2% increase from the average price in 2016 at USD700.4/metric ton.

IPOA's processed data collected from various sources (Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Agriculture, Ministry of Industry, Statistics Indonesia, IPOA, Indonesian Biofuel Manufacturers Association (APROBI), Indonesian Vegetable Oil Association (GIMNI), Indonesian Oleochemicals Manufacturers Association (APOLIN), Indonesian Oleofood Industry Association (AIMMI), and OPPFMA), Indonesia's palm oil exports (CPO and its derivatives) excluding biodiesel and oleochemical in 2017 was 31.05 million tons which was an improvement by 23% from 2016 at 25.11 million tons.

Palm oil has been increasing its foreign exchange contributions with improvements in export volume and favorable price. Indonesian palm oil export in 2017 at USD22.97 billion was an improvement by 26% from 2016 at USD18.22 billion. This was the highest figure attained throughout the history of Indonesian palm oil exports.

Almost all main palm oil export destination countries increased their demands in 2017. India scored a significant improvement both in the volume and percentage of demands. India's palm oil export demands in 2017 was 7.63 million tons, which increased 32% or by 1.84 million tons from 5.78 million tons in 2016. African countries recorded 2.29 million tons of demands in 2017, signifying an increase by 50% from 2016 at 1.52 million tons. China demanded 3.73 million tons of palm oil in 2017, which was an increase by 16% from 2016 at 3.23 million tons. Uni European countries

Analisis Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan Operational and Financial Performance Discussion and Analysis

3,73 juta ton meningkat 16% dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,23 juta ton. Negara-negara Uni Eropa tahun 2017 sebesar 5,03 juta ton meningkat 15% dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,37 juta ton. Pakistan tahun 2017 sebesar 1,18 juta ton meningkat 7% dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,18 juta ton. Bangladesh tahun 2017 sebesar 1,26 juta ton meningkat 36% dibandingkan tahun 2016 sebesar 922,85 ribu ton. dan Negara-negara Timur Tengah tahun 2017 sebesar 2,12 juta ton meningkat naik 7% dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,98 juta ton.

Kekhawatiran akan adanya kebakaran lahan dapat teratas dengan baik, hampir tidak ada kasus kebakaran di perkebunan kelapa sawit. GAPKI dan perusahaan anggotanya telah melakukan berbagai upaya mencegah terjadi kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di sekitar konsesi dengan pembentukan Desa Siaga Api diberbagai daerah. Sampai pada akhir tahun 2017 telah tercatat lebih dari 572 Desa Siaga Api yang dibentuk oleh perusahaan anggota GAPKI dengan berbagai nama. Pelatihan antisipasi dan mitigasi karlahut dilaksanakan di berbagai daerah. Kegiatan ini juga akan terus ditingkat dan dilanjutkan untuk ke depannya.

Pada tahun 2017, tercatat sejumlah masalah yang dihadapi industri sawit Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakpastian hukum terhadap HGU perkebunan tetap menjadi kekhawatiran paling besar, hal ini disebabkan terbitnya PP 57/2017 dan peraturan turunannya tentang penetapan kawasan hutan;
2. Masih terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang kontraproduktif di daerah-daerah;
3. Semakin masivnya Kampanye negatif dari dalam dan luar negeri yang dilaksanakan LSM/NGO lokal dan asing, terutama isu hak asasi manusia seperti child labour dan perampasan hak masyarakat adat;
4. Isu hambatan dagang di berbagai negara seperti:
 - a. Pemberlakukan antidumping oleh Amerika untuk biodiesel Indonesia;
 - b. Pelarangan biodiesel berbasis sawit oleh Resolusi Parlemen Eropa karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran HAM;

recorded 5.03 million tons of demands in 2017, signifying an increase by 15% from 2016 at 4.37 million tons. Pakistan demanded 1.18 million tons of palm oil in 2017, which was an increase by 7% from 2016 at 1.18 million tons. Bangladesh demanded 1.26 million tons of palm oil in 2017, which was an increase by 36% from 2016 at 922.85 million tons. Middle East countries recorded 2.12 million tons of demands in 2017, signifying an increase by 7% from 2016 at 1.98 million tons.

The concerns about land fire was overcome, as there were very little cases of fire in oil palm estates. The IPOA and its members have sought various measures to prevent land and forest fire in concession areas by establishing Desa Siaga Api (Fire-Alert Villages) in regions. As of the end of 2017, 572 Desa Siaga Api were established by the IPOA under different names. Trainings on the anticipation and mitigation of forest fire were given in various regions. In the future, this will be continued and improved.

The issues faced by Indonesian palm oil both from inside and outside the country in 2017 were among others:

1. Legal uncertainty in the right to cultivate (Hak Guna Usaha) of plantation remains the biggest concern, due to the issuance of Government Regulation Number 57 of 2017 and its derivative regulations on the stipulation of forest area;
2. Existing counterproductive Regional Regulations in regions;
3. Massive negative issues from inside and outside the country by local and foreign NGOs, particularly human rights issues such as child labor and deprivation of indigenous peoples' rights;
4. Trade barriers in various countries, among others:
 - a. USA's anti-dumping policy on Indonesia' biodiesel;
 - b. Ban of palm oil-based biodiesel by European Parliament Resolutions due to lingering issues of deforestation, corruption, child labor, and human rights violation;

- c. Peningkatan nilai pajak impor minyak sawit oleh India yang mencapai dua kali lipat pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya;
- d. Pengajuan RUU Competition and Consumer Amendment (Truth in Labeling - Palm Oil) oleh Senat Australia.

Hambatan perdagangan yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, terlihat sangat ironis dengan kinerja ekspor yang masih meningkat cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa minyak sawit masih merupakan minyak nabati yang sangat vital bagi dunia dan akan terus dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya.

Berbagai upaya menghambat pertumbuhan Industri ini dilancarkan karena persaingan dagang minyak nabati yang semakin ketat. Dalam kondisi ini, pemerintah diharapkan lebih cermat dalam melihat permasalahan dan diimbau untuk tidak mengeluarkan regulasi yang nantinya menghambat perkembangan industri sawit Indonesia yang saat ini merupakan mesin penghasil devisa terbesar dalam menyokong perekonomian Indonesia.

- c. The rise of taxes on palm oil import in India, reaching twofold from the previous year's taxes;
- d. The proposal of the Bill of Competition and Consumer Amendment (Truth in Labeling - Palm Oil) by the Australian Senate.

Trade barriers by various countries seemed ironical in contrast with the significant improvement in export volumes. This shows that palm oil maintains its significance for the world and will still be needed along with the continuously growing population every year.

A number of efforts to inhibit the growth of palm oil are sought due to the increasingly high competition in biofuel industry. This condition requires thorough attention from the Government in spotting the issues while avoiding the issuance of regulations that may hamper the development of Indonesian palm oil industry which is currently the biggest contributor to the Country's economy.

Dampak Penerbitan dan Perubahan Regulasi terhadap Kinerja BPDPKS Impact of Publications and Regulatory Changes on OPPFMA Performance

BPDPKS terus berkomitmen dalam menjalankan setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh regulator. Setiap terdapat perubahan regulasi, BPDPKS senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan baru tersebut dalam rangka menganalisis dampaknya terhadap kinerja BPDPKS.

OPPFMA is consistently committed to applying the laws and regulations issued by the regulator. In the event of a change in regulation, OPPFMA always conducts a review of the new regulation in order to analyze its impact on OPPFMA performance.

Kontribusi BPDPKS kepada Negara

Contribution to the Country

Kontribusi pada Industri Sawit Kelapa Sawit

Contribution to Palm Oil Industry

Kontribusi utama BPDPKS dalam industri kelapa sawit tercermin pada kegiatan operasional yaitu meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pada tahun 2017, BPDPKS telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan kontribusi dalam dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Kegiatan yang telah dilaksanakan secara umum, yaitu:

1. Pembayaran selisih harga biodiesel,
2. Penyaluran dana riset,
3. Promosi kelapa sawit,
4. Pengembangan SDM kelapa sawit,
5. Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit,
6. Persiapan penyediaan sarana dan prasarana kebun kelapa sawit.

OPPFMA's main contributions in palm oil industry are shown by its operating activities i.e. increasing price, strengthening downstream industry, and establishing sustainable palm oil commodity.

In 2017 OPPFMA has performed the programs that enhance contributions to Indonesia's palm oil industry. These among others include:

1. Biodiesel price variance payment
2. Research fund distribution
3. Palm oil promotion campaign
4. Palm oil HR development
5. Oil palm estate replanting fund distribution
6. Preparation of oil palm estate facilities and infrastructure procurements.

Kontribusi dalam Pembayaran Pajak

Tax Contribution

Terkait dengan hasil kinerja keuangan, BPDPKS memenuhi kewajiban melalui pembayaran pajak. BPDPKS berperan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak-pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi, PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan, dan PPh pasal 22 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setoran pajak BPDPKS pada tahun 2017 adalah sebesar Rp961.560.386.576 menurun 3,42% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp995.638.719.417.

Related to the financial performance outcomes, OPPFMA meets its obligation through tax contribution. OPPFMA actively participates in the withholding, payment, and report of taxes such as Income Tax Article 21 for income received by individual taxpayers, Income Tax Article 23 for income received by corporate taxpayers, and Income Tax Article 22, in addition to Value Added Tax (PPN).

OPPFMA's tax contribution in 2017 was Rp961,560,386,576, decreased by 3.42% compared to in 2016 at Rp995,638,719,417.

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2015-2017 (Rp)
Table of Tax Contributions in 2015-2017 (Rp)

| Jenis Pajak Type of Tax | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| PPh Pasal 21 Income Tax Article 21 | 1.828.666.044 | 4.315.651.785 | 5.193.661.022 |
| PPh Pasal 22 Income Tax Article 22 | 27.212.910 | 168.223.734 | 68.017.729 |
| PPh Pasal 23 Income Tax Article 23 | 1.839.824.262 | 3.695.142.799 | 3.367.148.124 |
| PPh Pasal 4 Income Tax Article 4 | - | 995.235.480 | 796.438.218 |
| PPN VAT | 93.205.583.410 | 986.464.465.629 | 952.135.121.484 |
| Jumlah Total | 96.901.286.626 | 995.638.719.427 | 961.560.386.576 |

BPDPKS tidak pernah terlambat dalam penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan dan Bulanan), serta tidak pernah terlambat dalam penyampaian dokumen wajib yang harus dilaporkan kepada regulator.

OPPFMA has never been late in submitting its taxation documents (Annual and Monthly Tax Returns) and other mandatory documents.



Analisis Kinerja Operasional

Operational Performance Analysis

Analisis Pencapaian Kinerja Utama

Main Performance Analysis

Berikut adalah pencapaian IKU BPDPKS selama tahun 2017:

The following details show OPPFMA Key Performance Indicators in 2017.

Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPDPKS Tahun 2017
Table of ECFPO Key Performance Indicators Achievement in 2017

| Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Strategic Goals/ Key Performance Indicators | Target | | | | Realisasi Realization | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| | Q1 | Q2/ Smt I Q2/1st Semester | Q3/ s.d. Q3 Q3/to Q3 | Q4/ Y-17 | Q1 | Q2/ Smt I Q2/1st Semester | Q3/ s.d. Q3 Q3/to Q3 | Q4/ Y-2017 Q4/ Y-2017 | |
| Terwujudnya dana kelapa sawit yang BerkelaJutan sustainable Realization of sustainable CPO fund | | | | | | | | | |
| 1 | Percentase dana pendapatan yang sesuai RBA Percentage of revenue fund according to WP&B | 25% | 50% | 75% | 100% | 33.67% | 65% | 102% | 139% |
| 2 | Deviasi target harga CPO [Target harga CPO \$750] Deviation in CPO price target [CPO price target \$750] | 20% | 20% | 20% | 20% | 3.2% | 20% | 20% | 20% |
| Kepuasan pengguna layanan yang tinggi High service user satisfaction | | | | | | | | | |
| 3 | Indeks kepuasan pengguna layanan Index of service user satisfaction | - | 3 | - | 3 | - | 3.22 | - | 3.24 |
| Perencanaan kebijakan yang berkualitas Quality policy plan | | | | | | | | | |
| 4 | Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan strategis Index of punctual completion of strategic policies | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 |
| 5 | Indeks ketepatan waktu penyelesaian penyusunan peraturan dan SOP Index of punctual completion of regulation and SOP preparation | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
| Penyelenggaraan penghimpunan dana yang optimal Optimal fund distribution | | | | | | | | | |
| 6 | Percentase imbal hasil dana kelolaan [lebih besar dari referensi] Percentage of managed fund returns [larger than reference] | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7.44% | 7.48% | 6.62% | 6.52% |
| Penyelenggaraan penyaluran dana untuk petani dan pengembangan SDM sawit Fund distribution for farmers and palm oil HR development | | | | | | | | | |
| 7 | Percentase penyelesaian program replanting sesuai RBA (target 20.000 ha) Percentage of completion of replanting program according to WP&B (target 20.000 ha) | 0% | 30% | 75% | 100% | - | 0% | 0% | 14.71% |
| 8 | Percentase penyelesaian program pengembangan SDM sawit dan sarpras (target = 60 kegiatan) Percentage of completion of palm oil HR development program and facilities and infrastructure (target 60 activities) | 5% | 30% | 75% | 100% | 58% | 63.3% | 73.3% | 101.67% |
| Penyelenggaraan penyaluran dana untuk biodiesel dan pengembangan produk Fund distribution for biodiesel and product development | | | | | | | | | |
| 9 | Indeks ketepatan waktu penyelesaian penilaian dan verifikasi permohonan dana biodiesel Index of punctual completion of assessment and verification of biodiesel fund proposal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Percentase riset yang dibiayai sesuai RBA Target (= 40 riset) Percentage of funded researches according to WP&B (target 40 researches) | 5% | 10% | 15% | 100% | 7.5% | 12.5% | 17.5% | 100% |
| 11 | Percentase volume biodiesel yang disubsidi (target 2.530.000 KL) Percentage of subsidized biodiesel volume (target 2,530,000 KL) | 25% | 50% | 75% | 100% | 28% | 47.62% | 62% | 90.44% |

| Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Strategic Goals/ Key Performance Indicators | | Target | | | | Realisasi Realization | | | |
|---|---|--------|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | Q1 | Q2/ Smt I Q2/1st Semester | Q3/ s.d. Q3/ to Q3 | Q4/ Y-17 | Q1 | Q2/ Smt I Q2/1st Semester | Q3/ s.d. Q3/ to Q3 | Q4/ Y-2017 Q4/ Y-2017 |
| Penyelenggaraan penyaluran dana untuk promosi dan kemitraan Fund distribution for promotion and partnership | | | | | | | | | |
| 12 | Percentase penyelesaian program promosi sesuai RBA (target = 30 kegiatan) Percentage of completion of promotion programs according to WP&B (target 30 activities) | 10% | 40% | 60% | 100% | 30% | 63.3% | 100% | 143% |
| 13 | Percentase penyelesaian program kemitraan sesuai RBA (target = 60 kegiatan) Percentage of completion of partnership programs according to WP&B (target 60 activities) | 10% | 40% | 60% | 100% | 36% | 55% | 73% | 106.67% |
| Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel Accountable fund management | | | | | | | | | |
| 14 | Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Index of punctual preparation of financial statements | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
| 15 | Percentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti Percentage of actionable recommendations from BPK and APIP audits | - | - | - | 75% | - | - | - | 100% |
| SDM yang kompetitif Competitive Human Resources | | | | | | | | | |
| 16 | Rata-rata nilai hard competency pegawai Average score of employees' hard competency | - | 72 | - | 72 | - | 82 | - | 89 |
| Organisasi yang kondusif Favorable organization | | | | | | | | | |
| 17 | Percentase kematangan penerapan manajemen risiko Percentage of the thoroughness of risk management implementation | - | - | - | 75% | - | - | - | 75% |
| Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern Optimal and modernized Information and Communication Technology facility management | | | | | | | | | |
| 18 | Percentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan Percentage of office facility and infrastructure provision according to requirements | 20% | 40% | 60% | 80% | 25% | 41% | 137% | 170.69% |
| 19 | Percentase modernisasi pengelolaan BLU Percentage of Public Service Agency management modernization | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% |
| Pelaksanaan anggaran yang optimal Optimal budget implementation | | | | | | | | | |
| 20 | Percentase kualitas pelaksanaan anggaran internal satker BPDPKS sebagaimana baseline Percentage of OPPFMA work unit internal budget implementation quality according to baseline | 12% | 29% | 60% | 95% | 16.92% | 30% | 63.60% | 89.04% |

Terwujudnya Dana Kelapa Sawit yang Sustainable Realization of Sustainable CPO fund

Percentase Dana Pendapatan yang Sesuai RBA

Target pendapatan yang sesuai RBA tahun 2017 adalah sebesar Rp10.663.291.000.000 dengan realisasi mencapai Rp14.790.194.157.891 atau sebesar 138,70% dari target tahun 2017 yang terdiri dari Pendapatan Pungutan Dana Sawit sebesar Rp14.284.246.148.137, Pendapatan atas Pengelolaan Dana sebesar Rp505.120.147.305 dan Pendapatan Lain-lain Rp297.852.027.

Percentage of Revenue Fund According to WP&B

Revenue target in accordance with the 2017 RBA is Rp10,663,291,000,000 with realization reaching Rp14,790,194,157,891 or 138.70% of the 2017 target which is consisting of Palm Fund Collection Revenue of Rp14,284,246,148,137, Revenue from Management Funds of Rp505,120,147,305 and Other Revenues of Rp297,852,027.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Deviasi Target Harga CPO

Rata-rata harga CPO (dari CIF Rotterdam Index) tahun 2017 adalah sebesar USD750 per ton sehingga deviasi harga CPO terhadap target harga acuan adalah sebesar 6,13%.

Deviation in CPO Price Target

The average CPO price (of the CIF Rotterdam Index) in 2017 was USD750 per ton, and therefore the deviation in CPO price against the reference price target was 6.13%

Perencanaan Bisnis yang Berkualitas Quality Business Plan

Percentase Program Replanting yang Diselesaikan Sesuai RBA

Target program replanting sesuai dengan RBA tahun 2017 adalah sebesar Rp519.000.000.000 dengan target cakupan lahan seluas 20.000 ha. Realisasi penyaluran dana peremajaan sawit rakyat tahun 2017 adalah sebesar Rp73.495.210.000 dengan luas lahan 2.941,85 ha.

Percentage of Replanting Program Completed According to WP&B

The replanting program target in accordance with the 2017 RBA is Rp519,000,000,000 with an area target of 20,000 ha. The realization of the distribution of people's oil palm rejuvenation funds in 2017 amounted to Rp73,495,210,000 with an area of 2,941.85 ha.

Penyelenggaraan Penyaluran Dana yang Efektif Effective Fund Distribution

Jumlah Riset yang akan Dibiayai

Target pembiayaan riset pada Triwulan IV tahun 2017 adalah sebanyak 40 riset, sementara realisasi tahun 2017 telah mencapai 40 riset dengan penyaluran dana mencapai Rp37,27 miliar.

Number of Researches to be Funded

The research funding in Q4 2017 was targeted for 40 researches, with the realization of 40 researches in 2017 at an amount of Rp37.27 billion of fund distributed.

Percentase Volume Biodiesel yang Disubsidi

Target penyaluran dana volume biodiesel tahun 2017 adalah sebesar 2,530 juta KL. Realisasi volume biodiesel tahun 2017 telah mencapai 2,288 juta KL atau sebesar 90%. Pembayaran biodiesel untuk periode penyaluran bulan November 2016 s.d. April 2017 masih menunggu penandatangan kontrak antara BU BBM dan BU BBN.

Percentage of Subsidized Biodiesel Volume

The biodiesel volume fund distribution in 2017 was targeted to 2,530 million KL. The realization of biodiesel volume in 2017 was 2,288 million KL or 90%. The payment for biodiesel from November 2016 to April 2017 was awaiting the contract execution between Oil Fuel Business Entities and Biofuel Business Entities.

Pengelolaan Kemitraaan yang Berkelaanjutan Sustainable Partnership Management

Percentase Program Promosi yang Sesuai RBA

Target program promosi yang sesuai RBA tahun 2017 adalah sebanyak 30 kegiatan dengan realisasi program promosi tahun 2017 adalah sebanyak 43 kegiatan.

Percentage of Promotion Programs According to WP&B

The promotion program according to WP&B targets 30 activities with the promotion program realization of 43 activities in 2017.

Analisis Operasi Per Aktivitas Usaha

Operational Analysis per Business Activity

Berdasarkan Peraturan Presiden No.61 Tahun 2015 Pasal 20, kegiatan operasional BPDPKS mencakup enam aktivitas yaitu melakukan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan dana, pengelolaan dana, penyaluran penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Pelaksanaan kegiatan operasional BPDPKS tersebut di bawah tanggung jawab lima Direktorat yang berkoordinasi dengan Direktur Utama. Keenam aktivitas tersebut dilaksanakan secara maksimal oleh BPDPKS untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit nasional terutama sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pursuant to Article 20 of the Presidential Regulation Number 61 of 2015, OPPFMA operations cover six activities including planning and budgeting, fund collection, fund management, fund distribution and utilization, administration and accountability, and supervision. The implementation of these operational activities is under the responsibility of five Directorates under coordination of the President Director. These activities are optimally implemented by OPPFMA to support the national palm oil industry development particularly in the efforts of increasing price, strengthening downstream industries, and building sustainable palm oil commodity.



Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Kegiatan Operasional BPDPKS OPPFMA Operational Activities



100

Perencanaan dan Penganggaran Planning and Budgeting

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses awal yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi tentang gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu.

Planning and budgeting is the initial process performed based on facts and assumptions on the depiction of activities to be performed in achieving certain objectives.

Penghimpunan Dana Fund Collection

Sumber penghimpunan dana yang dilakukan BPDPKS terdiri dari Pelaku usaha perkebunan sawit dan turunannya, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Pelaku usaha perkebunan sawit dikenakan pungutan atas eksport hasil perkebunan kelapa sawit dan iuran. Besarnya iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan BPDPKS dengan pelaku usaha. Iuran diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu dan hanya dikenakan untuk perusahaan perkebunan sawit bukan pekebun. Dana lembaga pembiayaan berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Dana masyarakat berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat. Dana yang diperoleh dari sumber lain yang sah berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan dana.

The sources of OPPFMA fund collection comprise palm oil and palm oil derivatives business owners, financing institution funds, community funds, and/or other legal funds. Palm oil business owners are subjects to palm oil export levies and contributions. The amount of the contribution is determined by agreement between OPPFMA and business owners. The contribution is paid on a regular basis or incidentally and obligatory only for palm oil estates rather than farmers. Financing institution fund comes from banking and/or non-banking institutions. Community fund comes from individuals, associations, and/or non-binding community institutions. Funds obtained from other legal sources include grants, non-binding assistance from other parties, and/or fund management yields.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Penghimpunan Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Crude Palm Oil dan Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan. Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Crude Palm Oil mempunyai tugas memungut dan menghimpun dana berupa biaya ekspor Crude Palm Oil dan iuran berkala dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan mempunyai tugas memungut dan menghimpun dana berupa biaya dari ekspor produk turunan kelapa sawit dan iuran berkala dari pelaku usaha industri berbahan baku kelapa sawit.

Sampai dengan 31 Desember 2017, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp14.284.246.148.137 dengan volume sebanyak 37,44 Ton. Jumlah penghimpunan dana ini meningkat 23,53% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp11.563.088.494.773.

Pengelolaan Dana Fund Management

Pengelolaan atas dana yang dihimpun digunakan untuk aktivitas pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPDPKS dalam rangka pengembangan perkebunan sawit dan pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. BPDPKS menetapkan prioritas penggunaan dana untuk masing-masing kegiatan tersebut dengan memperhatikan program Pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Pengembangan Biodiesel, Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan; dan Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. Divisi Pengembangan Biodiesel mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait pengembangan biodiesel. Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan

OPPFMA fund collection under the responsibility of the Directorate of Fund Collection is performed by the Crude Palm Oil Duties and Contributions Division and the Derivative Product Duties and Contributions Division. The Crude Palm Oil Duties and Contributions Division is responsible for collecting duties and funds from Crude Palm Oil export fees and regular contributions from palm oil business owners. The Derivative Product Duties and Contributions Division is responsible for collecting duties and funds from palm oil derivatives export fees and regular contributions from palm oil-based industry business owners.

As of December 31, 2017, OPPFMA has collected Rp14,284,246,148,137 of fund with a volume of 37.44 Tons. The total fund collection was an increase by 23.53% from Rp11,563,088,494,773 in 2016.

101

The collected funds are managed and used for oil palm estate human resources development, oil palm estate research and development, oil palm estate promotion, oil palm estate replanting, and oil palm estate facilities and infrastructure. These activities are conducted in order to develop oil palm estates and meet the oil palm estate production for food requirements, oil palm plantation industry downstreaming, and biofuel-biodiesel provision and utilization. OPPFMA sets the priority for the utilization of funds for each of these activities while taking into account Government's programs and Steering Committee's policies.

OPPFMA fund management under the responsibility of the Directorate of Fund Planning and Management is performed by Biodiesel Development Division; Replanting, Reforestation, and Plantation Promotion Division; and HR Education, Research and Development, and Facility and Infrastructure Development Division. The Biodiesel Development Division assumes the duties to implement fund allocation plan, fund cooperation management, fund distribution plan preparation, and research and data management on biodiesel development. The Plantation Replanting, Reforestation, and Promotion Division

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengdolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait peremajaan perkebunan, reforestation, dan promosi perkebunan. Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait pendidikan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

Penyaluran dan Penggunaan Dana Fund Distribution and Utilization

102

Penyaluran dan penggunaan dana merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana pengelolaan dana yang diuraikan diatas. Penggunaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan fasilitasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Penggunaan dana untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan lembaga riset yang fokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

Penggunaan dana untuk promosi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan sawit sebagai produk yang mempunyai nilai strategis. Pelaksanaan promosi tersebut dapat meningkatkan citra nilai produk, informasi pasar, memperluas pasar, meningkatkan investasi, menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan sawit.

assumes the duties to implement fund allocation plan, fund cooperation management, fund distribution plan preparation, and research and data management on plantation replanting, reforestation, and promotion. The HR Education, Research and Development, and Facility and Infrastructure Development Division assumes the duties to implement fund allocation plan, fund cooperation management, fund distribution plan preparation, and research and data management on human resource education, research and development, and facility and infrastructure development.

Fund distribution and utilization is the activity performed as fund management described above. The utilization of fund for oil palm estate human resource development aims at improving knowledge, skills, professionalism, independence, competitiveness, as well as enhancing technical, managerial, and entrepreneurial capabilities. Human resource development is performed through the provision of counseling, education, training, and facilitation. Human resource development is performed by either formal or non-formal educational institutions.

The utilization of fund for oil palm plantation research and development aims at increasing knowledge on plant breeding, cultivation, post-harvesting and produce processing, industry, market, plantation product value chain from upstream to downstream, and business development prospects. This activity is performed by establishing and strengthening a research institution that focuses on technology, industry, product innovation, financing scheme, market knowledge, and environmental adoption.

The utilization of fund for promotion aims at increasing knowledge on the significance of oil palm estate as a product with strategic value. The promotion may improve product value image and market information, expand the market, increase investments, and develop the oil palm estate commodity marketing center.

Penggunaan dana untuk peremajaan perkebunan sawit dilaksanakan sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sawit maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Penggunaan dana untuk sarana dan prasarana perkebunan sawit dilakukan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain benih; pupuk; pestisida; alat pasca panen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan verifikasi atau penelusuran teknis.

Pelaksanaan kegiatan penyaluran dan penggunaan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Penyaluran dana yang dilaksanakan oleh Divisi Program Pelayanan dan Divisi Unit Penyaluran. Divisi Program Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penyaluran dana, penilaian dan verifikasi terhadap proposal permohonan dana, pengembangan dana, penetapan usulan calon penerima dana. Divisi Unit Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyaluran dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana, menjalankan fungsi kustodian atas dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan penyimpanan dana, dan laporan realisasi penyaluran dana.

The utilization of fund for oil palm plantation rejuvenation aims at increasing oil palm productivity and maintaining optimal utilization of oil palm estate area. The utilization of fund for oil palm plantation facilities and infrastructure aims at improving production, productivity, and plantation yield quality. The facilities and infrastructure comprise seedlings; fertilizers; pesticides; post-harvesting and yield processing equipment; plantation road and access road to public road and/or ports; means of transportation; agricultural machineries; market infrastructure construction; and technical verification or tracing.

The distribution and utilization of OPPFMA fund under the responsibility of the Directorate of Fund Distribution is assumed by the Service Program Division and Distribution Unit Division. The Service Program Division assumes the duties to perform fund distribution plan preparation, assessment and verification of fund application proposal, fund development, and determination of fund acceptor candidate proposal. The Distribution Unit Division assumes the duties to perform fund distribution for development financing, fund distribution monitoring and evaluation, in addition to serve as fund custodian for the recording, monitoring, and reporting of fund reserve, and to report the fund distribution realization.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Administration and Accountability

Penatausahaan dan pertanggungjawaban senantiasa dilaksanakan oleh setiap pimpinan BPDPKS dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPDPKS serta dengan instansi lain di luar BPDPKS sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, berkoordinasi dengan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Selain itu, setiap pimpinan juga wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Administration and accountability is upheld by every OPPFMA leader by applying the principles of coordination, integration, and synchronization internally among organizational units as well as with other external institutions in accordance with each unit's duties. Every organizational unit head is responsible for leading and coordinating their subordinates while providing guidance and directives for the implementation of the subordinates' duties. These heads also have the obligation to comply with their superiors' directives as well as to report to their respective superior and submit regular reports on time.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Pertanggungjawaban diwujudkan dengan kegiatan penyampaian laporan kepada atasan yang tembusannya wajib disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Laporan tersebut diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut sebagai petunjuk kepada bawahan. Para Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama yang selanjutnya akan memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan penatausahaan.

Accountability is realized by the submission of report to superiors, the copy of which is to be forwarded to the heads of other organizational unit(s) with relevant duties. The report is processed and used as the material for preparing further reports as directives to subordinates. The Directors and the Head of Internal Audit Unit submit the report to the President Director who subsequently shall request relevant official to implement the administration duty.

Pengawasan Supervision

104

BPDPKS melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit. Hasil pungutan tersebut disampaikan oleh BPDPKS kepada Menteri Keuangan yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa denda jika kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit tidak dipenuhi. Besarnya denda yang dibayarkan sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan menggunakan mata uang Rupiah. BPDPKS juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis dalam pelaksanaan pembayaran pungutan tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam bentuk laporan surveyor.

OPPFMA supervises the implementation of obligatory levies for oil palm plantation commodity export. The collected fund will be then submitted by OPPFMA to the Minister of Finance along with the recommendation of administrative sanction imposition, e.g. penalty, when such obligatory levies for oil palm plantation commodity export is not complied. The amount of penalty paid follows the rate regulated by the Minister of Finance in Rupiah. OPPFMA also coordinates with the Ministry of Trade to assign a surveyor in conducting technical verification and tracing of the payment of such levies, so that they comply with the provisions of laws and regulations. The result of verification conducted by the surveyor as intended is presented as surveyor report.



Analisis Kinerja Keuangan

Financial Performance Analysis

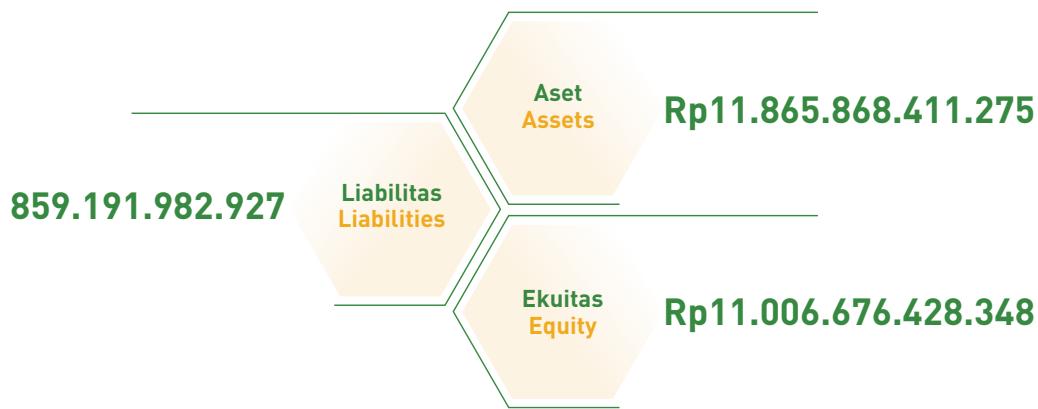
Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

Posisi keuangan BPDPKStahun 2017 terdiridari Aset sebesar Rp11.865.868.411.275, Liabilitas sebesar Rp859.191.982.927 dan Ekuitas sebesar Rp11.006.676.428.348.

OPPFMA's financial position in 2017 comprised Assets amounted to Rp11,865,868,411,275; Liabilities amounted to Rp859,191,982,927; and Equity amounted to Rp11,006,676,428,348.

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2017 (Rp)
Table of Financial Position in 2017 (Rp)



Aset Assets

Jumlah asset BPDPKS tahun 2017 adalah sebesar Rp11.865.868.411.275 meningkat 105,55% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5.772.734.755.548. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus tahun 2017 yang lebih besar.

OPPFMA's total asset in 2017 was Rp11,865,868,411,275, which increased by 105.55% from Rp5,772,734,755,548 in 2016. This was mainly caused by larger surplus in 2017.

Tabel Aset Tahun 2016-2017 (Rp)
Table of Assets in 2016-2017 (Rp)

| Uraian Description | 2016 | 2017 | Perubahan (%) Change (%) |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ASET ASSETS | 5.772.734.755.548 | 11.865.868.411.275 | 105,55 |
| Aset Lancar Current Assets | 5.757.640.522.316 | 11.851.159.824.294 | 105,83 |
| Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents | 5.729.108.049.237 | 3.186.919.095.885 | (44,37) |
| Investasi jangka pendek Short-term Investments | - | 8.643.092.784.654 | - |
| Piutang Receivables | 25.294.448.346 | 17.398.545.399 | (31,22) |
| Aset Lancar lainnya Other Current Assets | 3.238.024.733 | 3.749.398.356 | 15,79 |
| Aset Tidak Lancar Non-Current Assets | 15.094.233.232 | 14.708.586.981 | (2,55) |
| Aset tetap - bersih Fixed Assets - net | 13.975.498.859 | 12.929.303.608 | (7,49) |
| Aset tak berwujud - bersih Intangible Assets – net | 1.118.734.373 | 1.779.283.373 | 59,04 |

Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan aset lancar lainnya. Jumlah Aset Lancar BPDPKS pada tahun 2017 adalah sebesar Rp11.851.159.824.294 meningkat 105,83% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5.757.640.522.316. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan surplus pada tahun 2017 yang berupa kas dan setara kas yang kemudian ditempatkan pada investasi jangka pendek.

Kas dan setara kas tahun 2017 sebesar Rp3.186.919.095.885 menurun 44,37% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5.729.108.049.237. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penempatan kas dan setara kas pada instrumen investasi jangka pendek berupa deposito dengan tenor lebih dari 3 bulan.

Investasi jangka pendek tahun 2017 sebesar Rp8.643.092.784.654. Baru pada tahun 2017 BPDPKS melakukan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek yang dilakukan BPDPKS yaitu menempatkan deposito berjangka dengan jangka waktu diatas tiga bulan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp3.949.092.784.654, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp3.049.000.000.000 dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.645.000.000.000.

Piutang BPDPKS tahun 2017 utamanya adalah dari piutang bunga deposito. Piutang tahun 2017 sebesar 17.398.545.399 menurun 31,22% menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp25.228.443.346. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan normal waktu perhitungan piutang diakarenakan roll-over deposito.

Current Assets

Current assets include Cash and Cash Equivalents, Short-term Investments, Receivables, and Other Current Assets. OPPFMA's Current Assets in 2017 were Rp11,851,159,824,294 which increased by 105.83% from Rp5,757,640,522,316 in 2016. This was particularly caused by the increase in surplus in 2017 from Cash and Cash Equivalents which were subsequently posted as Short-term Investments.

Total Cash and Cash Equivalent in 2017 was Rp3,186,919,095,885, which was a decline by 44.37% from Rp5,729,108,049,237 in 2016. The decline was mainly caused by the posting of Cash and Cash Equivalents as Short Term Investments, i.e. Deposit with above 3-month term.

The Short-term Investments in 2017 were amounting Rp8,643,092,784,654. 2017 was the first year for OPPFMA to perform Short-term Investments. OPPFMA's Short-term Investments were the placement of above 3-month term deposits at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at an amount of Rp3,949,092,784,654; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk at an amount of Rp3,049,000,000,000; and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk at an amount of Rp1,645,000,000,000.

OPPFMA's Receivables in 2017 were mainly from deposit interest receivables. The Receivables in 2017 at Rp17,398,545,399 was a decline by 31.22% from Rp25,294,448,346 in 2016. This was particularly caused by normal changes during the calculation of receivables due to deposit rollover.

Analisis Kinerja Keuangan

Financial Performance Analysis

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar terdiri dari Aset tetap dan Aset tak berwujud. Jumlah aset tidak lancar BPDPKS pada tahun 2017 adalah sebesar Rp14.708.586.981 menurun 2,55% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp15.094.233.232. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyusutan nilai aset tetap.

Aset tetap BPDPKS tahun 2017 sebesar Rp12.929.303.608 menurun 7,49% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp13.975.498.859. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyusutan nilai aset tetap.

Aset tak berwujud BPDPKS tahun 2017 sebesar Rp1.779.283.373 meningkat 59,04% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1.118.734.373. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh amortisasi aset tak berwujud.

Non-Current Assets

Non-Current Assets comprise Fixed and Intangible Assets. OPPFMA's Non-Current Assets in 2017 were Rp14,708,586,981, which declined by 2.55% from Rp15,094,233,232 in 2016. This was mainly due to the depreciation of fixed assets.

OPPFMA's Fixed Assets in 2017 were Rp12,929,303,608, which was a decline by 7.49% from Rp13,975,498,859 in 2016. This was mainly due to the depreciation of fixed assets.

OPPFMA's Intangible Assets in 2017 were Rp1,779,283,373, which was a decline by 59.04% from Rp1,118,734,373 in 2016. This was mainly due to the amortization of intangible assets.

Liabilitas

Liabilities

Jumlah liabilitas BPDPKS tahun 2017 adalah sebesar Rp859.191.982.927 meningkat 42,71% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp602.045.717.305. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan beban pembayaran selisih harga biodiesel yang telah diverifikasi oleh Kementerian ESDM.

Tidak terdapat Utang pajak BPDPKS tahun 2017. Sedangkan Akrual BPDPKS tahun 2017 sebesar Rp859.191.982.927 meningkat 42,71% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp602.045.717.305. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan beban pembayaran selisih harga biodiesel yang telah diverifikasi oleh Kementerian ESDM.

OPPFMA's liabilities in 2017 were Rp859,191,982,927, which increased by 42.71% from Rp602,045,717,305 in 2016. The improvement was mainly due to the acknowledgment of the expense for biodiesel price variance payment which has been verified by the Ministry of Energy and Mineral Resources.

There were no Taxes Payable throughout 2017. OPPFMA's Accrual in 2017 was Rp859,191,982,927, which increased by 42.71% from Rp602,045,717,305 in 2016. The improvement was mainly due to the acknowledgment of the expense for biodiesel price variance payment which has been verified by the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Tabel Liabilitas Tahun 2016-2017 (Rp)
Table of Liabilities in 2016-2017 (Rp)

| Uraian Description | 2016 | 2017 | Perubahan (%) Change (%) |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| LIABILITAS LIABILITIES | 602.045.717.305 | 859.191.982.927 | 42,71 |
| Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities | 602.045.717.305 | 859.191.982.927 | 42,71 |
| Akrual Accrual | 602.045.717.305 | 859.191.982.927 | 42,71 |
| Utang pajak Taxes Payable | 10.645.000 | - | - |

Ekuitas Equity

Ekuitas BPDPKS tahun 2017 sebesar Rp11.006.676.428.348 meningkat 91,02% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5.170.678.393.243. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh surplus tahun 2017 dan pengembalian setoran sebesar dari kas negara sebesar Rp2.000.000.000.000.

OPPFMA's equity in 2017 was Rp11,006,676,428,348, which increased by 91.02% from Rp5,170,678,393,243 in 2016. This increase was mainly caused by surplus in 2017 and deposit refund from the state treasury at an amount of Rp2,000,000,000,000.

Laporan Aktivitas Statements of Activity

Tahun 2017 BPDPKS berhasil membukukan Surplus setelah Setor ke Kas Negara sebesar Rp3.835.998.035.105 naik sebesar 516% dari tahun 2016 sebesar Rp743.974.977.022, kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran dana melalui pembayaran selisih harga biodiesel yang meningkat signifikan di tahun 2016.

OPPFMA successfully recorded a Surplus after Deposit to State Treasury at an amount of Rp3,835,998,035,105, which was an increase by 516% from Rp743,974,977,022. This was mainly due to fund distribution through biodiesel price variance payment which significantly increased in 2016.

109

Tabel Laporan Aktivitas Tahun 2016-2017 (Rp)
Table of Statement of Activity in 2016-2017 (Rp)

| Uraian Description | 2016 | 2017 | Perubahan (%) Change (%) |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Pendapatan Revenue | 12.321.204.623.969 | 14.782.736.571.602 | 19,98 |
| Beban Usaha Operating Expenses | (11.577.229.646.947) | (10.946.738.536.497) | (5,45) |
| Pengembalian setoran dari kas negara Deposit Refund from State Treasury | - | 2.000.000.000.000 | - |
| Setoran ke kas Negara Deposit to State Treasury | (2.000.000.000.000) | - | - |
| Penyesuaian surplus tahun berjalan Current Year Surplus Adjustment | (3.027.019.999) | - | - |
| Kenaikan (penurunan) asset neto tidak terikat Increase (Decrease) in Non-binding Net Assets | (1.259.052.042.977) | 5.835.998.035.105 | 563,52 |
| Aset neto tidak terikat awal tahun Non-binding Net Assets at the Beginning of the Year | 6.429.730.436.220 | 5.170.678.393.243 | (19,58) |
| Aset neto tidak terikat akhir tahun Non-binding Net Assets at the End of the Year | 5.170.678.393.243 | 11.006.676.428.348 | 112,87 |

Analisis Kinerja Keuangan

Financial Performance Analysis

Pendapatan

Revenue

Pendapatan BPDPKS berasal dari Pendapatan operasional jasa layanan yang terdiri dari Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan Pendapatan atas pengelolaan dana. Pada tahun 2017 BPDPKS berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp14.782.736.571.602 meningkat 19,98% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp12.321.204.623.969. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit sebesar 22,12% pada tahun 2017 atau Rp14.277.241.158.165 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp11.690.819.130.021. Kenaikan pendapatan pungutan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya volume ekspor kelapa sawit dan pelemahan nilai kurs rupiah terhadap US dollar, sehingga menyebabkan jumlah pungutan per ton yang diterima oleh BPDPKS lebih besar.

OPPFMA's revenue was earned from Service Operating Income consisting of Income from Oil Palm Estate Levies and Income from Fund Management. In 2017, OPPFMA earned an income of Rp14,782,736,571,602 which was an increase by 19.98% from Rp12,321,204,623,969 in 2016. The increase in income was due to the increase in oil palm estate levies by 22.12% in 2017 or amounting at Rp14,277,241,158,165 from Rp11,690,819,130,021 in 2016. The increase in income from levies was mainly due to improved palm oil export volume and weakening Rupiah exchange rate against US Dollar, which resulted in larger levies per ton for OPPFMA.

Tabel Pendapatan Tahun 2016-2017 (Rp)
Table of Revenue in 2016-2017 (Rp)

| Uraian Description | 2016 | 2017 | Perubahan (%) Change (%) |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan Operasional Jasa Layanan Operating Income from Services | | | |
| Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit Income from Oil Palm Estate Levies | 11.690.819.130.021 | 14.277.241.158.165 | 22,12 |
| Pendapatan atas pengelolaan dana Income from Fund Management | 630.385.493.948 | 505.120.147.304 | (19,87) |
| Pendapatan lainnya Other Incomes | - | 375.266.133 | - |
| Jumlah Pendapatan Total Revenue | 12.321.204.623.969 | 14.782.736.571.602 | 19,98 |

Beban Usaha

Operating Expenses

Beban usaha BPDPKS tahun 2017 sebesar Rp(10.946.738.536.497) menurun 5,45% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp(11.577.229.646.947). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban biodiesel dan beban pengembangan SDM pada tahun 2017.

OPPFMA's operating expenses in 2017 was Rp(10,946,738,536,497), which was a decline by 5.45% from Rp(11,577,229,646,947) in 2016. This was mainly caused by a decline in biodiesel expenses and HR development expenses in 2017.

Tabel Pendapatan Tahun 2016-2017 (Rp)
Table of Operating Expenses in 2016-2017 (Rp)

| Uraian Description | 2016 | 2017 | Perubahan (%) Change (%) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Beban pembayaran selisih harga biodiesel Biodiesel price variance payment expenses | (11.274.650.587.923) | (10.566.772.566.846) | (6,28) |
| Beban surveyor Surveyor expenses | (103.108.856.431) | (121.484.745.241) | 17,82 |
| Beban penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit Oil palm estate regeneration fund expenses | (9.311.029.449) | (78.296.222.696) | 740,90 |
| Beban promosi kelapa sawit Palm oil promotion expenses | (35.366.464.339) | (40.042.947.942) | 13,22 |
| Beban dana riset Research fund expenses | (52.760.887.446) | (37.270.833.248) | (29,36) |
| Beban pengembangan SDM kelapa sawit Palm oil HR development expenses | (44.560.036.252) | (29.059.005.432) | (34,79) |
| Beban perencanaan dana pengelolaan dana Fund planning and management expenses | (601.027.349) | (2.328.223.744) | 287,37 |
| Beban penyaluran dana Fund Distribution Expenses | (11.520.358.889.189) | (10.875.254.545.149) | (5,60) |
| Beban gaji dan tunjangan Salaries and allowances expenses | (37.470.710.066) | (40.503.522.066) | 8,09 |
| Beban sewa Rent expenses | (5.964.760.667) | (14.759.656.405) | 147,45 |
| Beban keperluan perkantoran Office supplies expenses | (3.953.442.713) | (5.646.757.730) | 42,83 |
| Beban jasa profesional Professional service expenses | (2.916.463.725) | (5.267.968.799) | 80,63 |
| Beban lainnya Other expenses | (6.565.380.587) | (5.306.086.348) | (19,18) |
| Beban dukungan layanan manajemen Managerial Services Support Expenses | (56.870.757.758) | (71.483.991.348) | 25,70 |
| Jumlah Pendapatan Total Expenses | (11.577.229.646.947) | (10.946.738.536.497) | (5,45) |

111

Laporan Arus Kas

Statements of Cash Flow

Jumlah Kas dan setara kas BPDPKS tahun 2017 adalah sebesar Rp3.186.919.095.885 menurun 44,37% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5.729.108.049.237. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penempatan kas dan setara kas pada instrument deposito dengan tenor di atas 3 bulan.

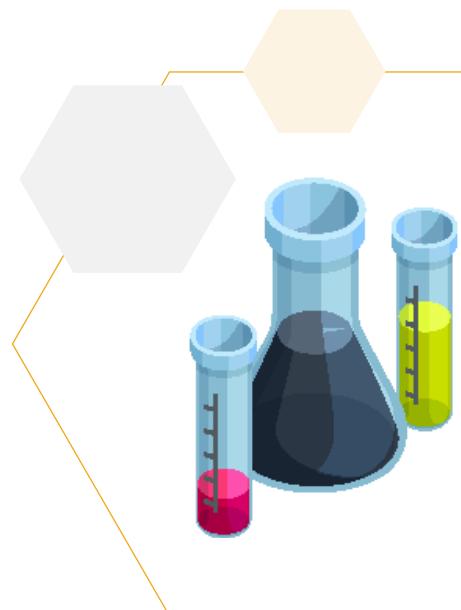
Total Cash and Cash Equivalents in 2017 was Rp3,186,919,095,885, which was a decline by 44.37% from Rp5,729,108,049,237 in 2016. The decline was mainly caused by the posting of Cash and Cash Equivalents as Deposit with above 3-month term.

Analisis Kinerja Keuangan

Financial Performance Analysis

Tabel Pendapatan Tahun 2016-2017 (Rp)
Table of Cash Flow in 2016-2017 (Rp)

| Uraian Description | 2016 | 2017 | Perubahan (%) Change (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net Cash Flow from Operating Activities | 1.303.611.901.381 | 4.021.710.047.373 | 208,51 |
| Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Net Cash Flow Earned from [Used for] Investment Activities | 3.945.123.562.400 | [8.563.899.000.725] | [317,08] |
| Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Net Cash Flow [Used for] Financing Activities | (2.000.000.000.000) | (2.000.000.000.000) | - |
| Kenaikan bersih pada kas dan setara kas Net Increase on Cash and Cash Equivalents | 3.248.735.463.781 | [2.542.188.853.352] | (178,25) |
| Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year | 2.480.372.585.456 | 5.729.108.049.237 | 130,98 |
| Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year | 5.729.108.049.237 | 3.186.919.095.885 | [44,37] |



**Tahun 2017 BPDPKS
berhasil membukukan
Surplus setelah Setor
ke Kas Negara sebesar
Rp1.335.348.783.963**

OPPFMA in 2017 managed to OPPFMA in 2016
managed to book Surplus after Deposit to
State Treasury of Rp1,335,348,783,963

Manajemen Struktur Modal

Capital Structure Management

Struktur Modal

Capital Structure

Struktur modal BPDPKS terdiri dari surplus yang diperoleh yaitu selisih antara pendapatan (pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan dana) dengan beban usaha. Berikut adalah perubahan ekuitas BPDPKS:

OPPFMA capital structure comprises earned surpluses i.e. difference between income (oil palm estate levies and fund management) and operating expenses. The following table shows the changes in OPPFMA's equity:

Tabel Perubahan Ekuitas Tahun 2015-2016 (Rp)
Table of Equity Changes in 2015-2016 (Rp)

| | Penyertaan Modal Pemerintah Government Capital Investment | Akumulasi Surplus Accumulation | Jumlah Ekuitas Total Equity |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Ekuitas pada 01 Juli 2015 Equity Balance on July 1, 2015 | - | - | - |
| Penyesuaian surplus tahun berjalan Current Year Surplus Adjustment | - | (1.006.500) | (1.006.500) |
| Surplus tahun berjalan Current Year Surplus | - | 6.429.731.442.720 | 6.429.731.442.720 |
| Saldo Ekuitas pada 31 Desember 2015 Equity Balance on December 31, 2015 | - | 6.429.730.436.220 | 6.429.730.436.220 |
| Setoran ke kas negara Deposit to State Treasury | - | (2.000.000.000.000) | (2.000.000.000.000) |
| Penyesuaian surplus tahun berjalan Current Year Surplus Adjustment | - | [3.027.019.999] | [3.027.019.999] |
| Surplus tahun berjalan Current Year Surplus | - | 1.335.348.783.963 | 1.335.348.783.963 |
| Saldo Ekuitas pada 31 Desember 2016 Equity Balance on December 31, 2016 | - | 5.762.052.200.184 | 5.762.052.200.184 |

Tahun 2017 telah terjadi penyajian kembali laporan keuangan. Laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas BPDPKS untuk tahun sebelumnya telah disajikan kembali karena BPDPKS belum mengakui akrual atas selisih harga biodiesel pada tanggal 31 Desember 2016. Dampak penyajian kembali pada laporan keuangan 2016 BPDPKS adalah sebagai berikut:

OPPFMA performed a financial restatement in 2017. The financial position and activities for the previous year were restated as OPPFMA has not acknowledged the accrual for the biodiesel price variance on December 31, 2016. The impacts of the 2016 financial restatement are as follows:

| | Dilaporkan Sebelumnya Previously Reported | Penyesuaian Adjustment | Disajikan Kembali Represented |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|
| Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position | | | |
| Akrual selisih harga biodiesel Accrued Biodiesel Price Variance | - | 591.373.806.941 | 591.373.806.941 |
| Aset neto tidak terikat Non-binding Net Assets | 5.762.052.200.184 | (591.373.806.941) | 5.170.678.393.243 |
| Laporan aktivitas Statements of Activity | | | |
| Pembayaran selisih harga biodiesel Biodiesel Price Variance Payment | 10.683.276.780.982 | 591.373.806.941 | 11.274.650.587.923 |

Manajemen Struktur Modal

Capital Structure Management

Mekanisme Review Struktur Modal

Capital Structure Review Method

Pelaksanaan review struktur modal dilakukan BPDPKS melalui monitor pada kegiatan pemungutan dana perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan dana. Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit untuk tahun 2017 sebesar Rp14.277.241.158.165 meningkat 22,12% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp11.690.819.130.021. Sedangkan pendapatan atas pengelolaan dana BPDPKS pada tahun 2017 sebesar Rp505.120.147.304 menurun 19,87% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp630.385.493.948. Penurunan tersebut dikarenakan turunnya suku bunga atas deposito.

The capital structure review was carried out by monitoring the oil palm estate fund collection and fund management activities. The oil palm estate levies for 2017 was amounting to Rp14,277,241,158,165 which was an increase by 22.12% from Rp11,690,819,130,021 in 2016. Whereas income from OPPFMA fund management in 2017 was amounting at Rp505,120,147,304, which was a decline by 19.87% from Rp630,385,493,948 in 2016. The decline was due to decreased deposit interest rate.



Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2017, serta Proyeksi 2018

Comparison of 2017 Target and Realization and 2018 Outlook

Pendapatan BPDPKS tahun 2017 sebesar Rp14.782.736.571.602 atau tercapai 142,89% dari target RBA 2017 sebesar Rp10.345.480.000.00. Selanjutnya sesuai dengan RBA 2018, jumlah pendapatan diproyeksikan sebesar Rp11.992.000.000.000.

Beban usaha BPDPKS tahun 2017 sebesar Rp10.946.738.536.497 atau tercapai 105,62% dari target RBA 2017 sebesar Rp10.364.589.375.975. Selanjutnya sesuai dengan RBA 2018, jumlah beban usaha diproyeksikan sebesar Rp11.992.000.000.000.

OPPFMA's Revenue in 2017 at Rp14,782,736,571,602 was an achievement of 142.89% from the WP&B 2017 target at Rp10,345,480,000,000. Subsequently, according to WP&B 2018, the total income is predicted to reach Rp11,992,000,000,000.

OPPFMA's Operating Expenses in 2017 at Rp10,946,738,536,497 was an achievement of 105.62% from the WP&B 2017 target at Rp10,364,589,375,975. Subsequently, according to WP&B 2018, the total operating expenses are predicted to reach Rp11,992,000,000,000.

Tabel Target dan Realisasi Aktivitas Tahun 2017 (Rp)
Table of Target and Realization of Activities in 2017 (Rp)

| | 2017 | | | Proyeksi RBA 2018 Outlook WP&B 2018 |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| | RBA 2017 | WP&B 2017 | Realisasi Realization | Pencapaian (%) Achievement (%) |
| Pendapatan Revenue | 10.345.480.000.000 | 14.782.736.571.602 | 142,89 | 11.992.000.000.000 |
| Beban Usaha Operating Expenses | 10.364.589.375.975 | 10.946.738.536.497 | 105,62 | 11.992.000.000.000 |
| Surplus setelah Setor ke Kas Negara Surplus setelah Setor ke Kas Negara | 3.835.998.035.105 | | | |

Asumsi Proyeksi Tahun 2018

Assumptions for 2018 Outlook

Angka proyeksi RBA di tahun 2018 ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a) Harga CPO berkisar antara \$650 – \$750 per ton.
- b) Penerimaan berasal dari hasil pemungutan biaya ekspor Crude Palm Oil dan turunannya. Proyeksi besaran ekspor untuk tahun 2018 sebesar 36.000.000 ton, dan penerimaan pungutan pada tahun 2018 sebesar Rp10.759.000.000.000. Namun demikian, melihat realisasi 2017 yang mencapai Rp14.284.246.148.137, direncanakan revisi untuk target pendapatan tahun 2018 menjadi sebesar Rp12.898.000.000.000. Proyeksi di 2018 tersebut menurun sekitar 10% dari realisasi penerimaan pungutan di tahun 2017. Proyeksi penurunan kinerja ekspor ditahun 2018 disebabkan karena adanya asumsi penurunan ekspor sawit ke China (terkait adanya kebijakan penggunaan soybean/kedelai untuk pakan ternak) dan India (adanya kenaikan tarif bea masuk CPO sebesar 100% dan kenaikan pajak impor minyak kelapa sawit olahan sebesar 42%).

The WP&B 2018 outlook is determined based on the following assumptions:

- a) CPO price ranges between US\$650 and US\$750 per ton.
- b) Revenue is sourced from the collection of CPO and CPO derivatives export fees. Exports are estimated to reach 36,000,000 tons in 2018, with income from levies amounting to Rp10,759,000,000,000. Nevertheless, considering that the realization in 2017 has reached Rp14,284,246,148,137, the target income for 2018 was revised to Rp12,898,000,000,000. The estimation declined 10% from the realization of income from levies in 2017. The estimated decline in exports in 2018 is due to the assumption of declining palm oil exports to China (due to a policy specifying the use of soybean for livestock) and India (due to 100% increase in CPO import duty and 42% increase in processed palm oil import tax).

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2017, serta Proyeksi 2018

Comparison of 2017 Target and Realization and 2018 Outlook

- c) Dana yang disediakan untuk jasa verifikasi ekspor produk kelapa sawit oleh surveyor sebesar Rp143.000.000.000 dengan biaya Rp3.000/ ton untuk ekspor sebesar 36.000.000 ton dan biaya pengembangan sistem pungutan ekspor.
- d) Pengelolaan dana menggunakan investasi dengan yield return rata-rata 6% p.a. atau sebesar Rp233.000.000.000, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan trend tingkat suku bunga pasar keuangan. Dan revisi target penerimaan pengelolaan dana direncanakan mencapai Rp300.000.000.000 menyesuaikan dengan perkiraan penerimaan pungutan yang juga meningkat.
- e) Dana yang disediakan untuk biaya pengelolaan dana sebesar Rp4.000.000.000.
- f) Berdasarkan Rapat Komite Pengarah tanggal 19 Desember 2017 diputuskan bahwa alokasi dana program adalah:
 - 1) Peremajaan sampai dengan 22% dengan target 185.000 ha,
 - 2) Sarana Prasarana sampai dengan 2%,
 - 3) Pembayaran Selisih Harga Biodiesel sampai dengan 70% dengan target 3,5 juta KL,
 - 4) Dukungan Riset sampai dengan 2%,
 - 5) Promosi dan Kemitraan sampai dengan 2%,
 - 6) Pengembangan SDM sampai dengan 2%,
 - 7) Dana Cadangan sampai dengan 4%.

Dengan menggunakan target peremajaan sebagai dasar penghitungan maka didapatkan alokasi dana sebagai berikut:

- 1) Peremajaan sebagai dasar perhitungan yaitu target 185.000 ha dikalikan Rp25.000.000/ha ditambah dana pendukung sebesar Rp126.000.000.000 mencapai Rp4.751.000.000.000.
- 2) Pembayaran Selisih Harga Biodiesel yaitu 70/22 x Rp4.751.000.000.000 mencapai Rp15.117.000.000.000.
- 3) Sarana Prasarana, yaitu 2/22 x Rp4.751.000.000.000 mencapai Rp432.000.000.000.
- 4) Riset yaitu 2/22 x Rp4.751.000.000.000 mencapai Rp432.000.000.000.
- 5) Promosi yaitu 2/22 x Rp4.751.000.000.000 mencapai Rp432.000.000.000.
- 6) Pengembangan SDM Sawit yaitu 2/22 x Rp4.751.000.000.000 mencapai Rp432.000.000.000.

- c) The fund provided for palm oil product export verification service by surveyor is Rp143,000,000,000 at Rp3,000/ton for the export of 36,000,000 tons, and export levies system development fees.
- d) Fund management using investment with average yield return 6% p.a. or Rp233,000,000,000, due to a declining trend in the financial market interest rate. Revision was also made to fund management income target at Rp300,000,000,000 which was adjusted to the estimated increase in income from levies.
- e) The fund provided for fund management is Rp4,000,000,000.
- f) According to Steering Committee Meeting dated December 19, 2017, the program funds are allocated for:
 - 1) Replanting up to 22%, targeting 185,000 ha;
 - 2) Facilities and Infrastructure up to 2%;
 - 3) Biodiesel Price Variance Payment up to 70%, targeting 3.5 million KL;
 - 4) Research Support up to 2%;
 - 5) Promotion and Partnership up to 2%;
 - 6) HR Development up to 2%;
 - 7) Reserve Fund up to 4%.

With the replanting target as the basis of calculation, the fund allocation is determined as follows:

- 1) Replanting as the basis of calculation, target 185,000 ha x Rp25,000,000/ha + supporting fund Rp126,000,000,000 = Rp4,751,000,000,000.
- 2) Biodiesel Price Variance Payment, 70/22 x Rp4,751,000,000,000 = Rp15,117,000,000,000
- 3) Facilities and Infrastructure, 2/22 x Rp4,751,000,000,000 = Rp432,000,000,000.
- 4) Research, 2/22 x Rp4,751,000,000,000 = Rp432,000,000,000.
- 5) Promotion, 2/22 x Rp4,751,000,000,000 = Rp432,000,000,000.
- 6) Palm Oil HR Development, 2/22 x Rp4,751,000,000,000 = Rp432,000,000,000.

Namun demikian, Pagu belanja untuk tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp10.992.000.000.000, sehingga untuk alokasi sementara dengan menggunakan pagu tersebut dan persentase alokasi Komite Pengarah yang baru adalah sebagai berikut:

- 1) Peremajaan menjadi Rp2.347.000.000.000.
- 2) Pembayaran Selisih Harga Biodiesel menjadi Rp7.468.000.000.000
- 3) Sarana Prasarana, menjadi Rp213.000.000.000.
- 4) Riset menjadi Rp213.000.000.000.
- 5) Promosi menjadi Rp213.000.000.000.
- 6) Pengembangan SDM Sawit menjadi Rp213.000.000.000.
- g) Dana Cadangan ditetapkan sebesar 4% dari total dana tersedia dikurangi dana dukungan manajemen, untuk tahun 2018 mencapai Rp870.000.000.000.
- h) Dukungan Manajemen, pengeluaran ini untuk membiayai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan operasional BPDPKS. Anggaran Dukungan Manajemen adalah maksimal sebesar 1,25% dari total dana tersedia atau sebesar Rp302.000.000.000. Namun demikian, untuk revisi dengan alokasi sementara menggunakan pagu total Rp10.992.000.000.000, pagu untuk dukungan manajemen belum mengalami perubahan yaitu sebesar Rp177.000.000.000.

1. Target Kinerja Keuangan BPDPKS Tahun 2018

Nevertheless, the expenditure cap for 2018 has been set at an amount of Rp10,992,000,000,000, and therefore the temporary allocation using the cap and the new Steering Committee allocation percentage are as follows:

- 1] Replanting to Rp2,347,000,000,000.
- 2] Biodiesel Price Variance Payment to Rp7,468,000,000,000
- 3] Facilities and Infrastructure to Rp213,000,000,000.
- 4] Research to Rp213,000,000,000.
- 5] Promotion to Rp213,000,000,000.
- 6] Palm Oil HR Development to Rp213,000,000,000.
- g) Reserve Fund is set at 4% from the total available fund - Management Support fund = Rp870,000,000,000 for 2018.
- h) Management Support is an expense used for financing the entire activities relevant to OPPFMA operations. The Management Support Budget is at maximum 1.25% from the total available fund or Rp302,000,000,000. However, with the revision using temporary allocation at the total cap of Rp10,992,000,000,000, the management support cap remains the same at Rp177,000,000,000.

1. OPPFMA Financial Performance Target 2018

Tabel I : Target Kinerja BPDPKS Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar rupiah)
Table I : OPPFMA Performance Target 2018-2022 (in billion Rupiah)

| Uraian Description | 2018 | 2018 (Revisi I) 2018 (1 st Revision) | 2018 [Rev Pagu Max] 2018 [Max Cap Rev] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Pendapatan Total Revenue | 10.992 | 10.992 | 10.992 | 13.538 | 13.455 | 13.458 | 13.616 |
| Saldo Awal Temporer (<i>free cash</i>) Temporary Beginning Balance (<i>free cash</i>) | 11.082 | 11.082 | 11.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Tersedia Available Fund | 22.074 | 22.074 | 22.074 | 13.538 | 13.455 | 13.458 | 13.616 |
| Total Belanja Total Expenditure | (10.992) | (10.992) | (21.208) | (13.009) | (12.929) | (12.932) | (13.084) |
| Dana Cadangan Permanen Tahun Berjalan Permanent Reserve Fund of the Current Year | 653 | 870 | 866 | 529 | 526 | 526 | 532 |
| Surplus (Defisit) Surplus (Deficit) | 10.430 | 10.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Akhir Tahun dari Dana Tahun Berjalan End of Year Balance from Current Year Fund | 11.082 | 11.082 | 866 | 529 | 526 | 526 | 532 |
| Dana Cadangan Permanen Tahun Lalu Permanent Reserve Fund of the Previous Year | 748 | 748 | 748 | 1.614 | 2.143 | 2.668 | 3.194 |
| Total Saldo Kas Akhir Tahun Total Cash Balance at the End of the Year | 11.830 | 11.830 | 1.614 | 2.143 | 2.668 | 3.194 | 3.726 |

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2017, serta Proyeksi 2018

Comparison of 2017 Target and Realization and 2018 Outlook

Tabel II : Proyeksi Arus Kas BPDPKS Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar rupiah)
 Table II : OPPFMA Projection Cash Flow 2018 - 2022 (in billion rupiah)

| No. | Program/Kegiatan/Output Program/Activity/Output | 2018 [awal] 2018 (beginning) | 2018 [Revisi I] 2018 (1 st Revision) | 2018 (Rev Pagu Max) 2018 (Max Cap Rev) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|
| A | Dana Cadangan Temporer (free cash) Tahun Lalu Temporary Reserve Fund (free cash) of the Previous Year | 11.082 | 11.082 | 11.082 | 1.283 | 0 | 0 | 0 |
| B | Dana Cadangan Permanen Tahun Lalu Permanent Reserve Fund of the Previous Year | 748 | 748 | 748 | 1.701 | 2.281 | 2.806 | 3.332 |
| C | Total Dana pada Awal Tahun [A+B] Total Fund at the Beginning of the Year [A+B] | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 2.984 | 2.281 | 2.806 | 3.332 |
| D | Total Penerimaan Pungutan Neto Total Net Income from Levies | 10.616 | 10.616 | 12.755 | 13.152 | 13.129 | 13.073 | 13.140 |
| | 1. Penerimaan Pungutan Income from Levies | 10.759 | 10.759 | 12.898 | 13.298 | 13.275 | 13.218 | 13.286 |
| | 2. Biaya Pungutan Levy Fees | (143) | (143) | (143) | (146) | (146) | (145) | (146) |
| E | Penerimaan Pengelolaan Dana Neto Net Income from Fund Management | 229 | 229 | 296 | 236 | 176 | 235 | 325 |
| | 1. Penerimaan Pengelolaan Dana Income from Fund Management | 233 | 233 | 300 | 240 | 180 | 240 | 330 |
| | 2. Biaya Pengelolaan Dana Fund Management Fee | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (5) |
| F | Dana Tersedia sebelum dukungan manajemen [A+D+E] Available Fund before Management Support [A+D+E] | 21.927 | 21.927 | 24.133 | 14.670 | 13.305 | 13.308 | 13.465 |
| G | Dukungan Manajemen (1,25% x F) Management Support (1.25%xF) | (177) | (177) | (302) | (183) | (166) | (166) | (168) |
| H | Dana setelah dukungan manajemen (F-G) Fund after Management Support (F-G) | 21.750 | 21.750 | 23.831 | 14.487 | 13.138 | 13.142 | 13.297 |
| I | Dana Cadangan Permanen Tahun Berjalan (4% x H) Permanent Reserve Fund of the Current Year (4%xH) | - | 870 | 953 | 579 | 526 | 526 | 532 |
| J | Total Dana Program/Penyaluran (H-I) Total Program Fund/Distribution (H-I) | 21.750 | 20.880 | 22.878 | 13.908 | 12.613 | 12.616 | 12.765 |
| K | Target Program/Penyaluran Program/Distribution Target | (10.668) | (10.668) | (21.595) | (13.908) | (12.613) | (12.616) | (12.765) |
| | 1. Peremajaan Replanting | (550) | (2.347) | (4.751) | (3.060) | (2.775) | (2.776) | (2.808) |
| | 2. Sarana Prasarana Facilities and Infrastructure | (55) | (213) | (432) | (278) | (252) | (252) | (255) |
| | 3. Biodiesel Biodiesel | (9.898) | (7.468) | (15.117) | (9.735) | (8.829) | (8.831) | (8.935) |
| | 4. Riset Research | (55) | (213) | (432) | (278) | (252) | (252) | (255) |
| | 5. Promosi dan Kemitraan Promotion and Partnership | (55) | (213) | (432) | (278) | (252) | (252) | (255) |
| | 6. Pengembangan SDM HR Development | (55) | (213) | (432) | (278) | (252) | (252) | (255) |
| L | Dana Cadangan Permanen Tahun Berjalan (3%), (arahannya komrah sebelumnya) Permanent Reserve Fund of the Current Year (3%), (directives from the previous Steering Committee) | 653 | pindah ke I dan menjadi 4% moved to I and become 4% | | | | | |
| M | Sisa Dana (J-K) Remaining Fund (J-K) | 10.430 | 10.212 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Saldo Kas Akhir Tahun Cash Balance at the End of the Year | 11.830 | 11.830 | 2.984 | 2.281 | 2.806 | 3.332 | 3.864 |
| | 1. Dana Cadangan Temporer (free cash) Temporary Reserve Fund (free cash) | 10.430 | 10.212 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Dana Cadangan Permanen (B+I) Permanent Reserve Fund (B+I) | 1.401 | 1.618 | 1.701 | 2.281 | 2.806 | 3.332 | 3.864 |

Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliates

Sampai dengan 31 Desember 2017, BPDPKS tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

As of December 31, 2017, OPPFMA did not conduct any transactions that contain conflict of interest and/or transactions with affiliates.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring after Accountant's Reporting Date

Sampai dengan 31 Desember 2017, tidak terdapat peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan BPDPKS yang dapat mempengaruhi secara signifikan kewajaran penyajian laporan keuangan BPDPKS.

As of December 31, 2017, there were no significant information after OPPFMA's financial reporting date that significantly affect the fairness of OPPFMA's financial reporting presentation.



Prospek dan Strategi Usaha

Business Outlook and Strategies

Prospek Usaha

Business Outlook

Prospek Perekonomian

Economic Outlook

Perkembangan ekonomi global di tahun 2018 diproyeksikan tumbuh lebih baik dalam tingkatan yang moderat dibandingkan tahun 2017. Perbaikan ekonomi global di tahun 2018 tersebut sejalan dengan permintaan global yang diproyeksikan meningkat dan harga komoditas diperkirakan cenderung stagnan. Volume perdagangan dunia sebagai dampak meningkatnya permintaan global diperkirakan akan tumbuh hingga 3,9 persen di tahun 2018.

Di sisi lain, ekspansi perekonomian negara maju khususnya Amerika Serikat dan negara-negara berkembang Asia diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global meskipun moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih tetap akan berlanjut. Dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 diperkirakan menguat menjadi 3,6 persen, dengan pertumbuhan di negara maju sebesar 1,9 persen dan negara berkembang sebesar 4,8 persen. Berikut grafik perkembangan perekonomian global:

The global economic development in 2018 is predicted to improve at a moderate rate compared to in 2017. The global economic improvement in 2018 is in line with the estimated increase in global demands and the stagnation tendency in commodity price. The global trade volume as a result of the increase in global demand is predicted to grow up to 3.9% in 2018.

On the other hand, developed countries' economic expansion, particularly by the United States and Asian developing countries are estimated to primarily support the global economy, while the moderate growth in China's economy continues. With this condition, the global economic growth in 2018 is estimated to strengthen by 3.6%, with developed countries' growth by 1.9% and developing countries' growth by 4.8%. The chart below illustrates the global economic growth:

Grafik 2.1 : Pertumbuhan Ekonomi Global (%yoY)
Chart 2.1 : Global Economic Growth (% yoY)



2017p &2018p: Proyeksi 2017p &2018p: Projection

Sumber: *World Economic Outlook IMF*, Juli 2017 Sumber: *World Economic Outlook IMF*, Juli 2017

Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan turut mengalami perbaikan. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat mencapai 5,4 persen yang akan didorong terutama oleh peningkatan kinerja investasi dan ekspor. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun 2016-2017 diharapkan memberikan dorongan peningkatan pada sisi investasi di sektor riil.

Pemerintah akan terus mendorong investasi di bidang infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Langkah yang akan ditempuh Pemerintah yaitu dengan mempermudah dan memperbaiki kegiatan iklim dunia usaha, diantaranya melalui implementasi paket kebijakan yang telah dan akan diluncurkan. Langkah tersebut, akan membuat pembangunan Indonesia lebih berkualitas dan berkesinambungan, mengefisienkan birokrasi dan ekonomi di dalam negeri, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan daya saing ekonomi Indonesia.

Kinerja ekspor terutama komoditi nonmigas diharapkan tumbuh lebih baik seiring membaiknya permintaan negara-negara mitra dagang utama. Sementara itu, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap stabil dengan dukungan inflasi yang terkendali dalam level yang rendah, sedangkan konsumsi pemerintah akan dipengaruhi oleh kelanjutan kebijakan efisien pada belanja operasional yang tidak produktif.

Untuk mengakselerasi perekonomian tahun 2018, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengefektifkan belanja negara sesuai prioritas yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM terutama bidang pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan.

Sumber: Bappenas dan Kemenkeu Source: Bappenas and Ministry of Finance

Along with the improvement in global economy, Indonesia's economic performance in 2018 is also predicted to improve. Indonesia's economic growth is estimated to reach 5.4%, particularly due to support from increased investments and exports. Tax amnesty policy implemented throughout 2016-2017 is hoped to have encouraged investments in real sectors.

The Government will continue encouraging investments in infrastructure in order to enhance competitiveness and strengthen national connectivity. The measures to be taken by the Government are facilitating and improving the activities of business climate by implementing existing or future policy packages. These measures will improve the quality and sustainability of Indonesia's development, the efficiency of domestic bureaucracy and economy, the independence of the nation, and the competitiveness of economy.

121

Indonesian exports, particularly non-oil and gas commodities, are expected to improve with the recovered demands of the main business partnering countries. Household consumptions are predicted to remain stable along with controlled inflation at a low level. Government consumptions, on the other hand, will be affected by continued efficiency policy of non-productive operating expenditures.

For economic acceleration by 2018, the Government remains committed to improve the effectiveness of state expenditure according to priority, i.e. construction of infrastructure, improvement of HR quality in education and health, reduction of poverty, and reduction of inequality.

Prospek dan Strategi Usaha Business Outlook and Strategies

Prospek Industri Crude Palm Oil (CPO) Crude Palm Oil (CPO) Industry Outlook

Berdasarkan data Oil World tahun 2017, Empat minyak nabati utama dunia yaitu minyak sawit, minyak kedelai, minyak bunga matahari dan minyak *rapeseed* mencakup 85-90 persen konsumsi minyak nabati dan hewani global. Pangsa pasar terbesar dikuasai oleh minyak sawit (39%), minyak kedelai (33%), pangsa minyak *rapeseed* (17%) dan minyak bunga matahari (10%). Oleh karena itu perubahan produksi dan konsumsi keempat minyak nabati tersebut sangat mempengaruhi pasar minyak nabati dunia.

Dalam kondisi normal, tambahan produksi dari keempat minyak nabati utama dunia mencapai 5,4% juta ton per tahun yang disumbang oleh minyak sawit (47,5%), minyak kedelai (31,2%), minyak bunga matahari (6,9%) dan minyak *rapeseed* (14,3%). Sementara itu untuk kebutuhan konsumsi edible oil global, tambahan konsumsi keempat minyak nabati tersebut sekitar 5,4 juta ton per tahun yakni tambahan konsumsi minyak sawit (2,3 juta ton), minyak kedelai (1,6 juta ton), minyak bunga matahari (0,4 juta ton) dan minyak *rapeseed* (0,9 juta ton).

Data ini memberikan arah perkembangan yang positif. Dengan tambahan produksi tersebut maka dapat diestimasi produksi minyak nabati ke depan dimana CPO memiliki pertambahan yang paling besar dibandingkan dengan tiga sumber minyak nabati lainnya. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan total produksi minyak sawit Indonesia tahun 2018 sebanyak 38,35 juta ton. Angka itu terdiri dari total penggunaan untuk Domestik sebesar 16.696.961 dan Eksport sebesar 21.654.599.

The Oil World data in 2017 recorded that the world's four vegetable oils consisting of palm oil, soybean oil, sunflower oil, and rapeseed oil dominate 85-90% of the global vegetable and animal oil consumptions. Palm oil has the largest market share (39%), followed by soybean oil (33%), rapeseed oil (17%), and sunflower oil (10%). This is why a change in the production and consumption of these four oils will highly affect the world's vegetable oil market share.

In normal condition, additional production of these four oils will reach 5.4% million tons per annum, with contribution from palm oil by 47.5%, soybean oil by 31.2%, sunflower oil by 6.9%, and rapeseed oil by 14.3%. For global edible oil consumption requirements, total additional consumptions for these four vegetable oils reaches around 5.4 million tons per annum, comprising palm oil by 2.3 million tons, soybean oil by 1.6 million tons, sunflower oil by 0.4 million tons, and rapeseed oil by 0.9 million tons.

The data leads to a positive direction of growth. The additional production can be used as the basis for the estimation of future vegetable oil production, in which CPO shows higher additions as compared to the other three types of vegetable oils. The IPOA projects a total of 38.35 million tons of Indonesian palm oil production for 2018. The figure consists of total domestic consumption amounting to 16,696,961 tons, and exports amounting to 21,654,599 tons.

Tabel Proyeksi Produksi dan Penggunaan Minyak Sawit Tahun 2017-2020 (Ton)
Table of Palm Oil Production and Utilization Outlook in 2017-2020 (Ton)

| Tahun Year | Total Produksi Total Production | Penggunaan Utilization | | | | | | | | | | Total Penggunaan Total Utilization | |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| | | Biodiesel | | Minyak Goreng, Margarin, Shortening, RBD Oil Cooking Oil, Margarine, Shortening, RBD Oil | | | | Oleochemical | | CPO | | | |
| | | Domestik Domestic | Eksport Export | Domestik Domestic | Eksport Export | Domestik Domestic | Eksport Export | Domestik Domestic | Eksport Export | Domestik Domestic | Eksport Export | | |
| 2017 | 36.525.294 | 9.189.373 | 1.500.000 | 6.301.724 | 14.139.665 | 657.524 | 1.178.513 | 3.558.495 | 16.148.621 | 20.376.673 | | | |
| 2018 | 38.351.560 | 9.522.360 | 1.500.000 | 6.490.776 | 14.281.062 | 683.825 | 1.216.473 | 4.657.064 | 16.696.961 | 21.654.599 | | | |
| 2019 | 40.269.138 | 9.855.347 | 1.500.000 | 6.685.499 | 14.423.872 | 711.178 | 1.255.631 | 5.837.611 | 17.252.024 | 23.017.114 | | | |
| 2020 | 42.282.594 | 10.188.333 | 1.500.000 | 6.886.064 | 14.568.111 | 739.625 | 1.296.022 | 7.104.439 | 17.814.022 | 24.468.572 | | | |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan. Penggunaan minyak sawit domestik terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel. Minyak sawit yang dieksport terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan RBD oil sebagai bahan baku penting dalam pembuatan sabun mandi, sabun cuci, dan produk kebersihan dan perawatan diri lainnya.

Sampai dengan tahun 2020 luas area lahan perkebunan kelapa sawit diperkirakan juga akan mengalami peningkatan sebesar 5% setiap tahun. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut diperkirakan akan dikuasai terutama oleh rakyat dengan penguasaan terhadap lahan meningkat ±7% setiap tahun sehingga berkontribusi sebesar 50,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rakyat akan meningkat seiring dengan peran rakyat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan. Proyeksi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam lima tahun ke depan ditunjukkan dalam tabel berikut.

From the table above, it can be assumed that Indonesian palm oil industry improves. Domestically, palm oil is mainly used for meeting biodiesel requirements. Exported palm oil is particularly used to meet food requirements such as cooking oil, margarine, shortening, and RBD oil as important raw materials in the production of bath soap, laundry soap, and other hygiene and sanitary products.

By 2020, the oil palm estate areas are also predicted to grow by 5% per annum. These oil palm estates are predicted to be owned by particularly the community, with land tenure increasing ±7% annually, which will contribute around 50.61%. This indicates that community welfare will improve along with people's role in future oil palm estate development. The projection of oil palm estate development for the next five years is shown in the following table.

Tabel Proyeksi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2016-2020
Table of Oil Palm Estate Development Outlook in 2016-2020

| Tahun Year | Penguasaan Lahan (ha) Land Tenure | | | Total Luas Area (ha) | Kontribusi (%) Contribution (%) | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | Rakyat Community | Swasta Private | BUMN SOE | | Rakyat Community | Swasta Private | BUMN SOE |
| 2017 | 36.525.294 | 9.189.373 | 1.500.000 | 6.301.724 | 14.139.665 | 657.524 | 1.178.513 |
| 2018 | 38.351.560 | 9.522.360 | 1.500.000 | 6.490.776 | 14.281.062 | 683.825 | 1.216.473 |
| 2019 | 40.269.138 | 9.855.347 | 1.500.000 | 6.685.499 | 14.423.872 | 711.178 | 1.255.631 |
| 2020 | 42.282.594 | 10.188.333 | 1.500.000 | 6.886.064 | 14.568.111 | 739.625 | 1.296.022 |

Sumber: data diolah GAPKI Sumber: data diolah GAPKI

Prospek dan Strategi Usaha Business Outlook and Strategies

Strategi usaha BPDPKS dalam rangka menghadapi tantangan dan menangkap peluang pada industri kelapa sawit mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Rencana Strategis Kementerian pertanian dan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian yang disusun dalam Rencana Strategis Bisnis BPDPKS Tahun 2015-2019. Penyusunan Rencana Strategis ditujukan untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit nasional terutama sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun.

BPDPKS melakukan analisis kondisi internal dan eksternal sebagai upaya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) dalam 5 tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut terdiri dari:

- Menata organisasi dan melengkapi perangkat-perangkat hukum (peraturan/ketentuan/keputusan) sebagai landasan untuk memberikan layanan yang prima dalam rangka pencapaian visi dan misi;
- Membangun komitmen dengan para pihak yang memiliki hubungan (termasuk semua pemangku kepentingan) dalam pemungutan biaya, pengalokasian, dan pengelolaan DPKS;
- Menerapkan standar pelayanan yang terukur dengan memperhatikan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mempersiapkan sistem pemberian rewards dan punishment yang memotivasi pencapaian kinerja;
- Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas kewenangan dalam pengelolaan DPKS;
- Meningkatkan koordinasi, sinergi dan membangun kemitraan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan dan lembaga pengelolaan dana sejenis; dan
- Membangun sistem pelaksanaan tugas dan fungsi berbasiskan teknologi.

Berbagai tantangan tersebut menjadi acuan langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh BPDPKS ke depan. Sasaran strategis tersebut telah dimuat dalam Rencana Strategis Bisnis BPDPKS Tahun 2015 - 2019 yang ditunjukkan dalam gambar berikut:

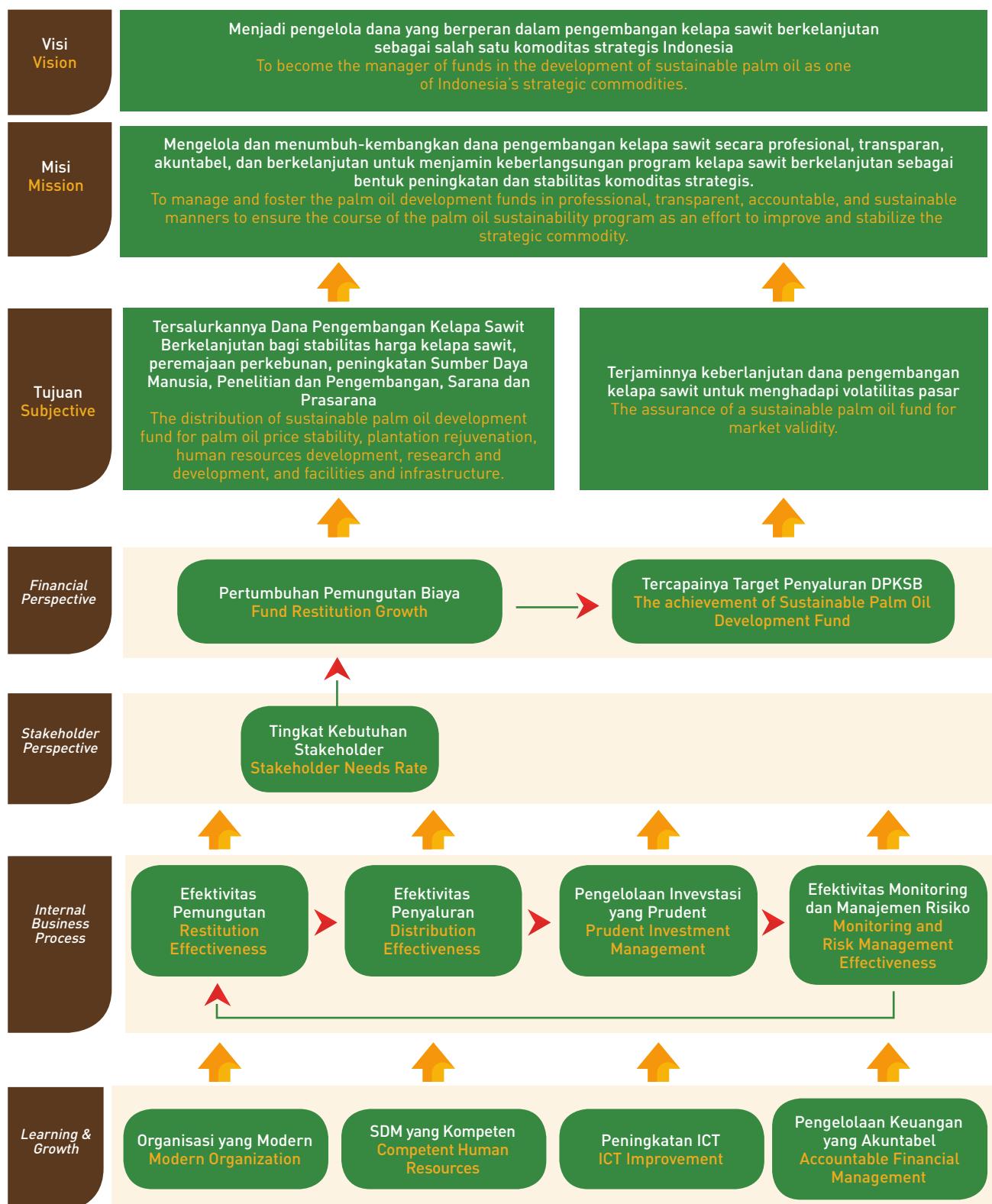
OPPFMA's business strategies to face challenges and seize the opportunities in palm oil industry refers to the Strategic Plans of the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture, and the Ministry of Industry, which are compiled in OPPFMA Business Strategic Plan 2015-2019. The preparation of the Strategic Plan aims at supporting the development of national palm oil industry primarily as an effort to increase price, strengthen and build downstream industry.

OPPFMA analyzes the internal and external conditions as an effort to identify challenges faced in managing CPO Fund in the next five years. These challenges include:

- Administering organization and completing legal devices (regulations/provisions/decrees) as the platform to provide excellent services in achieving vision and mission;
- Building commitments with related parties (including all stakeholders) in the collection of duties, allocations, and management of CPO Fund;
- Applying measured service standards by prioritizing professionalism in the implementation of duties and functions;
- Enhancing human resource quality and quantity while preparing reward and punishment system to motivate performance achievement;
- Developing policies to strengthen and expand authorization in CPO Fund management.
- Improving coordination and synergy and building long-term partnership with stakeholders and similar fund management agencies; and
- Developing technology-based duties and functions implementation system.

These challenges are the foundation for the strategic measures to be implemented by OPPFMA in the future. These strategic goals are contained in OPPFMA Business Strategic Plan 2015-2019 as shown in the following figure.

Gambar Peta Strategi BPDPKS 2015-2019
Figure of OPPFMA 2015-2019 Strategy Map



05



Tata Kelola Perusahaan

OPPFMA Governance



EMPLOYEE

TEAM BUILDING AND SKILL IMPROVEMENT PROGRAM

MERIT SAVANA SENTUL
30 NOVEMBER - 3 DECEMBER 2016



Tata Kelola BPDPKS

Corporate Governance

Sebagai wujud tanggungjawab BPDPKS kepada stakeholder maupun Komite Pengarah, BPDPKS senantiasa menerapkan Tata Kelola Badan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam setiap kegiatan usahanya, dalam rangka meningkatkan nilai BPDPKS jangka panjang, baik bagi seluruh **stakeholder maupun Komite Pengarah.**

To demonstrate OPPFMA accountability to stakeholders and the Steering Committee, OPPFMA constantly implements Good Corporate Governance (GCG) in each and every business activity. It aims to improve long term corporate value, both for the stakeholders and the Steering Committee.



Pendahuluan

Introduction

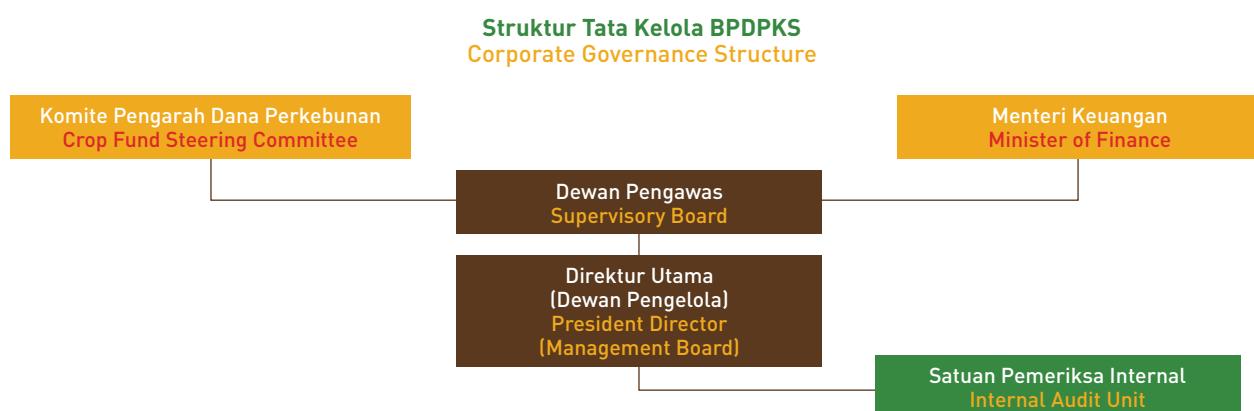
128

BPDPKS selalu berupaya untuk dapat menerapkan implementasi GCG pada setiap lini bisnisnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi dan tanggung jawab) guna mempertahankan eksistensi BPDPKS dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang.

Dalam rangka mendukung berjalannya implementasi Tata Kelola BPDPKS yang baik, BPDPKS membentuk Struktur Tata Kelola sebagai berikut:

OPPFMA constantly strives to implement GCG in every business line based on GCG principles (transparency, accountability, fairness, independence, and responsibility) while maintaining existence and facing challenges and business competition in the future.

To support the streamlined GCG implementation, OPPFMA established the following Governance Structure:



Selain pembentukan struktur tata kelola BPDPKS, BPDPKS juga sedang menyusun kebijakan-kebijakan operasional dalam rangka mendukung terlaksananya penerapan GCG di BPDPKS, saat ini tahun buku 2017, BPDPKS telah mengimplementasikan Sistem Keuangan yang Terintegrasi/*Enterprise Resource Planning* (ERP), *e-billing* dan penerapan persuratan secara *paper less* (*e-office*).

Informasi Pengelolaan Keuangan BPDPKS Financial Management Information

BPDPKS merupakan instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh.

In addition to establishing the corporate governance structure, OPPFMA also prepares operational policies that support the implementation of GCG at its environment. For the fiscal year 2017, OPPFMA has implemented Integrated Financial System/Enterprise Resource Planning (ERP), *e-billing*, and paperless office systems.

OPPFMA was established as a governmental institution which fully applies the Public Service Agency financial model pursuant to Decree of the Minister of Finance Number 650/PMK.01/2015 concerning the Stipulation of OPPFMA at the Ministry of Finance as a Governmental Institution which Fully Applies the Public Service Agency Financial Management.



Komite Pengarah Dana Perkebunan

Crop Fund Steering Committee

Komite Pengarah Dana Perkebunan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada pengelola BPDPKS.

Komite Pengarah Dana Perkebunan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Pasal 25 dan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

The Crop Fund Steering Committee was established to give directives to OPPFMA management. The Crop Fund Steering Committee, in carrying out its duties and responsibilities, adheres to the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 24 of 2015 concerning Crop Fund Collection Article 25 and Presidential Regulation Number 61 of 2015 concerning Collection and Use of CPO Fund.



Tugas dan Kewajiban Komite Pengarah Dana Perkebunan

Duties and Responsibilities of Crop Fund Steering Committee

Tugas pokok Komite Pengarah ada dua yakni memberikan arahan kebijakan, visi, misi dan kebijakan dari penggunaan dana perkebunan kelapa sawit terutama menetapkan rancangan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kemudian, tugas utama berikutnya adalah menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas dan Direktur Eksekutif.

Adapun tugas Komite Pengarah Dana Perkebunan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; dan
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio.

There are two principal duties of the Steering Committee, namely to provide directives for the vision, mission, and policies on the use of CPO fund mainly in implementing sustainable palm oil development and management policy plan, and to appoint and assign the Supervisory Board and Executive Directors.

The duties of the Crop Fund Steering Committee as contained in the Presidential Regulation Number 61 of 2015 concerning Collection and Use of CPO Fund are as follows:

1. Formulating policies in the collection and utilization of funds, including asset allocation policy based on portfolio approach; and
2. Conducting supervision on the implementation of policies in the collection and utilization of funds, including asset allocation policy based on portfolio approach.

Komposisi Komite Pengarah Dana Perkebunan

Composition of Crop Fund Steering Committee

Komite Pengarah Dana Perkebunan merupakan jabatan tetap dan memperbolehkan jabatan *ex-officio* dari kementerian terkait. Komite Pengarah terdiri atas:

1. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Anggota:
 - a. Menteri Pertanian;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Perindustrian;
 - d. Menteri Perdagangan;
 - e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - f. Menteri BUMN.
 - g. Menteri BAPENAS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Sekretariat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Sekretariat Komite Pengarah.
2. Melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan
3. Menunjuk narasumber utama (*prominent*) yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit, dan eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya.

Sekretariat Komite Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Membantu Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam melakukan pengawasan dan penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Memberikan dukungan teknis penyelenggaraan diseminasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
4. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite Pengarah dan/atau anggota Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

The Crop Fund Steering Committee is a permanent position which allows ex-officio positions from relevant ministries. The Steering Committee consists of:

1. Chair: Coordinating Minister for Economic Affairs;
2. Members:
 - a. Minister of Agriculture;
 - b. Minister of Finance;
 - c. Minister of Industry;
 - d. Minister of Trade;
 - e. Minister of Energy and Mineral Resources;
 - f. Minister of SOEs;
 - g. Minister of National Development Planning.

In running its duties, the Steering Committee may take the following measures:

1. Establishing the Secretariat of the OPPFMA Steering Committee, which is subsequently called as the Steering Committee Secretariat.
2. Involving ministries, institutions, local governments, and other relevant parties; and
3. Assigning prominent source from palm oil business owners, palm oil-based industry business owners, and CPO and/or CPO derivative commodity exporters.

The Steering Committee Secretariat has the following duties:

1. Providing technical and administrative assistances for the implementation of the OPPFMA Steering Committee duties;
2. Assisting the OPPFMA Steering Committee in monitoring and utilizing the CPO Fund;
3. Providing technical assistance for the dissemination of the OPPFMA Steering Committee activities; and
4. Performing other relevant duties assigned by the Chair and/or Members of the Steering Committee.

Komite Pengarah Dana Perkebunan Crop Fund Steering Committee

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komite Pengarah dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan serta pihak lain yang dipandang perlu. Selanjutnya Sekretariat Komite Pengarah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komite Pengarah BPDPKS secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

During the performance of its duties, the Steering Committee Secretariat may involve any Ministries/Non-Ministry Governmental Institutions, Local Governments, stakeholders, or other parties considered relevant. Subsequently, the Steering Committee Secretariat reports the outcome of its duties to the Chair of OPPFMA Steering Committee on periodical or incidental basis.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah Dana Perkebunan Crop Fund Steering Committee Activities Implementation Report

Selama tahun 2017, Komite Pengarah Dana Perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam pengawasan terhadap BPDPKS, diantaranya adalah:

- 1) Pelaksanaan Rapat Komite Pengarah BPDPKS pada hari Rabu, 1 Februari 2017 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Rapat Komite Pengarah memutuskan bahwa Direktur Utama BPDPKS yang diusulkan Komite Pengarah untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah Sdr. Dono Boestami, M.Sc.
 2. Rapat Komite Pengarah menyepakati bahwa alokasi dana dan rencana kerja BPDPKS tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Peremajaan tanaman kelapa sawit perkebunan swadaya sebesar 5%
 - b. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit sebesar 0,5%
 - c. Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit sebesar 0,5%
 - d. Promosi perkebunan kelapa sawit sebesar 0,5%
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit sebesar 0,5%
 - f. Pengembangan biodiesel sebesar 90%
 - g. Dana cadangan sebesar 3%
 3. Rapat Komite Pengarah menyepakati bahwa imbalan manajemen BPDPKS tahun 2017 maksimum 1,25% dari total Dana yang dikelola.
- 2) Pelaksanaan Rapat Komite Pengarah BPDPKS dengan ini disampaikan keputusan rapat dimaksud sebagai berikut:

Throughout 2017, the Crop Fund Steering Committee has performed a number of activities in order to monitor OPPFMA, i.e:

- 1) Implementation of OPPFMA Steering Committee meeting on Wednesday, February 1, 2017, at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, with the following matters to report:
 1. The Steering Committee meeting decided to appoint Mr. Dono Boestami, M.Sc. who was nominated by the Steering Committee as the President Director of OPPFMA President Director of OPPFMA.
 2. The Steering Committee meeting agreed upon the allocation of funds and work plan for OPPFMA for 2017 as follows:
 - a. Oil palm replanting for independent smallholdings at 5%
 - b. Oil palm estate human resources development at 0.5%
 - c. Oil palm estate research and development at 0.5%
 - d. Oil palm estate promotion at 0.5%
 - e. Oil palm estate facilities and infrastructure provision at 0.5%
 - f. Biodiesel development at 90%
 - g. Reserve fund at 3%
 3. The Steering Committee meeting approved the allocation of maximum 1.25% for management fee for 2017 of the total funds managed.
- 2) The OPPFMA Steering Committee meeting made the following resolutions:

1. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa uang Rp2 triliun dari BPDPKS akan dikembalikan pada tahun 2017;
 2. Penurunan biaya konversi CPO ke Biodiesel dari USD 125/MT menjadi USD 100/MT;
 3. Komite Pengarah menyetujui usulan Kementerian ESDM tentang insentif untuk PSO dan Non PSO, yaitu:
 - a. Insentif PSG ditentukan maksimal sebesar Rp4.000/liter
 - b. Insentif Non PSO ditentukan maksimum sebesar Rp2.000/liter
 - c. Usulan Kementerian ESDM akan ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan terkait
 4. Pemerintah akan menerapkan pungutan progresif untuk biodiesel jika harga CPO KPB diatas USD 700/ton. Setiap kenaikan USD 50/ton akan dikenakan tambahan pungutan sebesar 20% dari pungutan awal;
 5. Penentuan alokasi Biodiesel PSO akan dilakukan penyesuaian dari sistem penunjukan langsung menjadi sistem lelang. Untuk industri biodiesel skala kecil, akan mendapatkan alokasi dengan harga yang ditentukan sesuai lelang.
 6. Untuk periode transisi penentuan alokasi Biodiesel PSO akan tetap menggunakan mekanisme yang berlaku saat ini sampai ditetapkan mekanisme yang baru;
 7. Akan dilakukan revisi PMK tentang pelaksanaan *pilot project program replanting*.
- 3) Pelaksanaan Rapat Komite Pengarah BPDPKS pada hari Senin, 17 Juli 2017 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melaporkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Rapat Komite Pengarah menyepakati bahwa Komite Pengarah dan Kementerian Keuangan akan memisahkan antara Dana Kelolaan atau *Fund* (98,75%) dan imbalan manajemen (*management fee*) Pengelola Dana BPDPKS (maksimum 1,25%) melalui:
 - a. *Restatement* pembukuan BPDPKS menjadi 2 pembukuan yaitu Pembukuan Dana Kelolaan dan pembukuan Pengelola Dana.
 - b. BPDPKS mendapatkan imbalan jasa manajemen maksimum 1,25% dari total dana yang dikelola. Dana pungutan sebesar 98.75% merupakan dana kelolaan yang pemanfaatannya diputuskan oleh Komite Pengarah.
1. The Ministry of Finance confirmed that a sum of money amounted Rp2 trillion from OPPFMA will be returned in 2017.
 2. The reduction of CPO conversion cost to biodiesel, from USD 125/MT to USD 100/MT.
 3. The Steering Committee approved the Ministry of Energy and Mineral Resources' proposal on incentives for PSO and Non-PSO, as follows:
 - a. PSO incentives are at maximum Rp4,000/liter.
 - b. Non-PSO incentives are at maximum Rp2,000/liter.
 - c. The proposal will be actionable following amendments to relevant regulations.
 4. The Government will apply progressive collection for biodiesel for CPO KPB price above USD 700/ton. Each USD 50/ton increment will be subject to additional collection by 20% from the initial levies.
 5. The determination of PSO biodiesel allocation will be changed, from direct appointment to bidding. Small scale biodiesel industries will receive allocations at the price specified through bidding.
6. During transitional period, the PSO biodiesel allocation will be determined using the currently applied method until a new system is established.
 7. A revision will be made to the Regulation of the Minister of Finance concerning pilot project for replanting program.
- 3) The implementation of OPPFMA Steering Committee meeting on Monday, July 17, 2017, at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, with the following matters to report:
1. The Steering Committee meeting agreed that the Steering Committee and the Ministry of Finance will separate between the Managed Fund (98.75%) and the Management Fee (at maximum 1.25%) through:
 - a. The OPPFMA accounting restatement, into two entries for Managed Fund and Fund Manager.
 - b. OPPFMA will receive management fee at maximum 1.25% from the total managed fund. The collected fund of 98.75% consists of managed fund whose utilization shall be determined by the Steering Committee.

Komite Pengarah Dana Perkebunan Crop Fund Steering Committee

- c. Akan dibuat dokumen SOP untuk memisahkan Dana Kelolaan dan imbalan jasa Pengelola Dana yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku Menteri teknis.
2. Rapat Komite Pengarah menyepakati pengembalian dana Rp 2 triliun harus dilakukan segera dan teknisnya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
3. Rapat Komite Pengarah menyepakati tambahan volume penyerapan sebesar 1 juta kiloliter agar mencapai target 2017 sebesar 3,5 juta kiloliter. Tambahan penyerapan sebesar 1 juta kilo liter memerlukan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPDPKS.
4. Penyerapan biodiesel disepakati untuk diserap penuh. Selisih kurang dibatasi maksimal Rp 4.000/liter. Jika selisih lebih dari Rp 4.000/liter akan didiskusikan lebih lanjut melalui rapat Komite Pengarah. Kewenangan Komite Pengarah dalam menentukan besaran selisih kurang akan diatur lebih lanjut dalam Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015.
5. Peremajaan kelapa sawit akan diperluas dengan pilot project seluas 30 ha x 1000 plot. Perusahaan besar kelapa sawit diharapkan menjadi *avalis/off taker*.
6. Draft Perpres ISPO akan dibahas pada rapat Komite Pengarah yang akan datang.

c. A SOP will be devised to separate between both funds, to be signed by the Minister of Finance as the technical minister.

2. The Steering Committee meeting agreed that the return of the sum of money amounting Rp2 trillion needs to be done immediately, whose procedure is to be coordinated by the Coordinating Ministry for Economic Affairs and the Ministry of Finance.
3. The Steering Committee meeting stipulated the addition of absorption volume at an amount of 1 million kiloliter in order to aim the target of 3.5 million kiloliter by 2017. The addition to absorption at 1 million kiloliter requires revision to OPPFMA WP&B.
4. Full biodiesel absorption was agreed upon. Plus/minus difference is limited to a maximum of Rp4,000/liter. Plus difference exceeding Rp4,000/liter will be further discussed in Steering Committee meeting. The Steering Committee's authority in determining the value of minus difference will be further stipulated in the Second Amendment to Presidential Regulation Number 61 of 2015.
5. Oil palm replanting will be expanded through pilot project at 30 ha x 1,000 plots. Large palm oil companies are expected to act as avalist/off-taker.
6. The draft Presidential Regulation on ISPO will be discussed in the next Steering Committee meeting(s).



Dewan Pengawas

Supervisory Board



135

Dewan Pengawas merupakan organ utama BPDPKS yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.

Supervisory Board is OPPFMA's main organ in charge of and collectively responsible for supervising the management policies, advising the Directors, and ensuring the Company's implementation of GCG.

Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Requirements, Appointment, and Dismissal of the Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas BPDPKS wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yaitu mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha BPDPKS serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Selain itu calon anggota Dewan Pengawas juga memenuhi persyaratan kepatutan lainnya yaitu tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau berkaitan dengan sektor keuangan.

The members of Supervisory Board at OPPFMA are required to meet the fit and proper requirements, i.e. having sufficient knowledge in OPPFMA's line of business while having proper integrity, competence, and reputation. A Supervisory Board candidate must also meet other proper requirements, i.e. never been declared as bankrupt, never been serving as the member of a Board of Directors or a Supervisory Board found guilty of causing bankruptcy to an entity, and never been punished due to a crime that results in the Country's financial loss and/or any financial crimes.

Dewan Pengawas Supervisory Board

Pengangkatan Dewan Pengawas berlandaskan pada uji kemampuan dan kepatutan Komite Pengarah. Adapun untuk pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan apabila:

- Masa jabatannya berakhir
- Mengundurkan diri
- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
- Meninggal dunia
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara
- Tidak memenuhi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar dan/atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

The appointment of Supervisory Board depends on the fit and proper test. A member of the Supervisory Board can be discharged under the following reasons:

- End of tenure
- Resignation
- Inability to perform well
- Death
- Involvement in any action detrimental to the Company and/or the Country
- Failure to meet or non-compliance with applicable laws and regulations or Articles of Association and/or found guilty by court verdict with permanent legal force.

Program Pengenalan Dewan Pengawas Inauguration for New Supervisory Board Members

136

Latar belakang Anggota Dewan Pengawas yang merupakan representasi dari beberapa Komite Pengarah, Dewan Pengawas BPDPKS selalu mengadakan program pengenalan anggota Dewan Pengawas baru dengan harapan para anggota Dewan Pengawas dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif dan sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi BPDPKS.

Pada tahun 2017 tidak ada Pengangkatan anggota Dewan Pengawas baru, sehingga tidak ada penyelenggaraan program pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas baru.

Given that the Supervisory Board members come from different backgrounds, OPPFMA Supervisory Board will always provide inauguration for its new members so that they can get along well with the other members and hence can cooperate as a solid, comprehensive, and effective team.

There were no new Supervisory Board members appointed in 2017, and therefore such inauguration was not held.

Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Number and Composition of Supervisory Board

Pada tahun 2017, Komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan terdiri dari Ketua Dewan dan Anggota Dewan Pengawas. Jumlah Dewan Pengawas BPDPKS sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang dan unsur Profesional sebanyak 3 (tiga) orang. Dewan Pengawas dari unsur pemerintah berasal dari pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian

As of 2017, the Supervisory Board, in compliance with the Decree of the Minister of Finance, consisted of Board chair and members. The Supervisory Board is composed of 9 (nine) members, consisting of 6 (six) governmental representatives and 3 (three) professionals. The governmental representatives in the Supervisory Board come from the Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of Industry, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Trade, and the Coordinating Ministry for Economic Affairs who were proposed by

Koordinator Bidang Perekonomian yang diusulkan oleh masing-masing menteri kepada Menteri Keuangan. Sedangkan Dewan Pengawas dari unsur profesional diusulkan oleh Komite Pengarah kepada Menteri Keuangan.

respective ministers to the Minister of Finance. Meanwhile, professional members of the Supervisory Board were proposed by the Steering Committee to the Minister of Finance.

Komposisi Dewan Pengawas BPDPKS tahun 2017 Composition of OPPFMA Supervisory Board in 2017

| Nama Name | Jabatan Position | Representative | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment |
|-----------------------|---------------------|---|--|
| Rusman Heriawan | Ketua Chairman | Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture | |
| Lukita Dinarsyah Tuwo | Anggota Member | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Ministry for Economic Affairs | |
| Suahasil Nazara | Anggota Member | Kementerian Keuangan Ministry of Finance | |
| Arlinda | Anggota Member | Kementerian Perdagangan Ministry of Trade | |
| Rida Mulyana | Anggota Member | Kementerian ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources | |
| Panggah Susanto | Anggota Member | Kementerian Perindustrian Ministry of Industry | |
| Gamal Nasir | Anggota Member | Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture | |
| Loso Judijanto | Anggota Member | Kementerian Negara PPN/ Bappenas Ministry of National Development Planning/Bappenas | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/2015 Minister of Finance Decree Number 714/ KMK.05/2015 dated June 26, 2015 |
| Joko Supriyono | Anggota Member | GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) IPOA (Indonesian Palm Oil Association) | |

137

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Diversity in Supervisory Board Composition

BPDPKS tidak menerapkan suatu kebijakan khusus terkait dengan keberagaman komposisi Dewan Pengawas, akan tetapi BPDPKS telah memperhatikan keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dengan memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia.

Informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja jenis kelamin dan usia Dewan Pengawas lebih jelasnya telah diuraikan pada Bab Laporan Kepada Pemegang Saham dibagian profil Dewan Pengawas dalam Laporan Tahunan ini.

Disamping itu, dalam rangka menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan BPDPKS, BPDPKS memiliki Dewan Pengawas dari pihak independen yang dijabat oleh Sdr. Joko Supriyono.

OPPFMA does not specifically enforce a policy on the diversity of the Supervisory Board composition. Nevertheless, the diversity of the Supervisory Board composition has been taken into account as seen from different backgrounds of education, work experience, sex, and age of its members.

Information on education, work experience, sex, and age of the Supervisory Board are described in details in Chapter of Report to Shareholders, in the profile of the Supervisory Board of this Annual Report.

In order to nurture an objective and independent climate as well as maintaining fairness and providing protection to corporate interests, the Supervisory Board also includes an independent member, which is currently assumed by Mr. Joko Supriyono.

Dewan Pengawas

Supervisory Board

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Badan Lain

Affiliation and Management in Other Entities

Hubungan afiliasi Dewan Pengawas dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Badan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan

The Supervisory Board's affiliation is seen from the characteristics of familial, financial, shareholding, and managerial relations in other entities (concurrent position) that may result in a conflict of interest.

Sifat Afiliasi Dewan Pengawas Berdasarkan Sifat Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepemilikan Saham

Characteristics of the Supervisory Board's Affiliation by Financial, Familial, and Shareholding Relations

| Nama Anggota Dewan Pengawas Name of Supervisory Board Member | Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation with | | | Hubungan Keluarga Dengan Familial Relation With | | | Hubungan Kepemilikan Saham Shareholding Relation | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | Direksi Board of Directors | Dewan Pengawas Supervisory Board | Pemegang Saham Shareholders | Direksi Board of Directors | Dewan Pengawas Supervisory Board | Pemegang Saham Shareholders | Direksi Board of Directors | Dewan Pengawas Supervisory Board | Pemegang Saham Shareholders |
| Rusman Heriawan | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Lukita Dinarsyah Tuwo | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Suahasil Nazara | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Arlinda | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Rida Mulyana | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Panggah Susanto | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Gamal Nasir | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Loso Judijanto | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Joko Supriyono | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Selama tahun 2017, tidak terdapat hubungan afiliasi keuangan, keluarga dan kemilikan Saham Dewan Pengawas dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Utama Pengendali Throughout 2017, there were no financial, familial, and shareholding relations between the Supervisory Board and the Board of Directors, Supervisory Board, and Major Controlling Shareholders. | | | | | | | | | |

Pedoman, Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Guidelines, Duties, and Responsibilities of the Supervisory Board

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 tanggal 26 Juni 2015. Sejalan dengan pedoman tersebut, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas adalah:

Tugas Dewan Pengawas:

- Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat pengelola;
- Menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat pengelola kepada Komite Pengarah;
- Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah.

In performing its duties and responsibilities, the Supervisory Board refers to the Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015. Pursuant to such guidelines, the duties and responsibilities of the Supervisory Board are:

Duties of the Supervisory Board:

- Supervising and guiding the implementation of the Management duties.
- Supplying recommendations for the implementation of fund collection and utilization policies by the management to the Steering Committee.
- Performing other relevant duties assigned by the Steering Committee.

Kewajiban Dewan Pengawas:

- Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum (BLU);
- Melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
- Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU; dan
- Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

Responsibilities of the Supervisory Board:

- Providing opinions and suggestions to the Minister of Industry and the Minister of Finance on Business and Budgeting Strategic Plans proposed by the Public Service Agency Management.
- Reporting to the Minister of Industry and Minister of Finance of any symptoms of declining performance in Public Service Agency.
- Keeping up with the development of Public Service Agency activities, providing opinions and suggestions to the Minister of Industry and the Minister of Finance on any issues deemed vital for Public Service Agency management.
- Providing inputs, suggestions, or feedbacks on the performance of Public Service Agency financial statements to Public Service Agency Management.

Rapat Dewan Pengawas

Supervisory Board Meetings

Rapat Internal Dewan Pengawas selama tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 7 kali. Selain itu Dewan Pengawas juga melakukan Rapat gabungan bersama Direksi.

The Supervisory Board had held seven (7) meetings throughout 2017. In addition, the Supervisory Board also conducts joint meetings with the Directors.

139

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Pengawas
Table of Supervisory Board Internal Meeting Agenda

| Tanggal Rapat Meeting Date | Agenda | Peserta Rapat Meeting Participants | |
|-------------------------------|--|--|--|
| 22 Juni 2017 June 22, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Draft Revisi Peraturan Presiden Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit Pembahasan Kinerja BPDP Sawit Pembahasan Laporan Keuangan BPDP Sawit Hal-hal lain yang perlu dibahas | <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Draft Presidential Regulation Revision Discussion of Audit Committee Meeting Output Discussion of OPPFMA Performance Discussion of OPPFMA Financial Statements Other matters that require discussion | Rusman Heriawan, Reni Kustiarini, Arlinda, Rida Mulya Endang, Gamal Nasir, Loso Judianto, Hari Noegroho |
| 21 Juli 2017 July 21, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Regulasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Program yang harus segera dilaksanakan Karena Regulasi Sudah Tersedia Pembahasan Rencana Investasi Jangka Panjang Pembahasan Laporan Kinerja dan Keuangan BPDP Sawit Periode Juni 2017 Hal-hal lain yang perlu dibahas | <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Oil Palm Replanting Program Regulation Programs that requires immediate action following the availability of regulations Discussion of Long-Term Investment Plan Discussion of OPPFMA Performance and Financial Statements for June 2017 Other matters that require discussion | Rusman Heriawan, Reni Kustiarini, Rida Mulya Endang, Loso Judianto, Lukita Dinarsyah Tuwo, dan Hari Noegroho |

Dewan Pengawas

Supervisory Board

| Tanggal Rapat Meeting Date | Agenda | Peserta Rapat Meeting Participants | |
|---|---|--|---|
| 26 September 2017 September 26, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tata Kelola BPDPKS (rangkap Jabatan Kepala SPI dan Posisi Kepala Divisi yang kosong) 2. Proses Audit di BPDPKS (Audit BPK, Itjen Kementerian Keuangan dan intern oleh KAP PWC) 3. Pelaksanaan Anggaran 2017 dan Revisi RBA 2017 4. Pembahasan Realisasi Kegiatan Utama: <i>Replanting</i> dan Sarana & Prasarana 5. Pembahasan Laporan Kinerja dan Keuangan BPDP Sawit Periode Agustus 2017 6. Hal-hal lain yang perlu dibahas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of OPPFMA Governance (concurrent position by Internal Audit Unit Head and the vacant Division Head position(s)) 2. Audit process at OPPFMA (Audit by the Audit Board (BPK), Inspectorate General of the Ministry of Finance, and internal audit by PWC Public Accounting Firm) 3. Implementation of 2017 budget and WP&B 2017 Revision 4. Discussion of Main Activity Realization: Replanting and Facilities and Infrastructure 5. Discussion of OPPFMA Performance and Financial Statements for August 2017 6. Other matters that require discussion | Rusman Heriawan, Reni Kustiarini, Arlinda, Loso Judianto, Gamal Nasir, Panggah Sutanto, dan Hari Noegroho |
| 22 Oktober 2017 October 22, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola BPDPKS 2. Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit 3. Pembahasan Kinerja BPDP Sawit 4. Pelaksanaan Anggaran 2017 dan Revisi RBA 2017 5. Laporan Keuangan Per September 2017 6. RBA – RKAKL 2018 7. Hal-hal lain yang perlu dibahas | <ol style="list-style-type: none"> 1. OPPFMA Governance 2. Discussion of Audit Committee Meeting Output 3. Discussion of OPPFMA Performance 4. Implementation of 2017 budget and WP&B 2017 Revision 5. Financial Statements for September 2017 6. WP&B - State Ministry/ Institution WP&B 2018 7. Other matters that require discussion | Rusman Heriawan, Reni Kustiarini, Arlinda, Rida Mulya Endang, Loso Judianto, Gamal Nasir, dan Hari Noegroho |
| 23 November 2017 November 23, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola BPDPKS 2. Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit 3. Pembahasan Kinerja BPDP Sawit 4. Pelaksanaan Anggaran 2017 dan Revisi RBA 2017 5. Laporan Keuangan Per September 2017 6. Kinerja Dewan pengawas 7. Panitia Seleksi Calon Direksi 8. Hal-hal lain yang perlu dibahas | <ol style="list-style-type: none"> 1. OPPFMA Governance 2. Discussion of Audit Committee Meeting Output 3. Discussion of OPPFMA Performance 4. Implementation of 2017 budget and WP&B 2017 Revision 5. Financial Statements for September 2017 6. Supervisory Board Performance 7. Board of Directors Candidate Selection Committee 8. Other matters that require discussion | Rusman Heriawan, Reni Kustiarini, Arlinda, Loso Judianto, Gamal Nasir, dan Hari Noegroho |
| 28 Desember 2017 December 28, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola BPDPKS 2. Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit 3. Pembahasan Kinerja BPDP Sawit 4. Pelaksanaan Anggaran 2017 dan Revisi RBA 2017 5. Laporan Keuangan Per September 2017 6. Kinerja Dewan pengawas 7. Panitia Seleksi Calon Direksi 8. Hal-hal lain yang perlu dibahas | <ol style="list-style-type: none"> 1. OPPFMA Governance 2. Discussion of Audit Committee Meeting Output 3. Discussion of OPPFMA Performance 4. Implementation of 2017 budget and WP&B 2017 Revision 5. Financial Statements for September 2017 6. Supervisory Board Performance 7. Board of Directors Candidate Selection Committee 8. Other matters that require discussion | Rusman Heriawan, Reni Kustiarini, Arlinda, Loso Judianto, Joko Suriyono, dan Hari Noegroho |

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi
Supervisory Board-Board of Directors Joint Meetings

| Tanggal Rapat Meeting Date | Agenda | Peserta Rapat Meeting Participants | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 25 Januari 2017 January 25, 2017 | 1. Evaluasi Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja 2. Evaluasi Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Riset, Pelatihan SDM Sawit, Kemitraan dan Promosi 3. Hal-hal lain terkait yang memerlukan pertimbangan Dewan Pengawas. | 1. Evaluation of Financial Statements and Performance Achievements 2. Evaluation of Biodiesel, Replanting, Research, Palm Oil HR Training, Partnership, and Promotion Programs 3. Other issues requiring the Supervisory Board's concerns | Rusman Heriawan, Arlinda, Lukita Dinarsyah Tuwo, Gamal Nasir, Joko Supriyono, Loso Judjianto, Rida Mulyana, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana dan Direktur Penghimpunan Dana |
| 23 Februari 2017 February 23, 2017 | 1. Laporan Kinerja dan Keuangan Januari 2017 2. Laporan Kemajuan Program Biodiesel, Replanting, Riset, Kerjasama dan Promosi, Capacity Building SDM Sawit, Tatakelola dan hal terkait lainnya 3. Laporan Komite Audit 4. Hal-hal lain terkait yang memerlukan pertimbangan Dewan Pengawas. | 1. Financial and Performance Statements for January 2017 2. Progress Report on Biodiesel Program, Replanting, Research, Cooperation and Promotion, Palm Oil HR Capacity Building, Governance, and other relevant programs 3. Audit Committee Report 4. Other issues requiring the Supervisory Board's concerns | Rusman Heriawan, Arlinda, Lukita Dinarsyah Tuwo, Gamal Nasir, Joko Supriyono, Loso Judjianto, Rida Mulyana, Suahasil Nazara, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana dan Direktur Penghimpunan Dana |
| 21 Maret 2017 March 21, 2017 | 1. Poin-poin hasil kajian KPK yang terkait dengan BPDPKS 2. Laporan Kinerja dan Keuangan Februari 2017 3. Laporan Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Riset, Kerjasama dan Promosi, Capacity Building SDM Sawit, Tatakelola dan hal lain terkait 4. Laporan Komite Audit. | 1. Points of KPK's studies relevant to OPPFMA 2. Financial and Performance Statements for February 2017 3. Progress Report on Biodiesel Program, Replanting, Research, Cooperation and Promotion, Palm Oil HR Capacity Building, Governance, and other relevant programs 4. Audit Committee Report | Rusman Heriawan, Arlinda, Lukita Dinarsyah Tuwo, Joko Supriyono, Loso Judjianto, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan dana, Direktur Penyaluran Dana dan Direktur Kemitraan |
| 25 April 2017 April 25, 2017 | 1. Laporan Kinerja dan Keuangan Maret 2017 2. Laporan Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Riset, Kerjasama dan Promosi, Capacity Building SDM Sawit, Tatakelola dan hal lain terkait 3. Laporan Komite Audit 4. Update Kebijakan/Keputusan Komite Pengarah | 1. Financial and Performance Statements for March 2017 2. Progress Report on Biodiesel Program, Replanting, Research, Cooperation and Promotion, Palm Oil HR Capacity Building, Governance, and other relevant programs 3. Audit Committee Report 4. Updated Steering Committee Policy/Resolutions | Rusman Heriawan, Arlinda, Gamal Nasir, Loso Judjianto, Rida Mulyana, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana dan Direktur Kemitraan |
| 24 Mei 2017 May 24, 2017 | 1. Laporan Komite Audit untuk bulan Mei 2017 2. Masalah Manajemen 3. Hal-hal lain terkait yang memerlukan pertimbangan Dewan Pengawas. | 1. Audit Committee Report for May 2017 2. Managerial issues 3. Other issues requiring the Supervisory Board's concerns | Rusman Heriawan, Arlinda, Gamal Nasir, Panggah Susanto, Loso Judjianto, Rida Mulyana, Suahasil Nazara, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana dan Direktur Kemitraan |

Dewan Pengawas

Supervisory Board

| Tanggal Rapat Meeting Date | Agenda | Peserta Rapat Meeting Participants | |
|---|--|---|---|
| 22 Juni 2017 June 22, 2017 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja dan Keuangan Mei 2017 2. Laporan Kemajuan Program Biodiesel, Replanting, Riset, Kerjasama dan Promosi, Capacity Building SDM Sawit, Tatakelola dan hal lain terkait 3. Laporan Komite Audit 4. Lain-lain yang terkait | <ul style="list-style-type: none"> 1. Financial and Performance Statements for May 2017 2. Progress Report on Biodiesel Program, Replanting, Research, Cooperation and Promotion, Palm Oil HR Capacity Building, Governance, and other relevant programs 3. Audit Committee Report 4. Other relevant matters | Rusman Heriawa, Arlinda, Rida Mulyana, Gamal Nasir, Loso Judijanto, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana dan Direktur Kemitraan |
| 21 Juli 2017 July 21, 2017 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Pengawas dan Dewan Direksi 2. Laporan Keuangan Juni 2017 3. Laporan Capaian Penghimpunan Dana Juni 2017 4. Laporan Pengelolaan Dana Juni 2017 5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program B-20 6. Laporan Perkembangan Replanting, Pelatihan, serta Sarana Prasarana 7. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan 8. Laporan Perkembangan Kerjasama Riset 9. Laporan Perkembangan Promosi dan Kemitraan 10. Proyeksi Capaian Kinerja BPDPKS tahun 2017 11. Hal-hal lain terkait yang memerlukan Pertimbangan Dewan Pengawas | <ul style="list-style-type: none"> 1. Follow-up on Supervisory Board and Board of Directors Meeting Output 2. Financial Statements for June 2017 3. Fund Collection Report for June 2017 4. Fund Management Report for June 2017 5. Progress Report on Program B-20 6. Progress Report on Replanting, Training, and Facilities and Infrastructure 7. Progress Report on Education and Training Implementation 8. Progress Report on Research Cooperation 9. Progress Report on Promotion and Partnership 10. OPPFMA Performance Achievement 2017 Outlook 11. Other issues requiring the Supervisory Board's concerns | Rusman Heriawan, Lukita Dinarsyah Tuwo, Rida Mulyana, Suahasil Nazara, Loso Judijanto, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana dan Direktur Kemitraan |
| 25 Agustus 2017 August 25, 2017 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Juli 2017 2. Masukan untuk RBA 2018 3. Wacana pendirian Pusat Informasi Sawit di Luar Negeri 4. Tindak lanjut hasil rapat Komite Pengarah terkait dengan tambahan Biodiesel 5 Juta kiloliter dan percepatan program <i>replanting</i> 6. Hal-hal lain terkait yang memerlukan Pertimbangan Dewan Pengawas | <ul style="list-style-type: none"> 1. Financial and Performance Statements for July 2017 2. Inputs for WP&B 2018 3. Discussion on the establishment of Palm Oil Info Center abroad 4. Follow-up on Steering Committee meeting resolutions regarding the addition of 5 million kiloliter biodiesel and replanting acceleration 6. Other issues requiring the Supervisory Board's concerns | Rusman Heriawan, Lukita Dinarsyah Tuwo, Rida Mulyana, Suahasil Nazara, Loso Judijanto, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana and Direktur Kemitraan |
| 26 September 2017 September 26, 2017 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komite Audit untuk bulan Agustus 2017 2. Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Agustus 2017 3. Laporan Persiapan dan Progres Launching <i>Replanting</i> di Muba-Sumsel 4. Hal-hal lain terkait yang memerlukan Pertimbangan Dewan Pengawas | <ul style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee Report for August 2017 2. Financial and Performance Statements for August 2017 3. Progress Report and Replanting Launch Progress in Musi Banyu Asin, South Sumatra 4. Other issues requiring the Supervisory Board's concerns | Rusman Heriawan, Arlinda, Panggah Sutanto, Loso Judijanto, Gamal Nasir, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana dan Direktur Penghimpunan Dana |

| Tanggal Rapat Meeting Date | Agenda | Peserta Rapat Meeting Participants | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 26 Oktober 2017 October 26, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komite Audit untuk bulan September 2017 2. Laporan Keuangan dan Kinerja bulan September 2017 3. Laporan Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i>, Riset, Kerja sama dan Promosi 4. Hal-hal lain terkait yang memerlukan Pertimbangan Dewan Pengawas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee Report for September 2017 2. Financial and Performance Statements for September 2017 3. Progress Report on Biodiesel Program, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion 4. Other issues requiring the Supervisory Board's concerns | Rusman Heriawan, Arlinda, Rida Mulyana, Gamal Nasir, Loso Judijanto, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Penyaluran Dana dan Direktur Kemitraan |
| 23 November 2017 November 23, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komite Audit untuk bulan Oktober 2017 2. Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Oktoberber 2017 3. Laporan Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i>, Riset, Kerja sama dan Promosi 4. Progres Persiapan Acara <i>Launching Replanting</i> di Sumatera Utara 5. Hal-hal lain yang terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee Report for October 2017 2. Financial and Performance Statements for October 2017 3. Progress Report on Biodiesel Program, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion 4. Progress Report on Replanting Launch Event in North Sumatra 5. Other relevant matters | Rusman Heriawan, Arlinda, Panggah Sutanto, Loso Judijanto, Gamal Nasir, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana dan Direktur Penghimpunan Dana |
| 28 Desember 2017 December 28, 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Komite Audit untuk bulan November 2017 2. Laporan Kinerja dan Keuangan bulan November 2017 3. Laporan Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i>, Riset, Kerja sama dan Promosi 4. Hal-hal lain yang terkait. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee Report for November 2017 2. Financial and Performance Statements for November 2017 3. Progress Report on Biodiesel Program, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion 4. Other relevant matters | Rusman Heriawan, Arlinda, Panggah Sutanto, Loso Judijanto, Gamal Nasir, Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana dan Direktur Penghimpunan Dana |

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas
Table of Meeting Frequency and Attendances of the Supervisory Board

| Nama Name | Rapat Internal Dewan Pengawas Supervisory Board Internal Meetings | | |
|-----------------------|--|-------------------------|------|
| | Jumlah Total | Kehadiran Attendance | % |
| Rusman Heriawan | 7 | 7 | 100% |
| Lukita Dinarsyah Tuwo | 7 | 1 | 14% |
| Suahasil Nazara | 7 | 0 | 0% |
| Arlinda | 7 | 5 | 71% |
| Rida Mulyana | 7 | 3 | 43% |
| Panggah Susanto | 7 | 2 | 29% |
| Gamal Nasir | 7 | 4 | 57% |
| Loso Judijanto | 7 | 4 | 57% |
| Joko Supriyono | 7 | 1 | 14% |

Dewan Pengawas
Supervisory Board

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Tahun Buku 2017

Report of Supervisory Board's Duties and Responsibilities Implementation for Fiscal Year 2017

Dewan Pengawas BPDPKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi. Selama tahun buku 2017 Dewan Pengawas telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan Pengawas yang meliputi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan atas jalannya pengurusan BPDPKS yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran BPDPKS serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan maksud dan tujuan BPDPKS.

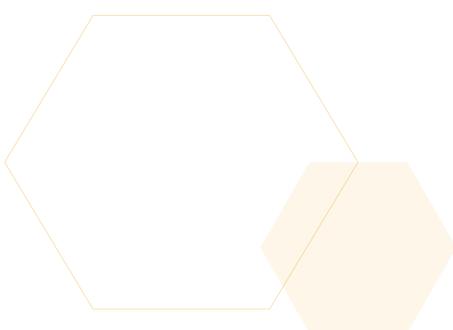
The Supervisory Board proactively supervises and provides inputs to the Board of Directors. The supervision is performed directly by among others monitoring the follow-up on the Supervisory Board's recommendations to the Board of Directors. In 2017 the Supervisory Board has performed the activities according to their duties and functions, including supervising the OPPFMA management by the Board of Directors, providing inputs to the Board of Directors, supervising the implementation of OPPFMA Long-Term Plan and Work Plan and Budget, and assuring the compliance with applicable laws and regulations according to OPPFMA's intents and purposes.

144

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Supervisory Board Performance Assessment

Sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 tanggal 26 Juni 2015 Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selama tahun 2017, Dewan Pengawas telah menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahunan 2017.

In accordance with the Decree of the Minister of Finance Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015, the Supervisory Board reports its implementation of duties to the Minister of Industry and the Minister of Finance on periodical basis at least biannually and whenever necessary. The Supervisory Board has prepared the Annual Supervisory Duty Report 2017 in 2017.



Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi menjaga efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dari segi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit (eksternal/internal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Pada tahun 2017, BPDPKS telah membentuk Komite Audit yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota sesuai dengan Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BPDPKS.

The Audit Committee was established by the Supervisory Board to work collectively and safeguard the effectiveness of its duties and responsibilities, particularly in monitoring and evaluating the planning and implementation of internal audits, while monitoring the follow-up on audits (external/internal) results that are aimed at assessing the adequacy of internal controls including the adequacy of the financial reporting process.

As of 2017, OPPFMA has established the Audit Committee which consists of 1 Chair and 2 Members according to the mandate of OPPFMA President Director Decree Number KEP-08/DPKS/2016 concerning the Establishment of Audit Committee at OPPFMA.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Educational Qualification and Work Experience of Audit Committee Members

BPDPKS telah menentukan persyaratan dalam menentukan kualifikasi untuk dapat menjadi anggota Komite Audit, antara lain (1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan, (2) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan terhadap perusahaan, (3) mampu berkomunikasi secara efektif, (4) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, (5) memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

Kompetensi dan keahlian Ketua Komite Audit dapat dilihat pada profil ringkas sebagai berikut:

OPPFMA has set forth the requirements to qualify the Audit Committee members, among others (1) having good integrity, adequate knowledge, and sufficient work experience in the supervisory/audit field, (2) not having personal interests/link that may detriment and trigger conflicts in the company, (3) able to communicate effectively, (4) able to provide sufficient time to complete their duties, (5) having expertise in finance or accounting.

The competence and expertise of the Audit Committee Chair are shown in the following brief profile:



Loso Judijanto

Profil Ringkas Anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas

Can be found in the Profile of the Supervisory Board



Komite Audit

Komite Audit

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit

Appointment and Dismissal of Audit Committee Members

Pengangkatan anggota Komite Audit diputuskan melalui Keputusan Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BPDPKS tanggal 22 Februari Tahun 2016. Anggota Komite Audit dapat berhenti atau diberhentikan meskipun jabatannya belum berakhir, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia.

The appointment of Audit Committee members is stipulated under the Decree of OPPFMA President Director Number KEP-08/DPKS/2016 concerning the Establishment of Audit Committee at OPPFMA dated February 22, 2016. A member of the Audit Committee may resign or be dismissed before the end of their tenure, due to resignation or death.

Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Number and Composition of Audit Committee

Jumlah Komite Audit BPPKS pada tahun buku 2017 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota dengan komposisi sebagai berikut:

In 2017, the Audit Committee consisted of three (3) members, comprising one (1) Chair and two (2) Members with the following composition:

| Nama Name | Jabatan Position |
|-----------------|--|
| Loso Judijanto | Ketua/Anggota Dewan Pengawas Chair/Member of Supervisory Board |
| Hary Nugroho S. | Anggota Member |
| Moehammad Hatta | Anggota Member |

Pedoman Kerja Komite Audit

Audit Committee Work Guidelines

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tanggal 22 Februari 2016. Cakupan dari keputusan Direktur Utama tersebut terdiri dari penetapan Susunan Komite Audit Tahun 2016, Tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Audit, Fungsi Komite Audit dan Honorarium bagi Komite Audit.

In performing their duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Decree of OPPFMA President Director Number KEP-08/DPKS/2016 dated February 22, 2016. The Decree among others covers the establishment of Audit Committee Composition for 2016, Duties and Responsibilities of Audit Committee, Audit Committee Functions, and Salary for the Audit Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee Duties and Responsibilities

Komite Audit BPDPKS sesuai dengan arahan Dewan Komisaris dan Keputusan Direktur Utama adalah bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaanya kepada Dewan Pengawas BPDPKS. Sejalan dengan Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016, fungsi Komite Audit BPDPKS adalah:

- a) Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas
- b) Melakukan supervisi atas pelaksanaan pengendalian internal BPDPKS
- c) Melakukan tugas lainnya sebagaimana arahan Dewan Pengawas

Selain itu, Komite Audit juga senantiasa bertugas melakukan pengawasan pekerjaan auditor independen, memantau kepatuhan BPDPKS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pengelolaan risiko BPDPKS.

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, Komite Audit memiliki kewenangan untuk mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, data keuangan, aset serta sumber daya BPDPKS lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diakses untuk keperluan tugas tersebut.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala. Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Rapat dilakukan sedikitnya sebulan sekali, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BPDPKS. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak, dengan ketentuan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hasil pembahasan rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Dewan Pengawas.

The Audit Committee, as mandated by the Board of Commissioners and the Decree of the President Director, holds the responsibility to report the output of its works to the Supervisory Board. According to the Decree of OPPFMA President Director Number KEP-08/DPKS/2016, the functions of the Audit Committee include:

- a) Reviewing the reports submitted by the Board of Directors to the Supervisory Board
- b) Supervising the internal control implementation at OPPFMA
- c) Performing other duties as directed by the Supervisory Board

The Audit Committee also supervises independent auditor, monitors OPPFMA's compliance with applicable laws and regulations, and monitoring risk management at OPPFMA.

147

To optimally perform its duties and responsibilities, the Audit Committee retains the right to access records and information on employees, finance, assets, and other relevant corporate data. The Audit Committee shall maintain the confidentiality of corporate documents, data, and information accessed for such duties.

The Audit Committee holds meetings periodically. As stipulated in the Audit Committee Charter, the meetings are held at least once in a month, as necessary. The meeting is led by the Chair or a Member of the Audit Committee. Audit Committee Meeting Resolutions are taken amicably. In the event that such meeting fails to take any amicable resolutions, such resolutions shall be taken by voting, provided that the resolutions are taken by majority vote. The results of discussion in the meeting become recommendations that can be utilized by the Supervisory Board.

Komite Audit

Komite Audit

Disepanjang tahun 2017, komite audit BPDPKS telah mengadakan rapat bersama Dewan Pengawas dengan membahas agenda sebagaimana program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Pengawas

Throughout 2017, Audit Committee had conducted... meetings. The attendances of the Audit Committee members in the meetings are as follows:

Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee Duties and Responsibilities Report

Pelaksanaan tugas Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit dan program atau rencana kerja yang telah disusun agar berjalan efektif dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penelaahan dan pemantauan atas semua informasi keuangan yang disajikan Manajemen;
2. Penelaahan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal;
3. Penelaahan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan hasil pemeriksaan oleh unit Internal Audit;
4. Penelaahan dan pemantauan atas:
 - a. Independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan menjadi auditor eksternal;
 - b. Biaya jasa audit dan cakupan audit yang diajukan oleh KAP terpilih;
 - c. Pelaksanaan perkembangan audit yang dilakukan oleh KAP; dan
 - d. Laporan hasil audit yang disampaikan oleh KAP.
5. Penelaahan dan pemantauan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Penelaahan dan pemantauan serta melaporkan berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

The implementation of Audit Committee's duties refers to the Audit Committee Charter and the existing work plan and programs to maintain effectiveness and achieve the target set. In 2017, the following activities were performed by the Audit Committee:

1. Reviewing and supervising all financial information presented by the Management.
2. Reviewing and supervising the effectiveness of internal control.
3. Reviewing and supervising the effectiveness of audit by Internal Audit Unit.
4. Reviewing and supervising:
 - a. The independence and objectivity of Public Accounting Firm which serves as the external auditor;
 - b. The audit service fee and audit scope proposed by selected Public Accounting Firm;
 - c. The progress of audit performed by the Public Accounting Firm; and
 - d. The audit report submitted by the Public Accounting Firm.
5. Reviewing and supervising the compliance with applicable laws and regulations.
6. Reviewing and supervising and reporting various potential risks.

Sekretaris Dewan Pengawas

Secretary to the Supervisory Board

Sekretaris Dewan Pengawas dalam struktur tata kelola BPDPKS merupakan organ pendukung yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan memastikan implemetasi *Good Corporate Governance* terkait fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas beserta organnya telah memadai.

Pada tahun 2017, Sekretaris Dewan Pengawas dijabat oleh Reni Kustiari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-22/DPKS/ 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas. Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

The Supervisory Board Secretary, within OPPFMA governance structure, is a supporting organ which reports directly to the Supervisory Board. This position is crucial in streamlining the administration and ensuring that Good Corporate Governance, particularly the supervisory function, has been sufficiently implemented.

In 2017, Reni Kustiari served as the Secretary to the Supervisory Board in accordance with the Decree of the President Director Number KEP-22/DPKS/2015 dated December 30, 2015 on the Establishment of the Secretariat to the Supervisory Board. The appointment of the Supervisory Board Secretary has been approved by the Supervisory Board.

Profil Kepala Sekretariat Dewan Pengawas sebagai berikut: Profile of Head of Supervisory Board Secretariat:



Reni Kustiari

Tempat Tanggal Lahir:
Bengkulu, 18 Oktober 1958

Pendidikan: Doctor of Philosophy in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University, Bogor, 2001-2007; Master of Agricultural Economics, University of Missouri, USA, 1992-1994; Bachelor in Agricultural Statistics, Bogor Agricultural University, Bogor, 1979-1982.

Place and Date of Birth:
Bengkulu, 18 October 1958

Education: Doctor of Philosophy in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University, Bogor, 2001-2007; Master of Agricultural Economics, University of Missouri, USA, 1992-1994; Bachelor in Agricultural Statistics, Bogor Agricultural University, Bogor, 1979-1982.

149

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas Duties and Responsibilities of the Secretary to the Supervisory Board

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas, antara lain:

1. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh data dan informasi terkait dengan Dewan Pengawas;
2. Menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting tentang Rapat Dewan Pengawas kepada Manajemen BPDPKS;

The duties and responsibilities of the Secretary to the Supervisory Board include:

1. Administering and documenting all data and information pertaining to the Supervisory Board;
2. Preparing and delivering important information on Supervisory Board meetings to OPPFMA Management;

Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board

3. Memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas guna memperlancar tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
4. Sebagai penghubung antara Dewan Pengawas dengan Direksi.

3. Supporting the Supervisory Board to streamline the implementation of the Board's duties; and
4. Liaising between the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Pengawas Competency Building for the Secretary to the Supervisory Board

Selama tahun 2017, Sekretaris Dewan Pengawas telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* atau seminar, sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas pelaksanaan tugas Sekretaris Pengawas.

In 2017, the Supervisory Board Secretary has attended a number of competency building programs which include trainings, workshops, and seminars in order to improve the position's roles and quality.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas Implementation of the Secretary to the Supervisory Board's Duties

150

Sekretaris Dewan Pengawas telah menjalankan berbagai kegiatan dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang juga merupakan bagian dalam implementasi GCG BPDPKS. Kegiatan yang telah dilakukan Sekretaris Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Pengawas dalam rangka pengambilan keputusan;
2. Mempersiapkan rapat-rapat dalam lingkungan Dewan Pengawas baik yang bersifat rutin maupun non rutin dengan berbagai pihak;
3. Membuat risalah rapat atas rapat-rapat rutin maupun non rutin Dewan Pengawas dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Melaksanakan dan melaporkan hasil pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan operasional BPDPKS, ketiaatan terhadap ketentuan baik ketentuan intern maupun eksternal serta perundang-undangan lain yang berlaku;
5. Melaksanakan dan melaporkan hasil pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan Pelaksanaan *Good Coorporate Governance* (GCG) BPDPKS;
6. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Pengawas, baik untuk keperluan Dewan Pengawas dan Komite Audit, serta melakukan pengadministrasiannya.

The Supervisory Board Secretary has performed various activities that assist the implementation of the Supervisory Board's duties as an integral part of the GCG implementation. These activities include:

1. Providing information necessary for the Supervisory Board in decision making;
2. Preparing regular and non-regular meetings between the Supervisory Board and various parties;
3. Preparing minutes for the regular and non-regular meetings of the Supervisory Board and delivering them to relevant parties;
4. Conducting and reporting the result of the supervision on the duties and responsibilities of the Board of Directors that are related to OPPFMA operations, compliance with internal and external provisions and other applicable laws and regulations;
5. Conducting and reporting the result of the supervision on the duties and responsibilities of the Board of Directors that are related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at OPPFMA;
6. Conducting secretarial activities within the Supervisory Board, for the interest of the Supervisory Board and the Audit Committee, along with the administrative duties.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ utama BPDPKS yang bertanggung jawab penuh secara kolektif dan kolegial dalam pengelolaan BPDPKS untuk kepentingan dan tujuan BPDPKS. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara.

Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama (kolegial).

The Board of Directors is OPPFMA's main organ which is collectively (collegially) responsible in the OPPFMA management for OPPFMA's interest and objectives. Each and every Board of Directors member has equal position, including the President Director.

The President Director acts as the primus inter pares who coordinates the Board of Directors' activities. Each and every Board of Directors member is capable to perform their duties and make any decision according to their respective division of task and authorities. However, the performance of duties by each and every Board of Directors member remains collegial responsibility.

Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Requirements, Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Anggota Direksi BPDPKS wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yaitu mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha BPDPKS serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Selain itu calon anggota Direksi juga memenuhi persyaratan kepatutan lainnya yaitu tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

The members of the Board of Directors are required to meet the fit and proper requirements, i.e. having sufficient knowledge in OPPFMA's line of business while having proper integrity, competence, and reputation. A Board of Directors candidate must also meet other proper requirements, i.e. never been declared as bankrupt, never been serving as the member of a Board of Directors or a Supervisory Board found guilty of causing bankruptcy to an entity, and never been punished due to a crime that results in the Country's financial loss and/or any financial crimes.

Program Pengenalan Direksi

Inauguration for New Board of Directors Members

BPDPKS memberikan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Pelaksanaan program pengenalan dilakukan secara informal pada saat rapat maupun dilakukan secara langsung dilakukan perkenalan dengan seluruh karyawan. Anggota Direksi yang baru diangkat diberikan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan yang berlaku di BPDPKS maupun terkait dengan berbagai peraturan terkait sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Selain itu, pada saat calon anggota direksi baru tersebut akan mengikuti proses *fit & proper test*, yang bersangkutan akan melakukan *self assessment* dimana salah satu yang ditanyakan terkait

OPPFMA provides inauguration program for newly appointed members of the Board of Directors. The inauguration is given informally during meetings or directly through introduction to all employees. The newly appointed members are given the knowledge and understanding on the regulations applicable at OPPFMA and other relevant rules, to be able to perform their duties effectively and efficiently. A candidate for the Board of Directors, while attending the fit and proper test, must also take a self-assessment which inquires their knowledge about OPPFMA's line of business. In 2017, the orientation program was given by the newly-appointed Board of Directors members, i.e. Mr.

Direksi
Board of Directors

dengan pengetahuannya di bidang usaha BPDPKS. Selama tahun 2017, telah dilakukan program pengenalan kepada anggota Direksi yang baru yaitu Sdr. Dono Boestami sebagai Direktur Utama, Sdr Edi Wibowo sebagai Direktur Penyaluran Dana dan Sdr. Tulus Budhianto sebagai Direktur Kemitraan.

Dono Boestami as the President Director, Mr. Edi Wibowo as the Director of Fund Distribution, and Mr. Tulus Budhianto as the Director of Partnership.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Number and Composition of the Board of Directors

Selama tahun 2017, Jumlah anggota Direksi mengalami perubahan yaitu dari 4 (empat) orang, menjadi 6 (enam) orang dimana perubahan terjadi pada:

1. Pemberhentian Direktur Utama yang dijabat oleh Sdr. Bayu Krisnamurthi dan mengangkat Sdr. Dono Boestami dengan jabatan yang sama.
2. Pengangkatan Sdr. Edi Wibowo sebagai Direktur Penyaluran Dana.
3. Pengangkatan Sdr. Tulus Budhianto sebagai Direktur Kemitraan.

Throughout 2017, the Board of Directors membership changed from 4 to 6 members. The followings are the details of the changes:

1. The dismissal of President Director previously served by Mr. Bayu Krisnamurthi and the appointment of Mr. Dono Boestami to serve the same position.
2. The appointment of Mr. Edi Wibowo as the Director of Fund Distribution.
3. The appointment of Mr. Tulus Budhianto as the Director of Partnership.

Sehingga Komposisi Dewan Pengawas BPDPKS sebagai berikut:

Thus the composition OPPFMA Supervisory Board is as follows:

Komposisi Direksi BPDPKS Tahun 2017
Composition of OPPFMA Board of Directors in 2017

| Nama Name | Jabatan Position |
|-----------------------|--|
| Dono Boestami | Direktur Utama President Director |
| Catur Ariyanto Widodo | Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management |
| Agustinus Antonius | Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Fund Planning and Management |
| Hendrajat Natawidjaja | Direktur Penghimpun Dana Director of Fund Collection |
| Edi Wibowo | Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Distribution |
| Tulus Budhianto | Direktur Kemitraan Director of Partnership |

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Diversity Policy in the Board of Directors Composition

BPDPKS tidak menerapkan suatu kebijakan khusus terkait dengan keberagaman komposisi Direksi, akan tetapi BPDPKS telah memperhatikan keberagaman Komposisi Direksi dengan memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia.

Informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja jenis kelamin dan usia Direksi lebih jelasnya telah diuraikan pada Bab Laporan Kepada Pemegang Saham dibagian profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

OPPFMA does not specifically enforce a policy on the diversity of the Board of Directors composition. Nevertheless, the diversity of the Board Directors composition has been taken into account as seen from different backgrounds of education, work experience, sex, and age of its members.

Information on education, work experience, sex, and age of the Board Directors are described in details in Chapter of Report to Shareholders, in the profile of the Board of Directors of this Annual Report.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Badan Lain

Affiliation and Management in Other Entities

Hubungan afiliasi Direksi dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Badan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan.

The Board of Directors' affiliation is seen from the characteristics of familial, financial, shareholding, and managerial relations in other entities (concurrent position) that may result in a conflict of interest.

Sifat Afiliasi Direksi Berdasarkan Sifat Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepemilikan Saham
Characteristics of the Board of Directors' Affiliation by Financial, Familial, and Shareholding Relations

| Nama Anggota Dewan Direksi Name of Board of Directors Members | Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation with | | | Hubungan Keluarga Dengan Familial Relation With | | | Hubungan Kepemilikan Saham Shareholding Relation | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| | Direksi Board of Directors | Dewan Pengawas Supervisory Board | Pemegang Saham Shareholders | Direksi Board of Directors | Dewan Pengawas Supervisory Board | Pemegang Saham Shareholders | Direksi Board of Directors | Dewan Pengawas Supervisory Board | Pemegang Saham Shareholders |
| Dono Boestami | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Catur Aryianto Widodo | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Agustinus Antonius | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Hendrajat Natawidjaja | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Edi Wibowo | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |
| Tulus Budhianto | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No | Tidak No |

Selama tahun 2017, tidak terdapat hubungan afiliasi keuangan, keluarga dan kemilikan Saham Direksi dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Utama Pengendali

Throughout 2017, there was no financial, family and Shareholding affiliation relations among Board of Directors and fellow Board of Directors, Supervisory Board and Major Controlling Shareholders

Direksi
Board of Directors

Pedoman, Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Guidelines, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Juni 2015.

Direksi BPDPKS bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPDPKS untuk kepentingan dan tujuan BPDPKS. Direksi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan BPDPKS sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BPDPKS. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Berikut merupakan tugas khusus masing-masing Anggota Direksi BPDPKS:

Board of Directors in executing its duties and responsibilities refers to Copy to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No.113/PMK.01/2015 concerning Organization and Work Governance of Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil dated June 11, 2015.

The Board of Directors holds full responsibility for OPPFMA management for OPPFMA interests and objectives. The Board of Directors is answerable to the Minister of Finance as the embodiment of OPPFMA management accountability in accordance with the principles of good governance. In carrying out its duties and responsibilities, each of the Directors has clear duties and responsibilities in accordance with their respective functions.

The followings are the special duties of each OPPFMA Board of Directors.

| Jabatan Position | Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities |
|--|---|
| Direktur Utama Members | Direktur Utama dalam memimpin dan mengelola BPDPKS mempunyai fungsi merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum BPDPKS berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi, mengkoordinasikan kegiatan para Direktur, serta pengembangan kebijakan komunikasi, pengawasan intern, kepatuhan dan hukum. |
| Direktorat Penghimpunan Dana Directorate of Fund Collection | Direktorat Penghimpunan Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan dana lainnya. |
| Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana Directorate of Fund Planning and Management | Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan strategi bisnis, mengembangkan rencana pengalokasian dana, pengembangan dan penempatan dana yang dikelola pada instrumen investasi. |
| Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management | Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (<i>settlement</i>), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| Jabatan Position | Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities |
|--|--|
| Direktorat Penyaluran Dana Directorate of Fund Distribution | Direktorat Penyaluran Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran Dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Dana, serta melakukan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan Dana. |
| Direktorat Kemitraan Directorate of Partnership | Direktorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi perusahaan Lembaga Kemasyarakatan, dan <i>civil society</i> untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. |

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Rapat internal Direksi selama tahun 2017 dilaksanakan sebanyak ... kali. Rapat gabungan bersama Dewan Komisaris selama tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 20 kali. Agenda dan peserta rapat internal Direksi dapat dilihat sebagai berikut:

The Board of Directors had held ... meetings throughout 2017. Joint meetings with the Board of Commissioners were held 20 times in 2017. The agenda and attendants of the Board of Directors' internal meetings were as follows:

155

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017
Frequency of Board of Directors-Board of Commissioners Joint Meetings in 2017

| No. | Nama Name | Jabatan Position | Frekuensi Kehadiran Frequency Attendance | % Kehadiran Attendance Percentage |
|-----|-----------------------|--|---|---|
| 1 | Dono Boestami | Direktur Utama President Director | 19 | 95.0% |
| 2 | Catur Ariyanto Widodo | Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management | 19 | 95.0% |
| 3 | Agustinus Antonius | Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Fund Planning and Management | 18 | 90.0% |
| 4 | Hendrajat Natawidjaja | Direktur Penghimpun Dana Director of Fund Collection | 16 | 80.0% |
| 5 | Edi Wibowo | Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Distribution | 17 | 85.0% |
| 6 | Tulus Budhianto | Direktur Kemitraan Director of Partnership | 18 | 90.0% |

Direksi
Board of Directors

Program Pengembangan Kompetensi Direksi Competency Building Program for the Board of Directors

Perusahaan telah memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi bagi Direksi dalam rangka meningkatkan pengembangan dan kompetensi melalui kegiatan berupa pelatihan dan seminar. Direksi BPDPKS telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi selama tahun 2017 sebagaimana telah dijelaskan pada bab profil uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The Company provides competency building program for the Board of Directors through seminars and trainings. The trainings and seminars attended for building the Board of Directors' competencies throughout 2017 are discussed in details in the chapter of Profile, section of Education and Training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of Internal Audit Unit.

Penilaian Kinerja Direksi Board of Directors' Performance Assessment

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab, pencapaian Indikator Kinerja. Penilaian tersebut dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan.

The Board of Directors' performance assessment is performed on the implementation of the duties and responsibilities, signifying the achievement of Performance Indicators. The assessment is held during the annual accountability report.

Komite di Bawah Direksi Committees under the Board of Directors

Sampai dengan tahun 2017, Direksi BPDPKS belum membentuk Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi mengenai Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi berikut dasar penilaianya.

As of 2017, OPPFMA Board of Directors had not yet established any Committee(s) under the Board of Directors, and therefore no information is available on the performance of such committees and their bases of assessment.

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Remuneration Policy for the Supervisory Board and the Board of Directors

BPDPKS dalam menentukan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada KMK Nomor 1020/PMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada BLU BPDPKS.

Besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi.

In determining Remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors, OPPFMA refers to KMK Number 1020 / PMK.05 / 2015 concerning Determination of Remuneration for Managing Officers, Board of Trustees, and Employees at OPPFMA.

The amount of remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors is proposed to the Minister/Head of Agency to the Minister of Finance, with attention to the Director General of Budgeting and Financial Balance, to be stipulated in a Regulation of the Minister of Finance concerning the amount of remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Indicators for Stipulating Remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors

Besaran Remunerasi ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Proposionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan;
2. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
3. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;
4. Kinerja operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

The amount of the remuneration is determined by considering the following factors:

1. Proportionality, consideration on the size and the total amount of assets managed by Public Service Agency and the service level;
2. Equality, by observing similar service industries;
3. Adequacy, i.e. adjusting the revenue capability of such Public Service Agency;
4. The Public Service Agency's operational performance stipulated by the Minister/Head of Agency must at least consider financial indicators, services, quality, and benefits for the community.

157

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Structure of Remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors

| No. | Remunerasi Dewan Pengawas Remuneration for the Supervisory Board | Remunerasi Direksi Remuneration for the Board of Directors |
|-----|---|---|
| 1 | Honorarium Honorarium | Gaji Salary |
| 2 | Insentif Incentive | Insentif Incentive |
| 3 | Bonus atas prestasi Achievement bonus | Bonus atas prestasi Achievement bonus |
| 4 | Pensiun Retirement pay | Pensiun Retirement pay |
| 5 | Pesongan Severance pay | Pesongan Severance pay |

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Remuneration Policy for the Supervisory Board and the Board of Directors

Remunerasi yang Diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2017

Remuneration Received by Supervisory Board and Board of Directors in 2017

Berdasarkan KMK nomor 1020/KMK.05/2015 Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Tahun Buku 2017 sebesar Rp5.002.005.825,- dan Rp9.432.917.697,-

According to the Decree of the Minister of Finance Number 1020/KMK.05/2015, the remunerations provided for the Supervisory Board and the Board of Directors for the fiscal year 2017 were respectively Rp5,002,005,825 and Rp9,432,917,697.

Sekretaris BPDPKS

Corporate Secretary

158 Selama tahun 2017, BPDPKS belum membentuk Sekretaris BPDPKS secara khusus. Adapun fungsi dan tugas Sekretaris BPDPKS dijalankan oleh Divisi Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan untuk mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

In 2017, OPPFMA has not yet established a Corporate Secretary. The functions and duties of a Corporate Secretary in the Company were assumed by the Division(s) in charge of managing partnership with other companies in order to support sustainable palm oil development.



Audit Internal

Internal Audit

Audit internal BPDPKS dijalankan oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI). Pembentukan Divisi SPI ini dilakukan pada tahun 2016 dengan tujuan menentukan kehandalan informasi yang dibuat manajemen serta untuk menetukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional BPDPKS. Selaras hal tersebut, BPDPKS membentuk Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.KEP-52/DPKS/2016 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal BPDPKS.

Internal Audit at OPPFMA is carried out by the Internal Audit Unit Division. The Internal Audit Unit was established in 2016 with the objectives to confirm the reliability of information provided by the management and the effectiveness and efficiency of various operational activities. Therefore, OPPFMA establishes the Internal Audit which is appointed and dismissed by the President Director with approval from the Supervisory Board as specified in the Board of Directors Decree Number KEP-52/DPKS/2016 concerning the Appointment of the Head of OPPFMA Internal Audit Unit.

Struktur dan Kedudukan

Structure and Position

Struktur SPI

Internal Audit Unit Structure



159

Kedudukan SPI

Internal Audit Unit Position

1. SPI merupakan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama;
2. SPI dimimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
3. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas BPDPKS;
4. Kepala SPI akan menjadi Mitra Kerja Manajemen yang Independen dan Profesional;
5. Personil SPI tidak diperbolehkan merangkap tugas ataupun pekerjaan yang ada pada Direktorat teknis didalam BPDPKS;
6. Direktur Utama memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya Independensi SPI dan wajib menjaga serta mengevaluasi fungsi SPI.

1. The Internal Audit Unit was stipulated under the Regulation of the Minister of Finance and reports directly to the President Director;
2. The Internal Audit Unit is led by a Head who answers directly to the President Director;
3. The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director upon approval of the Supervisory Board;
4. The Head of Internal Audit Unit serves as an independent and professional management work partner;
5. Any members of the Internal Audit Unit may not concurrently assume any other duties or works within OPPFMA's technical directorates;
6. The President Director provides full support to maintain the independence of the Internal Audit Unit while protecting and evaluating the function.

Audit Internal Internal Audit

Pada tahun 2017, Divisi SPI BPDPKS dipimpin oleh Sdr. Prayudha Moejo dengan dibantu oleh 3 (tiga) auditor. Kedudukan Kepala Audit Internal dalam struktur BPDPKS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

In 2017, OPPFMA Internal Audit Unit was chaired by Mr. Prayudha Moejo, with assistance from of three (3) auditors. The position of the Head of Internal Audit Unit in the Corporate structure is under and answerable to the President Director.

Ruang Lingkup SPI Scope of Internal Audit Unit

1. Melaksanakan audit operasional, audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan khusus;
2. Mitra (*Counterpart*) Auditor Eksternal;
3. Koordinasi dengan Komite Audit;
4. Monitor dan evaluasi tindak lanjut Hasil Audit (LHA);
5. Evaluasi program kerja guna memastikan apakah hasilnya konsisten dengan sasaran yang ingin dicapai Rencana Bisnis Anggaran;
6. Mengkaji ulang, menganalisis dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal BPDPKS telah memadai, serta berfungsi secara efektif;
7. Melakukan kegiatan *assurance* dan *consulting*.

1. Performing operational, financial, performance, and special audits;
2. Working as the counterpart of the external auditors;
3. Coordinating with the Audit Committee;
4. Monitoring and evaluating the follow-up on the audit findings;
5. Evaluating work programs to ensure their consistency with the targets set in the WP&B;
6. Reviewing, analyzing, and assessing to ensure that the internal control system as OPPFMA runs properly and functions effectively;
7. Performing assurance and consulting activities.

Visi dan Misi Internal Audit Vision and Mission of Internal Audit Unit

Visi Vision

Menjadi Satuan Pemeriksa Internal yang Profesional, Independen, Mandiri dan Terpercaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPDPKS.

To become a professional, independent, self-reliable, and trustworthy Internal Audit Unit which supports the achievement of OPPFMA's vision and mission.

Misi Mission

1. Mewujudkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola BPDPKS (*good governance*);
2. Mendorong ketataan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Menjadi yang *independent* dan obyektif bagi manajemen BPDPKS;
4. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi dengan Pemeriksa Eksternal lain.

1. Realizing effective risk management process, internal control, and good governance;
2. Encouraging compliance with the laws and regulations;
3. Becoming an independent and objective strategic business partner for OPPFMA management;
4. Creating harmony and synergy with other external auditors.

Persyaratan Pemeriksa Internal Requirements for Internal Auditors

1. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan objektif;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan;
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU dan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis;
5. Mematuhi standar profesi dan kode etik;
6. Menjaga kerahasiaan informasi, kecuali diwajibkan berdasarkan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
7. Memahami prinsip tata kelola BLU dan manajemen risiko;
8. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesional secara terus-menerus;

1. Having integrity and behaving professionally, independently, honestly, and objectively;
2. Possessing the knowledge of and technical experience in audit and/or other relevant disciplines;
3. Having the knowledge of regulations on financial management in Public Service Agencies and other relevant regulations;
4. Having the capability to interact and communicate, both verbally and in writing;
5. Complying with professional standards and the code of conducts;
6. Maintaining the confidentiality of information, unless required by the regulations or court verdict;
7. Understanding the principles of Public Service Agency governance and risk management;
8. Constantly improving their knowledge, expertise, and professional skills.

161

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Satuan Pemeriksa Internal Duties, Functions, and Responsibilities of Internal Audit Unit

Tugas SPI berdasarkan PMK No. 200 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal BLU antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;

According to Regulation of the Minister of Finance Number 200 of 2017 concerning Internal Control System at Public Service Agencies, the Internal Audit Unit among others has the following duties:

1. Preparing and realizing Internal Audit plan;
2. Assessing and evaluating the implementation of internal control and risk management system;
3. Auditing and assessing the efficiency and effectiveness of financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology performances and other fields;
4. Providing constructive inputs and objective information on monitored activities at all managerial lines;

Audit Internal

Internal Audit

5. Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan BLU dan Dewan Pengawas;
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan Pembina BLU;
8. Melakukan reviu laporan keuangan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penguasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tugas SPI berdasarkan PMK No. 113 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Audit *Charter* dan Audit Program;
2. Pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Fungsi SPI berdasarkan PMK No. 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDPKS, memuat antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan audit *charter* (Piagam Satuan Pemeriksa Internal) dan audit program;
2. Pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Reviu laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

5. Preparing Internal Audit report and submitting the report to head of Public Service Agency and Supervisory Board;
6. Providing recommendations for the improvement of governance and business strategic achievements at Public Service Agency;
7. Monitoring, analyzing, and reporting the implementation of follow-up on audit recommendations by the Internal Audit Unit, government's internal and external audit apparatuses, and Public Service Agency Supervisory Body;
8. Reviewing the financial statements;
9. Conducting special investigation, when necessary;
10. Performing other duties according to expertise according to the laws and regulations.

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, **the Internal Audit Unit has the following duties:**

1. Preparing and implementing duties according to Audit Charter and Audit Program;
2. Performing risk-based audit, especially on OPPFMA's business activities;
3. Reviewing the financial statements to ensure that their content, presentation, and disclosure are in accordance with the government accounting standards and applicable financial accounting standards.

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015 concerning the Organization and Work Procedures of OPPFMA, **the Internal Audit Unit has the following functions:**

1. Preparing and implementing duties according to Audit Charter and Audit Program;
2. Performing risk-based audit, especially on OPPFMA's business activities;
3. Reviewing the financial statements to ensure that the statements' content, presentation, and disclosure are in accordance with government accounting standards and applicable financial accounting standards.

Tanggung Jawab SPI:

1. Membantu Direktur Utama dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan BPDPKS melalui pengawasan/pemeriksaan atas ketaatan, operasional, dan program/kegiatan;
2. Mementau kinerja seluruh kegiatan unit kerja BPDPKS secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dan pengendalian administrasi, akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya;
3. Membantu Direksi dan Dewan Pengawas dalam upaya meningkatkan terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kepatuhan;
4. Membantu Direksi dan Dewan Pengawas memberikan informasi awal (*Early Warning Signal*) atas terjadinya risiko bisnis/kegiatan yang mungkin timbul;
5. Mendorong unit-unit kerja pada BPDPKS untuk terus meningkatkan peran pengawasan yang melekat pada Unit Kerja masing-masing (*Waskat*);
6. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan kelemahan dalam sistem, cara kerja yang dapat mempengaruhi Kinerja BPDPKS;
7. Mengidentifikasi, mengevaluasi berbagai kegiatan, unit kerja yang akan dilakukan pemeriksaan, menganalisis serta menilai tingkat GRC pada kegiatan-kegiatan dimaksud;
8. Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan pemeriksaan serta laporan evaluasi disesuaikan dengan kecukupan SDM pada Unit Kerja SPI;
9. Memberikan evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan atas proses pengelolaan operasional dan kegiatan program pada BPDPKS;
10. Memantau pelaksanaan dan ketepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan penyelesaian rekomendasi;
11. Mengembangkan PKAT berbasis risiko dan menyampaikan kepada Direktur Utama BPDPKS untuk mendapatkan pengesahan;
12. Melaksanakan PKAT yang dibuat oleh konsultan SPI dan telah ditetapkan oleh Direktur Utama serta melakukan:
 - Proses evaluasi hasil audit yang telah dilaksanakan;
 - Proses evaluasi atas hasil audit yang telah dilaksanakan.
13. Melaksanakan pemeriksaan/pengawasan tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan berdasarkan permintaan dari Direksi BPDPKS/APIP

Responsibilities of Internal Audit Unit:

1. Assisting the President Director in meeting its managerial responsibility by supervising compliance, operations, and programs/activities;
2. Comprehensively monitoring the performance of activities by all work units for the compliance, completion, utilization, and control of administration, accounting, finance, and other controls;
3. Assisting the Board of Directors and the Supervisory Board to realize good governance and compliance;
4. Assisting the Board of Directors and the Supervisory Board by giving early warning signal on possible business/activity risks;
5. Encouraging work units at OPPFMA to continue improving inherent supervision;
6. Reporting crucial matters such as system weaknesses or work procedures that may affect OPPFMA's performance;
7. Identifying and evaluating various activities and work units to be audited, analyzing and assessing GRC level of the intended activities;
8. Preparing periodical report on the results of audit and evaluation with adjustment to HR sufficiency at Internal Audit Unit;
9. Conducting evaluation and analysis and providing constructive recommendations for operational management and program implementations;
10. Monitoring the implementation and accuracy of follow-up on Audit Report and settlement of recommendations;
11. Developing risk-based Annual Audit Plan and submitting the plan to OPPFMA President Director for approval;
12. Implementing the Annual Audit Plan prepared by Internal Audit Unit consultant and stipulated by the President Director, and performing:
 - Evaluation to audit results;
 - Evaluation to audit results.
13. Performing unscheduled and/or secret audit/monitoring upon request from OPPFMA President Director/Governmental Internal Audit Apparatus.

Audit Internal Internal Audit

Independensi dan Objektivitas Independence and Objectiveness

1. SPI merupakan satuan kerja yang independen, obyektif tanpa adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manajemen atau pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pemeriksa Internal senantiasa menjaga independensi organisasi dan obyektivitas para auditor;
2. SPI di tempatkan pada struktur organisasi yang memungkinkan dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara independen, obyektif, dan efektif;
3. Para auditor SPI menjaga sikap mental dan tidak memihak dan tanpa prasangka serta menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (*conflict interest*).

1. The Internal Audit Unit is an independent, objective work unit without any influence or pressure from the Management or other parties. In performing its duties, the Internal Audit Unit maintains its organizational independence and auditors' objectiveness;
2. Within OPPFMA's organizational structure, the Internal Audit Unit is placed in such a position that allows independent, objective, and effective operations;
3. The auditors within the Internal Audit Unit should maintain unbiased and fair-minded attitude and prevent themselves from any potential conflict of interest.

Pedoman Satuan Pengawasan Internal Guidelines for Internal Audit Unit

164

Satuan Pengawasan Internal memiliki Piagam Pengawasan Intern sebagai pedomannya dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab serta pelaksanaan lainnya.

The Internal Control Unit is guided by an Audit Charter in performing their duties, responsibilities, and other works.

Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal Development Program for Internal Auditors

BPDPKS telah mewajibkan semua auditor internal untuk mengikuti berbagai pelatihan professional dalam rangka sertifikasi guna memenuhi standar yang dibutuhkan BPDPKS. Kepala SPI dan Kepala Pemeriksaan I dan II telah mendapatkan pelatihan di bidang manajerial dan profesi yang memadai untuk dapat mengelola Unit Kerja SPI dengan baik.

OPPFMA requires all internal auditors to attend professional trainings that award them with necessary certifications to meet OPPFMA's standards. The Head of the Internal Audit Unit and Head of Audit I and II have received proper managerial and professional trainings in order to be able to properly manage the Work Unit.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Accountability and Reporting

1. Kepala SPI mengkomunikasikan LHP kepada Direktur Utama dan unit divisi yang diperiksa atau pihak lain dan instansi terkait program kegiatan BPDPKS unit yang diperiksa;
2. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit mengungkapkan tujuan, ruang lingkup kerja, simpulan/ temuan dan rekomendasi;
3. Direktur Utama wajib menyampaikan LHP kepada Dewan Pengawas;
4. Laporan Kegiatan Satuan Pemeriksa Internal (LKSPI) disampaikan kepada Komite Audit Dewan Pengawas BPDPKS setiap triwulan sebagai bahan untuk evaluasi tindak lanjut;
5. Kepala SPI menyampaikan hasil reviu Laporan Keuangan BPDPKS kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit Dewan Pengawas;
6. Kepala SPI membahas hasil reviu Laporan Keuangan BPDPKS dengan Komite Audit.

Kegiatan Unit Internal Audit dijalankan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk tahun buku 2017 diantaranya menyusun Annual Audit Plan Tahun 2017 yang memuat rencana kerja Fungsi Internal Audit dalam kurun waktu satu tahun yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama dan direview oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Pengawas BPDPKS.

1. The Head of Internal Audit Unit communicates the Audit Report to the President Director and the audited division or other parties and institutions pertaining to the audited activities in the relevant division.
2. The report shall at least disclose the purpose, scope of work, findings, and recommendations.
3. The President Director shall submit the Audit Report to the Supervisory Board.
4. The Internal Audit Unit Activity Report shall be submitted to the Audit Committee of the Supervisory Board on quarterly basis for follow-up evaluation.
5. The Head of the Internal Audit Unit delivers the result of OPPFMA Financial Statements review to the President Director with carbon copy to the Audit Committee of the Supervisory Board.
6. The Head of the Internal Audit Unit discusses the result of OPPFMA Financial Statements review with the Audit Committee.

The activities of the Internal Audit Unit were performed according to the plan set for fiscal year 2017, among others preparing Annual Audit Plan 2017 which contains Internal Audit work plan for one year, to be submitted to the President Director, reviewed by the Audit Committee, and approved by the Supervisory Board.

Manajemen Risiko BPDPKS

Risk Management



Manajemen risiko merupakan salah satu aspek yang penting dalam *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan kelangsungan usaha BPDPKS. Tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi BPDPKS melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan. Mengingat BPDPKS merupakan salah satu badan yang rentan dengan risiko, karena melibatkan pengelolaan uang dalam berbagai bentuk pembiayaan. Manajemen risiko juga menjadi dasar bagi BPDPKS untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan dapat memberikan dampak bagi kinerja BPDPKS.

Pengelolaan penerapan manajemen risiko di BPDPKS dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko yang memberi arah ruang lingkup risiko yang harus dikelola BPDPKS. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko merupakan divisi yang mengelola manajemen risiko pada BPDPKS yang bertanggung jawab melakukan pengendalian internal melalui serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan rencana pengawasan, penyusunan indikator kontrol, penyusunan standarisasi pengendalian dan perencanaan kebijakan dasar terkait pengawasan dan pengendalian, serta melakukan kontrol secara langsung atas praktik bisnis, melakukan pengelolaan risiko satuan kerja termasuk penyusunan profil risiko.

Risk management is one of the most crucial aspects of a good corporate governance that ensures the sustainability of OPPFMA's business. The implementation of risk management mainly aims to safeguard and protect OPPFMA by managing the potential loss that may arise from various activities and containing the risk level at the specified limit. OPPFMA is a risk-laden agency, given its involvement of cash management in various forms of funding. Risk management also becomes a foundation for OPPFMA to set strategic policies in anticipating possible risks that may arise and affect OPPFMA's performance.

Therefore, the risk management at OPPFMA is performed effectively and comprehensively with a risk management framework that directs the scope of risk to manage. The Compliance and Risk Management Division assumes the duty to perform risk management at OPPFMA and holds the responsibility to perform internal control through preparing control plan, control indicators, control standards, and basic policy plan for control and audit, while directly controlling the business practice, managing work unit risks, and preparing risk profile.

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko di pimpin oleh Sylvia Daniarty, S.E., M.M yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-53/DPKS/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Sdri. Sylvia Daniarty, S.E., M.M., NIP 197111181999032008 Sebagai Kepala Divisi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pengangkatan Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah berdasarkan pada Pendidikan dan Pengalaman kerja serta sesuai dengan kebutuhan BPDPKS.

The Compliance and Risk Management Division is led by Sylvia Daniarty, S.E., M.M who is appointed and dismissed by the President Director through Board of Directors Decree Number KEP-53/DPKS/2016 dated August 30, 2016 concerning the Appointment of Ms. Sylvia Daniarty, S.E., M.M., Employment Identity Number 197111181999032008 as the Head of Compliance and Risk Management Division of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency. The appointment of the Head of Risk Compliance and Management Division is based on the consideration of education and work experience and according to the OPPFMA's requirements.

Pedoman, Tugas dan Tanggungjawab Unit Manajemen Risiko Perusahaan Guidelines, Duties, and Responsibilities of Risk Management Unit

Penerapan Manajemen Risiko BPDPKS mengacu pada peraturan eksternal yaitu peraturan PMK Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya, maka telah diberlakukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016. BPDPKS tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko. BPDPKS sebagai Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan, juga telah melaksanakan pengelolaan risiko sesuai peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dan juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015.

Tugas dan tanggung jawab Unit Manajemen Risiko BPDPKS meliputi:

1. Membangun infrastruktur dan kapabilitas penerapan manajemen risiko korporasi sebagai pondasi bagi pengelolaan risiko BPDPKS;
2. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis yang dijalankan oleh BPDPKS;
3. Mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan;

The implementation of risk management at OPPFMA refers to external regulation, i.e. Regulation of the Minister of Finance Number 171/PMK.01/2016 concerning Risk Management within the Ministry of Finance, which specifies that every Head and Employee of the Ministry of Finance shall implement Risk management in every activity in order to achieve targets. Further, to exercise the Regulation, the Decree of the Minister of Finance Number 845/KMK.01/2016 concerning the Guidelines for the Implementation of Risk Management within the Ministry of Finance (hereinafter referred to as Risk Management Implementation Guidelines) was stipulated. As a Public Service Agency within the Ministry of Finance, OPPFMA has also performed risk management as specified by applicable regulations and decrees of the Ministry of Finance, as well as the Regulation of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015.

167

The duties and responsibilities of the Risk Management Unit include:

1. Building the infrastructure and capability of corporate risk management implementation as a foundation for risk management at OPPFMA;
2. Integrating risk management into all of OPPFMA's business processes;
3. Considering business risk in every decision making;

Manajemen Risiko BPDPKS

Risk Management

4. Memastikan semua risiko dalam kondisi terpantau dan terdapat langkah antisipasi yang disiapkan dalam rangka pengendalian risiko;
5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil risiko bersamaan dengan Laporan Manajemen BPDPKS.

4. Ensuring that all risks are monitored and an anticipatory measure is in place for risk control;
5. Preparing and submitting Risk Profile along with OPPFMA Management Report.

Tujuan

Purposes

a. Tujuan Pengelolaan Risiko

- 1) Meningkatkan kesadaran bahwa semua upaya pencapaian sasaran dan target-target BPDPKS mlehgandung risiko dan karenanya semua Pimpinan dan Pegawai harus dapat mengelola risiko sesuai kedudukan dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai dari pengelolaan risiko BPDPKS yang terintegrasi;
- 2) Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran dengan target-target kinerja, dengan cara :
 - a) Menemukan dan mengupayakan pencegahan setiap potensi gangguan yang timbul karena adanya ancaman dari eksternal dan kelemahan internal yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran;
 - b) Menemukan dan mengupayakan pemanfaatan setiap potensi dukungan oleh karena adanya peluang eksternal dan kekuatan internal yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran.

b. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko :

- 1) Sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran akan arti penting manajemen risiko di BPDPKS;
- 2) Memberikan panduan teknis pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan kepada seluruh jajaran Pimpinan dan Pegawai BPDPKS

a. Risk Management Purposes

- 1) Enhancing the awareness that all efforts to achieve OPPFMA's targets and objectives contain risks, and therefore all Heads and Employees must be able to manage risks according to their respective position and responsibility as a part of an integrated risk management;
- 2) Enhancing the possibility of performance target achievement, by way of:
 - a) Recognizing and seeking prevention for every potential disturbances arising from external threats and internal weaknesses that have positive impact on the achievement of targets;
 - b) Recognizing and seeking utilization for every potential support from external opportunities and internal strengths that have positive impact on the achievement of targets.
- b. The Risk Management Technical Guidance was prepared with the following aims:
 - 1) Nurturing awareness of the importance of risk management at OPPFMA;
 - 2) Providing technical guidance for the execution of the Minister of Finance Decree Number 845/KMK.01/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Risk Management within the Ministry of Finance to all Heads and Employees of OPPFMA.

Dengan berlakunya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko ini, maka seluruh pimpinan unit kerja pada setiap tingkatan struktur organisasi di BPDPKS, wajib menyusun dan melaksanakan Rencana Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko dan secara berkala melaporkan perkembangannya kepada Direksi BPDPKS melalui unit Manajemen Risiko.

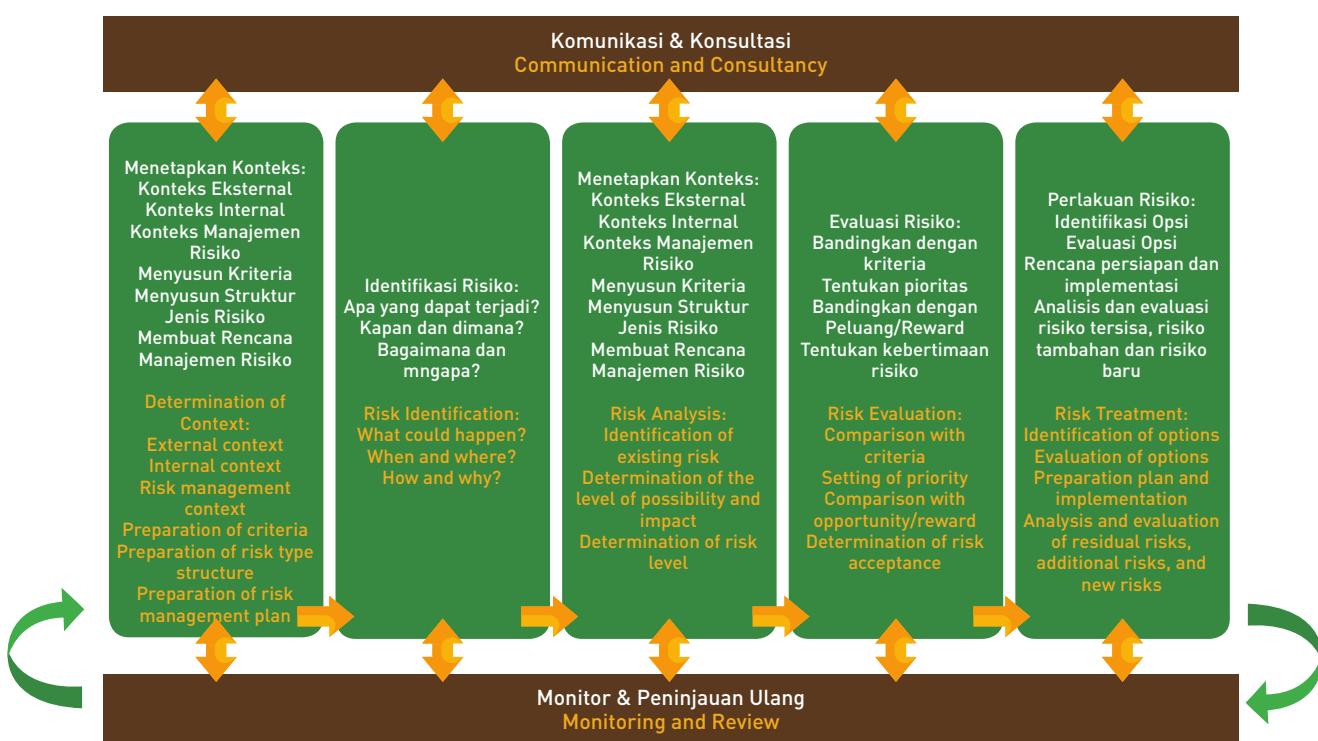
With the enactment of the Risk Management Technical Guidance, all leaders at every work unit in all organizational levels are required to prepare and execute their Risk Management Plan and periodically report their progress to the Board of Directors through the Risk Management Unit.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko BPDPKS

Risk Management Framework

Untuk mendukung pengelolaan penerapan manajemen risiko, BPDPKS telah memiliki Alur Proses Manajemen Risiko yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memetakan, mengukur serta mengembangkan penanganan risiko sesuai ISO 31000 Tahun 2009, sebagaimana ditunjukkan pada bagan di bawah ini:

In supporting the implementation of risk management, a structured and systematic Risk Management Process Flow is available for identifying, mapping, measuring, and developing risk handling according to ISO 31000 of 2009, as shown in the chart below:



Sebagai langkah awal proses, BPDPKS melakukan kegiatan identifikasi risiko untuk menentukan risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi performance, tujuan dan strategi. Penerapan identifikasi risiko harus dilakukan secara jelas, lengkap, terarah dan akurat. BPDPKS melakukan komunikasi dan konsultasi dengan segenap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya memetakan kondisi lingkungan internal dan eksternal penyebab terjadinya risiko dan menetapkan ruang lingkup pelaksanaan proses manajemen risiko di setiap tingkatan BPDPKS serta menentukan kriteria yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi setiap risiko yang teridentifikasi.

As the preliminary measure, the risk identification is performed to determine potential risks that may affect performance, purposes, and strategies. Risk identification shall be performed clearly, completely, directed, and accurately. Communication and consultancy with all internal and external stakeholders must also be performed. Further, the internal and external conditions are mapped to recognize the cause of risks, the scope of risk management implementation is defined for every level, and the criteria are set to analyze and evaluate every identified risk.

Manajemen Risiko BPDPKS

Risk Management

Tahapan selanjutnya melakukan asesmen risiko yang terdiri dari tiga fase sebagai berikut:

- Identifikasi risiko: Menemukan, mengenali dan mendeskripsikan risiko;
- Analisis risiko: Memahami sifat dan tingkat eksposur risiko sehingga dapat dibuat keputusan tentang perlu/tidaknya risiko diambil dan dikendalikan;
- Evaluasi risiko: Memutuskan ambil/tolak risiko dan membuat prioritas pengendalian dengan cara membandingkan dengan kriteria toleransi risiko yang ditetapkan.

Tahap berikutnya adalah perlakuan risiko: Mengidentifikasi, memilih dan menerapkan respons terhadap risiko yang diputuskan harus diambil dan dikendalikan berdasarkan urutan prioritas pengendalian risiko. Tahap terakhir merupakan monitoring dan peninjauan ulang: memantau perubahan lingkungan dan mengkaji pengaruhnya terhadap keefektifan proses manajemen risiko yang dijalankan termasuk keefektifan perlakuan risiko serta secara berkala melaporkan kondisi status profil risiko.

The next step is to perform risk assessment, through three phases as follows:

- Risk identification: Finding, identifying, and describing risks.
- Risk analysis: Understanding the nature and level of risk exposure in order to be able to make a decision on whether or not a risk should be taken and controlled.
- Risk evaluation: Determining to take/reject to take risks and make controlling priority by comparing with the stipulated risk tolerance criteria.

The next phase, risk treatment: Identifying, selecting, and responding to the risks that are determined to be taken and controlled according to the risk control priority order. The last phase, monitoring and review. Monitoring the environmental changes and reviewing their impacts on the effectiveness of risk management run, including the effectiveness of risk treatment, while periodically reporting the risk profile status.



Penilaian Kematangan Risiko BPDPKS

Risk Maturity Assessment

Dalam rangka menentukan penilaian kematangan Risiko di BPDPKS, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah menerapkan peraturan Kematangan Risiko dan dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

To assess risk maturity at OPPFMA, the Compliance and Risk Management Division has implemented the Risk Maturity regulation as seen in the following matrix:

| Tingkat Kematangan Maturity Level | Parameter Penilaian Assessment Parameters | | | |
|---|---|--|---|--|
| | Kepemimpinan Leadership | Proses Manajemen Risiko Risk Management Process | Aktivitas Penanganan Risiko Risk Management Activity | Hasil Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Output |
| Belum Sadar Risiko <i>(Risk Naive)</i> Risk Naive | Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen risiko sangat rendah Very low level of leader's commitment to and understanding of risk management implementation | Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif Very incomplete implementation of risk management process and very non-comprehensive identification | Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat rendah Very low percentage of sought mitigation and very low level of successful risk reduction measures | Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah Very low success rate of strategic objective achievements |
| Sadar Risiko <i>(Risk Aware)</i> Risk Aware | Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen risiko rendah Low level of leader's commitment to and understanding of risk management implementation | Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif Incomplete implementation of risk management process and non-comprehensive identification | Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah Low percentage of sought mitigation and low level of successful risk reduction measures | Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah Low success rate of strategic objective achievements |
| Risiko Ditetapkan <i>(Risk Defined)</i> Risk Defined | Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen risiko sedang Medium level of leader's commitment to and understanding of risk management implementation | Proses manajemen risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif Sufficiently complete implementation of risk management process and sufficiently comprehensive identification | Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sedang Medium percentage of sought mitigation and medium level of successful risk reduction measures | Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang Medium success rate of strategic objective achievements |
| Risiko Dikelola <i>(Risk Managed)</i> Risk Managed | Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen risiko tinggi High level of leader's commitment to and understanding of risk management implementation | Proses manajemen risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi komprehensif Complete implementation of risk management process and comprehensive identification | Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi High percentage of sought mitigation and high level of successful risk reduction measures | Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi High success rate of strategic objective achievements |
| Dapat Menangani Risiko <i>(Risk Enabled)</i> Risk Enabled | Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen risiko sangat tinggi Very high level of leader's commitment to and understanding of risk management implementation | Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif Very complete implementation of risk management process and very comprehensive identification | Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi Very high percentage of sought mitigation and very high level of successful risk reduction measures | Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi Very high success rate of strategic objective achievements |

Manajemen Risiko BPDPKS

Risk Management

Laporan Unit Manajemen Risiko Perusahaan

Risk Management Unit Report

Realisasi Program Kerja Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division Work Program Realization

Selama tahun 2017, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang direncanakan. Realisasi atas Program Kerja Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Melakukan pembaharuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, SOP, Komite Manajemen Risiko sesuai ketentuan Kementerian Keuangan yang baru dan telah disampaikan kepada BPDPKS.
- Membuat Profil Risiko sesuai ketentuan Kementerian Keuangan per Dirut (manajemen) dan per Direktorat masing-masing sesuai sasaran pada kontrak kerja.

172

- Melakukan monitoring atas kinerja Direktorat pada sasaran kinerja profil risiko.
- Melakukan kajian atas kinerja masing-masing Direktorat sesuai sasaran yang telah ditetapkan di Profil Risiko.
- Penyempurnaan pengidentifikasi risiko melekat (*inherent risk*) BPDPKS untuk seluruh risiko (8 jenis risiko), khususnya Pungutan. Pengelolaan, Replanting, Biodiesel, Riset dan sistem untuk mitigasi risiko (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) dari waktu ke waktu untuk menggambarkan risiko BPDPKS yang lebih tepat.
- Melakukan pengkinian pembuatan SOP.
- Melakukan pengkinian pembuatan SK Komite(revisi penunjukan Komite Manajemen Risiko)
- Melakukan pengkinian SK Administrator Manajemen Risiko.
- Melaksanakan *Training Risk Management Fundamental Top Management* sampai dengan *Middle Management* oleh *Credit for Management Studies* [CRMS].

Throughout 2017, the Risk Management Division had executed its duties and responsibilities in accordance with the established work program. The followings are the work program realization of the Risk Management Division:

- Updating Risk Management Implementation Guidelines, SOPs, and Risk Management Committee in accordance with the Ministry of Finance's new provisions and submitting them to OPPFMA.
- Devising Risk Profile in accordance with the Minister of Finance provisions through the President Director (the Management) and each Directorate according to their respective objectives as contained in the employment contract.
- Monitoring the Directorates' performance on their risk profile performance objectives.
- Reviewing the performance of respective Directorates by the objectives established in the Risk Profile.
- Improving the identification of inherent risk at OPPFMA for all risks (8 risk types) particularly Levies, Management, Replanting, Biodiesel, and risk mitigation system (Risk Management Implementation Quality) from time to time to better describe OPPFMA's risk.
- Updating the SOPs.
- Updating the Decree on Committee (revision to the appointment of Risk Management Committee).
- Updating the Decree on Risk Management Administrator.
- Conducting Fundamental Top Management Risk Management Training to Middle Management by Credit for Management Studies [CRMS].

Profil-Profil Risiko BPDPKS dan Mitigasi Risiko Risk Profiles and Risk Mitigation

Pada tahun 2017, Unit Manajemen Risiko BPDPKS memfokuskan pengelolaan perbaikan dan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan BPDPKS baik di bidang Penerimaan, Belanja, Pembiayaan, Strategik, *Fraud*, Kepatuhan, Operasional dan Reputasi. Jenis risiko (Profil Risiko) yang dihadapi BPDPKS dan Upaya Pengelolaan Risiko (mitigasi) dapat dilihat pada tabel berikut:

As of 2017, the Risk Management Unit focused on managing the improvement and mitigation of potential risks that may harm OPPFMA in terms of Revenue, Expenditure, Financing, Strategic, Fraud, Compliance, Operations, and Reputation. The risk types (Risk Profile) faced by the Corporate and Risk Management Efforts (mitigation) are provided in the following table:

| No. | Risiko Risk | Mitigasi Mitigation |
|-----|--|--|
| 1 | Dana peremajaan belum dapat disalurkan Undistributed replanting fund | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Dit. SMI, PPK-BLU, Biro Hukum terkait penyusunan PMK Replanting; 2. Penyusunan peraturan internal BPDPKS. <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinating with the Directorates of Investment Management System, Financial Management Supervision for Public Service Agencies, and Legal Bureau on the preparation of Regulation of the Ministry of Finance on Replanting; 2. Establishing internal regulation for OPPFMA. |
| 2 | Dana Biodiesel tidak mencukupi untuk membayar selisih kurang antara HIP Solar dan HIP Biodiesel Biodiesel fund insufficient to cover minus difference between Diesel Fuel and Biodiesel Market Index Prices | <ol style="list-style-type: none"> 1. Updating simulasi kebutuhan dana; 2. Revisi RBA. <ol style="list-style-type: none"> 1. Updating fund requirement simulation; 2. Revising the WP&B. |
| 3 | Penertiban regulasi hambatan non tarif oleh negara tujuan ekspor atau badan-badan dunia atas perdagangan komoditas Sawit dan turunannya Improving non-tariff barrier regulation by export destination countries or world agencies for the trade of palm oil commodity and its derivatives | <ol style="list-style-type: none"> 1. Counter issue berupa penyajian data objektif yang berhubungan dengan isu terkait; 2. Promosi dan diplomasi sawit sebagai produk yang ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan; 3. Penyusunan starategi diplomasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Making countermeasures by providing objective data on relevant issues; 2. Conducting promotion and diplomacy of palm oil as environmentally-friendly and health-safe product; 3. Establishing diplomacy strategy. |
| 4 | Stagnasi atau penurunan gradual volume ekspor komoditas sawit dan turunannya Stagnation or gradual decline in the export volume of palm oil commodity and its derivatives | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan volume ekspor kepada negara-negara tujuan ekspor sawit utama; 2. Penguatan dukungan promosi dan diplomasi dalam rangka mempertahankan pasar ekspor sawit; 3. Penguatan dukungan promosi dan diplomasi dalam rangka memperluas pasar sawit. <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring export volume to major destination countries; 2. Strengthening support to promotion and diplomacy to maintain the palm oil export market; 3. Strengthening support to promotion and diplomacy to expand the palm oil export market. |
| 5 | Layanan pengembalian kelebihan bayar (restitusi) belum optimal karena masih cukup lama Non-optimal restitution service | Membuat peraturan mengenai rekonsiliasi dan pengembalian kelebihan bayar. Formulating regulation on reconciliation and restitution. |
| 6 | Keterlambatan dalam pembayaran uang saku pelatihan kepada petani dan kepada provider Delay in the payment of training allowance to farmers and providers | Sosialisasi prosedur pembayaran. Socializing the payment procedure. |
| 7 | Program kegiatan yang direncanakan tidak berjalan Non-operational program plans | Penyusunan dengan melibatkan tiap Divisi dengan rapat koordinasi. Establishing programs with involvement from every Division through coordination meeting. |
| 8 | Produk investasi masih terbatas pada investasi jangka pendek dibawah satu tahun Investment product limited to short-term investment with duration under 1 year | Mendapatkan izin prinsip dari Direktur Utama dan telah disetujuinya Kebijaka serta SOP investasi jangka panjang. Obtaining principle permit from the President Director and approval for SOP and Policy on long-term investment. |

Manajemen Risiko BPDPKS

Risk Management

| No. | Risiko Risk | Mitigasi Mitigation |
|-----|---|---|
| 9 | Luas lahan kepala sawit yang diberikan bantuan tidak mencapai 20.000 Ha Assisted palm oil estates not yet covering an area of 20,000 hectare | Berkordinasi dengan Ditjembun, Disbun Provinsi dan Disbuk Kabupaten. Coordinating with the Directorate General of Plantation, Provincial Office of Plantation, and Municipality Office of Plantation. |
| 10 | Petani tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Farmers not eligible to receive assistance fund | 1. Koordinasi dengan Dit. SMI, PPK-BLU, Biro Hukum terkait penyusunan PMK Replanting; 2. Penyusunan peraturan internal BPDPKS. 1. Coordinating with the Directorates of Investment Management System, Financial Management Supervision for Public Service Agencies, and Legal Bureau on the preparation of Regulation of the Ministry of Finance on Replanting; 2. Establishing internal regulation for OPPFMA. |
| 11 | Dana sarana prasarana belum dapat disalurkan Undistributed fund for facilities and infrastructure | 1. Koordinasi dengan Dit. SMI, PPK-BLU, Biro Hukum terkait penyusunan PMK Replanting; 2. Penyusunan peraturan internal BPDPKS. 1. Coordinating with the Directorates of Investment Management System, Financial Management Supervision for Public Service Agencies, and Legal Bureau on the preparation of Regulation of the Ministry of Finance on Replanting; 2. Preparing internal regulation for OPPFMA. |
| 12 | Tidak terlaksananya penerimaan proposal riset baru tahun 2017 New research proposal for 2017 not implemented | 1. Melakukan koordinasi kebijakan alokasi dana riset melalui Direksi dan Dewan Pengawas serta Sekretariat Komite Pengarah; 2. Mengusulkan addendum kontrak kinerja kepada IKU jumlah riset; 3. Mengusulkan kegiatan lomba riset mahasiswa. 1. Discussing the policy of research fund allocation through the Board of Directors and the Supervisory Board and the Steering Committee Secretariat; 2. Proposing addendum to performance contract on KPI of research number; 3. Proposing research competition for university students. |
| 13 | Dana biodiesel yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah volume biodiesel yang telah disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Paid biodiesel fund not meeting the volume of biodiesel distributed under the applicable provision | Permintaan refund dana biodiesel sesuai dengan volume yang seharusnya tidak dibayarkan. Requesting biodiesel fund refund for the volumes that are not supposed to be paid. |
| 14 | Dana biodiesel yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah volume biodiesel yang telah disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Paid biodiesel fund not meeting the volume of biodiesel distributed under the applicable provision | Permintaan refund dana biodiesel sesuai dengan volume yang seharusnya tidak dibayarkan. Requesting biodiesel fund refund for the volumes that are not supposed to be paid. |
| 15 | Proses permohonan verifikasi ke Ditjen EBTKE melebihi waktu yang telah ditentukan sejak penerimaan dokumen tagihan. Verification application to Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation exceeded the specified time since the acceptance of invoice document | 1. Monitoring routing slip; 2. Membuat aplikasi untuk pencatatan online; 3. Review target dan manual IKU. 1. Monitoring routing slip; 2. Membuat aplikasi untuk pencatatan online; 3. Review target and manual IKU. |
| 16 | Pembayaran dana biodiesel terlambat/tidak sesuai dengan ketentuan berlaku Delayed/irregular biodiesel fund payment | 1. Monitoring routing slip; 2. Membuat aplikasi untuk pencatatan online; 3. Menerapkan standar penagihan oleh BU BBN. 1. Monitoring the routing slip; 2. Developing online recording application; 3. Implementing invoicing standard by Vegetable Fuel Enterprises. |
| 17 | Realisasi anggaran dan output jumlah kegiatan promosi tidak sesuai dengan RBA Budget realization and promotional output not meeting the WP&B | 1. Evaluasi kuartalan kegiatan promosi yang telah dilaksanakan bersama Mitra Strategis dan proyeksi kegiatan selanjutnya; 2. Perluasan jaringan mitra BPDPKS pada kelompok masyarakat selain asosiasi sawit anggota DMSI. 1. Conducting quarterly evaluation to performed promotions with strategic partners and creating projection for subsequent activities; 2. Expanding partnership network in community groups other than the members of the Indonesian Palm Oil Board (IPOB). |

| No. | Risiko Risk | Mitigasi Mitigation |
|-----|---|--|
| 18 | Realisasi anggaran dan output jumlah kegiatan promosi tidak sesuai dengan RBA Budget realization and promotional output not meeting the WP&B | <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kuartalan kegiatan promosi yang telah dilaksanakan bersama Mitra Starategis dan proyeksi kegiatan selanjutnya; Perluasan jaringan mitra BPDPKS pada kelompok masyarakat selain asosiasi sawit anggota DMSI. Conducting quarterly evaluation to performed promotions with strategic partners and creating projection for subsequent activities; Expanding partnership network in community groups other than the members of the Indonesian Palm Oil Board (IPOB). |
| 19 | Penyaluran dana untuk kegiatan promosi dan kemitraan di luar negeri tidak proporsional dengan output yang diperoleh Fund distribution for promotion and partnership programs abroad not proportional with the output | Penyusunan Standar Biaya promosi di Luar Negeri. Establishing promotional cost standard for abroad. |
| 20 | Gugus Kendali Mutu tidak dilaksanakan secara rutin Non-regular implementation of Quality Control Circle | Menyusun kebijakan manajemen untuk menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu secara rutin. Establishing managerial policy for routine implementation of Quality Control Circle. |
| 21 | Kompetensi pegawai tidak merata Non-equal employee competencies | Menyusun standar kompetensi karyawan. Establishing competency standard for employees. |
| 22 | Pegawai tidak memetahui/tidak disiplin dalam memetahui jam kerja Employees' ignorance of work hours | Menyusun peraturan tentang penegakan disiplin pegawai. Establishing regulation to discipline the employees. |
| 23 | Grading pegawai yang tidak sesuai Non-appropriate employee grading | Menyusun pengaturan yang jelas terkait dengan grading pegawai Establishing clear regulation on employee grading. |
| 24 | Belum dijalankan proses manajemen risiko dengan baik Non-optimal risk management implementation | <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi kematangan profil risiko; Pembentukan Komite Manajemen Risiko BPDPKS. Identifying risk maturity profile; Establishing Risk Management Committee. |
| 25 | Terdapat perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan Non-actionable agreement | Penggunaan Jasa Konsultan Hukum Independen untuk membuatkan template standart perjanjian kerjasama. Hiring independent legal consultant service to devise standard cooperation agreement templates. |
| 26 | Terjadinya kebakaran kantor Fire hazard at work | Pemasangan alat pemadam kebakaran dan sprayer. Installing fire extinguishers and firefighting sprayers. |
| 27 | Terjadinya inkonsistensi data atau informasi antara unit kerja di BPDPKS Inconsistency of data and information among work units at OPPFMA | Pembuatan sistem terintegrasi. Developing an integrated system. |
| 28 | Pengiriman data terhambat Delayed data delivery | Pengadaan jalur internet ganda. Establishing multiple Internet connection. |
| 29 | Kesalahan dalam proses pembayaran Payment error | Pembayaran kembali dilakukan sehari setelah kesalahan terjadi. Performing repayment one day following the errors. |
| 30 | Keterlambatan dalam proses pembayaran Delayed payment | Pembayaran kembali dilakukan sehari setelah jatuh tempo masa pembayaran. Performing repayment one day following the due date of the payment period. |

Manajemen Risiko BPDPKS

Risk Management

Peta Risiko

Risk Map

Berikut peta risiko perusahaan selama tahun 2017

The following is the Company's risk map for 2017

1. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

1. Risk Analysis and Risk Level Matrix

| Matriks Analisis Risiko 5 x 5 Risk Analysis Matrix 5x5 | | | Level Dampak Impact Level | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Tidak Signifikan Insignificant | Minor | Moderat Moderate | Signifikan Significant | Sangat Signifikan Very Significant |
| Level Kemungkinan Possibility Level | 5 | Hampir Pasti terjadi Very Likely to Occur | 9 | 15 | 18 | 23 | 25 |
| | 4 | Sering Terjadi Frequently Occurring | 6 | 12 | 16 | 19 | 24 |
| | 3 | Kadang Terjadi Occasionally Occurring | 4 | 10 | 14 | 17 | 22 |
| | 2 | Jarang Terjadi Rarely Occurring | 2 | 7 | 11 | 13 | 21 |
| | 1 | Hampir Tidak Terjadi Very Rarely to Occur | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 |

2. Selera Risiko

2. Risk Appetite



| Tingkatan Level | Level Risiko / Risk Level | Besaran Risiko / Risk Magnitude | Warna Color |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 5 | Sangat Tinggi / Very High | 20 – 25 | |
| 4 | Tinggi / High | 16 – 19 | |
| 3 | Sedang / Medium | 12 – 15 | |
| 2 | Rendah / Low | 6 -11 | |
| 1 | Sangat Rendah / Very Low | 1 - 5 | |

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen BPDPKS secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh pejabat dan Pegawai BPDPKS. Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BPDPKS mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 53. Sistem Pengendalian Internal merupakan serangkaian proses pengendalian terhadap kegiatan BPDPKS pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen BPDPKS dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu menjaga aset BPDPKS, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan managerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan BPDPKS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Pemeriksa Internal berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan, keputusan BPDPKS dan seluruh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi BPDPKS menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha BPDPKS, manajemen risiko, perencanaan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendeklegasian wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Sedangkan Dewan Pengawas mengawasi kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit.

Sejalan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efektif, BPDPKS memiliki Fungsi Internal Audit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengendalian Internal Audit secara keseluruhan. Konsep Sistem Pengendalian Internal sejalan dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari COSO dimana di dalamnya terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

The Internal Control System is a supervisory mechanism established by OPPFMA Management on an ongoing basis, whose quality of design and implementation depends on the Supervisory Board, the Board of Directors, and all officials and employees of the Corporate. The internal control system at OPPFMA refers to Article 53 of the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 60 of 2008 concerning Governmental Internal Control System. The Internal Control System is a set of controlling process towards OPPFMA's activities at every level and unit in the organizational structure.

An effective Internal Control System is crucial for OPPFMA management and serves as the basis for sound and healthy operations. An effective Internal Control System may help safeguarding OPPFMA's assets, ensuring the availability of reliable financial and managerial reporting, enhancing compliance with the applicable laws and regulations, and reducing the risks of loss, irregularities, and violation of prudential principle. The Internal Audit Unit strives to ensure that the policies, resolutions, and all business activities are taken according to the applicable laws and regulations.

The Board of Directors implements the internal control system by consistently exercising policies and procedures on OPPFMA's business activities, and risk management, through accurate strategic planning, clear job division and delegation of authorities, and sufficient accounting policies. Whereas the Supervisory Board monitors the adequacy and reasonability in the preparation of the financial statements and risk management by applying the prudential principle, with assistance from the Audit Committee.

Along with the effective Internal Control System implementation, Internal Audit Function coexists as an integral part of the whole Internal Control System. The concept of the Internal Control System conforms to COSO's Internal Control System framework which consists of five main, interconnected elements, i.e.

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian yang efektif diperlukan dalam mendukung seluruh organ BPDPKS dapat menjalankan semua aktivitasnya, mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai dan mengerti serta berkomitmen untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar. Lingkungan pengendalian BPDPKS tergambaran secara jelas melalui pembentukan Struktur Organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan tugas dari masing-masing organ.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Identifikasi dan penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisa risiko yang relevan terkait pencapaian tujuan PDPKS dan menentukan respon yang tepat dalam menghilangkan, meminimalisasi, atau menentukan risiko yang dapat diterima. Pada tahun 2017 BPDPKS telah melakukan pengelolaan manajemen risiko. Sistem Pengendalian Internal yang efektif mengharuskan BPDPKS secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus dilakukan oleh auditor intern melalui cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. **(Dapat dilihat pada Bab Tata Kelola BPDPKS bagian Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini).**

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Dalam rangka menciptakan pengendalian yang efektif BPDPKS melibatkan seluruh pegawai termasuk Direksi dalam kegiatan BPDPKS sehari-hari dan risiko yang telah teridentifikasi serta memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian serta dilakukan proses verifikasi lebih dini untuk memastikan kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian BPDPKS meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberi keyakinan pegawai BPDPKS bahwa arahan Dewan Pengawas dan Direksi BPDPKS secara efektif.

4. Informasi dan Komunikasi

(Information & Communication)

Komunikasi atas informasi telah dilakukan secara efektif baik dalam komunikasi di lingkungan BPDPKS maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait dalam program, proyek, dan kegiatan lainnya termasuk penganggaran. Tahun 2017, BPDPKS telah melakukan

1. Control Environment

An effective control environment is vital to support all OPPFMA organs in performing their activities, understanding their duties and responsibilities, possessing proper knowledge, and understanding and committing to performing the right things in the right way. OPPFMA's control environment is clearly defined through the establishment of the organizational structure which describes the division of functions and duties of each organ.

2. Risk Identification and Assessment

Risk identification and assessment is crucial for OPPFMA's achievement of objectives while defining the right responses to eliminate, minimize, or determine which risks to accept. In 2017, OPPFMA has performed the risk management. An effective Internal Control System requires OPPFMA to continuously identify and assess the risks that may affect the achievement of targets. Risk assessment must be performed by internal auditor, through expanded and more comprehensive audit scope. **(Can be found in the Chapter of OPPFMA Governance, section of Risk Management of this Annual Report.)**

3. Control Activities

In order to create an effective control, OPPFMA engages all employees, including the Board of Directors, in daily activities and identified risks, while having control policies and procedures available and conducting early verification to ensure consistent compliance with these policies and procedures. OPPFMA's control activities cover the policies, procedures, and practices that give assurance to OPPFMA's employees that the directives given by the Supervisory Board and the Board of Directors are taken effectively.

4. Information & Communication

Proper communication of information has been performed both internally within OPPFMA environment, and externally with outside parties concerning the programs, projects, and other activities, including budgeting. Internal communication forums held throughout 2017 include Supervisory Board Meetings,

Manajemen Risiko BPDPKS

Manajemen Risiko BPDPKS

forum komunikasi internal antara lain melalui Rapat Dewan Pengawas, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Rapat Manajemen dan rapat-rapat lainnya atau melalui pelaporan formal.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem pengendalian intern telah dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan dan kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi sudah dibuatkan rencana perbaikan. BPDPKS melakukan monitoring secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Monitoring dilakukan terhadap seluruh fungsi yang merupakan bagian dari kegiatan operasional BPDPKS. Proses monitoring ini dilakukan oleh Fungsi Internal Audit yang dilaksanakan melalui kegiatan Audit maupun kegiatan Non Audit. Pelaksanaan monitoring selain dilakukan oleh Fungsi Internal Audit, dapat juga dilakukan oleh KAP yang ditunjuk dan ditetapkan oleh BPDPKS, serta juga dapat dilakukan oleh lembaga tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Directors Meetings, Audit Committee Meetings, Management Meetings, and other meetings and formal reporting.

5. Monitoring

Monitoring aims to verify that the internal control system has been executed as planned, and the identified weaknesses have been addressed for improvements. At OPPFMA, constant monitoring is performed on the effectiveness of the entire implementation of internal control. The monitoring covers all functions as parts of OPPFMA's operations. This duty can be performed by Internal Audit Unit through audit and non-audit activities, by a Public Accounting Firm appointed and determined by OPPFMA, or by a certain institution as specified by the applicable laws and regulations.



Kode Etik BPDPKS

Code of Conducts



Kode Etik BPDPKS terdiri dari Etika Bisnis dan Etika Kerja yang merupakan tanggung jawab seluruh manajemen BPDPKS mencakup pegawai, Direksi, Dewan Pengawas dan Komite di bawah Dewan Pengawas untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya perusahaan.

OPPFMA Code of Conducts comprises Work Ethics and Business Conducts which constitutes responsibility of the Management along with all employees, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Committees under the Supervisory Board to act appropriately in accordance with the company culture.

Dalam menjalankan usahanya, BPDPKS menerapkan etika bisnis/usaha dan etika kerja, dimana etika bisnis menjadi acuan bagi BPDPKS dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan stakeholder. Sementara etika kerja merupakan sistem yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Pegawai dan BPDPKS.

Penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan sikap disiplin Pegawai serta dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

Kode Etik menuntun pegawai dalam bersikap dan berperilaku. Pegawai dapat dikenakan sanksi moral apabila melanggar kode etik yang penyampaiannya dilakukan secara tertutup atau terbuka. Untuk itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK.01/2007 Tentang Pendeklegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya BPDPKS. Selama tahun 2017, tidak terdapat pelanggaran kode etik, sehingga tidak ada informasi sanksi yang diberikan.

In managing its business, OPPFMA applies business conducts and work conducts. The business ethics serve as a reference in conducting business activities, including interacting with stakeholders. Work ethics, on the other hand, is a system adhered by all Leaders and Employees in performing their duties, including the ethics of relationship between the Employees and OPPFMA.

Consistent implementation of business conducts and work ethics is expected to improve the employees' discipline and promote professional, responsible, reasonable, feasible, and reliable conducts in engaging business relation with colleagues and work partners.

The Code of Conducts guides the employees in their conducts and behavior. Employees may be subjected to moral sanctions when committing violation against the Code of Conducts, whose disclosure can be done in secrecy or transparently. Therefore, the Ministry of Finance Decree Number 293/KMK.01/2007 concerning Delegation of Authority to Officials within the Ministry of Finance for Imposing Moral Sanctions for the Violation of the Code of Conducts for Civil Servants within the Ministry of Finance, including OPPFMA. Throughout 2017, there were no violation of the Code of Conducts, and therefore no information on the imposed sanctions are available.

Kode Etik BPDPKS

Code of Conducts

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Insan BPDPKS berlandaskan pada nilai-nilai dan budaya BPDPKS yaitu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Uraian lebih lengkap mengenai Budaya BPDPKS telah diuraikan pada Bab Profil BPDPKS bagian Nilai-Nilai dan Budaya BPDPKS.

Dalam rangka penegakan kode etik, BPDPKS membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi dengan melakukan sosialisasi Nilai-Nilai Budaya BPDPKS pada Pegawai BPDPKS melalui acara-acara besar BPDPKS seperti *employee gathering* yang secara rutin dilakukan oleh BPDPKS dalam rangka membangun menambah semangat dan kekompakan dalam berkerja.

In carrying out their duties and responsibilities, OPPFMA Personnel adhere to the corporate values and culture: Integrity, Professionalism, Synergy, Service, and Perfection. A more comprehensive description of the Corporate Culture has been described in Chapter of Company Profile, Section of Corporate Values and Culture.

To enforce the Code of Conducts, OPPFMA establishes a compliance culture across all organizational levels by disseminating Corporate Cultural Values to OPPFMA Employees through major corporate events such as regular employee gathering which strives to nurture the work spirit and cooperation.



Perkara Hukum Legal Cases

BPDPKS senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan lingkup usaha BPDPKS.

OPPFMA constantly focuses on the compliance with the applicable regulations as well as other regulations relevant to corporate business scope.

Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh BPDPKS dan Entitas Anak Significant Cases Faced by OPPFMA and Its Subsidiaries

Selama tahun 2017, BPDPKS tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Sehingga tidak ada informasi terkait dengan pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap BPDPKS, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada BPDPKS.

Throughout 2017, OPPFMA did not face any legal, civil or criminal, issues. Thus there is no information regarding the principal case, settlement status, impact on the Company, the value of the charges, and administrative sanctions imposed on the Company.

Selama tahun 2017, BPDPKS tidak memiliki entitas anak, sehingga tidak ada informasi terkait pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap Entitas Anak, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas Anak.

Throughout 2017, OPPFMA did not have any subsidiaries, thus there is no information regarding the principal case, settlement status, impact to the Subsidiaries, the nominal value of the charges and administrative sanctions imposed on the Subsidiaries.

183

Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang Menjabat Significant Case Faced by Incumbent Member(s) of the Supervisory Board and the Board of Directors

Selama tahun 2017, Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPDPKS yang sedang menjabat tidak memiliki permasalahan hukum, sehingga tidak ada informasi terkait perkara gugatan, status penyelesaian pengaruh terhadap BPDPKS, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.

Throughout 2017, no incumbent member(s) of the Supervisory Board and the Board of Directors of OPPFMA faced any legal issues, and therefore there is no information related to the lawsuit, the settlement status, impact on the Company, the nominal value of the lawsuit and the administrative sanctions imposed on the members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Salah satu perwujudan dari komitmen BPDPKS dalam upaya pengendalian internal adalah dijalankannya kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*). Sistem pelaporan pelanggaran BPDPKS mengacu pada *Whistle Blowing System* Kementerian Keuangan. *Whistle Blowing System* Kementerian Keuangan adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi individu yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sistem pelaporan pelanggaran adalah sistem yang mengelola pengaduan, penyingkapan mengenai korupsi, kecurangan (*fraud*), pencurian, menuap dan atau menerima suap, gratifikasi, benturan kepentingan, pembocoran rahasia perusahaan, pelanggaran etika, penggelapan aset, penipuan, pemerasan, tindakan melanggar hukum dan kebijakan prosedur perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BPDPKS dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPDPKS.

Pelapor dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui alamat:

The implementation of the whistleblowing system denotes OPPFMA's commitment in the internal control efforts. OPPFMA's whistleblowing system refers to the Whistleblowing System of the Ministry of Finance. The Whistleblowing System of the Ministry of Finance is an application provided by the Ministry of Finance for individuals having information and desiring to report any alleged violations occurring within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Whistleblowing system manages the reporting and disclosure of corruption, fraud, theft, bribery, and/or the acceptance of bribery, gratification, conflict of interest, leaking of company's confidentiality, violation of ethics, assets embezzlement, deception, extortion, law and policy-violating acts, unethical conducts committed in secret, anonymously, and independently to optimize the participation of OPPFMA Personnel and other parties in disclosing violations occurring within OPPFMA.

Whistleblower may report any violation via:

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 6
JALAN DR. WAHIDIN NO.1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
Phone : (021) 345-4236
Fax : (021) 352-3252
SMS : 0815-99-6666-2
e-mail : pengaduan.itjen@depkeu.go.id

Semua laporan pelanggaran akan diteruskan kepada Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang merupakan pihak eksternal BPDPKS. Seluruh organ BPDPKS, yaitu Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh elemen maupun pegawai BPDPKS hingga pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan adanya pelanggaran. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran adalah Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai.

BPDPKS menyediakan perlindungan kerahasiaan atas identitas pelapor, perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor, perlindungan dari pemecatan penurunan jabatan atau *grade*, penundaan kenaikan *grade*, tekanan tindakan fisik, perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya. Informasi mengenai tindak lanjut yang sedang dilakukan informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, BPDPKS juga berupaya untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi.

Selama tahun 2017, tidak terdapat pelaporan pelanggaran sehingga tidak ada informasi terkait dengan Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai.

All reports of violations must be forwarded to the Special Investigation Inspectorate (IBI) which is an external party of the Company. OPPFMA organs, i.e. Supervisory Board, Board of Directors, and all elements or employees as well as the stakeholders may act as whistleblower. Whereas the reportable party may come from the Supervisory Board, the Board of Directors, and all employees.

OPPFMA protects the confidentiality of whistleblower's identity, as well as providing protection to the whistleblower from retaliation from the reported party, protection from termination of employment, demotion of position or grade, delay in grade promotion, physical persecution, and protection to sensitive personal data. Information on the ongoing follow-up is provided in secret to the whistleblower through independent, free, and confidential reporting channels (phone, letter, e-mail) to ensure a secure whistleblowing process. OPPFMA also strives to maintain the confidentiality of the whistleblower to protect them and their family from any retaliation from the reported party or organization.

Throughout 2017, there was no reporting of the violation, thus there is no information pertaining to sanctions/follow-up on the resolved report.

Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement

Untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu Badan Layanan Umum di Kementerian Keuangan, BPDPKS telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melayani kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh unit-unit dalam BPDPKS. ULP dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Utama No.30/DPKS/2016 tanggal 1 Juni 2016. Hal ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Pasal 5 ayat 1 dan 2.

In executing its function as a Public Service Agency of the Ministry of Finance, OPPFMA has established a Procurement Service Unit to facilitate the procurement of goods and services for units within OPPFMA. The Procurement Service Unit was established pursuant to the Decree of the President Director Number 30/DPKS/2016 dated June 1, 2016. This conforms to the Regulation of the Minister of Finance Number 08/PMK.02/2006 concerning the Authority of Goods and Services Procurement at Public Service Agencies, Article 5, sub-articles 1 and 2.

Struktur Organisasi dan Tugas ULP

Organizational Structure and Duties of the Procurement Service Unit

Untuk memastikan implementasi dan menjaga proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan secara baik dan dengan pengendalian yang efektif dan efisien, BPDPKS membentuk Unit Layana Pengadaan (ULP) yang terdiri dari Kepala, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung.

To ensure and maintain proper goods and services procurement with effective and efficient control, OPPFMA has established the Procurement Service Unit which comprises the Head, Secretariat, Work Group, and Supporting Staff.

Tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan BPDPKS

Duties and Authorities of the Procurement Service Unit

ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Mempunya Tugas:

1. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
3. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
4. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. menjawab sanggahan;
7. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
8. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa;
9. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
10. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Direktur Utama;

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) Procurement Services Unit has the duties of:

1. Reviewing Goods/Services Procurement General Plan with Commitment-Making Official;
2. Preparing goods/services provider selection plan;
3. Announcing the implementation of the goods/services procurement on OPPFMA's website;
4. Assessing the qualification of the goods/services procurement through pre- or post-qualification;
5. Conducting administration, technical, and pricing evaluation for any incoming offer(s);
6. Responding to any rebuttal(s);
7. Submitting selection results and copies of goods/services provider selection documents to Commitment-Making Official;
8. Keeping the original documents of the goods/services provider selection;
9. Proposing change in Independent Estimated Price, Terms of Reference/technical specification for works, and contract design to Commitment-Making Official;
10. Preparing reports on the Procurement process and result for the President Director;

11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
12. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
13. melaksanakan pengadaan barang/jas dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE Kementerian Keuangan;
14. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
15. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.

ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan Dokumen Pengadaan;
2. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
3. dalam penetapan penyedia barang /jasa ULP terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. Pemimpin BLU untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
4. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
5. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Service Procurement Guidelines

Dalam melaksanakan kegiatan terkait barang dan jasa, BPDPKS menerapkan kebijakan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.30/DPKS/2016 tetang Penetapan Unit Layanan Pengadaan tanggal 1 Juni 2016. Muatan dalam Keputusan Direktur Utama tersebut adalah terkait dengan tugas dan tanggung jawab Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

11. Providing accountability for the implementation of the Goods/Services Procurement to Budget User/Budget User Proxy;
12. Preparing and implementing Goods/Services Procurement strategies in the Procurement Services Unit of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA);
13. Conducting goods/services procurement using LPSE (e-procurement service) of the Ministry of Finance;
14. Evaluating completed goods/services procurement processes; and
15. Managing procurement management information system which covers procurement documents, price survey list, goods/services requirement list, and provider blacklist.

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) Procurement Services Unit has the duties of:

1. Establishing Procurement Documents;
2. Determining the amount of Bid Security;
3. In determining goods/services provider, the Procurement Services Unit must firstly obtain written approval from:
 - a. Head of Public Service Agency for Goods/Services Procurement valued above Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah).
 - b. Other officials appointed by the Head of Public Service Agency for Goods/Services Procurement valued up to Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah).
4. Proposing to the Budget User/Budget User Proxy to blacklist Goods/Services Providers for any act or deed of fraud, forgery, or other violations they committed as a sanction; and
5. Imposing administrative sanction to Goods/Services Providers for their violations, deeds, or acts as applied in the Presidential Regulation Number 54 of 2010 on Government Goods/Services Procurement.

In carrying out goods and services-related activities, OPPFMA applies the policy on Goods and Services Procurement which refers to the Decree of OPPFMA President Director No. 30/DPKS/2016 on Determination of Procurement Services Unit dated June 1, 2016. The President Director Decree contains the duties and responsibilities of the Goods and Services Procurement Unit.

Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement

Konsep Pengadaan Barang dan Jasa BPDPKS Goods and Service Procurement Concept at OPPFMA

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Service Procurement Principles

Pengadaan Barang dan Jasa di BPDPKS dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

Goods and Services Procurement at OPPFMA are carried out with the following principles:



Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Method

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Proses pengadaan barang/jasa BPDPKS dilaksanakan melalui metode Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Kontes/Sayembara.

Pursuant to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2015 on Governmental Goods/Services Procurement, the Goods/Services Procurement Process is carried out through Public Bidding, Simple Bidding, Direct Appointment, Direct Procurement, and Contest/Competition.

| No. | Mekanisme Method | Definisi Definition |
|-----|--|---|
| 1 | Pelelangan Umum Public Bidding | Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. |
| 2 | Pelelangan Sederhana Simple Bidding | Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |
| 3 | Penunjukan Langsung Direct Appointment | Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. |
| 4 | Pengadaan Langsung Direct Procurement | Mengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan langsung/seleksi/penunjukan langsung. |
| 5 | Sayembara Competition | Metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan sedangkan Kontes adalah metode pilihan Penyedi Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. |

Pengadaan Barang dan Jasa

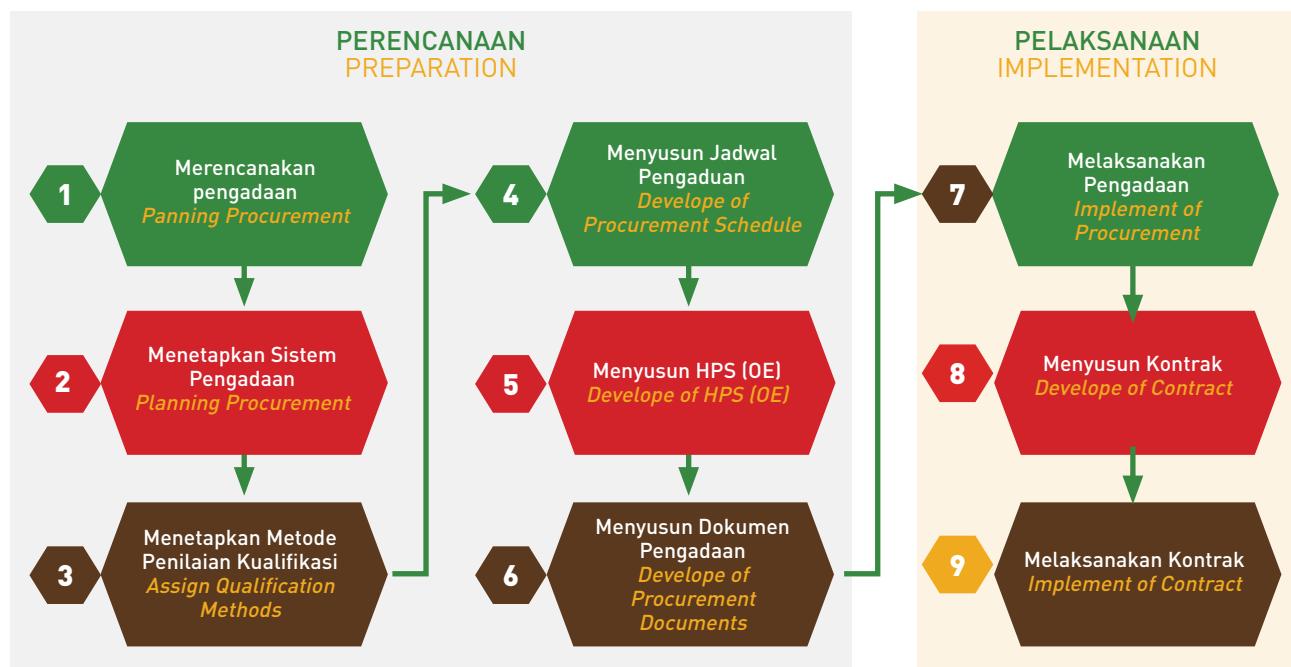
Goods and Services Procurement

Siklus Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Process Cycle

Pengadaan adalah seluruh proses akuisisi dari pihak lain (termasuk aspek logistik) dan mencakup barang, jasa, dan pekerjaan. Proses ini mencakup seluruh daur hidup sejak konsep awal dan penentuan kebutuhan hingga ke akhir masa manfaat atau akhir kontrak jasa. Siklus proses pengadaan barang dan jasa BPDPKS memiliki 9 tahapan yang digambarkan dalam skema berikut ini:

Procurement is the whole acquisition process from another party (including the logistics) which covers goods, services, and works. The process covers the whole cycle from the initial concept, determination of needs, to the end of useful life or the end of the service contract. OPPFMA goods and services procurement cycle consists of 9 phases described in the following scheme:



Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Service Procurement Activities

Selama tahun 2017, BPDPKS telah melakukan pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi BPDPKS, baik yang menggunakan metode lelang umum, sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara.

Throughout 2017, the volumes of goods and services procurement packages completed to meet the Company's operational requirements, either through public bidding, simple bidding, direct appointment, direct procurement, or competition.

Sistem Manajemen Mutu

Quality Management System

BPDPKS berkomitmen untuk memberikan jaminan mutu yang terbaik kepada para *stakeholder*. Untuk itu BPDPKS telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Standar Pelayanan Minimum pedoman dalam memberikan layanan minimum atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BPDPKS.

SPM merupakan pedoman dalam memberikan layanan minimum yang diberikan kepada masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BPDPKS. Dalam pelaksanaannya Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BPDPKS yang dilakukan oleh Direksi.

Kebijakan terkait Sistem Pelayanan Minimum BPDPKS, meliputi:

- a. Pengelolaan Dana;
- b. Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
- d. Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya;
- e. Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
- f. Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- g. Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan
- h. Pelaksanaan Urusan Umum dan Keruماhtanggaan.

Tujuan Sistem Pelayanan Minimum BPDPKS, antara lain

1. Menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; dan
3. Menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

OPPFMA is committed to providing the best quality assurance to the stakeholders. To that reason, OPPFMA has applied the Financial Management Model for Public Service Agency using Minimum Service Standards according to the Regulation of the Minister of Finance Number 80 / PMK.05/2016 concerning Minimum Service Standards for the Oil Palm Plantation Fund Management Agency.

The Minimum Service Standards guides the provision of minimum services for the management of sustainable palm oil development fund performed by OPPFMA.

The Minimum Service Standards guides the provision of minimum services for the community for the management of sustainable palm oil development fund performed by OPPFMA. Along the way, the Supervisory Board monitors the OPPFMA management performed by the Board of Directors.

191

The policy on Minimum Service Standards at OPPFMA covers:

- a. Fund Management;
- b. Human Resource Development Fund Distribution;
- c. Research and Development Fund Distribution;
- d. Palm Oil and Derivatives Promotion Fund Distribution;
- e. Estate Replanting Fund Distribution;
- f. Estate Facilities and Infrastructure Fund Distribution;
- g. Biodiesel Financing Fund Distribution; and
- h. Implementation of General and Internal Affairs.

The objectives of Minimum Service Standards at OPPFMA among others are:

1. Ensuring the implementation of CPO Fund management procedure according to applicable provisions;
2. Ensuring the provision of quality services in the management of sustainable palm oil development fund; and
3. Ensuring the consistency in planning, implementation, monitoring, and evaluation of the sustainable palm oil development fund.

Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System

Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring and Evaluation

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pengembangan BPDPKS telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima layanan.

Pelaksanaan pemantauan meliputi:

- Membandingkan layanan yang diberikan dengan indikator SPM yang ditetapkan;
- BLU BPDPKS yang berkoordinasi dengan unit/lembaga terkait;
- Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala.

Selanjutnya untuk melihat pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BPDPKS, maka dilakukan evaluasi meliputi secara berkala dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan BPDPKS.

Monitoring aims to ensure that the OPPFMA development services are run according to the specified standards. The monitoring is performed, among others, through site visit, documentary study, and meetings with service implementers and receivers.

The implementation of monitoring includes:

- Comparison of provided services with the specified Minimum Service Standards indicators;
- OPPFMA Public Service Agency coordinating with relevant units/institutions;
- The monitoring is performed on periodical basis.

Further, to observe the achievement and impact of the programs executed based on the monitoring results in order to improve performance, periodical evaluation is performed through site visit, interviews, observation, and documentary study. The results of the evaluation are used as the input in improving OPPFMA services.

Teknologi Informasi

Information Technology

Teknologi informasi yang andal menjadi enabler proses pengembangan bisnis dan sinergi dengan stakeholder dan mitra terkait. BPDPKS terus berupaya melaksanakan pengelolaan teknologi informasi secara optimal melalui penyusunan dan penerapan *Road Map IT* yang telah didesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.

A reliable information technology becomes the enabler for business development and synergy with stakeholders and relevant partners. OPPFMA continues the effort to optimally manage the information technology by establishing and implementing IT Roadmap which has been designed to the data level and security system.

Pengelolaan Informasi

Information Management

Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi BPDPKS dikelola oleh Divisi Umum dan SDM yang dipimpin oleh Bapak Suharman dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang pegawai.

The IT Management Function at OPPFMA is managed by the General Affairs and Human resources Division chaired by Mr. Suharman with assistance from three (3) employees.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Sistem Informasi

Duties and Responsibilities of Information System Management

1. Mengkoordinir, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan transaksi elektronik yang terintegrasi dan mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPDPKS.
2. Mengkoordinir penyiapan data/informasi yang dibutuhkan baik untuk kepentingan pencatatan seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh BPDP Sawit maupun untuk menunjang kebutuhan laporan kepentingan internal maupun eksternal.
3. Membuat dan menganalisa atas permintaan kebutuhan teknologi informasi pada setiap unit BPDPKS.
4. Pengembangan SDM di Deputi Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi.

1. Coordinating, developing, and enhancing integrated information system and electronic transactions and covering all activities performed by OPPFMA.
2. Coordinating the preparation of data/information necessary either for the recording of all transactions performed by OPPFMA or for supporting the reporting needs for internal and external parties.
3. Preparing and analyzing the IT requirements at every OPPFMA unit.
4. Developing human resources at the Deputy Directorate of Information System Management.

Roadmap Teknologi Informasi

Information Technology Roadmap

Target yang ingin dicapai oleh BPDPKS dari penerapan Teknologi Informasi untuk tahun 2017 adalah Peningkatan dan pemeliharaan sistem informasi/infrastruktur. Saat ini Teknologi Informasi BPDPKS masih berada pada taham pengembangan system informasi dan infrastruktur. Roadmap Divisi Pengelolaan Sistem Informasi BPDPKS Tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

The target intended to achieve by OPPFMA from IT implementation by 2017 is the improvement and maintenance of information system/infrastructure. Currently, OPPFMA's IT is at the information and infrastructure system phase. OPPFMA IT System Management Division Roadmap 2016-2018 is as follows:

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Pengelolaan Informasi Tahun 2017

IT Management Division's Activities Implementation Report 2017

194

Pada tahun 2017, Divisi Direktirat Pengelolaan Informasi telah melakukan Pengembangan Infrastruktur terhadap:

1. Pembangunan Data Center BPDPKS
2. PABX System
3. Integrated UPS
4. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet
5. Pembangunan Active Directory Server dan File Sharing Server
6. Pembangunan Jaringan Internet Dedicated
7. Pengembangan Sistem Pengamanan IT
 - Antivirus Server
 - Firewall
 - Internet Management System
8. Pemanfaatan Trunking System PABX
9. Kajian terhadap pengembangan infrastruktur yang telah dilakukan.

In 2017, the IT Management Division has performed Infrastructure Development for:

1. OPPFMA Data Center Development
2. PABX System
3. Integrated UPS
4. Internet Network Infrastructure Development
5. Active Directory Server and File Sharing Server Development
6. Dedicated Internet Network Development
7. IT Security System Development
 - Antivirus Server
 - Firewall
 - Internet Management System
8. PABX System Trunking Utilization
9. Review on infrastructure development conducted.

Pencapaian Pengembangan Sistem Informasi BPDPKS Tahun 2017

OPPFMA Information System Development Achievements in 2017

1. Telah dikembangkan sistem rekonsiliasi data pungutan Ekspor Kelapa Sawit guna melakukan rekonsiliasi antara data rekening koran Bank dengan data LS dari Sucofindo
2. Telah diimplementasikan sistem manajemen persuratan yang berfungsi untuk mengadministrasikan surat dinas secara digital dan informasi disposisi dilengkapi dengan tindak lanjut.
1. A reconciliation system for palm oil export levies data has been developed for reconciling between the data from Bank's current account with LS data from Sucofindo.
2. A mailing management system which digitally manages official letters and disposition information has been implemented.



Akuntan Publik

Public Accountants

BPDPKS menunjuk akuntan publik sebagai auditor eksternal untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi BPDPKS sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK). Selain itu, laporan yang disusun menyajikan informasi terkait posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan BPDPKS tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku. Auditor eksternal juga diberikan wewenang dalam melakukan penilaian yang dianggap penting.

Pemilihan auditor eksternal telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan dilakukan melalui mekanisme tender pengadaan jasa audit, dengan peserta tender sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh BPDPKS. Dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dari hasil pemilihan KAP yang telah dilakukan pada tahun 2017, telah ditetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit keuangan untuk Tahun Buku 2017 dengan fee audit sebesar Rp361.955.000,-. Informasi Akuntan Publik terkait Nama Akuntan, Nama Kantor Akuntan Publik, dan Jasa Lain yang Diberikan selama kurun waktu 2015 – 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

OPPFMA appoints public accountants as external auditors who ensures that the Company's accounting has met the provision of the Statements of Accounting and Financial Standards (PSAK). In addition, the prepared report contains the information on financial position and business yields in reasonable manners, while OPPFMA's business operations do not violate the applicable regulations. External auditors are also granted with the authority to conduct important assessments.

The selection of internal auditors has met the provision of the Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services and is conducted through audit service procurement bidding according to the qualifications set by OPPFMA. A Public Accounting Firm is only allowed to perform audit for at maximum six (6) consecutive fiscal years, whereas a Public Accountant is only allowed to conduct audit for at maximum three (3) consecutive fiscal years.

From the selection of Public Accounting Firm in 2017, the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners was selected to perform financial audit for the fiscal year 2017 with audit fee Rp361,955,000. Public Accountant Information on the Accountant's Name, Public Accounting Firm's Name, and Other Services Provided can be found in the following table:

Tabel Auditor Eksternal BPDPKS Tahun 2015-2017
Table of OPPFMA's External Auditors in 2015-2017

| Tahun Buku Fiscal Year | Akuntan Publik Public Accountant | Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm | Jasa Lain Other Services | Opini Opinion |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 2017 | Eddy Rintis, SE, CPA | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners | Tidak Ada N/A | Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2017, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency as at December 31, 2017, and their financial activities and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |

| Tahun Buku Fiscal Year | Akuntan Publik Public Accountant | Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm | Jasa Lain Other Services | Opini Opinion |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| 2016 | Rudi M, Tambunan, CA, CPA | Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusun Pedoman Akuntansi - Laporan Financial Managerial - Accounting Guidelines Preparation - Managerial Financial Report | <p>Laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BLU-BPDPKS tanggal 31 Desember 2015, dan aktivitas usaha serta arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>The accompanying financial statements are presented fairly in all material respects. The financial position of the Public Service Agency Oil Palm Plantation Fund Management Agency as at December 31, 2015, and their business activities and cash flows for the year then ended, are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> |
| 2015 | Rudi M, Tambunan, CA, CPA | Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali | Tidak Ada N/A | <p>Laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BLU-BPDPKS tanggal 31 Desember 2015, dan aktivitas usaha serta arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>The accompanying financial statements are presented fairly in all material respects. The financial position of the Public Service Agency Oil Palm Plantation Fund Management Agency as at December 31, 2015, and their business activities and cash flows for the year then ended, are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> |

Akses Informasi dan Data BPDPKS

Access to OPPFMA Information and Data

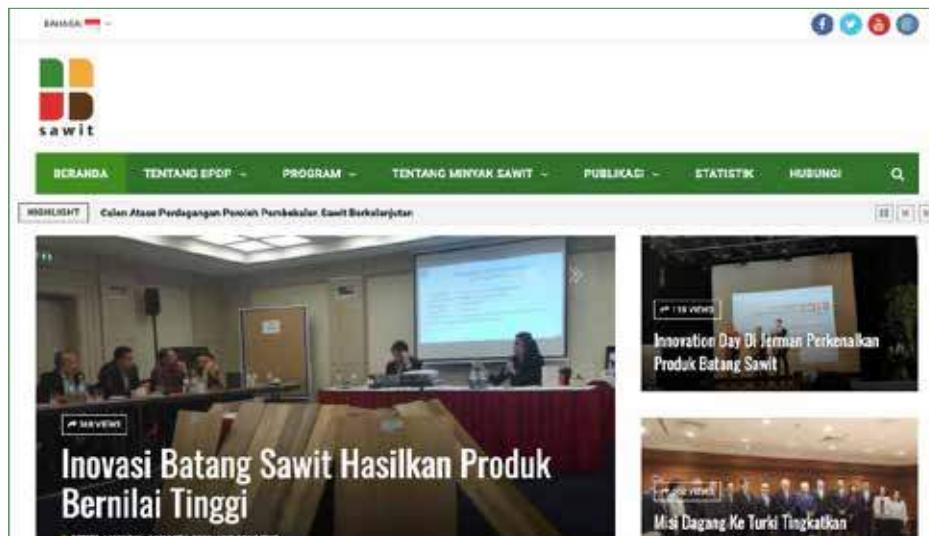
Ketersediaan informasi kepada Stakeholder dan seluruh Pemangku Kepentingan menjadi komitmen BPDPKS demi kelancaran komunikasi dan pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

OPPFMA is committed to make all information available for the Shareholders and Stakeholders in order to streamline communications and provide necessary information.

Penyediaan akses informasi dan data BPDPKS kepada publik merupakan salah satu implementasi BPDPKS dalam aspek transparansi. BPDPKS menyadari bahwa publik adalah strategic partner dalam menjaga keberlangsungan usaha. BPDPKS senantiasa memberikan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pengelolaan media informasi BPDPKS. Kebijakan tersebut disusun untuk melindungi keamanan informasi dan memastikan BPDPKS mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparan dan fair sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPDPKS senantiasa melakukan pembaharuan informasi dan data yang dapat di akses oleh publik. Dalam hal publikasi informasi BPDPKS baik bagi internal maupun eksternal, BPDPKS menggunakan media antara lain sebagai berikut:

1. Website : <https://www.bpdp.or.id>



The provision of access to OPPFMA information and data to the public is among the Company's realization of transparency. OPPFMA realizes that the public is the strategic partner in maintaining business continuity. OPPFMA constantly provides integrated information in timely and well-targeted manners according to the information media management policy in the Company. The policy was established to secure the information and ensure that the information are disclosed to interested parties transparently and fairly pursuant to applicable provisions.

OPPFMA constantly performs update on the public-accessible information and data. The publication of information both internally and externally by OPPFMA is performed through the following media:

1. Website: <https://www.bpdp.or.id>

Stakeholders dapat mengakses informasi komprehensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja BPDPKS serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengakses situs <https://www.bpdp.or.id>. Informasi dalam website disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mencakup informasi antara lain terkait dengan Profil BPDPKS secara lengkap, kegiatan BPDPKS yang memuat informasi kegiatan operasional BPDPKS serta berbagai informasi penting lainnya.

2. Press Release tahun 2017

Selama tahun 2017, BPDPKS telah mengeluarkan *Press Release*, sebagai berikut:

- Program Peremajaan Sawit Rakyat, 27 November 2017
- BPDPKS Tandatangani Perjanjian Pembiayaan Penyediaan Biodiesel , 5 Desember 2017
- BPDPKS Siap Menyalurkan Dana untuk Pembiayaan Penyediaan Biodiesel Periode ke-5 , 5 Desember 2017

3. Surat Edaran

BPDPKS menggunakan surat edaran sebagai salah satu media komunikasi yang digunakan dalam rangka menyampaikan keputusan, peraturan, pemberitahuan dan lain-lain.

4. Forum Komunikasi Internal

BPDPKS menyediakan sarana komunikasi yang mernjadi sarana diskusi bagi pegawai dengan manajemen yaitu sharing knowledge, siraman rohani, *family gathering / team building* yang dilaksanakan setiap tahun dll.

5. Laporan Tahunan

BPDPKS menyediakan sarana informasi melalui laporan tahunan yang menggambarkan kinerja BPDPKS. Laporan ini disusun setiap tahun dan disampaikan kepada seluruh *stakeholders* BPDPKS.

6. Media Sosial

BPDPKS juga menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi. Saat ini BPDPKS memiliki 4 (empat) akun media sosial antara lain:

- Facebook : www.facebook.com/bpdpsawit
- Twitter : www.twitter.com/bpdpsawit
- Youtube : BLU BPDPsawit
- Instagram : www.instagram.com/bpdpkelapasawit

The stakeholders can access comprehensive information pertaining OPPFMA operations and performance along with other information necessary for interested parties by accessing the website at <https://www.bpdp.or.id>. The information contained in the website are presented in Indonesian and English, covering among others comprehensive profile of the Company, the Company's operational activities, and other crucial information.

2. Press Releases in 2017

In 2017, OPPFMA published the following press releases:

- Smallholder Oil Palm Replanting Program, November 27, 2017
- OPPFMA Signs Biodiesel Provision Financing Agreement, December 5, 2017
- OPPFMA Ready to Distribute Fund for the 5th Biodiesel Provision Financing, December 5, 2017

3. Circulars

Circulars are also among the communication media used by OPPFMA to deliver news about decrees, regulations, notices, and others.

4. Internal Communication Forum

OPPFMA facilitates the communication between the employees and the Management through various media, including knowledge sharing, spiritual enrichment, family gathering/team building conducted annually.

5. Annual Reporting

Annual reports also serve as the means of information that illustrate OPPFMA's performances. The report is prepared on annual basis and distributed to all stakeholders.

6. Social Media

OPPFMA also utilizes social media accounts to communicate information. Currently there are four social media accounts used by OPPFMA, i.e.

- Facebook : www.facebook.com/bpdpsawit
- Twitter : www.twitter.com/bpdpsawit
- Youtube : BLU BPDPsawit
- Instagram : www.instagram.com/bpdpkelapasawit

06



Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

**Social Responsibility
at OPPFMA**





Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Social Responsibility at OPPFMA

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS merupakan perwujudan komitmen BPDPKS untuk mendukung Program tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu konsep tanggung jawab sosial dimaknai sebagai sebagai bentuk tanggung jawab BPDPKS untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BPDPKS merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit, tidak terlepas hubungannya dengan berbagai *stakeholders*. BPDPKS menyadari bahwa kesinambungan dan pencapaian kinerja Badan ditentukan diantaranya oleh hubungan yang harmonis antara BPDPKS dengan *stakeholders*. Sejalan dengan visinya untuk menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia, BPDPKS berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*.

Dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial, BPDPKS menggunakan pendekatan *triple bottom lines* yaitu *people, planet & profit* (3P), dimana upaya untuk menjaga lingkungan sekitar (*planet*) dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial (*people*) sejalan dengan pertumbuhan laba Perusahaan (*profit*). Pendekatan *triple bottom lines* yang meliputi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, diharapkan keberadaan BPDPKS tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham, tetapi juga bagi pemangku kepentingan lainnya.

Bentuk praktik CSR BPDPKS pada tahun 2017 mencakup 4 (empat) aspek yaitu:

1. Lingkungan Hidup;
2. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
3. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
4. Tanggung Jawab Kepada Konsumen.

OPPFMA's social responsibility is the embodiment of the commitment to supporting the creation of sustainable development. Hence, social responsibility is defined as the Company's responsibility to create a harmonious, balanced relationship according to the environment, values, norms, and culture of the local community. This is in accordance with the provision of Article 74 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

OPPFMA is a work unit under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia formed as a Public Service Agency which collects, administers, manages, reserves, and distributes CPO fund, in its relations with the stakeholders. OPPFMA realizes that the continuity and achievement of corporate performance is among others determined by harmonious relations between OPPFMA and the stakeholders. In line with the vision to become a fund manager which involves in sustainable oil palm development as one of Indonesia's strategic commodities, OPPFMA is committed to providing the best services to stakeholders.

In performing social responsibility program, OPPFMA adheres to the triple bottom lines or 3P, which strive to maintain balance between the surrounding environment (*planet*), social lives (*people*), and benefits for the Company (*profit*). The approach which covers economic, environmental, and social performances encourages OPPFMA to bring benefits not only for the shareholders but also for other stakeholders.

The Corporate Social Responsibility practiced by OPPFMA in 2017 touched four (4) aspects, namely:

1. Environment;
2. Socio-community Development;
3. Employment, Occupational Health and Safety; and
4. Responsibility to Customers.

Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup

Social Responsibility to Environment

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup

Realization of Social Responsibility to Environment

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan dan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ke area masyarakat, maka sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, BPDPKS senantiasa mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis BPDPKS, tetapi juga menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak negatif bagi para warga ataupun komunitas yang menetap atau bertempat tinggal di sekitar area lingkungan BPDPKS.

Bentuk kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup yang telah dilakukan BPDPKS selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

To enhance the performance of environmental management and prevent contaminations to the surrounding community, OPPFMA seeks the best management, processing, and utilization of the environment as the Company's responsibility to the environment. This is sought not only to give benefit to and enhance business efficiency at OPPFMA, but also to prevent environmental damage that may result in adverse impacts on the community living surrounding the Company's place of business.

OPPFMA's social responsibility to the environment in 2017 was realized through the following activities:

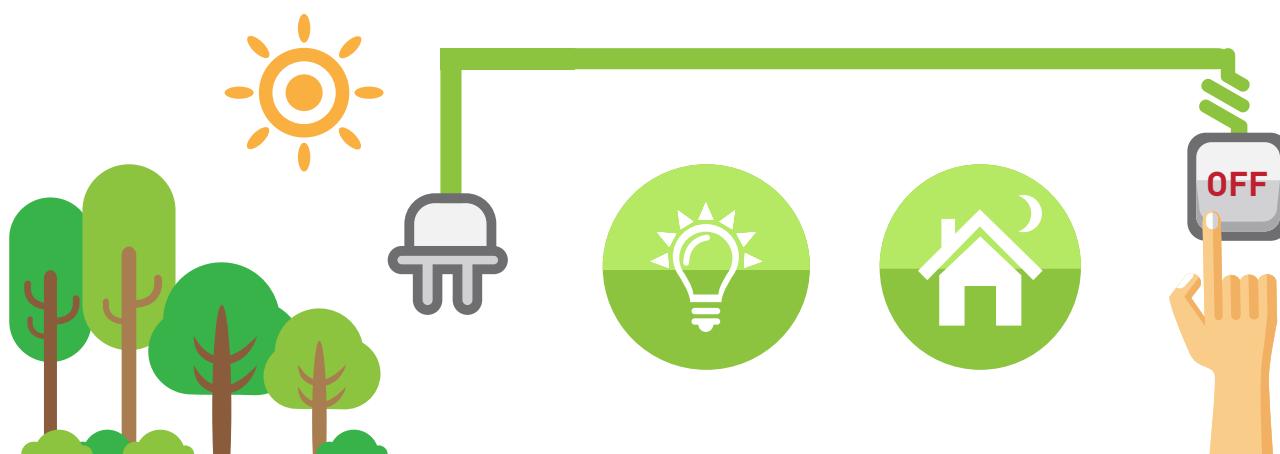
203

GREEN OFFICE

GREEN OFFICE

Green office merupakan sebuah strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit juga mencetak *benefit* kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kebijakan BPDPKS mengenai *green office* telah diterapkan dalam kegiatan operasional BPDPKS yang mencakup mengenai penggunaan material, emisi, kebijakan terhadap pengusaha sawit dan program lain mengenai lingkungan hidup.

Green office program is a long-term business strategy which not only aims to yield profit, but also serves to create sustainable benefits for environmental empowerment and preservation. The green office policy has been implemented in OPPFMA operational activities, which comprise material consumption, emission, policy on palm oil business owners, and other environmental programs.



Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup Social Responsibility to Environment

a. Penghematan Energi Listrik Energy Saving



204

BPDPKS senantiasa berupaya melakukan penghematan energi dalam setiap operasional usahanya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, BPDPKS senantiasa melakukan upaya penghematan energi diantaranya menggunakan lampu LED, mematikan lampu dan Komputer pada jam istirahat maupun sepulang kerja bila tidak diperlukan.

OPPFMA strives to save electricity in every business operation. To demonstrate environmental awareness, energy saving strategies are constantly performed, among others by using LED lamps, turning off lamps and computers during break hours and after office hours or whenever unused.

b. Penghematan Air Bersih
Clean Water Saving



205

Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Maka sebagai manusia yang akan selalu menggantungkan diri pada air kita memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air ini adalah sumber daya yang terbarukan, namun untuk air bersih ternyata sumber daya ini tidak bisa diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahunnya ini akhirnya harus membuat ekstra waspada akan stok atau persediaannya. Untuk menjaga stok atau persediaan air bersih ini dengan baik BPDPKS melakukan penghematan. Satu-satunya langkah adalah dengan mematikan air kran jika tidak diperlukan. Saat keran air terbuka dan mengeluarkan air, maka akan terjadi pemborosan air yang sia-sia. Air yang mengisi tempat penampungan yang sudah penuh, akan membuat air bersih terbuang sia-sia. Dari sini maka target penghematan air pun tak terwujud dan malah membuat Badan harus terkena tagihan perusahaan air yang besar.

Water is a natural resource which is vital to maintain our health. As a creature which highly depends on water, it is our duty to conserve it. Albeit being a renewable resource, potable water, particularly, cannot be instantly renewed. The depletion of clean water every year forces us to be extra careful about its supply. To maintain adequate water supply, the Company implements water saving program. This among others is executed by turning off water tap if unused. Water tap left open will deplete water supply faster. When the water tank is full, clean water will overflow in such a waste. This renders water saving program unrealized and creates high water bills.

Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup Social Responsibility to Environment

c. Pencapaian Udara Bersih dan Udara Sehat Clean and Healthy Air Accomplishment

Untuk mengurangi polusi udara dengan cara pegawai dilarang untuk merokok di seluruh area dalam gedung, area merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah disediakan.

Air pollution reduction is applied by prohibiting employees from smoking inside the building. Smoking is allowed only at the designed places.



d. Penggunaan Material Material Consumption

206

Dalam hal penggunaan material, BPDPKS menerapkan beberapa praktik dalam kegiatan operasional bisnis, khususnya pada operasional kantor yang efektif dan efisien. Upaya pelestarian lingkungan diwujudkan melalui penerapan berbagai praktik positif.

In terms of material consumption, OPPFMA applies some practices in business operations, particularly for effective and efficient office operations. The environmental preservation effort is materialized through the implementation of various positive practices.



Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Responsibility to Socio-Community Development

Pada tahun 2017, kegiatan-kegiatan terkait kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh BPDPKS antara lain sebagai berikut:

BPDPKS meyakini bahwa kinerja lembaganya harus memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan diharapkan akan memberikan dampak yang positif pula untuk pengembangan bisnis BPDPKS secara berkelanjutan. Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan besar dalam menjamin kelangsungan usaha BPDPKS dalam jangka panjang. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Sawit, hal ini merupakan komitmen BPDPKS dalam berbagi ilmu kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2017 adalah acara edukasi masyarakat soal sawit di Desa Singasari, Bogor. Acara tersebut dikemas dalam rangkaian kegiatan yang menggabungkan semangat kebersamaan, edukasi dan keceriaan. Dimana dalam kegiatan tersebut disampaikan mengenai cara mengolah makanan yang sehat dari produk turunan sawit.

The socio-community activities performed in 2017 were as follows:

OPPFMA believes that its institutional performance must bring positive impact on the community and on the Company's business development on a sustainable basis. The community is a stakeholder with huge role in supporting OPPFMA's business continuity in the long run. The social responsibility to the community is among others shown through the provision of palm oil education to the public, as a knowledge sharing commitment. For instance, community education held on February 4, 2017 in Singasari Village, Bogor explained palm oil in details to its inhabitants. The event was meant to spread the spirit of togetherness, education, and fun. During the event was also introduced healthy food processing techniques from palm oil derivative products.

207

Tanggung Jawab Sosial terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terhadap Ketenagakerjaan

Realization of Social Responsibility to Employment

BPDPKS senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai, dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara pegawai dengan BPDPKS yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan BPDPKS serta mengurangi adanya *turn over* pegawai. Pegawai merupakan bagian penting dari usaha BPDPKS, oleh karena itu BPDPKS memberikan perhatian besar terhadap aspek kepegawaian, termasuk didalamnya aspek kesehatan, dan keselamatan kerja (K3), pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan jenjang karir pegawai. BPDPKS sangat menghormati hak asasi manusia dengan selalu memberikan perlakuan setara kepada setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, dan ras. BPDPKS senantiasa menjaga keharmonisan masyarakat sekitar dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

OPPFMA always pays attention to employee welfare by seeking to facilitate their needs, with the expectation to create mutual dependency which forms a bond between the employees and OPPFMA to synergize in achieving OPPFMA goals and reducing employee turnover. Employees are crucial part of OPPFMA business, and therefore, employment affairs receive large attention. This includes the aspects of occupational health and safety (OHS), education and training, and employee career development. OPPFMA respects human rights by giving equal treatment to every employee regardless of ethnicity, religion, and race. OPPFMA constantly maintains harmony with the surrounding community and complies with applicable employment regulations.

Tanggung Jawab Sosial terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety

Kegiatan tanggung jawab sosial terhadap pegawai dilaksanakan melalui kegiatan operasional BPDPKS secara rutin sehari-hari dan juga program khusus, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Program peningkatan kesejahteraan pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain melalui pemberian fasilitas kepada pegawai berupa kompensasi, seperti uang *transport*, uang makan, uang pensiun, tunjangan hari raya, uang jabatan, bonus, uang pendidikan, uang pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian.

b. Persamaan Hak Kerja

BPDPKS senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria atau wanita tanpa memandang perbedaan etnik agama, ras, gender ataupun kondisi fisik untuk mengikuti rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja di lingkungan BPDPKS didasarkan atas hasil seleksi, evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

c. Pengembangan Pegawai Berkelanjutan

Terkait dengan pengembangan karir, BPDPKS memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai pria dan wanita. BPDPKS membuat sistem jenjang karir (career path) yang didasarkan pada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. BPDPKS secara konsisten berupaya mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, *training*, maupun studi banding serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan BPDPKS.

d. Program Kesehatan

Demi terwujudnya tenaga kerja yang kuat dan produktif serta dan menjaga agar kondisi pegawai selalu dalam kondisi terpantau kesehatannya, BPDPKS menyediakan dan memberikan fasilitas kesehatan kepada pegawainya. BPDPKS mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kepada seluruh pekerja berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

The practice of social responsibility to the employees were performed through daily operations and special programs, as defined below:

a. Improvement of Employee Welfare

Employee welfare improvement program carried out throughout 2017 covered the provision of facilities to the employees such as compensations, transport allowance, meal allowance, retirement allowance, religious holiday allowance, positional allowance, bonus, education allowance, medical allowance, uniform, leave allowance, and death allowance.

b. Equal Employment Right

OPPFMA provides equal opportunity to all people, both males and females, regardless of their ethnicity, religion, race, gender, or physical condition to take part in employee recruitment process. The appointment of employee candidates within OPPFMA is based on the result of selection and evaluation during probation period and employee orientation.

c. Sustainable Employee Development

For career development, OPPFMA provides equal opportunity to male and female employees. OPPFMA establishes career path system based on position qualification and employee competence which are integrated with performance assessment system. OPPFMA consistently strives to develop employee competence through education and training programs, comparative studies, and managerial and technical trainings tailored to OPPFMA needs.

d. Health Program

To encourage strong and productive manpower and to maintain and monitor employees' health, OPPFMA provides health facilities to its employees. OPPFMA participates all of its employees in BPJS Ketenagakerjaan plan that provides coverage in the forms of Old-Age Insurance, Work Accident Insurance, Death Insurance, and Retirement Insurance.

Tanggung Jawab Sosial terhadap Pelanggan

Tanggung Jawab Sosial terhadap Pelanggan

Program Tanggung Jawab Badan terhadap Pelanggan

Program Tanggung Jawab Badan terhadap Pelanggan

Badan telah menyusun dan melaksanakan beberapa program terkait tanggung jawab terhadap pelanggan secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Sepanjang tahun 2017 program yang dijalankan oleh Badan adalah :

a. Pengaduan Pelanggan

Bentuk tanggung jawab BPDPKS kepada konsumen, BPDPKS menyediakan sarana pengaduan pelanggan guna memenuhi memenuhi harapan pelanggan. Pengaduan atau keluhan pelanggan merupakan informasi penting yang dapat ditindaklanjuti dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan serta memenuhi tuntutan bisnis dan harapan pelanggan.

Pelanggan dapat menyampaikan saran, masukan dan keluhan melalui saluran antara lain:

Kantor: Graha Mandiri Lt.5 , Jl. Imam Bonjol No.61
Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Telepon/HP: (021) 3983 2091
Fax: (021) 3983 2095
Email: info@bpdp.or.id
Website: www.bpdp.or.id
Media Sosial: Facebook BPDP SAWIT, Twitter @infosawit,
instagram bpdkelapasawit

Melalui program pengaduan yang disediakan, BPDPKS telah memberikan respon yang cepat atas keluhan yang masuk dan menyelesaiannya dengan baik.

Badan telah menyusun dan melaksanakan beberapa program terkait tanggung jawab terhadap pelanggan secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Sepanjang tahun 2017 program yang dijalankan oleh Badan adalah :

a. Pengaduan Pelanggan

Bentuk tanggung jawab BPDPKS kepada konsumen, BPDPKS menyediakan sarana pengaduan pelanggan guna memenuhi memenuhi harapan pelanggan. Pengaduan atau keluhan pelanggan merupakan informasi penting yang dapat ditindaklanjuti dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan serta memenuhi tuntutan bisnis dan harapan pelanggan.

Pelanggan dapat menyampaikan saran, masukan dan keluhan melalui saluran antara lain:

Kantor: Graha Mandiri Lt.5 , Jl. Imam Bonjol No.61
Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Telepon/HP: (021) 3983 2091
Fax: (021) 3983 2095
Email: info@bpdp.or.id
Website: www.bpdp.or.id
Media Sosial: Facebook BPDP SAWIT, Twitter @infosawit,
instagram bpdkelapasawit

Melalui program pengaduan yang disediakan, BPDPKS telah memberikan respon yang cepat atas keluhan yang masuk dan menyelesaiannya dengan baik.



07



Laporan Keuangan Audited

Audited Financial Report





01 Pendahuluan
Introduction

02 Laporan Kepada Regulator dan
Pemangku Kepentingan
Report to Regulator and Stakeholder

03 Profil BPDPKS
OPPFMA Profile

04 Analisa Pembahasan Kinerja
Operasional dan Keuangan
Operational and Financial
Performance Discussion and Analysis

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS*

**31 DESEMBER 2017/
31 DECEMBER 2017**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

GRAHA MANDIRI LANTAI 5, JALAN IMAM BONJOL NOMOR 61, JAKARTA 10310
TELEPON: (021) 39832091-94; FAKSIMILE: (021) 39832095 SITUS: www.bpdp.or.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017

DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT
AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2017

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Dono Boestami
Alamat Kantor : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Alamat Rumah : Jl. Kebun Anggrek No. 16 Unit 7
RT 001/RW 005, Cipete Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-3983 2091
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Catur Ariyanto Widodo
Alamat Kantor : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Alamat Rumah : Jl. Kostrad No. 43,
RT 006/RW 004
Petukangan Utara, Pesanggrahan
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-3983 2091
Jabatan : Direktur Keuangan, Umum,
Kepatuhan, dan Manajemen Risiko

1. Name : Dono Boestami
Office address : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Residential Address : Jl. Kebun Anggrek No. 16 Unit 7
RT 001/RW 005, Cipete Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan
Telephone : 021-3983 2091
Title : President Director
2. Name : Catur Ariyanto Widodo
Office address : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Residential Address : Jl. Kostrad No. 43,
RT 006/RW 004
Petukangan Utara, Pesanggrahan,
Jakarta Selatan
Telephone : 021-3983 2091
Title : Director of Finance, General
Compliance, and Risk Management

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS");
 2. Laporan keuangan BPDPKS telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan BPDPKS telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan BPDPKS tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal BPDPKS.
1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS");
2. BPDPKS' financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the BPDPKS' financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. BPDPKS' financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for the BPDPKS' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

JAKARTA, 19 Maret/March 2018
Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*



Dono Boestami
Direktur Utama/
President Director



Catur Ariyanto Widodo 
Direktur Keuangan, Umum,
Kepatuhan, dan Manajemen Risiko/
*Director of Finance, General,
Compliance, and Risk Management*



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADА DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE
BOARD OF SUPERVISORS AND DIRECTORS

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan cuatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

We have audited the accompanying financial statements of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2017, and the statements of activities and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2013.
A180319005/DC2/EDR/2018



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2017, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit as at 31 December 2017, and their financial activities and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
19 Maret/March 2018

Eddy Rintis, S.E., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0230

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | 2017 | Catatan/ Notes | 2016^{a)} | |
|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| ASET | | | | ASSETS |
| Aset lancar | | | | Current assets |
| Kas dan setara kas | 3,186,919,095,885 | 4 | 5,729,108,049,237 | <i>Cash and cash equivalents</i> |
| Investasi jangka pendek | 8,643,092,784,654 | 5 | - | <i>Short-term investment</i> |
| Piutang | 17,398,545,399 | 6 | 25,294,448,346 | <i>Receivables</i> |
| Aset lancar lainnya | <u>3,749,398,356</u> | | <u>3,238,024,733</u> | <i>Other current assets</i> |
| Jumlah aset lancar | <u>11,851,159,824,294</u> | | <u>5,757,640,522,316</u> | Total current assets |
| Aset tidak lancar | | | | Non-current assets |
| Aset tetap - bersih | 12,929,303,608 | | 13,975,498,859 | <i>Fixed assets - net</i> |
| Aset tak berwujud - bersih | <u>1,779,283,373</u> | | <u>1,118,734,373</u> | <i>Intangible assets - net</i> |
| Jumlah aset tidak lancar | <u>14,708,586,981</u> | | <u>15,094,233,232</u> | Total non-current assets |
| JUMLAH ASET | <u>11,865,868,411,275</u> | | <u>5,772,734,755,548</u> | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Liabilitas jangka pendek | | | | Current liabilities |
| Akrual | 859,191,982,927 | 7 | 602,045,717,305 | <i>Accruals</i> |
| Utang pajak | <u>-</u> | | <u>10,645,000</u> | <i>Tax payables</i> |
| JUMLAH LIABILITAS | <u>859,191,982,927</u> | | <u>602,056,362,305</u> | TOTAL LIABILITIES |
| ASET NETO | | | | NET ASSETS |
| Aset neto tidak terikat | <u>11,006,676,428,348</u> | | <u>5,170,678,393,243</u> | <i>Unrestricted net assets</i> |
| JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO | <u>11,865,868,411,275</u> | | <u>5,772,734,755,548</u> | TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS |

^{a)} Disajikan kembali, lihat Catatan 15

^{a)} Restated, refer to Note 15

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 2 - Schedule**

**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2017**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | 2017 | Catatan/ Notes | 2016^a | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| PENDAPATAN | | | | INCOME |
| Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit | 14,277,241,158,165 | 8 | 11,690,819,130,021 | Income from fund collection of oil palm plantation |
| Pendapatan atas pengelolaan dana | 505,120,147,304 | 9 | 630,385,493,948 | Income from fund management |
| Pendapatan lainnya | <u>375,266,133</u> | | <u>-</u> | Other income |
| Jumlah pendapatan | <u>14,782,736,571,602</u> | | <u>12,321,204,623,969</u> | Total income |
| BEBAN | | | | EXPENSES |
| Beban penyaluran dana | (10,875,254,545,149) | 10 | (11,520,358,889,189) | Fund disbursement expenses |
| Beban dukungan layanan manajemen | <u>(71,483,991,348)</u> | 11 | <u>(56,870,757,758)</u> | Management services support expenses |
| Jumlah beban | <u>(10,946,738,536,497)</u> | | <u>(11,577,229,646,947)</u> | Total expenses |
| Pengembalian setoran dari kas negara | 2,000,000,000,000 | | - | Refund of deposit from state treasury |
| Setoran ke kas negara | - | | (2,000,000,000,000) | Deposit to state treasury |
| Penyesuaian surplus tahun berjalan | <u>-</u> | | <u>(3,027,019,999)</u> | Adjustment to current year surplus |
| Kenaikan/(penurunan) aset neto tidak terikat | <u>5,835,998,035,105</u> | | <u>(1,259,052,042,977)</u> | Increase/(decrease) in unrestricted net assets |
| Aset neto tidak terikat awal tahun | <u>5,170,678,393,243</u> | | <u>6,429,730,436,220</u> | Unrestricted net assets at the beginning of the year |
| Aset neto tidak terikat akhir tahun | <u>11,006,676,428,348</u> | | <u>5,170,678,393,243</u> | Unrestricted net assets at the end of the year |

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 15

*) Restated, refer to Note 15

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 3 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2017**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | 2017 | 2016 | |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan kas dari: | | | <i>Cash received from:</i> |
| Pungutan dana perkebunan kelapa sawit | 14,277,241,158,165 | 11,687,858,110,022 | <i>Collection of oil palm plantation fund</i> |
| Pengelolaan dana | 431,728,821,321 | 609,224,895,974 | <i>Fund management</i> |
| Pendapatan lainnya | 375,266,133 | - | <i>Other income</i> |
| Pengeluaran kas untuk: | | | <i>Cash disbursement for:</i> |
| Penyaluran dana | (10,621,498,126,460) | (10,935,364,438,762) | <i>Fund distribution</i> |
| Gaji dan tunjangan | (37,136,859,813) | (37,548,204,698) | <i>Salaries and allowances</i> |
| Pemasok | <u>(29,000,211,973)</u> | <u>(20,558,461,155)</u> | <i>Supplier</i> |
| Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 4,021,710,047,373 | 1,303,611,901,381 | Net cash flows provided from operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES |
| Investasi pada instrumen jangka pendek | (8,643,092,784,654) | - | <i>Investment in short-term instrument</i> |
| Pembelian aset tetap | (1,262,910,001) | (15,287,292,600) | <i>Acquisition of fixed assets</i> |
| Pembelian aset tidak berwujud | (830,535,000) | (1,366,145,000) | <i>Acquisition of intangible assets</i> |
| Pendapatan investasi jangka pendek | 81,287,228,930 | - | <i>Income from short-term investment</i> |
| Pencairan investasi jangka pendek | - | <u>3,961,777,000,000</u> | <i>Liquidation of short-term investment</i> |
| Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi | (8,563,899,000,725) | 3,945,123,562,400 | Net cash flows (used for)/ provided from investing activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES |
| Pengembalian setoran dari kas negara | 2,000,000,000,000 | - | <i>Refund of deposit from state treasury</i> |
| Setoran ke kas negara | - | <u>(2,000,000,000,000)</u> | <i>Deposit to state treasury</i> |
| Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | 2,000,000,000,000 | (2,000,000,000,000) | Net cash flows provided from/ (used for) financing activities |
| (Penurunan)/kenaikan bersih pada kas dan setara kas | (2,542,188,953,352) | 3,248,735,463,781 | Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | <u>5,729,108,049,237</u> | <u>2,480,372,585,456</u> | <i>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</i> |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 3,186,919,095,885 | 5,729,108,049,237 | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

The accompanying notes form an integral part of these

Lampiran - 4/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS") merupakan unit organisasi non-eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BPDPKS dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

Badan Layanan Umum didirikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

BPDPKS berkedudukan di Graha Mandiri, Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat.

BPDPKS melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
3. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, beserta perubahannya terhadap Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015.
4. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 75/PMK.01/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
5. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDPKS.
6. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 114/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

Oil Palm Plantation Fund Management Agency or Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS") is a non-eselon unit reporting to the Minister of Finance through Secretary General of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. BPDPKS is established based on the Decision of Minister of Finance No. 650/KMK.01/2015 regarding the Establishment of BPDPKS at the Ministry of Finance as a Government Agency that fully implements the Financial Management of Public Service Agency.

Public Service Agency was established to improve the services given to public in order to improve general welfare and educating nation by providing flexibility in financial management based on the economic and productivity principles, and implementation of healthy business practice.

BPDPKS is located at Graha Mandiri, 5th Floor, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Central Jakarta.

BPDPKS carries out its duties based on the following laws and regulations:

1. *Constitution Act No. 39 of 2014 on Plantations.*
2. *Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 24 of 2015 on Collection of Plantation Fund.*
3. *Presidential Decree No. 61 of 2015 on Collection and Utilisation of Oil Palm Plantation Funds, with its amendment to Presidential Decree No. 24 of 2015.*
4. *Copy of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.75/PMK.01/2012 on Stipulation of Export Goods Subject to Export Levy and Export Duty Tariff.*
5. *Copy of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 on the Organisation and Working Procedures of BPDPKS.*
6. *Copy of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 114/PMK.05/2015 on Tariff of Service of Public Service Agency of BPDPKS at the Ministry of Finance.*

Lampiran - 4/2 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

BPDPKS dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut: (lanjutan)

7. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.
8. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
9. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 30/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya.
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 29 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
13. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 650/KMK.05/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 748/M-DAG/DEP/7/2015 tentang Penetapan PT Sucofindo (Persero) sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

BPDPKS is executed based on the following laws and regulations: (continued)

7. Copy of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 133/PMK.05/2015 on Tariff of Service of Public Service Agency of BPDPKS at the Ministry of Finance.
8. Copy of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 136/PMK.010/2015 regarding the Fourth Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 75/PMK.011/2012 on Stipulation of Export Goods Subject to Export Levy and Export Duty Tariff.
9. Copy of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 30/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 133/PMK.05/2015 on Tariff of Service of Public Service Agency of BPDPKS at the Ministry of Finance.
10. Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 54/M-DAG/PER/7/2015 on Verification or Technical Inquiry into the Export of Oil Palm, Crude Palm Oil (CPO) and its Derivative Products.
11. Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 29 of 2015 on Supply and Utilisation of Biofuels with Biodiesel Type in the Financing Framework by BPDPKS.
12. Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 18/Permentan/KB.330/5/2016 on Guidelines for Rejuvenation of Oil Palm Plantations.
13. Copy of Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 650/KMK.05/2015 on the Establishment of BPDPKS at the Ministry of Finance as a Government Agency Implements the Financial Management of Public Service Agency.
14. Decision of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 748/M-DAG/DEP/7/2015 on the Determination of PT Sucofindo (Persero) as the Executor of Verification or Technical Inquiry on Export of Oil Palm, Crude Palm Oil (CPO) and its Derivative Products.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/3 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

BPDPKS dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut: (lanjutan)

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

| | 2017 | 2016 | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Dewan Pengawas: | | | Board of Supervisors: |
| Ketua | Rusman Heriawan | Rusman Heriawan | Chairman |
| Anggota | Lukita Dinarsyah Tuwo | Lukita Dinarsyah Tuwo | Member |
| Anggota | Suahasil Nazara | Suahasil Nazara | Member |
| Anggota | Arlinda | Arlinda | Member |
| Anggota | Rida Mulyana | Rida Mulyana | Member |
| Anggota | Panggah Susanto | Panggah Susanto | Member |
| Anggota | Gamal Nasir | Gamal Nasir | Member |
| Anggota | Loso Judijanto | Loso Judijanto | Member |
| Anggota | Joko Supriyono | Joko Supriyono | Member |
| Dewan Direksi: | | | Board of Directors: |
| Direktur Utama | Dono Boestami | Bayu Krisnamurthi | President Director |
| Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko | Catur Ariyanto Widodo | Catur Ariyanto Widodo | Director of Finance, General, Compliance and Risk Management |
| Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana | Agustinus Antonius | Agustinus Antonius | Director of Planning and Fund Management |
| Direktur Penghimpunan Dana | Hendrajat Natawidjaja | Hendrajat Natawidjaja | Director of Fund Raising Director of Fund Distribution |
| Direktur Penyaluran Dana | Edi Wibowo | - | Director of Partnership |
| Direktur Kemitraan | Tulus Budhianto | - | |

Pada tanggal 31 Desember 2017, BPDPKS mempunyai 106 pegawai (tidak diaudit).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

BPDPKS is executed based on the following laws and regulations: (continued)

15. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 26 of 2016 on the Supply and Utilisation of Biofuel with Biodiesel Type in the Financing Framework by BPDPKS.

The composition of BPDPKS' Board of Supervisors and Directors as at 31 December 2017 and 2016 are as follow:

| | 2017 | 2016 | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Board of Supervisors: | | | Board of Directors: |
| Chairman | Rusman Heriawan | Rusman Heriawan | President Director |
| Member | Lukita Dinarsyah Tuwo | Lukita Dinarsyah Tuwo | Director of Finance, General, Compliance and Risk Management |
| Member | Suahasil Nazara | Suahasil Nazara | Director of Planning and Fund Management |
| Member | Arlinda | Arlinda | |
| Member | Rida Mulyana | Rida Mulyana | |
| Member | Panggah Susanto | Panggah Susanto | |
| Member | Gamal Nasir | Gamal Nasir | |
| Member | Loso Judijanto | Loso Judijanto | |
| Member | Joko Supriyono | Joko Supriyono | |
| Board of Directors: | | | |
| President Director | Dono Boestami | Bayu Krisnamurthi | |
| Director of Finance, General, Compliance and Risk Management | Catur Ariyanto Widodo | Catur Ariyanto Widodo | |
| Director of Planning and Fund Management | Agustinus Antonius | Agustinus Antonius | |
| Director of Fund Raising Director of Fund Distribution | Hendrajat Natawidjaja | Hendrajat Natawidjaja | |
| Director of Partnership | Edi Wibowo | - | |
| Director of Partnership | Tulus Budhianto | - | |

As of 31 December 2017, BPDPKS has a total of 106 employees (unaudited).

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/4 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan BPDPKS diselesaikan dan diotorisasi oleh Dewan Direksi pada 19 Maret 2018.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan BPDPKS telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional BPDPKS.

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Standar dan interpretasi yang telah diterbitkan dan efektif pada tahun buku 2017 namun tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 3 (revisi 2016) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK 24 (revisi 2016) "Imbalan Kerja"
- PSAK 58 (revisi 2016) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK 60 (revisi 2016) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"
- ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

The financial statements of the BPDPKS were prepared and authorised by the Board of Directors on 19 March 2018.

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of the BPDPKS have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements have been prepared on the basis of the historical cost concept and the accrual concept, except for the statements of cash flows. The statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with a maturity of three months or less.

The presentation currency used in the financial statements is Rupiah, which is the BPDPKS' functional currency.

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

The standards and interpretation issued and effective in 2017 but did not result in a significant effect on the financial statements are as follows:

- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- PSAK 3 (revised 2016) "Interim Financial Statements"
- PSAK 24 (revised 2016) "Employee Benefits"
- PSAK 58 (revised 2016) "Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation"
- PSAK 60 (revised 2016) "Financial Instruments: Disclosure"
- ISAK 31 "Interpretation on the Scope of PSAK 13: Investment Property"
- ISAK 32 "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/5 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi BPDPKS, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

Efektif 1 Januari 2020:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, BPDPKS sedang mempertimbangkan dampak dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perseroan.

c. Instrumen keuangan

BPDPKS mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2017, BPDPKS hanya memiliki aset keuangan dalam bentuk pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar; kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang BPDPKS terdiri dari kas dan setara, investasi jangka pendek yang berupa deposito berjangka dan piutang dalam laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

New standards, amendments and interpretations issued and relevant for BPDPKS, but not yet effective for the financial year begin 1 January 2017 are as follows:

Effective 1 January 2018:

- Amendment to PSAK 2 "Cash Flows Statement"
- Amendment to PSAK 16 "Fixed Asset"
- Amendment to PSAK 46 "Taxation"

Effective 1 January 2020:

- PSAK 71 "Financial Instrument"
- PSAK 72 "Revenue from Contract with Customers"
- PSAK 73 "Leases"

As at the authorisation date of these financial statements, BPDPKS is reviewing the implication of the above standards, to its financial statements.

c. Financial instruments

BPDPKS classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

As at 31 December 2017, BPDPKS only has financial assets classified as loans and receivables.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets for maturities shorter than 12 months after the end of reporting period; otherwise, they are classified as non-current assets. BPDPKS' loans and receivables comprise of cash and cash equivalents, short-term investment in the form of time deposits and receivables in the statement of financial position.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/6 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan BPDPKS telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Liabilitas keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2017, BPDPKS hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari akrual. Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, BPDPKS mengukur seluruh liabilitas keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi yang menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika sudah ditebus, dibatalkan atau telah dibayar.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, BPDPKS mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai terjadi jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the assets have ceased to exist or have been transferred and BPDPKS has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

Financial liabilities

As at 31 December 2017, BPDPKS only had financial liabilities measured at amortised cost that comprise of accruals. After initial recognition which is at fair value plus transaction costs, BPDPKS measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method. Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed, cancelled, or otherwise extinguished.

Impairment of financial assets

At each reporting date, BPDPKS assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/7 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, kas pada bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

e. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

f. Pengakuan pendapatan

Pendapatan BPDPKS terdiri dari pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan pendapatan atas pengelolaan dana. BPDPKS mengakui pendapatan pada saat jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kepada BPDPKS.

g. Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadi dengan menggunakan dasar akrual.

h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Tidak ada estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah aset dan liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY (continued)

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less.

e. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment, if any.

f. Income recognition

BPDPKS' income consist of income from fund collection of oil palm plantations and income from fund management. BPDPKS recognises income when the amount of income can be reliably measured and it is probable that future economic benefits will flow to BPDPKS.

g. Expenses recognition

Expenses are recognised when they are incurred, on an accrual basis.

h. Transactions with related parties

The Company enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 (revised 2015) "Related party disclosures".

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Estimates and judgments used in preparing the financial statements are periodically evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that may occur. Actual results may differ from these estimates. There is no significant estimates and assumptions that have significant effect on the amounts of assets and liabilities.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 4/8 - Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**4. KAS DAN SETARA KAS****4. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

| | 2017 | 2016 | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Kas | 160,816,609 | 29,925,237 | Cash on hand |
| Kas di bank | | | Cash in banks |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 285,977,580,377 | 105,864,219,888 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 760,079,800 | 24,765,539,510 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 20,619,099 | 6,343,206,193 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| | <u>286,758,279,276</u> | <u>136,972,965,591</u> | |
| Deposito berjangka | | | Time deposits |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 2,900,000,000,000 | 2,458,681,883,156 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | - | 1,342,233,563,918 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | - | 601,941,078,285 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 476,154,653,469 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Bukopin Tbk | - | 412,468,979,581 | PT Bank Bukopin Tbk |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | - | 300,625,000,000 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
| | <u>2,900,000,000,000</u> | <u>5,592,105,158,409</u> | |
| | <u>3,186,919,095,885</u> | <u>5,729,108,049,237</u> | |

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan penempatan deposito berjangka dengan jangka waktu diatas tiga bulan pada bank-bank berikut:

5. SHORT-TERM INVESTMENT

This account represents time deposits with maturity more than three months placed in the following banks:

| | 2017 | 2016 | |
|--|--------------------------|-------------|--|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3,949,092,784,654 | - | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3,049,000,000,000 | - | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | <u>1,645,000,000,000</u> | - | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| | <u>8,643,092,784,654</u> | - | |

6. PIUTANG

Piutang merupakan piutang bunga dari bunga deposito. BPDPKS tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. RECEIVABLES

Receivables represent the interest receivable from time deposits. BPDPKS does not provide an allowance for impairment losses of receivables since Management believes that the receivables are collectible.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 4/9 - Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**7. AKRUAL****7. ACCRUALS**

| | 2017 | 2016^a | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Selisih harga biodiesel | 845,315,769,743 | 591,373,806,941 | <i>Biodiesel price variance</i> |
| Jasa surveyor | 10,422,696,207 | 10,641,240,320 | <i>Surveyor fee</i> |
| Insetif pegawai | 3,366,662,253 | - | <i>Employee incentives</i> |
| Lainnya | <u>86,854,724</u> | <u>30,670,044</u> | <i>Others</i> |
| | <u>859,191,982,927</u> | <u>602,045,717,305</u> | |

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 15

*) Restated, refer to Note 15

**8. PENDAPATAN PUNGUTAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT****8. INCOME FROM FUND COLLECTION OF OIL
PALM PLANTATION**

Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit adalah pendapatan yang berasal dari pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya.

Income from fund collection of oil palm plantation is income which derived from levies on the export of oil palm products and its derivatives.

9. PENDAPATAN ATAS PENGELOLAAN DANA**9. INCOME FROM FUND MANAGEMENT**

| | 2017 | 2016 | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Pendapatan bunga dari deposito berjangka | 406,722,505,666 | 575,758,128,971 | <i>Interest income from time deposit</i> |
| Pendapatan bunga dari investasi jangka pendek | 88,385,274,329 | 36,675,416,289 | <i>Interest income from short-term investment</i> |
| Pendapatan jasa giro | <u>10,012,367,309</u> | <u>17,951,948,688</u> | <i>Bank interest income</i> |
| | <u>505,120,147,304</u> | <u>630,385,493,948</u> | |

10. BEBAN PENYALURAN DANA**10. FUND DISBURSEMENT EXPENSES**

| | 2017 | 2016^a | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Pembayaran selisih harga biodiesel | 10,566,772,566,846 | 11,274,650,587,923 | <i>Biodiesel price variance payment</i> |
| Jasa surveyor | 121,484,745,241 | 103,108,856,431 | <i>Surveyor fee</i> |
| Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit | 78,296,222,696 | 9,311,029,449 | <i>Oil palm plantation replanting fund</i> |
| Promosi kelapa sawit | 40,042,947,942 | 35,366,464,339 | <i>Oil palm promotion</i> |
| Dana riset | 37,270,833,248 | 52,760,887,446 | <i>Research fund</i> |
| Pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit | 29,059,005,432 | 44,560,036,252 | <i>Oil palm human resource development</i> |
| Perencanaan dan pengelolaan dana | <u>2,328,223,744</u> | <u>601,027,349</u> | <i>Planning and fund management</i> |
| | <u>10,875,254,545,149</u> | <u>11,520,358,889,189</u> | |

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 15

*) Restated, refer to Note 15

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/10 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. BIAYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN

11. MANAGEMENT SERVICES SUPPORT EXPENSES

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Gaji dan tunjangan | 40,503,522,066 | 37,470,710,066 | Salaries and allowances |
| Sewa | 14,759,656,405 | 5,964,760,667 | Rent |
| Barang keperluan perkantoran | 5,646,757,730 | 3,953,442,713 | Office supplies |
| Jasa profesional | 5,267,968,799 | 2,916,463,725 | Professional fee |
| Lainnya | 5,306,086,348 | 6,565,380,587 | Others |
| | <u>71,483,991,348</u> | <u>56,870,757,758</u> | |

12. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

12. RELATED PARTIES INFORMATION

Personil manajemen kunci

Key management personnel

Kompensasi kepada personil manajemen kunci (terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Compensation of the key management personnel (consist of Board of Supervisors and Directors) for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Imbalan kerja jangka pendek | 13,670,847,120 | 11,884,008,476 | Short-term employee benefits |

229

13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Faktor risiko keuangan

Financial risk factors

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan BPDPKS adalah risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. BPDPKS menerapkan kebijakan manajemen risiko keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar keuangan terhadap kinerja keuangan BPDPKS. Berikut ini ringkasan kebijakan manajemen risiko tersebut:

The main risks arising from the BPDPKS' financial instruments are interest rate risk, credit risk and liquidity risk. Management review and determine policies for managing each of these risks. BPDPKS applies financial risk management policies to minimise impact of unpredictability financial markets on BPDPKS' financial performance. Summary of financial risk management policies are as follows:

(1) Risiko tingkat suku bunga

(1) Interest rate risk

BPDPKS menghadapi risiko tingkat bunga yang timbul dari fluktuasi tingkat bunga pasar.

BPDPKS is exposed to interest rate risk arises from the fluctuation in market interest rates.

Pada tanggal 31 Desember 2017, BPDPKS tidak memiliki risiko tingkat suku bunga yang signifikan. Aset keuangan BPDPKS yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi BPDPKS terdiri dari deposito berjangka dan investasi jangka pendek dengan pendapatan tetap.

As at 31 December 2017, BPDPKS has no significant interest rate risk. BPDPKS' financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. BPDPKS' investments consist of time deposits and short-term investment with fixed income.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/11 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit

BPDPKS tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan karena dalam tahun berjalan piutang BPDPKS berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito berjangka dan investasi jangka pendek.

Deposito berjangka, kas di bank dan investasi jangka pendek ditempatkan pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bank umum Nasional yang memiliki penilaian peringkat komposit bank yang sehat.

Semua aset keuangan BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2017 belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan.

(3) Risiko likuiditas

BPDPKS tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika BPDPKS mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. BPDPKS mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas keuangan BPDPKS terutama terdiri dari akrual yang jumlahnya tidak signifikan terhadap aset likuid BPDPKS. BPDPKS memiliki likuiditas aset yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

14. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan yang dapat mempengaruhi secara signifikan laporan keuangan BPDPKS pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(2) Credit risk

BPDPKS has no significant credit risk because in the current year BPDPKS' receivables arise from interest income from placement of time deposits and short-term investments.

Time deposits, cash in bank and short-term investments are placed in Government Banks and National commercial bank that has a healthy bank composite rating.

All of BPDPKS' financial assets as at 31 December 2017 are neither past due nor impaired, therefore, no allowance for impairment loss is needed.

(3) Liquidity risk

BPDPKS has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where BPDPKS has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. BPDPKS manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at 31 December 2017, BPDPKS' financial liability is mainly accruals which are insignificant to the total BPDPKS' liquid assets. BPDPKS' assets are highly liquid in form of cash and cash equivalents and investments.

14. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There is no material events after the reporting period that could affect significantly financial statements of BPDPKS as at and for the year ended 31 December 2017.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 4/12 - Schedule**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**15. RESTATEMENT ON THE FINANCIAL STATEMENTS**

Laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas BPDPKS untuk tahun sebelumnya telah disajikan kembali karena BPDPKS belum mengakui akrual atas selisih harga biodiesel pada tanggal 31 Desember 2016.

Dampak penyajian kembali pada laporan keuangan 2016 BPDPKS adalah sebagai berikut:

The previous year's statement of financial position and the statement of activities of BPDPKS has been restated since BPDPKS has not recognised the accruals for biodiesel price variance as at 31 December 2016.

The impact of restatement of BPDPKS' 2016 financial statements is as follows:

| | Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported | Penyesuaian/ Adjustment | Disajikan kembali/ As restated | Statement of financial position <i>Biodiesel price variance accrual</i> <i>Unrestricted net assets</i> |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| Laporan posisi keuangan | | | | |
| Akrual selisih harga biodiesel | - | 591,373,806,941 | 591,373,806,941 | |
| Aset neto tidak terikat | 5,762,052,200,184 | (591,373,806,941) | 5,170,678,393,243 | |
| | | | | Statement of activities <i>Biodiesel price variance payment</i> |
| Laporan aktivitas | | | | |
| Pembayaran selisih harga biodiesel | 10,683,276,780,982 | 591,373,806,941 | 11,274,650,587,923 | |



**Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDPKS)**

📍 Graha Mandiri Lt.5 , Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng,
Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10310
📞 Telp: (021) 3983 2091
✉️ Fax: (021) 3983 2095
🌐 info@bpdp.or.id
www.bpdp.or.id